

**PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS
AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Jawa Tengah)**

Ardiani Ika S
dianviraby@yahoo.co.id
Saifudin
saifudinmsi@yahoo.com

Abstract

Public accountants are independent auditors who provide services to the general public, especially in the field of audit of financial statements made by his client. Competent auditor is someone who has knowledge and extensive procedural skills shown by the experience. Independence requires the auditor to have an unbiased view on all matters relating to the audit. This research examines the effect of competence and independence of audit quality to auditor ethics as a moderating variable that adopts from the study. This study adopts the auditor ethics as a moderating variable that may affect the strong or weak relationship between competence and independence of audit quality. The population are all auditors working in public accounting firm in Central Java. Sample this study using sampling convenience spread questionnaire. Sample of 85 respondents, the method of analysis used is moderate regression analysis of two way Interactions, quality test data, test assumptions and classical hypothesis testing. The results of this study indicate that the competence and independence have a significant effect on audit quality with determinant coefficient of 21.1 percent. While the interaction of competence and independence of the auditor has a significant ethics with quality audits with the coefficient determinant of 52 percent.

Key words: *competence, independence, ethics, audit quality.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manajemen adalah pihak yang mengelola serta mengendalikan perusahaan dan memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya yang diinvestasikan pemilik ke dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus melaporkan pertanggungjawabannya secara periodik melalui media laporan keuangan. Selain pemilik, masih ada pihak lain yang memerlukan laporan keuangan seperti pemberi pinjaman, calon kreditor atau investor, pemerintah, analisis keuangan dan sebagainya. Sehingga manajemen harus merancang dan mengimplementasikan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara periodik yang akurat dan dapat diandalkan (Christiawan, 2002).

Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi. Guna menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak auditor yang independen, agar hasil pemeriksaan itu merupakan hasil yang tidak memihak (Novianty dan Kusuma, 2001).

Adapun audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajemen dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Auditor diharapkan dapat membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan (Meutia, 2004). Alasan lainnya mengapa laporan keuangan harus diaudit oleh

pihak ketiga yang independen adalah (1) informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan, (2) sebuah keahlian sering diperlukan dalam penyusunan dan verifikasi informasi dalam laporan keuangan, (3) pemakai laporan keuangan tidak bisa secara langsung melakukan verifikasi terhadap kualitas audit informasi dalam laporan keuangan Taylor (1997) dalam Christiawan (2002)

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi ?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik dan kreditur selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi, termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan dengan meminta laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal menilai kinerja manajemen. Manajemen kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang membuat laporannya terlihat baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih *reliable* (dapat dipercaya), perlu pengujian yang dilakukan oleh pihak independen, yaitu auditor independen (Harhinto, 2004).

Kompetensi

Susanto dalam Alim *et. al.* (2007) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin. Definisi kompetensi dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman (Mayangsari, 2003). Peneliti ini menggunakan dua dimensi kompetensi dari alim *et. al.* (2007) yaitu pengetahuan dan pengalaman

Pengetahuan

Harhinto (2004) menemukan, pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit yang menentukan kualitas audit. Secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu : (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Pengalaman

Auditor selalu melakukan pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit dapat menjadikan pertimbangan auditor berkualitas Libby dan Trotman dalam Nurchasanah dan Rahmawati (2003). Dalam artikel yang sama Ketchend dan Strawser (1998) menyatakan bahwa auditor dikatakan memperoleh pengalaman jika ia telah melakukan audit lebih dari dua tahun.

Independensi

Independensi adalah salah satu norma pemeriksaan akuntan yang penting (Sri Lastanti, 2005) karena opini akuntan independen diberikan untuk tujuan menambah kredibilitas laporan keuangan yang pada dasarnya merupakan gambaran kinerja manajemen, pihak yang membayar *fee* atas bisnis akuntan publik. Jika akuntan tidak independen kepada manajemen dan kliennya, maka pendapat yang diberikan tidak akan mendapat arti. Adapun dalam penelitian ini independensi ada dua dimensi : Lama kerjasama dengan klien, tekanan dari klien.

Lama Kerjasama dengan Klien (*Audit Tenure*)

Di Indonesia, masalah *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik, yaitu maksimal 3 tahun untuk klien yang sama, sedang untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien untuk mencegah terjadinya skandal akuntansi (Kusharyanti, 2003).

Tekanan dari Klien

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Goldman dan Barlev (1974) dalam Harhinto (2004) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika auditor tersebut tidak bersedia memenuhi keinginannya.

Etika Auditor

Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan Etika adalah (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, Neni Meidawati (2001) dalam Widagda *et. al.* (2002).

Kualitas Audit

Akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP,2001).

Hubungan Logis antar Variabel dan Perumusan Hipotesis Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya.

H1 : Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Pengaruh Interaksi kompetensi Auditor dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit

Bahwa, Behn *et. al.* (1997) dalam Alim *et. al.* (2007) mengembangkan atribut kualitas yang salah satu diantaranya adalah standar etika yang tinggi, sedangkan atribut-atribut lainnya terkait dengan kompetensi auditor. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggungjawab kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi.

H2 : Interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang

dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

H3 : Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Pengaruh Interaksi Independensi Auditor dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit

Posisi auditor juga sangat dilematis dimana mereka dituntut untuk memenuhi keinginan klien namun disatu sisi tindakan auditor dapat melanggar standar profesi sebagai acuan kerja mereka. Hipotesis dalam penelitian mereka terdapat argumen bahwa kemampuan auditor untuk dapat bertahan dibawah tekanan klien mereka tergantung pada kesepakatan ekonomi, lingkungan tertentu, dan perilaku termasuk didalamnya mencakup etika profesi.

H4 : Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

METODE PENELITIAN

Populasi, dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang terdaftar dan bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah dimana sampel diambil dengan metode *convenience sampling*.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Metode Analisis

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Analisis *Regresi Moderate Two Way Interactions*. Untuk dapat melakukan Analisis Regresi Moderate perlu pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan berikut ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3 X_1X_3 + b_4X_2 X_3 + e$$

Dimana:

Y	: Kualitas audit
a	: konstanta
b	: Koefisien regresi
X ₁	: Variabel kompetensi
X ₂	: Variabel independen
X ₃	: Variabel etika Auditor
e	: Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah. Sebanyak 14 KAP di Jawa Tengah berpartisipasi dalam penelitian ini dari 119 kuesioner yang disebar, sebanyak 85 kuesioner yang dapat diolah untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 60 orang pria (70,59%), 25 orang wanita (29,41%). Banyaknya auditor pria karena dinilai memiliki tenaga fisik yang lebih baik untuk mengerjakan pekerjaan yang memerlukan waktu lembur maupun pekerjaan di luar kota. Usia responden terbanyak adalah 26-30 tahun sebanyak 42 orang (49,41%), usia 31-35 tahun sebanyak 26 orang (30,59%), usia 36-40 tahun sebanyak 10 orang (11,76%) dan usia 41- 45 tahun sebanyak 7 orang (8,24%). Kelompok usia 26-35 tahun mendominasi sampel, karena pada usia tersebut umumnya seseorang masih sangat produktif.

Jabatan responden terbesar adalah junior auditor yaitu sebanyak 55 orang (64,71%), diikuti senior auditor sebanyak 29 orang (24,12%), dan partner hanya sebanyak 1 orang (1,19%). Jumlah auditor junior mencerminkan banyaknya auditor yang masih relative muda dan belum memiliki banyak pengalaman. Masa kerja responden terbanyak adalah kurang dari 3 tahun sebanyak 39 orang (45,58%), masa kerja 3–5 tahun sebanyak 28 orang (32,94%) dan masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 18 orang (21,18%). Keahlian khusus yang dimiliki karyawan KAP paling banyak adalah sebagai konsultan pajak yaitu sebanyak 47 orang atau 55,29 persen, sedangkan yang memiliki keahlian analisis system sebanyak 17 orang dan sebagai konsultan manajemen sebanyak 21 orang. Banyak KAP yang memberikan jasa non audit kepada perusahaan berupa konsultasi pajak.

Lama menekuni bidang keahlian oleh responden terbanyak adalah kurang dari 3 tahun sebanyak 52 orang (61,18%), lama menekuni keahlian selama 3–5 tahun sebanyak 25 orang (29,41%) dan lebih dari 5 tahun sebanyak 8 orang (9,41%). Hal ini menunjukkan, banyak karyawan KAP yang masih baru dalam menekuni bidang yang dinilai cocok bagi dirinya yang terkait dengan akuntansi. Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah S1 sebanyak 64 orang (75,29%), D3 sebanyak 11 orang (12,94%) dan S2 sebanyak 10 orang (11,76%). Pendidikan Sarjana masih menempati posisi terbanyak dari pendidikan manajer. Hal ini karena merupakan syarat umum yang masih diterapkan perusahaan untuk manajerial. Dari 85 responden hanya 17 orang atau 20 persen yang memiliki sertifikat atau gelar profesi lain yang menunjang pekerjaan mereka. Beberapa setifikasi yang diperoleh responden umumnya adalah sertifikasi Brevet A dan B.

Analisis Data

Untuk menganalisis data berdasarkan atas kecenderungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel, maka akan disajikan hasil jawaban responden dalam bentuk diskriptif berikut ini.

1. Kompetensi

Kompetensi yang dimiliki oleh responden penelitian menunjukkan rata-rata sebesar 44,41 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu sebesar 33. Hal ini menunjukkan adanya kompetensi yang tinggi dari responden terhadap pekerjaan mereka sebagai auditor. Jika diinterpretasikan dalam 3 skala maka diperoleh rentang skala sebagai berikut :

Rendah skor	11 – 25,66
Sedang	skor 25,66 – 40,33
Tinggi	skor 40,33 – 55

Dengan nilai rata-rata skor jawaban sebesar 44,41 maka hal ini berarti bahwa Kompetensi yang dimiliki responden karyawan KAP secara rata-rata memiliki kompetensi yang tinggi.

2. Independensi

Independensi yang dimiliki oleh responden penelitian menunjukkan rata-rata sebesar 40,61 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu sebesar 30. Hal ini menunjukkan adanya independensi yang tinggi dari responden terhadap pekerjaan mereka sebagai auditor. Jika diinterpretasikan dalam 3 skala maka diperoleh rentang skala sebagai berikut :

Rendah skor	10 – 23,33
Sedang	skor 23,34 – 36,67
Tinggi	skor 36,68 – 50

Dengan nilai rata-rata skor jawaban sebesar 40,61 maka hal ini berarti bahwa Independensi yang dimiliki responden karyawan KAP secara rata-rata memiliki kompetensi yang tinggi.

3. Etika Auditor

Etika Auditor yang dimiliki oleh responden penelitian menunjukkan rata-rata sebesar 36,81 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu sebesar 27. Hal ini menunjukkan adanya etika yang tinggi dari responden auditor terhadap pekerjaan mereka sebagai auditor. Jika diinterpretasikan dalam 3 skala maka diperoleh rentang skala sebagai berikut :

Rendah skor 9 – 21,00
Sedang skor 21,01 – 33,00
Tinggi skor 33,01 – 45

Dengan nilai rata-rata skor jawaban sebesar 36,81 maka hal ini berarti bahwa Etika yang dimiliki responden karyawan KAP secara rata-rata berada dalam kategori etika yang tinggi.

4. Kualitas Audit

Kualitas Audit yang dimiliki oleh responden penelitian menunjukkan rata-rata sebesar 22,84 yang berada di atas rata-rata teoritisnya yaitu sebesar 18. Hal ini menunjukkan adanya kualitas audit yang tinggi dari responden auditor terhadap pekerjaan mereka sebagai auditor. Jika diinterpretasikan dalam 3 skala maka diperoleh rentang skala sebagai berikut :

Rendah skor 6 – 14,00
Sedang skor 14,01 – 22,00
Tinggi skor 22,01 – 30

Dengan nilai rata-rata skor jawaban sebesar 22,84 maka hal ini berarti bahwa kualitas audit yang dimiliki responden karyawan KAP secara rata-rata berada dalam kategori yang tinggi.

Hasil Uji Validitas

Semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Diperoleh bahwa dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,213 yaitu r tabel untuk sampel sebanyak 85.

Hasil Uji Reliabilitas

Konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini ditunjukkan dengan koefisien *Cronbach Alpha* > 0,60, maka koefisien yang diambil adalah seluruh butir pertanyaan pada variabel kompetensi, independensi, etika auditor dan kualitas audit dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uji normalitas grafik histogram, residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak melenceng kekanan ataupun kekiri. Sedang pada grafik normal probability plots, titik-titik menyebar berhimpit disekitar diagonal dan hal menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Nilai uji Kolmogorov – Smirnov model pertama sebesar 0,677 dan tidak signifikan pada 0,05 atau berada diatas 0,05 (karena $p=0,749 >$ dari 0,05). Nilai uji Kolmogorov – Smirnov model kedua pertama sebesar 0,508 dan tidak signifikan pada 0,05 atau berada diatas 0,05 (karena $p=0,959 >$ dari 0,05). Jadi kita tidak dapat menolak H_0 yang artinya bahwa residual terdistribusi secara normal.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Pengujian multikolinieritas dilakukan pada model regresi. Hasil pengujian diperoleh bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF yang berada jauh di bawah angka 10 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung masalah multikolinieritas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara predictor dengan nilai residualnya. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Model Pertama (Pengujian Hipotesis 1 dan 3)

$$Y = 0,378 X_1 + 0,291 X_2 + e$$

Hasil pengujian pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t masing-masing sebesar 3,902 dan 3,004 dengan hasil signifikansi sebesar 0,000 dan 0,004. Hal ini berarti kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sehingga Hipotesis 1 dan Hipotesis 3 diterima.

Nilai *Adjusted R²* model pertama, dari model regresi diperoleh sebesar 0,211, yang berarti bahwa 21,1% kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi dan independensi, sedangkan 78,9% persen kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Model Kedua (Pengujian Hipotesis 2 dan 4)

$$Y = 0,267X_1 + 0,222X_2 + 0,070X_3 + 0,420X_1X_3 + 0,299X_2X_3 + e \dots \dots \dots$$

Hasil pengujian pengaruh interaksi kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 5,121 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti, interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sehingga

Hipotesis 2 diterima.

Hasil uji pengaruh interaksi independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 3,836 dan signifikansi sebesar 0,000. Artinya, interaksi independensi dengan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sehingga **Hipotesis 4 diterima.**

Nilai *Adjusted R²* dari model regresi diperoleh sebesar 0,525, yang berarti bahwa 52,5% kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi, independensi, etika auditor dan interaksi antara kompetensi dan independensi dengan etika auditor, sedangkan sisanya 47,5% kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Temuan penelitian ini menunjukkan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Harhinto (2004) dan Alim *et. al.* (2007), bahwa pengalaman dan pengetahuan sangat penting dalam pemberian opini audit. Sesuai dengan standar umum bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya.

Pengaruh Interaksi Kompetensi Auditor Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit

Temuan berikutnya, interaksi kompetensi auditor dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini berbeda dengan penelitian Alim *et. al.* (2007), namun mendukung Behn *et. al.* (1997) dalam Alim *et. al.* (2007). Hal ini berarti etika audit yang dilakukan dengan baik oleh auditor akan meningkatkan pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Dalam usaha meningkatkan akuntabilitasnya, auditor harus menegakkan etika profesional yang tinggi, agar timbul kepercayaan masyarakat.

Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Hasil uji hipotesis 3 membuktikan, independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini mendukung penelitian dari Harhinto (2004) dan Alim *et. al.* (2007) tetapi bertentangan dengan Nurchasanah dan Rahmawati (2003). Temuan ini menunjukkan, lamanya auditor melakukan kerjasama dengan klien (*tenure*) berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana *tenure* terkait dengan independensi. Auditor harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen.

Pengaruh Interaksi Independensi Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit

Pengujian hipotesis 4 membuktikan, interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, yang mendukung penelitian Alim *et. al.* (2007). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan auditor untuk bertahan di bawah tekanan klien, dalam hal ini independensi tergantung pada etika profesional. Kredibilitas auditor tentu sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Auditor yang dianggap telah melakukan kesalahan maka akan mengakibatkan mereduksinya kepercayaan klien. Kualitas audit yang dipengaruhi oleh independensi dan etika dalam

melaksanakan tugas audit masih terkait dengan perilaku klien kepada auditor. Klien sangat menginginkan hasil audit sesuai dengan kebutuhan tentu akan memperlakukan auditor dengan baik dimana auditor harus bersikap tegas jika dihadapkan pada situasi demikian.

PENUTUP

Keterbatasan Penelitian

Metode pengumpulan data yang hanya menggunakan metode kuesioner, menyebabkan kurangnya komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Selain itu metode kuesioner yang mengandalkan *self report* akan memberikan kelemahan apabila dijawab dengan tidak jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M.Nizarul *et.al*, 2007, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi". SNAX. Makasar Hal. 1-26.
- Christiawan, Yulius Jogi, 2003, "Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.4 No. 2 (Nov) Hal. 79-92.
- Farhan, Djuni, 2009, "Etika dan Akuntabilitas profesi Akuntan Publik", Intimedia, Malang.
- Ghozali, Imam, 2005, "Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS", BP Undip, Semarang
- Harhinto, Teguh, 2004, "Pengaruh Keahlian dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada KAP di Jawa Timur", Semarang. Tesis Maksi : Universitas Diponegoro. (Tidak dipublikasikan).
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. "Metode Penelitian Bisnis". Edisi I. Yogyakarta : BPF.
- Kusharyanti. 2003. "Temuan Penelitian Mengenai Kualitas Audit dan Kemungkinan Topik Penelitian di Masa Datang". Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Desember). Hal.25-60.
- Mayangsari, Sekar. 2003. "Pengaruh keahlian dan independensi terhadap pendapat audit: Sebuah kuasi eksperimen". Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.6 No.1 (Januari).
- Meutia, Inten. 2004. "Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba Untuk KAP Big 5 dan Non Big 5", Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 7 No. 3 September 2004.
- Nugrahaningsih, P. 2005. "Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (Studi Terhadap Peran Faktor-Faktor Individual: Locus of Control, Lama Pengalaman Kerja, Gender dan Equity Sensitivity)". SNA VIII Solo.
- Novianty, Retty dan Indra Wijaya Kusuma. 2001. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik". Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol.5. Hal.1-14.
- Nurchasanah, Rizmah dan Wiwin Rahmanti. 2003. "Analisis Faktor-faktor Penentu Kualitas Audit". Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Agustus). Hal.47-60.
- Payamta. 2002. Jurnal. "Sikap Akuntan dan Penggunaan Jasa Akuntan Publik Terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik". SNA V. Semarang
- Sri Lastanti, Hexana. 2005. "Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan". Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005. Hal 85-97.
- Widagdo, Ridwan. et al. 2002. Jurnal. "Analisis Pengaruh Atribut-Atribut Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien". SNA V. Semarang.

**PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN DAN KOMPLEKSITAS TUGAS
TERHADAP AUDIT JUDGMENT
(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)**

Dyah Nirmala Arum Janie¹
dyahjanie@gmail.com
Bagus Kendro Aminto²
Bagus_freelancer@yahoo.com
Dian Indudewi³
Dian.indudewi@gmail.com

Abstract

This research framework is based on considerations of motivation attitude of professionalism among auditors in audit firm (KAP). In an audit process conducted by audit firm will set up a team consisting of men and women, in decision-making process usually occurs a few conflicts between men and women. An auditor in performing its duties in making audit judgments are influenced by many factors, both technical and non technical. Behavioral aspects of individuals are factors affecting audit judgments by now receiving more attention from accounting practitioners or from academics.

In addition, this study is a replication of research conducted by Zaenal Fanani (2007), which examines the effect of obedience pressure on audit judgments. Of the few existing references such as research conducted Jamilah et al, Rahmawati, Zulaikah and other most talked about gender, compliance and audit judgments pressure. This study also provides extensions to the techniques of analysis using different test average. Analysis techniques to examine differences in judgments made by auditors viewed from the perspective of gender.

In addition, this study determined to empirically examine the influence of gender, compliance pressures and task complexity on audit judgments. Unit analysis of this study is the auditors who work audit firm in Jawa Tengah and D.I Yogyakarta, senior and junior level auditor who was taken by a random sampling. The results show that 1) gender insignificantly influence audit judgments 2) compliance pressures significantly affect audit judgments 3) the complexity of the task also significantly affects audit judgments.

Key word : Gender, Compliance Pressure, Task Complexity

PENDAHULUAN

Dilandasi peraturan BAPEPAM Nomer Kep-36/ PM/ 2003 dan peraturan bursa efek Jakarta (BEJ) Nomer Kep-306/BEJ/07-2004 menyebutkan bahwa perusahaan yang *go public* mewajibkan menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS dan telah di audit oleh akuntan publik. Seorang Akuntan (auditor) dalam proses audit memberikan opini dengan *judgment* yang didasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Standard Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 menyebutkan bahwa *audit judgment* atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berdasarkan pada ada tidaknya kesangsian

1

dalam diri auditor itu sendiri tertahap kemampuan suatu kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode satu tahun sejak tanggal laporan keuangan audit.

Seorang auditor melakukan tugasnya membuat *audit judgment* dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis maupun non teknis. Aspek perilaku individu, sebagai salah satu faktor yang banyak mempengaruhi pembuatan *audit judgment*, sekarang ini semakin banyak menerima perhatian dari para praktisi akuntansi ataupun dari akademis. Namun demikian meningkatnya perhatian tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan penelitian di bidang akuntansi perilaku di mana dalam banyak penelitian tidak menjadi fokus utama (Meyer, 2001).

Cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko audit yang dihadapi yang oleh auditor sehubungan dengan *judgment* yang dibuatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi auditor dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi ini informasi antara lain meliputi faktor pengetahuan, perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi informasi, serta kompleksitas tugas dalam melakukan pemeriksaan (Zaenal Fanani, 2007).

TELAAH PUSTAKA

Menurut penelitian terdahulu *gender* diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi *Audit Judgment* seiring dengan terjadinya perubahan kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Sesuai dengan literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam proses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan pria. Reguler dan King (1992) menyatakan bahwa wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria. Gilligan (1982) menyatakan pengaruh *gender* terhadap perbedaan persepsi etika terjadi pada proses pengambilan keputusan. Dezoort dan Lort dalam Hartanto (1999) melihat adanya tekanan atasan pada konsekuensi yang memerlukan biaya, seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. Hal tersebut mengidentifikasi adanya tekanan dari atasan pada *judgment* yang diambil auditor. Aston (1990) mencoba melihat pengaruh tekanan dari atasan pada kinerja auditor dalam hal budget waktu, tenggang waktu, akuntabilitas, dan justifikasi.

Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang memberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari *legitimate power*. Paradigma ketaatan pada kekuasaan ini dikembangkan oleh Milgram (1974), dalam teorinya dikatakan bawahan yang mengalami tekanan ketaatan dari atasan akan mengalami perubahan secara psikologis dari seseorang yang berilaku autonomis menjadi perilaku agen. Perubahan perilaku ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi agen dari sumber kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggungjawab atas apa yang dilakukannya.

Akuntan sering berhadapan dengan keputusan yang hasilnya tidak cukup oleh kode etik maupun oleh standart akuntansi berterima umum. Pertimbangan utama dalam keputusan adalah etika, walaupun sering kali melibatkan berbagai macam konflik kepentingan. *Judgment* akuntan profesional dapat rusak oleh konflik kepentingan terhadap dua konflik kepentingan yaitu *real konflik* dan *latent konflik*. *Real konflik* adalah yang mempunyai pengaruh pada masalah *judgment* yang ada, sedangkan *latent konflik* adalah konflik yang bisa mempengaruhi *judgment* dimasa mendatang.

Badan audit *research* ternama telah mendemonstrasikan bahwa sejumlah faktor level individu terbukti berpengaruh terhadap keputusan auditor (Solomon dan Shileds, 1995) dan bahwa berpengaruh dari keberadaan faktor-faktor ini berubah seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas yang dihadapi (Tan dan Kao, 1999; Libby 1995) pengujian terhadap sejumlah faktor tersebut terhadap kompleksitas tugas juga bersifat penting karena

kecenderungan bahwa tugas melakukannya audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Bonner (1994) mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan.

Hogart (1992) mengartikan *judgment* sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. *Judgment* merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut. Proses *judgment* tergantung pada kedatangan informasi sebagai suatu proses *unfloads*.

Cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan dengan *judgment* yang dibuatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi auditor dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi ini antara lain meliputi faktor pengetahuan, perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi informasi serta kompleksitas tugas dalam melaksanakan pemeriksaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah faktor *gender* dan tekanan ketaatan juga akan mempengaruhi persepsi auditor (Jamilah et al, 2007)

Menurut Jamilah et al (2007) *Gender* diduga menjadi salah satu faktor level individual yang turut mempengaruhi audit *judgment* seiring dengan terjadinya perubahan pada kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Temuan riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita juga menyebutkan, bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan pria. Rugger dan King (1992) dalam Jamilah et al (2007) menyatakan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dibandingkan pria. Gilligan (1982) dalam Jamilah et al (2007) menyatakan pengaruh *gender* terhadap perbedaan persepsi etika terjadi pada saat proses pengambilan keputusan. Namun demikian *gender* terhadap pemrosesan informasi dan *judgment* belum banyak teruji dalam konteks penugasan audit atau penugasan sebagai auditor

Isu mengenai *gender* dalam pengambilan keputusan kini banyak diperbincangkan dan juga diperdebatkan dalam masalah mengenai *gender* pada lingkungan kerja. Di Indonesia, walaupun kajian yang komprehensif belum banyak dilakukan namun tuntutan mengenai hal ini perlu diperlukan dan menjadi pertanyaannya adalah mengapa kajian mengenai *gender* menjadi begitu penting? Jawabnya adalah tidak lepas dari adanya indikasi meningkatnya keterlibatan wanita, khususnya pada suatu organisasi (Djuari dan Titik, 2005).

Pandangan terhadap *gender* sering kali dihubungkan dengan sifat positif dan negatif. Pria dipandang memiliki sifat kuat dan keras, yang memiliki konotasi positif, sedangkan wanita dipandang memiliki sifat yang lemah lembut, yang dipandang negatif di lingkungan pekerjaan, dalam perkembangan selanjutnya diperoleh bukti bahwa sifat-sifat wanita memiliki kelebihan dibandingkan sifat pria (Hartanto dan Kusuma, 2000).

Davidson dan Dabby (1993) dalam Jamilah et al (2007) menemukan dalam penelitiannya mengenai karakteristik kepribadian auditor bahwa antara auditor pria dan auditor wanita sama-sama memiliki karakteristik kepribadian yang kuat. Auditor pria dan auditor wanita mempunyai karakteristik kepribadian yang sangat cerdas, tegas, dan bersemangat, berpikiran terbuka memiliki kemampuan yang cukup, suka bekerja keras dan dalam keadaan yang tertekan karena mereka belum mampu untuk meraih tujuan-tujuan mereka. Namun auditor pria maupun auditor wanita juga memiliki karakteristik yang berbeda. Auditor wanita memiliki karakteristik lebih realistis, teguh pendirian, dapat dipercaya, memiliki kecurigaan yang tinggi (tidak mudah terpengaruh), penuh perhatian dan teliti, kurang percaya diri dan cenderung untuk memenuhi peraturan. Sedangkan auditor pria memiliki kepribadian yang tidak berpihak, kurang dapat bekerja sama, cenderung tidak praktis dan tidak realitis, lebih percaya diri, dan cenderung sembarangan dalam melaksanakan tugas.

Bidang akuntan publik merupakan salah satu bidang yang tidak lepas dari diskriminasi *gender*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wakup dan Fenzau tahun 1998 dalam Trisnansih (2004) ditemukan bahwa 41 persen responden yang mereka teliti, yaitu akuntan wanita meninggalkan karier mereka karena adanya bentuk-bentuk diskriminasi *gender* yang mereka rasakan.

Tekanan ketaatan mempengaruhi kualitas *judgment* dari seorang auditor, apabila seorang auditor telah memenuhi peraturan-peraturan dan memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam suatu firma KAP, maka serta tidak langsung *judgment* yang diberikan atau yang dibuat oleh auditor tersebut tidaklah sembarangan, melainkan telah melalui pertimbangan-pertimbangan sehingga *judgment* tersebut bisa dikatakan tepat (Hartanto dan Kusuma, 2000).

Beberapa tindakan-tindakan yang diambil untuk mengulangi masalah tekanan ketaatan, contohnya dengan tambahan program pendidikan dan pelatihan untuk menyelesaikan konflik atau personal dengan teknik yang memasukkan isu-isu ketaatan dan menggunakan pemeriksaan prosedur yang mendetail untuk mengurangi kemungkinan penurunan profesionalisme (Aryani dan Rahmawati, 2007).

Judgment yang diperlukan oleh seorang auditor dianggap tepat bila telah memenuhi pedoman atau sesuai yang telah ditentukan dalam praktek dan etika profesi auditor. *Judgment* auditor sangat tergantung pada pemahaman dan moral yang dimiliki oleh seorang auditor tersebut. *Judgment* yang berdasarkan pada pemahaman mempunyai beberapa keuntungan dalam memahami inti dari suatu masalah karena dalam menggunakan pemikiran yang akan melibatkan suatu pendekatan pemahaman berdasarkan hukum yang berlaku (Aryani dan Rahmawati, 2007).

Temuan Dezoort dan Lord dalam Hartanto dan Kusuma (2000) melihat adanya pengaruh tekanan atasan pada konsekuensi yang memerlukan biaya, seperti halnya tuntutan hukum, sehingga profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh dari tekanan atasan pada *judgment* yang diambil oleh auditor. Aston (1990) dalam Hartanto dan Kusuma (2000), telah mencoba untuk melihat pengaruh tekanan dari atasan pada kinerja auditor dalam hal budget waktu, tenggat waktu, akuntabilitas, dan justifikasi. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari *legitimate power*. Paradigma ketaatan pada kekuasaan ini dikembangkan oleh Milgram (1974), dalam teorinya dikatakan bahwa tambahan yang mengalami tekanan ketaatan dari atasan yang mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku autonomis menjadi perilaku agen. Perubahan perilaku ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi agen dari sumber kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya (Jamilah et al, 2007).

Sesuai dengan penelitian DeZoort dan Lord (1994) dalam Hartanto dan Kusuma, 2000) dalam tesisnya menghasilkan temuan bahwa auditor yang memperoleh perlakuan ketaatan dalam bentuk perintah yang tidak tepat dari atasan, baik dari manajer maupun partner secara signifikan melakukan tindakan yang menyimpang dari standar profesional dibandingkan dengan auditor yang tidak mendapatkan perlakuan tekanan ketaatan. Namun demikian, pengaruh tekanan ketaatan dari partner audit telah berbeda secara signifikan dengan pengaruh dari manajer. Fenomena ini disebabkan partisipasi sebagai auditor pemula sebelum mendapat perbedaan antar tekanan partner atau tekanan manajer. Mereka hanya terpengaruh oleh adanya tekanan dari atasan (Rahmawati 2004).

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kuntari dan Kusuma (2001), Hartanto dan Kusuma, (2000) dan Zulaikha (2006). Variabel ini meliputi gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan *audit judgment* yang diadopsi oleh penelitian-penelitian mereka. Penelitian ini juga memberikan indikasi tentang adanya kerentanan auditor pemula terhadap tekanan ketaatan. Auditor pemula yang menerima perintah untuk melakukan perilaku yang menyimpang dari manajer audit maupun partner

audit mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran norma atau standar profesional, bila dibandingkan dengan auditor pemula yang mengambil *judgment* tanpa adanya tekanan dari atasan. (Hartanto dan Kusuma, 2000).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 120 responden.
2. Sampel penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di 3 kota, yaitu Jawa Tengah dan D. I Yogyakarta.
3. Penelitian yang dahulu, tidak diketahui masa kerja auditornya. Sedangkan pada penelitian ini diketahui masa kerjanya.
4. Variabel penelitian yang digunakan yaitu gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan audit *judgment*. Sementara penelitian terdahulu belum pernah menggabungkan keempat-empatnya

Pengambilan keputusan harus didukung oleh informasi yang memadai. Kaum pria dalam pengelolaan informasi tersebut biasanya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia sehingga keputusan yang diambil kurang komprehensif. Lain halnya dengan wanita, mereka dalam mengolah informasi cenderung lebih teliti dengan menggunakan informasi yang lebih lengkap dan mengevaluasi kembali informasi tersebut dan tidak gampang menyerah (Meyer, dan Levy, 1986) Kaum wanita lebih efisien di bandingkan kaum pria selagi mendapat akses informasi . selain itu , kaum wanita juga mempunyai daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu informasi baru dibandingkan kaum pria dan demikian halnya kemampuan dalam mengolah informasi yang sedikit lebih tajam. Argumen ini didukung oleh hasil penelitian dari Gallian (1982), Sweeney dan Robert(1997), Barbeau dan Brabeckdalam Hartanto(1999), dan Cohen, et.al. (1999). Berdasarkan urian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Gender berpengaruh signifikan terhadap audit *judgment* yang diambil oleh auditor

Akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dalam keadaan ini klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Klien bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Auditor secara umum dianggap termotivasi oleh etika profesi dan standar pemeriksaan, maka auditor akan berada dalam situasi konflik. Memenuhi Tuntutan Klien berarti melanggar standart. Namun dengan tidak memenuhi tuntutan klien, bisa mendapatkan sanksi oleh klien berupa kemungkinan penghentian penugasan. Karena pertimbangan profesional berdasarkan landasankan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan akhir. Penelitian sebelumnya menunjukan bukti bahwa auditor yang mendapatkan perintah tidak tepat baik itu dari atasan ataupun dari klien cenderung akan berperilaku menyimpang dari standart profesional(Hartanto,1999). Berdasarkan urian diatas maka akan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap audit *judgment* yang diambil oleh auditor

Tingkat kesulitan tugas struktur merupakan dua aspek penyusun dari kompleksitas tugas. Tingkat kesulitannya tugas selalu dikaitkan dengan banyak informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur adalah keterkaitan dengan kejelasan informasi proses pengolahan informasi terdiri dari 3 tiga tahapan yaitu: Input, output, proses.pada tahap input dan proses, kompleksitas tugas sering bertambahnya faktor cues. Terdapat perbedaan antara pengertian banyaknya cues yang diadakan (number of cus avaliabel) dengan banyaknya cues yang terolah (number of cues prossed).banyaknya cues yang ada seorang decision maker harus berusaha melakukan pemilahan terhadap cues- cues tersebut (meliputi upaya penyelesaian dan pertimbangan –pertimbangan) dan kemudian mengintergrasi nya kedalam suatu jugment (pendapat). Keputusan bisa diberikan segera bila banyak cues yang diamati tidak meninggalkan batas kemampuan dari seorang decision maker (Chung dan Monroe,2001). Berdasarkan urian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H3: Kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap audit *judgment* yang diambil oleh auditor**
H4: Gender, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit *judgment* yang diambil auditor

METODE PENELITIAN

Subyek penelitian dalam eksperimen ini adalah akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Solo, Semarang, dan Jogjakarta. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei 2011. Sebanyak 120 partisipan berpartisipasi dalam eksperimen ini untuk menguji hipotesis penelitian dan hasilnya semua kuesioner bisa digunakan karena datanya lengkap, sehingga dengan demikian semua kuesioner dapat digunakan dalam analisis data.

Berikut ini adalah perincian mengenai jumlah kuesioner disebar hingga yang digunakan untuk analisis.

Jumlah kuesioner yang disebar	=	120
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	=	-18
Jumlah kuesioner yang tidak terisi dengan lengkap/rusak	=	-10
Jumlah kuesioner yang digunakan untuk analisis	=	92

Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Akan tetapi sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, dilakukan uji kualitas data yang berupa uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

HASIL

Sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: responden pria yaitu sebanyak 71 orang atau 59,1%, dan responden wanita hanya 49 orang atau 40,9%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan pria lebih banyak menjadi auditor pada beberapa KAP di Semarang, Solo, Yogyakarta. Para responden sudah menempati jabatan mereka sekarang selama lebih dari 1 – 2 tahun sebanyak 34 orang atau 28,3%, diikuti oleh responden yang bekerja selama 3 – 5 tahun sebanyak 56 orang atau 46,7%. Selanjutnya responden yang mempunyai masa kerja selama 5 - 10 tahun sebanyak 22 orang atau 18,3% dan yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun sebanyak 8 orang atau 6,7%. Sedangkan jabatan responden yang terbanyak adalah adalah pada auditor junior yaitu sebanyak 45 orang atau 37,5%, diikuti oleh auditor senior sebanyak 75 orang atau 62,5%. Untuk tingkat pendidikan responden adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 67 orang atau 77,5%, diikuti oleh responden yang berpendidikan S2 sebanyak 43 orang atau 22,5%, dan tidak ada yang berpendidikan D3 dan S3

Dari hasil uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas, tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan perlakuan khusus terhadap analisis regresi yang dilakukan. Selain itu pula dari semua uji asumsi klasik, tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas dan multikolinearitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Residual data juga termasuk normal. Sehingga bisa dilakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan.

Setelah seluruh asumsi klasik dapat terpenuhi maka interpretasi model regresi dapat dilakukan. Hasil perhitungan regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS, didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 14,294 - 1,328X_1 + 0,376X_2 + 0,572X_3 + \varepsilon$$

Koefisien regresi variabel X_1 (gender) diperoleh sebesar -1,328 dengan arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan prediksi wanita memiliki tingkat *audit judgment* yang relatif rendah. Pengujian pengaruh gender terhadap *audit judgment* dari hasil penelitian menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar $-1,328 > 1,6871$ (t tabel) dengan signifikansi sebesar 0,261 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan **H1 ditolak**. Artinya *gender tidak* berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*.

Koefisien regresi variabel X_2 (Tekanan ketaatan) diperoleh sebesar 0,376 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tekanan ketaatan yang diterima auditor diprediksi dapat meningkatkan *audit judgment*. Pengujian pengaruh tekanan ketaatan terhadap *audit judgment* dari hasil penelitian menunjukkan arah koefisien positif nilai t sebesar $2,2949 > 1,6871$ dengan signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan **H3 diterima**. Artinya tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Artinya semakin besar tekanan ketaatan kepada auditor secara signifikan dapat memberikan *audit judgment* yang lebih baik.

Koefisien regresi variabel X_3 (Kompleksitas Tugas) diperoleh sebesar 0,572 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar keberadaan kompleksitas tugas diprediksi dapat meningkatkan *audit judgment*. Pengujian pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgment* dari hasil penelitian menunjukkan arah koefisien positif nilai t sebesar $3,566 > 1,6871$ dengan signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan **H3 diterima**. Artinya kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Artinya semakin besar kompleksitas tugas auditor secara signifikan dapat memberikan *audit judgment* yang lebih baik.

Sedangkan dari hasil pengujian ketiga variabel yang ada dalam penelitian maka faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi *audit judgment* adalah variable kompleksitas tugas. Hal ini terbukti dari persamaan terstandarisasi berikut ini:

$$Y = -0,106X_1 + 0,280X_2 + 0,338X_3 + \varepsilon$$

Sementara itu, hasil pengujian model keseluruhan diperoleh nilai F sebesar 9.550 > 2,860 (F tabel) dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa taraf signifikansi 5 persen, model pengujian dengan menggunakan variabel *gender*, kompleksitas tugas dan tekanan ketaatan dapat menunjukkan sebagai model yang signifikan terhadap *audit judgment*. Dengan kata lain **H4 diterima**.

Besarnya pengaruh ketiga variabel bebas tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi *adjusted R²* dari model regresi diperoleh 0,220, yang berarti bahwa 22,0 persen *audit judgment* dipengaruhi oleh variabel *gender*, kompleksitas tugas dan tekanan ketaatan, sebagai sisanya 88,0 persen *audit judgment* dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil uji pengaruh *gender* terhadap *audit judgment* menunjukkan bahwa *gender* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat hasil *audit judgment* yang dihasilkan oleh auditor yang ber *gender* laki-laki dan responden yang bergender perempuan jika dilihat dari motivasi, komitmen profesional, dan kesempatan kerja. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ardi Hamzah dan Paramita (2005), Zulaikha (2006), Jamilah et al (2007), Siti Mutmainah (2007) dan hasil penelitian ini bertolak belakang atau berbeda dengan penelitian Putri Nugrahaningsih (2005). Hal ini dikarenakan bahwa secara keyakinan, konsep *gender* sudah menjadi semakin tidak banyak berbeda antara laki-laki baik dalam hal kesetaraan pekerjaan maupun kualitas hasil yang diperoleh.

Pengujian Hipotesis 2 menyatakan kompleksitas tugas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Hasil ini berbeda dengan penelitian Zulaikah (2006) dan Jamilah et al (2007), namun mendukung penelitian Chung dan Monroe (2001) dalam Jamilah et al (2007), yang mengatakan bahwa interaksi antara *gender* dengan kompleksitas tugas berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment*, menunjukkan bahwa kinerja auditor tergantung pada interaksi antara kompleksitas tugas dan struktur audit yang digunakan dalam pelaksanaan audit. Hal ini dibuktikan bahwa untuk tugas yang tidak terlalu kompleks, auditor dari perusahaan audit terstruktur dan tidak terstruktur menunjukkan kinerja yang sepadan. Sebaliknya, pada tugas yang relatif kompleks, maka auditor dari perusahaan yang tidak terstruktur jauh berada di bawah perusahaan audit terstruktur. Hal ini juga menjelaskan bahwa dengan tugas audit yang semakin kompleks maka auditor akan semakin banyak memiliki banyak sumber data yang dapat diolah sebelum memberikan

keputusan tentang *audit judgment*. Banyaknya tugas tersebut memberi auditor sebuah upaya untuk menyelesaikan proses audit

Pengujian Hipotesis 3 menyatakan tekanan ketaatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Hasil ini mendukung penelitian Jamilah dkk (2007) dan Hartanto (2000). Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam kondisi adanya perintah dari atasan dan tekanan dari klien untuk berperilaku menyimpang dari standar profesional auditor junior cenderung akan mentaati perintah tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa auditor junior tidak memiliki keberanian untuk tidak mentaati perintah atasan dan keinginan klien untuk berpindah walaupun instruksi tersebut tidak tepat. Tentunya sedikit yang mau mengambil resiko untuk mencari pekerjaan lain dan kehilangan klien sebagai konsekuensi menentang perintah atasan dan keinginan klien yang tidak tepat yang menyimpang dari standar profesional.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa **H1 ditolak**. Hal ini juga menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan *audit judgment* yang dimiliki auditor pria dibanding wanita.
2. Analisis dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa **H2 diterima**. Di dalam kompleksitas tugas menjelaskan bahwa adanya tugas yang semakin kompleks yang dimiliki auditor akan meningkatkan *audit judgment*.
3. Analisis dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa **H3 diterima**. Di dalam tekanan ketaatan juga menjelaskan bahwa adanya tekanan ketaatan yang semakin besar yang diperoleh auditor akan meningkatkan *audit judgment*.
4. Dari penelitian diatas maka faktor yang paling berpengaruh terhadap *audit judgment* adalah kompleksitas tugas.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh sebagaimana telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Auditor
Masih perlu ditingkatkan intensifikasi penanaman persamaan nilai-nilai kode etik profesi akuntansi sejak di bangku kuliah hingga dalam tahap rekrutmen pegawai.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik
Agar peran lembaga seperti IAI dan kantor akuntan publik dalam mendorong auditor mengikuti pelatihan harus terus berkesinambungan sehingga pemahaman dan keahlian auditor akan semakin baik.

Keterbatasan

Hasil analisis yang dikemukakan dalam penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang sebaiknya menjadikan perhatian bagi penelitian selanjutnya :

1. Instrumen pengukuran variabel penelitian ini semua menggunakan instrumen yang diadopsi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga kemungkinan adanya kelemahan dalam menterjemahkan instrumen yang menyebabkan terjadinya perubahan arti dan kemungkinan peneliti salah dalam mempersepsikan maksud yang sebenarnya ingin dicapai.
2. Pengukuran *audit judgment* memiliki keterbatasan dalam hal sumber informasinya yang dinilai contoh kasus yang seringkali bersifat pengandaian.
3. Nilai koefisien determinasi dari hasil penelitian ini masih tergolong rendah

Agenda Penelitian Yang Akan Datang

Bukti empiris yang ditemukan dari hasil penelitian ini memiliki beberapa agenda sebagai berikut:

1. Dimungkinkan untuk menambahkan kuesioner dalam bentuk pertanyaan terbuka untuk memperkuat jawaban dari pertanyaan tertutup yang terdapat dalam kuesioner.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya meluaskan objek penelitian, tidak hanya tiga kota saja tetapi juga dapat menambahkan beberapa kota untuk diteliti bahkan pulau jawa, atau tingkat nasional agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
3. Penelitian selanjutnya juga berpeluang untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan beberapa variabel, misalnya pengalaman auditor, perilaku etis, pendidikan dan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani dan Rahmawati, 2007, *Variabel Pertimbangan Moral Authoritarian Dan Gendermemoderasi Pengaruh Tekanan Kepatuhan Dengan Judgment Auditor*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, vol. 6, No. 1: 18-38.
- Direktori. 2010. IAI. Jakarta.
- Djuari dan Titik, 2005, *Peran Gender dan Penalaran Moral dalam Pengambilan Keputusan Etis di Bidang Manajemen dan Implikasinya: Study Kasus pada Organisasi Nir Laba*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.4, No 2:129-139.
- Fakih, M, 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam, 2005, *Model Persamaan Struktur, Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver. 5.0*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gilligan, C. 1982., *In A Different Voice*. MA : Harvard University. Boston.
- Hartanto dan Kusuma, 2000, *Analisis Perilaku Tekanan Ketaatan Terhadap Judgment Auditor*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen STEI YKPN: 1-14.
- Hamzah dan Paramita, 2005, *Perbedaan Perilaku Etis Dan Tekanan Kerja Perspektif Gender Dalam Audit Judgment Laporan Keuangan Historis Dan Kompleksitas Tugas*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, 18 – 29.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik, 2001, *Standar Akuntan Publik, Per 1 Januari 2001*, Penerbit Salemba, Empat, Jakarta.
- Jamilah, Siti, et. al 2007, Pengaruh Gender , Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgment, Simposium Nasional Akuntansi C, AUEP-06: 1-29.
- Kuntari, Yeni, 2001, *Pengalaman Organisasi Evaluasi Terhadap Kinerja dan Hasil Karir pada Kantor Akuntan Publik: Pengujian Pengaruh Gender*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16, No. 1, 74-87.
- Lehman, C., (1990), The Importance of being earnest: Gender conflicts in accounting. *Advances in Public Interest Accounting* 3: 137-157
- Meyer, M. dan J. T. Rigsby., 2001., Descriptive Analysis of The Content and Contribution of Behavioral Research In Accounting 1989-1998. *Accounting Journal*.
- Milgram, S., 1974., *Obedience to Authority*. Harper and Row., New York.
- Mosse, C, 1996, *Gender Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mutmainah, Siti, 2007, *Studi Tentang Perbedaan Evaluasi Etis, Intensi Etis (Ethical Intention) Dan Orientas Dilihat Gender Dan Disiplin Ilmu: Potensi Rekrutmen Staf Profesional Pada Kantor Akuntan Publik*, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, VOL. 10. No. 1, 43-67.
- Nugrahaningsih, Putri, 2005, *Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor Di Kap Dalam (Etical Internation) Dan Orientas Etis Dilhat Gender Dan Disiplin Ilmu: Potensi Rekrutmen Staf Profesional Pada Kantor Akuntan Publik*, Jurnal Riset Akuntan Indonesia, Vol. 10, No. 1, 43-67.

- Rahmawati dan Setyaningtyas Honggowati, 2004, *Pengaruh Tekanan Kepatuhan, Gender, Authoritarian Dan Pertimbangan Moral Terhadap Judgment Auditor*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 1: 42-64.
- Schawrtz, Felice N. (1996). Women in the profession. *Journal of Accountancy* (February): 39-42.
- Sholeh, Achmad Zanbar, 2005, *Ilmu Statiska, Pendekatan Teoritis Dan Aplikasi*, Penerbit: Rekayasa Sains. Bandung.
- Solomon, I., dan M. Shields., 1995., Judgment and Decision Making Research in Auditing. *In Judgment and Decision-Making Research I Accounting and Auditing*, edited by R. Ashton and A. Ashton. NY: Cambridge University Press., New York.
- Zulaikha, 2006, *Pengaruh interaksi gender, kompleksitas tugas, dan pengalaman asuditor terhadap audit judgment*. Simposium Naional Akuntansi. Bandung

**PENGARUH KUALITAS LAYANAN, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**
(*Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Bantul*)

Tri Siwi Nugrahani
tri.siwunugrahani@yahoo.com
Febriyanto

Abstract

The objective of this study is to examine the effect of quality services, taxation sanctions, and taxation awareness on taxation compliance. This study uses 50 samples. The result in this study showed that quality services, and taxation sanctions have the effect to taxation compliance, but not to taxation awareness.

Key words: *quality services, taxation sanctions, taxation awareness, and taxation compliance.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung terhadap pembangunan nasional adalah kepatuhan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Semestinya sebagai masyarakat yang baik harus memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab dan patuh membayar pajak secara tepat waktu supaya wajib pajak terhindar dari sanksi atau denda. Tentunya pemerintah sendiri dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam aturan undang-undang perpajakan. Salah satu upaya pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system* (Muliari dan Setiawan, 2009).

Harapan pemerintah, penerimaan pajak semakin meningkat tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya pemberlakuan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. *Self assessment system* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya, karena dalam sistem ini negara memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh wajib pajak (Supadmi 2009). Selain itu pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, karena dalam melaksanakan tugas sebagai *public service*, pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bertugas memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau wajib pajak baik yang terdiri wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan dan mendorong pada wajib pajak untuk sadar dalam memenuhi kewajibannya kepada Negara yaitu “membayar pajak.”

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Pajak dalam rangka meningkatkan meningkatkan kinerja dan kepuasan layanan yaitu dengan meningkatkan mutu layanan pajak kepada masyarakat (Hendarsyah 2009). Undang-undang pajak diberlakukan kepada

masyarakat Indonesia untuk secara sadar membayar pajak dan apabila melanggar juga akan diberlakukan sanksi. Mulai tanggal 1 Januari 2008 Undang-Undang Perpajakan baru telah dilaksanakan, yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan STTD undang-undang No. 28 tahun 2007. Hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun perseorangan karena terdapat perubahan berupa kenaikan drastis untuk sanksi administrasi denda dan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Setiap wajib pajak berkewajiban menyampaikan SPT masa PPN mulai masa Januari 2008 (untuk masa pajak Januari 2008 dan seterusnya, bukan masa-masa pajak sebelum tahun 2008) jika terlambat dalam menyampaikannya ke kantor pajak dikenai sanksi sebesar Rp 500.000,00 besarnya 10 kali lipat dari sanksi denda yang lama. Sedangkan untuk SPT masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00. Besarnya dua kali lipat dari denda yang lama (Basriani, 2010). Penelitian pajak yang berkaitan dengan sanksi pajak telah dilakukan diantaranya Hendarsyah (2009) menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Jatmiko,(2006) menguji pengaruh sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menguji kembali studi yang telah dilakukan oleh Hendarsyah (2009) dan Jatmiko (2006) dengan memfokuskan pada kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Perpajakan

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Dari pengertian pajak tersebut mengandung unsur iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang dan bukan barang. selain itu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, dan tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, yang terbagi menjadi 2 macam fungsi pajak yaitu 1) fungsi *budgetair*, ini merupakan fungsi utama pajak sebagai alat untuk memasukan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, 2) fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Asas pemgutan pajak yaitu 1) asas domisili yang berarti pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak, 2). asas sumber yaitu cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana obyek pajak diperoleh, dan 3) asas kebangsaan, yaitu cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari Negara (Rahayu, 2010).

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat diantaranya : keadilan, pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat

memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak (Supadmi 2009).

Terdapat empat karakteristik pelayanan yang dapat diberikan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) kepada wajib pajak, yaitu :

- 1) Tidak berwujud (*Intangibility*). Suatu jasa atau pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dan dinikmati sebelum dibeli oleh pelanggan / wajib pajak.
- 2) Tidak dapat dipisahkan (*Inseparability*). Dihasilkan atau dirasakan pada waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh pelanggan untuk diserahkan kepada pelanggan lainnya maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut.
- 3) Bervariasi (*Variability*). Pelayanan senantiasa mengalami perubahan tergantung dari siapa penyedia jasa, penerima jasa dan kondisi dimana jasa tersebut diberikan.
- 4) Tidak tahan lama (*Perishability*). Daya tahan suatu pelayanan tergantung suatu situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor.

Masyarakat menuntut pada kantor pajak untuk mampu memberi layanan yang baik merupakan tantangan pada pemerintah agar bekerja lebih efisien. Kualitas pelayanan dapat pula dilihat dari dimensi pokok seperti dikemukakan A. Zeitham et.al (1990 : 32) dalam Hendarsyah, D (2009) yaitu : 1) keberwujudan (*tangibles*) yaitu kebutuhan pelanggan yang berfokus pada barang atau jasa, yang menyangkut penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan alat komunikasi, 2) keandalan (*reliability*) yaitu pemenuhan pelayanan segera dan memuaskan. Keandalan merupakan kecakapan dalam memberikan janji pelayanan yang tepat dan dapat diandalkan, meliputi ketepatan waktu dan kecakapan dalam menangani pelanggan, 3) ketanggapan (*responsiveness*) yang berarti keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap, hal ini merupakan ketulusan dalam menolong dan memberi pelayanan termasuk kesepakatan waktu, 4) jaminan (*assurance*) merupakan perasaan pelanggan dimana mereka merasa masalah yang ada berada pada tangan yang baik, kecakapan personil dalam menyampaikan rahasia, memiliki minat atau rasa suka terhadap pelanggan dan memperlihatkan perhatian, dan 5) perhatian (*emphaty*) berarti memberikan perhatian secara individual kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen. *Emphaty* dapat juga berarti keamanan atau perlindungan yaitu adanya kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik dan pemahaman atas kebutuhan pelanggan.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipenuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu :

- 1) denda atau pidana. Denda ini dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Adapun macam denda pidana yaitu : pidana kurungan, dan pidana penjara. 2) sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dapat berupa : sanksi administrasi denda, sanksi administrasi bunga, dan sanksi administrasi kenaikan.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sesuai dengan sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Jatmiko, 2006). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran dengan memenuhi ketentuan antara lain: a) mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, b) mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara., c) memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, c) menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan benar (Muliari dan Setiawan, 2009).

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi : a) wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, b) wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, c) wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan d) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Rahayu, 2010).

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

6. Hubungan Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Studi yang berkaitan dengan perpajakan sudah dilakukan, diantaranya Hendarsyah (2009) yang menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hendarsyah (2009) menguji pada KPP Pratama Mampang Prapatan Jakarta, dengan hasil terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengaruh yang signifikan. Sedangkan Jatmiko (2006) menguji pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sampel wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Hasil penelitian Jatmiko (2006) terdapat pengaruh antara sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

a. Hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Dengan ditingkatkannya kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendarsyah (2009) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak harus mengetahui tentang sanksi-sanksi pajak supaya ia tidak melanggar undang-undang perpajakan dan memenuhi ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendarsyah (2009) dan Basriani (2009) sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka rumusan hipotesis ketiga yaitu :

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. METODE PENELITIAN

a. Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan pada wajib badan pribadi KPP Pratama Bantul. Terdapat 50 orang yang berhasil mengisi kuisisioner berkaitan dengan kualitas layanan, dan perpajakan.

b. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala *likert*, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan : 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu atau netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju (Ghozali, 2009).

c. Variabel Penelitian

Variabel dependen penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Instrumen kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 item pertanyaan yang dikembangkan oleh (Jatmiko, 2006).

Variabel independen pertama yaitu kualitas layanan yaitu layanan kantor pajak dalam memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan kantor pajak memberi layanan yang memuaskan, menanggapi keluhan wajib pajak, mampu, sopan dan dapat dipercaya (Supadmi 2009). Instrumen kualitas pelayanan terdiri dari 17 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Widodo (2009).

Variabel independen kedua yaitu sanksi perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipenuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat mencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen ketiga yang berarti wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Instrumen kesadaran wajib pajak terdiri dari 4 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Jatmiko (2006).

d. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan regresi berganda dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package For Social Science*) dengan memenuhi ketentuan:

1) Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009).

Pengujian ini menggunakan metode *pearson correlation*. Hasil uji validitas karena korelasi antara masing-masing butir pertanyaan memiliki *p value* $\leq 0,05$.

2) Uji Reliabilitas data

Uji reliabilitas alat untuk mengukur suatu kuesioner tingkat konsistensi atau stabil apabila dilakukan berulang kali dengan asumsi pada kondisi yang sama. Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2009).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Profil Responden

Penelitian ini dilakukan dengan 50 responden. Responden penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang melaporkan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Responden yang melaporkan pajak diminta untuk mengisi kuesioner mengenai kepatuhan wajib pajak yang telah dipersiapkan. Untuk memaksimalkan hasil penyebaran kuesioner, peneliti langsung memeriksa kelengkapan pengisian kuesioner, apabila kuesioner tidak lengkap maka responden diminta untuk melengkapi pengisiannya.

Tabel 1 menunjukkan profil responden berdasar jenis kelamin, umur, lama menjadi wajib pajak, dan tingkat pendidikan. Terdapat 33 orang (66%) laki-laki, dan 17 orang (34%) perempuan. Berdasarkan umur menunjukkan bahwa responden yang berumur < 25 tahun, 25 – 35 tahun, 36 – 45 tahun, dan > 45 tahun berturut-turut berjumlah 5 (10%), 17 orang (34%), 14 orang (28%), dan 14 orang (28%). Sedangkan berdasarkan lamanya responden menjadi wajib pajak <1 tahun, 1- 5 tahun, dan > 5 tahun berturut-turut sebesar 11 orang (22%), 22 orang (44%), dan 17 orang (34%). Ditinjau dari latar belakang pendidikan responden menunjukkan pendidikan yang \leq SLTA, Diploma, dan Sarjana yaitu 10 orang (20%), 14 orang (28%), dan 26 orang (52%). Berikut ini data Tabel 1:

Tabel 1. Profil Responden

No	Keterangan		Jumlah	%
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	33	66%
		Perempuan	17	34%
2	Umur	< 25 tahun	5	10%
		25 -35 tahun	17	34%
		36-45 tahun	14	28%
		>45 tahun	14	28%
3	Lama Wajib Pajak	< 1 tahun	11	22%
		1 - 5 tahun	22	44%
		> 5 tahun	17	34%
4	Pendidikan	\leq SLTA	10	20%
		Diploma	14	28%
		Sarjana	25	52%

b. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif Tabel 2 menunjukkan nilai minimum masing-masing variabel kualitas layanan, sanksi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak berturut-turut adalah 51, 9, 11, dan 12. Nilai maksimum berturut-turut adalah 85,15,20, dan 20. Rata-rata (deviasi standar) varianel-variabel tersebut adalah 68,44 (7,58); 12,54 (1,62); 16,16 (2,06); dan 16,60 (1,78). Berikut Tabel 2 Statistik Deskriptif:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kualitas Layanan	51	85	68,44	7,584
Sanksi Perpajakan	9	15	12,54	1,619
Kesadaran Pajak	11	20	16,16	2,064
Kepatuhan Pajak	12	20	16,60	1,784

b. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t pada kualitas pelayanan menunjukkan sebesar 2,537 dengan p value 0,015, karena signifikansi kurang dari 5%, maka secara statistik, hipotesis 1 yaitu terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak didukung. Oleh karena itu kualitas layanan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai t pada sanksi perpajakan menunjukkan sebesar 3,380 dengan p value 0,001 karena signifikansi kurang dari 5%, maka secara statistik, hipotesis 2 yang berbunyi terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak didukung. Oleh karena itu sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan nilai t pada kesadaran pajak menunjukkan sebesar 0,355 dengan p value 0,724 karena signifikansi lebih dari 5%, maka secara statistik, hipotesis 3 yaitu terdapat pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak didukung. Oleh karena itu kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini Tabel 3 yang menunjukkan pengujian hipotesis, sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Kesalahan Standar	Nilai t	Probabilitas
Konstanta	5,039	2,2895	2,205	0,032
Kualitas layanan	0,074	0,029	2,537	0,015
Sanksi Perpajakan	0,470	0,139	3,380	0,001
Kesadaran Perpajakan	0,037	0,103	0,365	0,724
$R^2 = 0,390$				
$F=9,819$				
Sig F= 0,000				

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan nilai $F = 9,819$ dengan p value sebesar 0,000 (signifikan), karena nilai p value pada kesadaran pajak $> 0,05$, dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan pajak. Berdasar Tabel 3 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,390 atau sebesar 39%. Hal ini berarti secara bersama-sama kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 61% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan kualitas layanan dan sanksi perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mempunyai keterbatasan karena responden hanya terbatas pada KPP Pratama Bantul, kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda apabila dilakukan di KPP lain.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Basriani, Ani Wakidah, 2010, *Pengaruh Sanksi Pajak dan Kompleksitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* Cetakan IV, UNDIP, Semarang.
- Hendarsyah, Deni, 2009, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Mampang Prapatan Jakarta)*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho, 2006, *Pengaruh Sikap Wajib pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*, Tesis, Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan edisi revisi 2009*, Andi Yogyakarta
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery, 2009, *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*

Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Rahayu, Siti Kurnia, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu Yogyakarta

Supadmi, Ni Luh, 2009, *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan.* Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Suryadi, 2006, *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*, Jurnal Keuangan Publik.

Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 2009, *Tingkat Kualitas Layanan Internal, Kepuasan Kerja Karyawan, Kualitas Layanan Eksternal Dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Volume 1 No.1, Universitas Sanata Dharma.

**PARADIGM OF ACCOUNTING KNOWLEDGE, GOING CONCERN AND
ASYMMETRY INFORMATION OF ACCOUNTING IN TRADITIONAL MARKET**

Nur Suci IMM

nursuci@perbanas.ac.id

shonhaji76@yahoo.com

Abstract

Paradigm of accounting knowledge was main issue for customer and trader in traditional market, this paradigm should have been understood of them when they make investment decision. Long term objective to gain profit and Seattle company was spurs their soul to make business. Unit analyze of this research are accounting knowledge, internal locus of control and uncertainty of the environment. Three propositions were developed to explain the result of this research. First paradigm of accounting knowledge to ensure their knowledge about accounting transaction that affected to their business, second proposition was going concern that affected their goal and long term object why they make and develop heir business and the latest preposition was asymmetry information to detect uncertainty of macro and micro economic atmosphere. Inflation and climate change could be external factors that significant affected customer and trader to make demand and supply.

Keywords: entrepreneur's personality, accounting information, going concern, investment and uncertainty of environment

1. Pendahuluan

Pedagang pasar tradisional merupakan salah satu komponen UMKM aktif yang terus berupaya melakukan transaksi akuntansi dalam ekonomi nasional. Pertumbuhan pasar tradisional yang baik diharapkan akan mampu menggerakkan sektor riil yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengelolaan usaha dan pencatatan akuntansi yang baik akan sangat mendukung para pelaku pedagang pasar untuk memperoleh laba dan jaringan pelanggan yang loyal. Kondisi tersebut mengarahkan peneliti untuk mengetahui peran pengetahuan akuntansi bagi pedagang pasar dalam meningkatkan omzet usaha dan laba serta memelihara jaringan pelanggan, apakah prinsip going concern yaitu upaya aktif dari pelanggan untuk tetap mempertahankan kehidupan usahanya dalam jangka waktu yang panjang juga menjadi motivasi bagi para pedagang pasar tradisional untuk tetap bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif antar pelaku pasar tradisional dan pasar modern. Ketidakjelasan pemerintah dan asosiasi yang terlibat dalam kompetisi tersebut juga akan berpotensi menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang akan mengganggu kehidupan pasar tradisional secara langsung. Berdasarkan fakta asimetri informasi dalam ketidakpastian lingkungan tersebut dan besarnya keinginan masyarakat yang berwirausaha melalui sektor usaha kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia, peranan investasi dalam perkembangan perusahaan kecil dan menengah, serta peranan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi tersebut, maka perlu dilakukan kajian paradigma pengetahuan akuntansi, going concern dan asimetri informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi pada pelaku usaha di pasar tradisional

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Mengapa pelaku di pasar tradisional lebih banyak menggunakan pengetahuan akuntansi penentuan harga jual dalam pengambilan keputusan?

2. Mengapa prinsip akuntansi going concern membentuk kepribadian wirausaha yang tinggi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
3. Mengapa asimetri informasi dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan cenderung memaksa pelaku usaha kecil dan menengah menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Tinjauan Pustaka

3.1. Usaha Kecil Menengah

Di Indonesia batasan perusahaan kecil dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah atau instansi yang membuat batasan disesuaikan dengan target group mereka. Menurut keputusan presiden RI no 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah :

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

3.2. Pengertian dan Tujuan Investasi

Investasi merupakan pengorbanan dari beberapa nilai sekarang (*certain present value*), untuk nilai masa datang (*future value*) yang belum bisa dijamin kepastiannya (*possibly uncertain*). Investasi juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas penanaman dana saat ini yang diharapkan pengembaliannya di masa datang, untuk mengkompensasi dana yang telah ditanamkan tersebut untuk periode tertentu.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa :

- 1) Investasi menyangkut dua dimensi waktu, yakni masa sekarang dan masa yang akan datang. Pengertian yang dimaksud didasari oleh konsep nilai waktu dari uang (*the time value of money concept*), yang melibatkan unsur ketidakpastian.

Investasi selalu berhubungan dengan tingkat pengembalian berupa keuntungan yang merupakan tujuan dari kegiatan investasi tersebut.

3.3. Peranan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Investasi

Informasi akuntansi merupakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan. Meskipun informasi akuntansi merupakan sebagian kecil dari informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun banyak penelitian yang mengasumsikan bahwa informasi akuntansi adalah satu-satunya informasi yang dapat digunakan oleh manajemen (McKinnon&Bums, 1992 dalam Suhairi, 2006).

3.4. Going Concern

Hany et. al. (2003) mendefinisikan going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. Dengan adanya going concern maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Setiawan (2006) menyatakan bahwa going concern sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya (going concern) secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disiapkan menggunakan dasar going concern kemungkinan akan berbeda secara substansial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan tidak going concern. Laporan keuangan yang disiapkan pada dasar going concern akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu pendek.

Petronela (2004) menyatakan kajian atas going concern dapat dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas, likuiditas ataupun respon investor terhadap perusahaan.

3.5. Asimetri Informasi

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan

dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (prepaper) dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi (user).

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

3.6. Ketidakpastian Lingkungan

Dalam lingkungan yang stabil, proses perencanaan dan pengendalian tidak banyak menghadapi masalah, namun dalam kondisi yang tidak pasti proses perencanaan dan pengendalian akan menjadi lebih sulit dan banyak menghadapi masalah, karena kejadian-kejadian yang akan datang sulit diperkirakan. Ketidakpastian lingkungan dapat terjadi karena beberapa faktor berikut ini (Duncan, 1972 dalam Muslichah, 2001) :

- 1) Kurangnya informasi yang berhubungan dengan faktor-faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan
- 2) Ketidakmampuan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari keputusan-keputusan yang diambil sehingga besarnya kerugian yang diderita akibat kesalahan dalam mengambil keputusan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas
- 3) Kemampuan menentukan kemungkinan-kemungkinan adanya ketidakpastian lingkungan sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam menjalankan fungsi masing-masing unit

3.7 Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi dalam penelitian ini adalah:

- P1 : Pelaku pasar tradisional lebih banyak menggunakan pengetahuan akuntansi penentuan harga jual dalam pengambilan keputusan agar produk dan jasa mereka dapat bersaing.
- P2 : Prinsip going concern membentuk pribadi wirausaha yang akan cenderung menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi.
- P3 : Asimetri informasi dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan cenderung memaksa pelaku usaha kecil dan menengah menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi

4. Metode Penelitian

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, seperti yang dikatakan oleh (Yin, 2000:1) mengatakan bahwa studi kasus itu sendiri merupakan salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang biasanya menggunakan strategi pokok pertanyaan yang berkenaan dengan "how" atau "why".

4.2 Unit Analisis

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, landasan teori dan proposisi penelitian yang ada tersebut, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah : pengetahuan akuntansi, going concern yang dibentuk dengan kepribadian untuk berwirausaha, dan asimetri informasi dalam ketidakpastian lingkungan terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi oleh para pelaku pasar tradisional di Kota Surabaya.

4.3 Data Pengamatan dan Teknik Pengambilan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner yaitu teknik pengumpulan data melalui butir-butir pernyataan yang diajukan secara tertulis kepada pemilik dan pelaku usaha kecil dan menengah pada pasar tradisional di wilayah Kota Surabaya. Teknik Pengambilan data berdasarkan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut. Adapun kriteria sampel yang diambil antara lain :

Sesuai dengan kriteria UU RI nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan menengah, yaitu untuk perusahaan kecil memiliki modal antara Rp 0,- sampai Rp 200.000.000,- dan untuk perusahaan menengah memiliki modal antara Rp 200.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-

4.4 Keterkaitan Data dengan Proposisi Penelitian

Keterkaitan data dengan preposisi merupakan instrument yang sangat diperlukan untuk menentukan hasil dari penelitian ini, oleh karena itu maka peneliti akan melakukan keterkaitan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan responden pada masing-masing proposisi penelitian.

4.5 Kriteria Intepretasi Temuan

Kriteia intepretasi temuan didasarkan pada hasil kuisiner yang dibagikan kepada responden. Instrumen pernyataan pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Suhairi, 2004 dan dilakukan penyesuaian penambahan pernyataan oleh peneliti pada hal-hal yang sesuai dengan karakteristik responden.

5. Hasil dan Pembahasan

Penyebaran Kuisisioner

Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 40 kuesioner yang disebar tidak semuanya kembali. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya responden menolak untuk mengisi karena mereka menganggap bahwa penggalian informasi melalui kuisisioner penelitian tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka (pelaku pedagang pasar tradisional). Selain itu, dari 36 eksemplar kuesioner yang kembali, 35 eksemplar yang diolah karena 1 eksemplar lainnya tidak sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan dan tidak terisi dengan baik dan lengkap

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam hal ini bertujuan untuk menggambarkan jawaban responden untuk masing-masing unit analisis yang diteliti.

1. Unit Analisis Pengetahuan Akuntansi

Unit analisis pengetahuan akuntansi mengukur tentang pengetahuan responden mengenai fakta transaksi bisnis dari usahanya. Pengetahuan akuntansi ini diukur dengan memprosentasikan responden yang menjawab pilihan jawaban dengan benar, responden yang menjawab pilihan jawaban salah dan responden yang menjawab pilihan jawaban sama sekali tidak mengetahui. Berikut ini adalah hasil jawaban 35 responden terhadap unit analisis pengetahuan akuntansi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Jika jawaban responden benar maka dapat diartikan responden sudah memiliki pengetahuan akuntansi yang baik
2. Jika jawaban responden salah maka dapat diartikan responden memiliki pengetahuan akuntansi.
3. Jika jawaban responden tidak tahu maka dapat diartikan responden belum memiliki pengetahuan akuntansi.

Tabel 5.1
Frekuensi Jawaban Responden Unit Analisis Pengetahuan Akuntansi

Pengetahuan akuntansi	Responden yang sudah memiliki pengetahuan akuntansi dengan baik	Responden yang memiliki pengetahuan akuntansi	Responden yang belum memiliki pengetahuan akuntansi
Pengetahuan terhadap laporan keuangan	48%	32%	20%
Pengetahuan jenis aktiva	50%	35%	15%
Pengetahuan elemen penentuan harga pokok penjualan	45%	32%	23%
Penentuan harga jual	80%	17%	3%

Sumber : data primer, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden sudah memiliki pengetahuan akuntansi yang baik tentang pengetahuan jenis aktiva seperti aktiva lancar yang berupa kas dan simpanan mereka di bank dalam bentuk tabungan dan deposito, piutang yang masih belum jatuh tempo terhadap pelanggan mereka dan persediaan barang dagangan yang mereka miliki dan siap untuk dijual. Pengetahuan mereka untuk aktiva tetap juga sangat baik mereka dapat menyebutkan bahwa semua aktiva yang mereka miliki dan digunakan untuk operasional perusahaan dalam jangka panjang adalah jenis aktiva tetap yang mereka miliki. Elemen biaya penentuan harga pokok penjualan yang diinformasikan oleh responden adalah elemen biaya transportasi pembelian barang dagangan ke pasar induk maupun ke toko yang menjadi vendor penyediaan barang dagangan mereka, selain itu pengetahuan mereka terhadap potongan pembelian yang kadangkala mereka berikan kepada para pelanggan mereka yang loyal juga dapat diidentifikasi dengan baik oleh responden sebagai salah satu elemen biaya penentuan harga pokok penjualan. Informasi lain yang dapat dijelaskan adalah bahwa 80% responden memiliki pengetahuan yang dominan tentang penentuan harga jual, artinya responden sangat mudah untuk menentukan berapa harga jual barang dagangan yang mereka miliki untuk memperoleh profit yang mereka inginkan.

2. Unit Analisis Paradigma Going Concern yang Membentuk Kepribadian Wirausaha

Tabel 5.2

Frekuensi Jawaban Responden Unit Analisis Paradigma Going Concern yang Membentuk Kepribadian Wirausaha.

Sifat Kepribadian Usahawan	Tingkat Nilai	Internal Locus dan keinginan berprestasi
Apabila saya yakin terhadap kemampuan dalam melaksanakan usaha maka saya laksanakan untuk jangka panjang (going concern)	5,49	Tinggi
Pelaksanaan suatu pekerjaan sangat tergantung kepada kemampuan saya pribadi dan pengaruh keberuntungan adalah sangat kecil sekali.	5,25	Tinggi
Apa yang terjadi pada saya, disebabkan oleh perilaku saya sendiri.	5,49	Tinggi
Kejadian yang tidak menguntungkan dalam kehidupan saya sampai saat ini sebagian disebabkan oleh nasib buruk.	2,71	Cukup Rendah
Untuk mendapatkan kesuksesan usaha, maka saya harus bertekad untuk memulai usaha untuk jangka waktu yang panjang.	4,44	Cukup tinggi
Kadang-kadang saya tidak mampu mengontrol kehidupan saya.	3,87	Sedang

Kepribadian wirausaha mengukur seberapa besar *internal locus of control (LoC)* dan keinginan berprestasi seorang wirausaha (pemilik/manajer) dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya termasuk dalam menjalankan usaha yang dipimpinya. Kepribadian wirausaha ini diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 7.

Adapun kriteria penilaian variabel kepribadian adalah sebagai berikut :

- b) $0 \leq x \leq 1$: *Internal LoC* dan keinginan berprestasi sangat rendah
- c) $1 < x \leq 2$: *Internal LoC* dan keinginan berprestasi rendah
- d) $2 < x \leq 3$: *Internal LoC* dan keinginan berprestasi cukup rendah
- e) $3 < x \leq 4$: *Internal LoC* dan keinginan berprestasi sedang
- f) $4 < x \leq 5$: *Internal LoC* dan keinginan berprestasi cukup tinggi
- g) $5 < x \leq 6$: *Internal LoC* dan keinginan berprestasi tinggi
- h) $6 < x \leq 7$: *Internal LoC* dan keinginan berprestasi sangat tinggi

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden memiliki *internal locus of control* yang tinggi dan keinginan berprestasi yang tinggi

3. Unit Analisis Paradigma Asimetri Informasi dalam Ketidakpastian Lingkungan

Tabel 5.3

Frekuensi Jawaban Responden Unit Analisis Asimetri Informasi yang Mempengaruhi Ketidak Pastian Lingkungan.

Kondisi lingkungan bisnis	Kemampuan Memprediksi
Penyediaan bahan baku dan komponennya	
a. Perubahan harga bahan baku	4.78
b. Perubahan kualitas bahan baku	4.56
c. Memperkenalkan bahan baku baru	3.87
Tindakan dari konsumen	
a. Permintaan terhadap produk yang ada	3.86
b. Permintaan terhadap produk baru	4.23
Tindakan dari pesaing	
a. Perubahan harga produk	4.76
b. Permintaan terhadap produk baru	4,55
c. Perubahan kualitas produk	4,45
d. Memperkenalkan produk baru	3,65
Pasar uang	
a. Perubahan tingkat bunga	4,34
b. Ketersediaan kredit bank	4,56
c. Perubahan nilai tukar rupiah	4,66
Perubahan kinerja bisnis	
a. Harga jual produk	4,32
b. Peningkatan volume produksi	4,72
c. Peningkatan laba	4,32
d. Metode pemasaran	4,76
e. Kebijakan tenaga kerja	4,45

Unit analisis ketidakpastian lingkungan mengukur kemampuan responden dalam memprediksi situasi yang ada. Ketidakpastian lingkungan ini diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 7. Semakin sulit responden memprediksi situasi maka semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan yang ada dan sebaliknya. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan responden dalam memprediksi penyediaan bahan baku dan komponennya mudah dengan nilai rata-rata 4,43 maka pengaruh ketidak pastian lingkungan tinggi. kemampuan responden dalam memprediksi tindakan dari konsumennya adalah mudah dengan nilai rata-rata 4,05 maka pengaruh ketidak pastian lingkungan juga cukup tinggi. kemampuan responden dalam memprediksi tindakan dari pesaingannya cukup sulit dengan nilai rata-rata 4,35 maka pengaruh ketidak pastian lingkungan cukup tinggi. kemampuan responden dalam memprediksi pasar uang sulit dengan nilai rata-rata 3,39 maka pengaruh ketidak pastian lingkungan rendah dan kemampuan responden dalam memprediksi perubahan kinerja bisnis adalah sulit dengan nilai rata-rata 4,51 maka pengaruh ketidak pastian lingkungan cukup tinggi.

Pembahasan

Analisa deskriptif pada proposisi pertama pada penelitian ini adalah "Pelaku UKM lebih banyak menggunakan Pengetahuan penentuan harga jual dalam pengambilan keputusan agar produk dan jasa mereka dapat bersaing" yang telah dilakukan, diketahui bahwa 73% responden memiliki pengetahuan yang dominan tentang penentuan harga jual. Hal ini mendukung dan membuktikan proposisi pertama, Karena pada kondisi asimetri informasi yang memicu sensitivitas perubahan harga persediaan barang dagangan di pasar

tradisional, maka para pelaku pengusaha di pasar tradisional lebih banyak berokus bagaimana barang dan jasa mereka laku terjual dengan harga yang bersaing, berapapun margin laba yang diperoleh namun yang paling penting adalah terjual. Semakin banyak barang dan jasa yang terjual maka menurut mereka akan semakin kecil biaya potensial yang timbul seperti: biaya kenaikan harga bahan baku, biaya penyusutan dan biaya modifikasi produk bagi produk yang lama belum terjual. Meskipun demikian responden sangat lemah sekali dalam perhitungan dan analisis titik impas (*break event point*). Hal ini dapat dipahami karena responden adalah para pelaku usaha kecil dan menengah yang belum memiliki divisi atau bagian produksi dan akuntansi yang terpisah, semua proses produksi dari mulai penyediaan bahan baku sampai penjualan barang dagangan dilakukan sendiri oleh para pemilik pada hal informasi *break event point* lebih banyak dibutuhkan dan diketahui oleh dua bagian tersebut. Oleh karena itu, walaupun pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh wirausaha (pemilik/manajer) itu tinggi, namun pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuan akuntansi secara umum dan sederhana dan tidak diimplementasikan dalam usahanya secara menyeluruh. Selain itu, informasi akuntansi yang terdapat di dalam neraca, laporan R/L, laporan arus kas, maupun anggaran hanya digunakan secara parsial dalam pengambilan keputusan investasi (tidak menyeluruh), karena kebanyakan UKM tidak membuat laporan keuangan secara lengkap, mereka hanya mempunyai catatan akuntansi berupa buku kas, buku piutang, buku hutang, buku pendapatan dan pengeluaran. Penelitian ini mendukung penelitian (Suhiri;2004) yang mengemukakan bahwa nilai kepribadian dan pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi cara mereka berfikir dan menilai lingkungan usaha yang dihadapi. Penemuan ini juga sejalan dengan rumusan dari beberapa penelitian terdahulu, khususnya terhadap usaha kecil dan menengah, bahwa penggunaan informasi akuntansi akan mempengaruhi kesuksesan perusahaan (McMahon, 2001; Acar, 1993). Beberapa penelitian yang menggunakan analisis deskriptif juga membuat rumusan yang sama, di mana informasi akuntansi merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan.

Rata-rata responden memiliki *internal locus of control* yang tinggi dan keinginan berwirausaha yang tinggi, hal ini mendukung proposisi kedua yang menyatakan bahwa " Prinsip going concern membentuk pribadi wirausaha yang akan cenderung menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi." Hal ini terjadi karena seorang wirausaha (pemilik/manajer) yang mempunyai *internal locus of control* dan keinginan berprestasi yang tinggi akan cenderung terus berupaya secara aktif untuk menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang (*going concern*), termasuk dalam penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Jika pelaku UMKM membuat dan menyajikan laporan keuangan yang disiapkan menggunakan dasar going concern kemungkinan akan berbeda secara substansial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan tidak going concern. Laporan keuangan yang disiapkan pada dasar going concern akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan bertahan untuk jangka panjang. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan yang mendasarkan diri pada prinsip going concern adalah (1) menjaga stabilitas kas dan meminimalkan piutang dagang (2) upaya menyisihkan sebagian pendapatan untuk penambahan modal (3) memproduksi dengan memperhatikan tingkat permintaan pasar dan selera pasar. (4) meminimalkan jumlah persediaan yang disimpan di gudang. Hal ini sangat mendukung pendapat Petronela (2004) yang menyatakan kajian atas going concern dapat dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas, likuiditas ataupun respon pemilik modal serta lemag pemberi pinjaman terhadap pertumbuhan perusahaan. Informasi akuntansi merupakan salah satu informasi utama yang akan mereka gunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Pelaku UMKM menggunakan informasi laporan laba rugi dan arus kas dalam pengambilan keputusan penentuan harga jual. Hal ini mereka lakukan karena keinginan dari wirausaha tersebut untuk dapat meningkatkan pendapatan yang ada.

Pada proposisi ketiga dapat diketahui pula bahwa " Asimetri informasi dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan cenderung memaksa pelaku usaha kecil dan

menengah menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi”. Kemampuan responden dalam memprediksi penyediaan bahan baku dan komponennya cukup sulit maka pengaruh ketidak pastian lingkungan cukup tinggi, hal ini terjadi karena selama periode penelitian responden sulit memprediksi penyediaan baha baku dan komponennya seperti cabe keriting dan cabe merah, perubahan harga bahan baku menjadi tidak menentu terpengaruh dengan meningkatnya biaya transportasi, akses jalan yang menuju lokasi UMKM yang terhambat infrastruktur yang rusak, musim kemarau yang berkepanjangan dan musim panca roba yang tidak menentu. Asimetri informasi dalam ketidak pastian lingkungan tersebut juga menyebabkan perubahan kualitas bahan baku karena pelaku pedagang pasar tradisional berusaha menawarkan harga produk yang lebih murah untuk memperoleh konsumen regional yang relatif tidak terpengaruh dengan ketidak pastian lingkungan, dengan alasan ini pula maka pelaku pasar tradisional memiliki kemampuan yang rendah dalam memprediksi untuk memperkenalkan bahan baku baru. Paradigma asimetri akuntansi dalam memprediksi ketidak pasian lingkungan ini juga memicu para pelaku pedagang pasar tradisional untuk cenderung melakukan kegiatan yang dilakukan tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang modal maupun pemberi pinjaman. Sehingga pelaku UMKM dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang modal dan pemberi pinjaman yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan seperti penggunaan kas untuk menutupi kebutuhan hidup bahkan membeli barang konsumtif yang sebenarnya dalam kontrak dengan pemilik modal maupun pemberi pinjaman adalah tambahan modala atau kas tersebut untuk memperluas usaha. Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara principal (pemilik modal dan pemberi pinjaman dengan pelaku UMKM untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri.

6. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh wirausaha (pemilik/manajer) itu tinggi, namun pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuan akuntansi secara umum dan sederhana dan tidak diimplementasikan dalam usahanya secara menyeluruh. Seorang wirausaha yang menerapkan prinsip akuntansi going concern akan cenderung mempunyai *internal locus of control* dan keinginan berprestasi yang tinggi sehingga akan cenderung terus berupaya secara aktif untuk mensukseskan usahanya, termasuk dalam penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Asimetri informasi dalam ketidak pastian lingkungan usaha dan iklim yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas barang dagangan sangat mempengaruhi pedagang pasar dalam menentukan harga jual barang dagangannya.

7. Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan antara unit analisis *locus of control* yang tidak hanya terbatas pada aspek internal, namun juga aspek eksternal seperti dukungan pemerintah baik sarana dan prasarana yang memadai, sebagai akibat masuknya pasar mini market modern seperti alfamart dan indomaret secara masal ke beberapa wilayah kota surabaya.

Daftar Pustaka

- Adnan, Muhammad Akhyar, dan Anggra Septriningsari. 2004. “Peranan Informasi Akuntansi dalam Keberhasilan Perusahaan (Studi pada Usaha Kecil dan Menengah di Blitar)”. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol 2 No 1. pp 25-44
- Anthony, Robert N; Govindarajan, Vijay: “*Management Control Systems*” 9th edition, Mc Graw Hill. 2002
- Eisenhardt, Kathleem. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of management Review*, 14, hal 57-74

- Fachrunnisa, Olivia. 2005. "Hubungan Antara Kepribadian (*Personality*), Orientasi Tujuan (*Goal Orientation*), Tingkatan tujuan (*Goal Level*), dan Kinerja Individu". Kajian Bisnis. Vol 13 No3. pp 302-314
- K. Yin, Robert, 2006. "Penelitian Studi Kasus" edisi terjemahan Jakarta.
- Murniati. 2002. "Investigasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Perusahaan Kecil dan Menengah". Simposium Nasional Akuntansi, V. Semarang
- Mudjiarto, dan Aliaras Wahid. 2006. Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan. Jakarta. Graha Ilmu
- Muslichah. 2002. "Interaksi Antara Independensi dan Desentralisasi Serta Pengaruhnya Terhadap Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen". Simposium Nasional Akuntansi, V. Semarang
- Olivia. 2005. "Analisis Pengaruh *Locus of Control*, Orientasi Tujuan Pembelajaran dan Lingkungan Kerja Terhadap *Self Efficacy* dan Transfer Pelatihan". Kajian Bisnis. Vol 13
- Petronela, Thio. (2004). "Perkembangan Going Concern Perusahaan Dalam Pemberian Opini Audit." Jurnal Balance. 47-55.
- Scott, William R. (2000). *Financial Accounting Theory*. Second edition. Canada: Prentice Hall.
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta. Salemba Empat
- Suhairi, Sofri Yahya, Hasna Haron. 2004. "Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Kepribadian terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Investasi". Simposium Nasional Akuntansi, VII. Denpasar
- Widjaja Tunggal, Amin, "Akuntansi untuk Koperasi" Rineka Cipta, 1995
- Watts, Ross L. (2003). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. *Accounting Horizon*, Vol. 17: 207-221.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Keputusan Presiden RI no 99 tahun 1998 tentang Usaha Kecil dan Menengah (www.depkop.go.id)
- UU RI No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian Undang-Undang Republik Indonesia
- UU RI No. 9 tahun 1995 tentang Industri kecil (www.depkop.go.id)

ANALISIS PENGARUH RASIO LEVERAGE KEUANGAN DAN PANGSA PASAR TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN TEXTILE DAN GARMENT YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA

Mei Farida
Endah Susilowati

endah.susilowati64@yahoo.co.id

Abstract

The rapid industrial development has implications on competition among firms in the industry. Companies are required to maintain or even improve its performance to remain gradual in times of crisis and competition is growing. A company should be required to improve performance and profitability that is used as a going concern. To predict earnings growth required financial statement analysis financial ratios calculated from the financial statements. Financial ratios related to company performance and assist users in taking decisions, the financial ratios themselves useful to the users of financial statements. The purpose of this study is to empirically examine and analyze and find out whether the financial leverage ratio and market share effect on Return On Assets and Return On Equity securities listed on Bursa Indonesi.

This study uses secondary data obtained from financial statements of textile and garment companies that went public the period 2006-2008 with the independent variables, financial leverage and market share as independent variables, and the views of company performance and Return On Asset Return On Equity as a dependent variable. Analysis technique is used in this study multiple linear regression analysis. .

The result showed that (1) leverage ratio negatively affect the return on assets, while the market has no effect on Return On Assets. (2) multiple linear regression model on Return On Equity variable, indicated that there were discrepancies leverage ratio and market share in influencing the Return On Equity.
KEYWORDS: Financial Leverage Ratio, Market Share, Company Performance, Return On Assets, Return On Equity

PENDAHULUAN

Perkembangan industri manufaktur memicu perkembangan sektor industri jasa dan perdagangan, perkembangan industri yang pesat membawa implikasi pada persaingan antar perusahaan dalam industri. Perusahaan dituntut untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dalam masa krisis maupun persaingan yang semakin ketat (Martono, 2002).

Kelangsungan hidup perusahaan merupakan ukuran kinerja perusahaan sebagai lawan dari kebangkrutan perusahaan, tapi studi empiris tentang diskriminasi antara kedua titik ekstrim tersebut di Indonesia tidak mudah diterapkan karena kesulitan dalam memperoleh data perusahaan yang telah bangkrut. Pendekatan lain perlu dikembangkan sebagai proksi dari kinerja perusahaan. Searby (1975) mengemukakan bahwa kegagalan perusahaan untuk mempertahankan tingkat laba investasi di atas biaya modal dapat membawa perusahaan pada kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Oleh karena itu profitabilitas merupakan proksi yang relevan untuk memprediksikan kelangsungan hidup perusahaan (Hermendito, 2002).

Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh *Leverage* keuangan dan pangsa pasar. Pertama *Leverage* keuangan yang digunakan mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau modal yang berasal dari kreditur. Pengaruh *Leverage* keuangan terhadap kinerja keuangan adalah semakin besar nilai rasio yang dihadapi perusahaan dimasa yang akan datang apabila perusahaan tidak bisa menurunkan tingkat rasio yang ada

maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan terhadap kinerja perusahaan. Kedua Pangsa Pasar untuk mengukur semakin besar pangsa pasar atau semakin tinggi penjualan perusahaan dalam industri berarti semakin tinggi penerimaan perusahaan yang merupakan komponen penting dalam perhitungan laba perusahaan. Dengan demikian pangsa pasar meningkat, berarti perusahaan mengungguli pesaingnya, jika menurun perusahaan kalah dari pesaingnya (Philip Kotler, 2001 :970).

Alasannya dipilihnya perusahaan tekstil dan garment sebagai sampel dikarenakan perusahaan tersebut merasakan efek negatif dari krisis keuangan global saat ini. Efek negatif ini menyebabkan penurunan dalam permintaan ekspor dari negara lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sulitnya tambahan likuiditas modal kerja sehingga berdampak pada penurunan aktivitas perdagangan di sektor industri (www.Inaplas.org, 2008).

Perumusan Masalah

1. Apakah rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar berpengaruh terhadap kinerja perusahaan *Return On Asset (ROA)* pada perusahaan textile dan garment yang *go public* di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar berpengaruh terhadap kinerja perusahaan *Return On Equity (ROE)* pada perusahaan textile dan garment yang *go public* di Bursa Efek Indonesia ?

TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Leverage

Menurut Sutrisno (2001 : 248-249) Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai *leverage* atau *leverage* faktornya = 0 artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Semakin rendah *leverage* faktor, perusahaan mempunyai resiko yang kecil bila kondisi ekonomi merosot.

Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa neraca, rugi-laba, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan deviden dimasa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut (Weston dan Brigham, 1993)

Menurut Machfoedz (1999) dalam jurnal Merkusiwati (2007), bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan efisiensi, sedangkan efisiensi bisa diartikan rasio perbandingan antara masukan dan keluaran. Dengan pengeluaran biaya tertentu diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal atau dengan hasil tertentu diharapkan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Mahfoedz (1999) juga menerangkan bahwa kinerja keuangan perusahaan diukur dengan efisiensinya diprosikan dengan beberapa keuangan.

Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan

Leverage merupakan konsep yang erat hubungannya, karena jumlah *leverage* pada perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Gittman, *leverage* adalah “*result the use of fixed cost asset or fund to manify return to the firm owners*” yang berarti hasil dari penggunaan asset atau dana dengan biaya tetap untuk memperbesar keuntungan bagi perusahaan.

Penggunaan *leverage* penting dalam mengendalikan resiko bisnis perusahaan. Jika *leverage* meningkat maka tingkat pengembalian (*return*) dan resiko (*risk*) perusahaan akan meningkat, sebaliknya penurunan *leverage* perusahaan akan mengakibatkan menurunnya tingkat pengembalian dan resiko perusahaan (Gittman, 2003: 489). Pengaruh ini sangat penting bagi perusahaan untuk memahami konsep (mengukur dan mengevaluasi) *leverage* dalam pengambilan keputusan dalam kinerja perusahaan.

Pengaruh *leverage* keuangan terhadap kinerja perusahaan dapat bersifat negatif dan positif. Dengan adanya perbedaan preferensi muncullah beberapa teori tentang *leverage*. Teori Miller dan Modigliani (MM) menyatakan bahwa *leverage* keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan didasarkan pada argumentasi bahwa penggunaan hutang akan mengurangi laba yang terkena pajak, sehingga dipandang lebih menguntungkan perusahaan karena terdapat penghematan pajak (mempertimbangkan pajak perusahaan). Hasil penelitian ini terbukti tidak mendukung teori MM bahwa perusahaan dengan *leverage* keuangan lebih baik daripada perusahaan tanpa *leverage* keuangan (atau dengan *leverage* keuangan lebih rendah) (Martono, 2002: 134).

Pangsa Pasar

Indikator posisi relatif perusahaan dalam persaingan industri dapat diukur dari pangsa pasar (*market share*). Semakin tinggi pangsa pasar mencerminkan semakin tinggi kekuatan perusahaan dalam persaingan pasar. Analisis pangsa pasar mencerminkan kinerja pemasaran yang dikaitkan dengan posisi persaingan dalam suatu industri.

Porter (1985) mengemukakan bahwa terdapat lima aspek penting yang berguna dalam memetakan posisi perusahaan dalam persaingan industri, yakni: (a) ancaman pendatang baru, dapat diukur dari *capital intensiveness* karena dapat mencerminkan hambatan masuk industri (Comanor dan Wilson, 1967; Porter, 1967; Beard dan Dess, 1979; Hermeindito, 1997a; 1997b; dan 2000). Semakin tinggi *capital intensiveness* semakin besar modal yang dibutuhkan untuk setiap unit penjualan yang diperoleh, (b) ancaman produk pengganti, (c) pesaing yang ada saat ini, (d) kekuatan tawar menawar dengan pembeli. Ketiga kategori antara (b), (c), (d) mencerminkan bahwa kemampuan perusahaan dalam bersaing dalam pangsa pasar untuk merebutkan pembeli. *Market share* mencerminkan ukuran kinerjanya perusahaan secara relatif dibandingkan industri dalam bersaing pada sisi *forward market*. Kekuatan tawar menawar dengan pemasok (e) mencerminkan persaingan antar perusahaan dalam merebutkan input bahan baku (Hermeindito, 1999, 2000).

Pengaruh Pangsa Pasar Terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut Buzzel, Gale dan Sultan (1975) mengemukakan tiga argumentasi, yaitu (1) *Economic of scale*. Pada umumnya tingkat keuntungan yang tinggi yang diperoleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang besar adalah karena perusahaan mampu mencapai skala produksi yang ekonomis atau efisien dibandingkan perusahaan yang memiliki pangsa pasar lebih rendah. (2) *Market power*. Para ahli ekonomi berargumentasi bahwa perusahaan dengan pangsa pasar cenderung akan memperoleh laba yang tinggi dari pesaing yang lebih kecil karena perusahaan memiliki kekuatan pasar yang lebih jelas. (3) *Quality of management*. Penjelasan paling sederhana mengenai hubungan pangsa pasar dengan probabilitas adalah bahwa keduanya mencerminkan kualitas manajemen. Manajer yang baik akan mampu meningkatkan pangsa pasar, kemampuan dalam mengendalikan biaya, dan mendorong produktivitas karyawan secara optimal. Lebih lanjut setelah perusahaan mencapai posisi leader, maka memudahkan perusahaan mengembangkan bidang baru untuk mempertahankan kepemimpinannya dibandingkan yang lain.

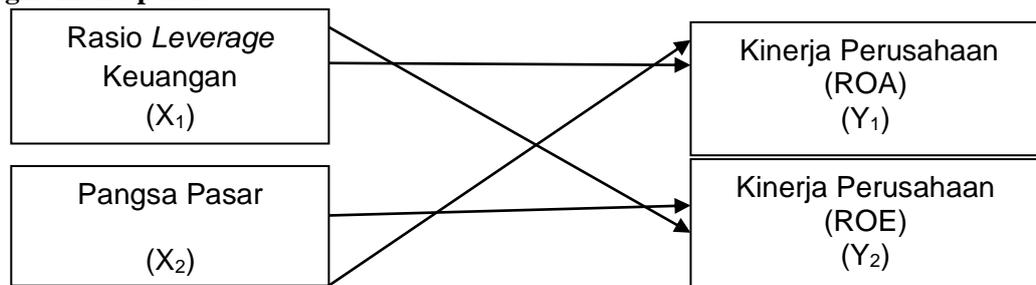
Teori pendekatan ekologi populasi (*population ecology theory*), menjelaskan bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan dimana perusahaan berada (Child, 1997). Model pendekatan ini membawa implikasi bahwa lingkungan eksternal mempunyai pengaruh langsung (*direct effect*) terhadap kinerja perusahaan tanpa memandang pilihan strategi yang dijalankan perusahaan (Wiklund, 1999).

Teori kontinjensi (*contingency theory*) menyatakan bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan (Child, 1997; Lee dan Miller, 1996). Teori kontinjensi juga bermakna bagaimana rencana strategi mampu memenuhi tuntutan lingkungan, yang mana jika tidak tercipta keselarasan antara rencana strategi dengan lingkungan bisnis eksternal dapat berakibat turunnya kinerja sehingga munculnya krisis organisasi atau perusahaan (Elenkov, 1997). Keselarasan antara

strategi organisasi dengan lingkungan eksternalnya merupakan fokus kajian manajemen strategik. Pendekatan dengan menggunakan teori kontijensi ini mendapat dukungan dari banyak pakar. Bukti empiris yang ada pada umumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil menyelaraskan strateginya dengan lingkungan eksternal yang dihadapinya akan memperlihatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang kurang berhasil menyelaraskan strateginya (Beal, 200; Elenkov, 1997).

Ukuran pangsa pasar lebih relevan dengan pengukuran kinerja jangka panjang. Hasil ini mendukung penelitian (Gale, 1972), dimana diperoleh bukti bahwa dalam pertumbuhan yang sangat cepat (fluktuasi yang tinggi), besarnya pangsa pasar cenderung tidak signifikan. Pangsa pasar walaupun berpengaruh positif tetapi hasilnya tidak signifikan. Artinya terdapat tingkat resiko yang tinggi bila manajemen ingin melakukan ekspansi pasar pangsa secara agresif.

Kerangka Konseptual



Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1:“Bahwa rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar berpengaruh terhadap kinerja perusahaan *Return On Asset (ROA)* pada perusahaan textile dan garment yang *go public* di Bursa Efek Indonesia”.

H2:“Bahwa rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar berpengaruh terhadap kinerja perusahaan *Return On Equity (ROE)* pada perusahaan textile dan garment yang *go public* di Bursa Efek Indonesia.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi: Variabel rasio leverage dan pangsa pasar, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja perusahaan, yang diukur dengan rasio ROA dan ROE

Teknik Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam jenis Textile dan Garment di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2006 sampai 2008 sebanyak 10 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut: Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam jenis Textile dan Garment di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perusahaan yang telah mempublicasikan laporan keuangannya secara kontinyu selama tahun 2006 sampai 2008 di Bursa Efek Indonesia. Sehingga sampel yang digunakan sebanyak 8 perusahaan selama 2006 sampai 2008.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_i$$

Keterangan :

Y = Kinerja Perusahaan (Y₁=ROA dan Y₂= ROE)

- α = Bilangan konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi Faktor
 e_i = Kesalahan Pengganggu
 X_1 = Rasio *leverage* keuangan tertimbang
 X_2 = Pangsa Pasar

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian telah memenuhi asumsi klasik yaitu tidak terdapat autokorelasi, multikolinieritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah ringkasan hasil analisis regresi linear berganda:

Variabel Bebas	Koef. Regresi	Stn.Error	t hitung	Sig	r parsial
Rasio Leverage (X_1)	-0,197	0.043	-4,533	0.000	0.642
Pangsa Pasar (X_2)	0.000	0.000	-0.283	0.781	0.027
Variabel Terikat (Y_1) : Kinerja keuangan (ROA) Konstanta : 11.697 Koefisien korelasi (R) : 0.743 Koefisien Determinasi (R^2) : 0.552 F hitung : 10.452 F. Signifikansi : 0.001					

Tabel 1: Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Rasio *Leverage* dan Pangsa Pasar Terhadap *Return On Assets* (ROA)

Sumber: Data diolah

$$\text{Model Refresi Linear Berganda: } Y_1 = 11,697 - 0,197 X_1 + 0,00011 X_2$$

Interpretasi Model Regresi

Konstanta (α) sebesar 11,697 menunjukkan besarnya *Return On Assets* (Y_1) jika rasio *leverage* (X_1) dan pangsa pasar (X_2) adalah konstan.

Koefisien regresi variabel rasio *leverage* (X_1) mempunyai hubungan tidak searah yaitu sebesar -0,197 yang artinya jika rasio *leverage* (X_1) naik satu satuan, maka *Return On Assets* (Y_1) akan turun sebesar 0,197 satuan begitu juga sebaliknya dan variabel lainnya dianggap konstan.

Koefisien regresi variabel pangsa pasar (X_2) mempunyai hubungan searah yaitu sebesar 0,00011 yang artinya jika pangsa pasar (X_2) naik satu satuan, maka *Return On Assets* (Y_1) akan naik sebesar 0,00011 satuan begitu juga sebaliknya dan variabel lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 10,452 dengan tingkat signifikan 0,001 kurang dari 5%, hal ini berarti model regresi yang dihasilkan adalah cocok untuk mengetahui pengaruh rasio *leverage* (X_1) dan pangsa pasar (X_2) terhadap ROA (Y_1), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-1 penelitian ini yang menyatakan bahwa rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ditinjau dari *Return On Assets* (ROA), teruji kebenarannya.

Nilai R^2 sebesar 0,552 yang berarti bahwa rasio *leverage* (X_1) dan pangsa pasar (X_2) hanya mampu menjelaskan variabel *Return On Assets* (Y_1) sebesar 55,2% dan sisanya sebesar 44,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Nilai korelasi (R) sebesar 0,743 menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara rasio *leverage* (X_1) dan pangsa pasar (X_2) dengan *Return On Assets* (Y_1) yaitu sebesar 74,3%.

Hasil uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh rasio *leverage* (X_1) dan pangsa pasar (X_2) secara parsial terhadap *Return On Assets* (Y_1) menunjukkan bahwa :

Nilai t_{hitung} pada variabel rasio *leverage* (X_1) sebesar -4,533 dan nilai signifikan sebesar 0,000.

maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti rasio *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Assets*. Untuk variabel pangsa pasar (X_2) sebesar -0,283 dan nilai signifikan sebesar 0,781 lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti pangsa pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Cryrilis Martono (2002) yang menyatakan bahwa ROA industri, rasio *leverage* keuangan tertimbang, rasio intensitas modal tertimbang, dan pangsa pasar terhadap ROA perusahaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Miller dan Modigliani (MM) yang menyatakan bahwa *leverage* keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan didasarkan pada argumentasi bahwa penggunaan hutang akan mengurangi laba yang terkena pajak, sehingga dipandang lebih menguntungkan perusahaan karena terdapat penghematan pajak (mempertimbangkan pajak perusahaan).

Berpengaruh negatifnya rasio *leverage* terhadap *Return On Assets* menunjukkan bahwa terdapat fenomena *overload* penggunaan hutang yang meningkatkan risiko *technical insolvency* (ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo). Kebijakan manajer dalam menentukan *leverage* terlalu besar justru tidak menguntungkan bagi perusahaan, oleh karena itu manajer perlu melakukan kebijakan untuk memperbaiki rasio *leverage* atau tingkat struktur modalnya agar tidak membawa efek yang membahayakan perusahaan.

Secara parsial variabel pangsa pasar tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* yang berarti pangsa pasar tidak memberikan kontribusi nyata terhadap *Return On Assets*. Hasil ini mendukung penelitian (Gale, 1972), dimana diperoleh bukti bahwa dalam pertumbuhan yang sangat cepat (fluktuasinya yang tinggi), besarnya pangsa pasar cenderung tidak signifikan. Walaupun pangsa pasar berpengaruh positif tetapi hasilnya tidak signifikan. Artinya terdapat tingkat risiko yang tinggi bila manajemen ingin melakukan ekspansi pangsa pasar secara agresif.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Cryrilis Martono (2002) yang menyatakan bahwa ROA industri, rasio *leverage* keuangan tertimbang, rasio intensitas modal tertimbang, dan pangsa pasar terhadap ROA perusahaan. Begitu juga dengan Teori kontinjensi (*contingency theory*) menyatakan bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan (Child, 1997; Lee dan Miller, 1996). Teori kontinjensi juga bermakna bagaimana rencana strategi mampu memenuhi tuntutan lingkungan, yang mana jika tidak tercipta keselarasan antara rencana strategi dengan lingkungan bisnis eksternal dapat berakibat turunnya kinerja sehingga munculnya krisis organisasi atau perusahaan (Elenkov, 1997). Keselarasan antara strategi organisasi dengan lingkungan eksternalnya merupakan fokus kajian manajemen strategik. Pendekatan dengan menggunakan teori kontinjensi ini mendapat dukungan dari banyak pakar. Bukti empiris yang ada pada umumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil menyelaraskan strateginya dengan lingkungan eksternal yang dihadapinya akan memperlihatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang kurang berhasil menyelaraskan strateginya (Beal, 200; Elenkov, 1997).

Tabel 2: Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Rasio *Leverage* dan Pangsa Pasar Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Variabel Bebas	Koef. Regresi	Stn.Error	t hitung	Sig	r parsial
Rasio <i>Leverage</i> (X ₁)	0,192	0,211	0,910	0,376	0,216
Pangsa Pasar (X ₂)	0,004	0,002	2,166	0,045	0,465
Variabel Terikat (Y ₁) : Kinerja keuangan (ROE) Konstanta : -7,862 Koefisien korelasi (R) : 0,505 Koefisien Determinasi (R ²) : 0,255 F hitung : 2,910 F.Signifikansi : 0,082					

Sumber: Data diolah

Model regresi linear berganda: $Y_1 = -7,862 + 0,192 X_1 + 0,004 X_2$

Interpretasi Model Regresi:

Konstanta (α) sebesar -7,862 menunjukkan besarnya *Return On Equity* (Y₂) jika rasio *leverage* (X₁) dan pangsa pasar (X₂) adalah konstan.

Koefisien regresi variabel rasio *leverage* (X₁) mempunyai hubungan searah yaitu sebesar 0,192 yang artinya jika rasio *leverage* (X₁) naik satu satuan, maka *Return On Equity* (Y₂) akan naik sebesar 0,192 satuan begitu juga sebaliknya dan variabel lainnya dianggap konstan.

Koefisien regresi variabel pangsa pasar (X₂) mempunyai hubungansearah yaitu sebesar 0,004 yang artinya jika pangsa pasar (X₂) naik satu satuan, maka *Return On Equity* (Y₂) akan naik sebesar 0,004 satuan begitu juga sebaliknya dan variabel lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2.910 dengan tingkat signifikan 0,082 lebih dari 5%, hal ini berarti model regresi yang dihasilkan adalah tidak cocok untuk mengetahui pengaruh rasio *leverage* (X₁) dan pangsa pasar (X₂) terhadap ROE (Y₂), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-2 penelitian ini yang menyatakan bahwa rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ditinjau dari *Return On Equity* (ROE), tidak teruji kebenarannya.

Nilai R² sebesar 0,255 yang berarti bahwa rasio *leverage* (X₁) dan pangsa pasar (X₂) hanya mampu menjelaskan variabel *Return On Equity* (Y₂) sebesar 25.5% dan sisanya sebesar 74,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Nilai korelasi (R) sebesar 0,505 menunjukkan korelasi yang cukup kuat antara rasio *leverage* (X₁) dan pangsa pasar (X₂) dengan *Return On Assets* (Y₁) yaitu sebesar 50.5%.

Hasil uji t digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh rasio *leverage* (X₁) dan

pangsa pasar (X₂) secara parsial terhadap *Return On Assets* (Y₁) menunjukkan bahwa :

Nilai t_{hitung} pada variabel rasio *leverage* (X₁) sebesar 0.910 dan nilai signifikan sebesar 0,376.

maka H_a ditolak dan H₀ diterima yang berarti rasio *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*. Untuk variabel pangsa pasar (X₂) sebesar 2.166 dan nilai signifikan sebesar 0,045 kurang dari 5% maka H_a diterima dan H₀ ditolak yang berarti pangsa

pasar berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*.

Ketidakcocokan model pengaruh rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal ini dapat disebabkan rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar hanya mempengaruhi *Return On*

Equity (Y_2) sebesar 25,5% dan sisanya sebesar 74,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Cryrilis Martono (2002) yang menyatakan bahwa ROE industri, rasio *leverage* keuangan tertimbang, rasio intensitas modal tertimbang, dan pangsa pasar terhadap ROE perusahaan manufaktur yang *go-public* di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

Rasio *leverage* dan pangsa pasar mampu memberikan kontribusi terhadap *Return On Asset*, sehingga hipotesis yang pertama teruji kebenarannya. Secara parsial rasio *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset*, sedangkan pangsa pasar tidak signifikan berpengaruh terhadap *Return On Asset*.

Rasio *leverage* keuangan dan pangsa pasar tidak mampu memberikan kontribusi terhadap *Return On Equity*, berarti hipotesis yang kedua tidak teruji kebenarannya. Secara parsial rasio *leverage* tidak signifikan berpengaruh terhadap *Return On Equity*, sedangkan pangsa pasar secara signifikan berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyampaikan saran

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan masukan agar kebijakan manajer dalam menentukan tingkat *leverage* jangan terlalu besar dan memperbaiki tingkat struktur modalnya

agar kebijakan yang sudah diambil akan menguntungkan dan tidak membahayakan perusahaan.

Manajemen perusahaan hendaknya melakukan efisiensi dalam pengambilan keputusan sumber

dana dan lebih berhati-hati agar dampaknya tidak merugikan perusahaan.

Bagi penelitian yang akan datang hendaknya menambahkan ukuran sampel agar dapat digeneralisasi secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Cyrillus Martono, 2002, Analisis Pengaruh Profitabilitas Industri, Rasio Leverage Keuangan Tertimbang dan Intensitas Modal Tertimbang Serta Pangsa Pasar Terhadap "ROA" dan "ROE" Perusahaan Manufaktur Yang Go Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4, no 2.
- Darsono, Ashari, 2005, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Djarwanto Ps, 2004, *Pokok – Pokok Analisis Laporan Keuangan, Edisi 2*, Penerbit PT BPFE, Yogyakarta.
- Fakruddin M, Sopian Hadianto, 2001, *Perangkat Dan Modal Analisis Investasi Di Pasar Modal*, Penerbit PT Alex Multimedia.
- Ghozali, Imam, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar, 1999, *Ekonometrika Dasar*, Penerbit Erlangga.
- Hanafi dan Halim, 2003, *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit UPP AMP YKPN.
- Harahap Sofyan Syafri, 2002, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermendito Ka'aro, 2001, Analisis Pengaruh Rasio-rasio Operasi dan Keuangan Tertimbang Serta Rasio Persaingan Industri Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi

- Empiris Perspektif Internal dan Perspektif Eksternal Organisasi, *Jurnal Widya Manajemen dan Akuntansi*, Vol 1, No 1.
Jumingan, 2006, *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
Kotler Philip And Susanto A.B, 2001, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Riyanto, Bambang, 1995, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
Santoso, Singgih, 2000, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Penerbit PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
Setyani Meriewaty, 2005, Analisis Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Kinerja Pada Perusahaan di Industri Food and Beverages Yang Terdaftar di BEJ, *Jurnal SNA VIII Solo*, 15 – 16 September 2005.
Standar Akuntansi Keuangan, 2009, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Sudjana, 1992, *Teknik Analisa Regresi Dan Korelasi*, Penerbit Tarsito, Bandung.
Supriyono, R.A. 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Sutrisno, 2001, *Manajemen Keuangan, Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Ekonosia, Yogyakarta.
Syamsudin, Lukman, 1994, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi 1, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Weston J.F. And Thomas E. Copeland, 1994, *Manajemen Keuangan*, Jilid I, Terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta.

**PRAKTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI:
STUDI KASUS PADA KOPERASI PRIMER
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR**

Tantina Haryati
(accountantina@yahoo.com)
Sishadiyati
Ira Wikartika

Abstract

Cooperative effort is directly related to business interests of members to improve the business and welfare of members. Like other business entities, cooperatives can make efforts as other business entities, such as trade, manufacturing, financial services, and financing, insurance services, transportation services, professional services, and other services. Accounting treatment arising from transactions between the cooperative relationship with its members and other transaction- specific cooperative business entity shall be guided by PSAK No. 27, while a general nature are treated with reference to the other PSAK. This situation may create a less cooperative management understand how to make proper accounting in accordance with PSAK. It is mainly experienced by medium and small cooperatives located in rural or small town.

Keyword: *Accounting Basis, Revenue and Expense Recognition, Asset, Liability, Equity, and Financial Reporting Cooperative.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda (*the dual identity of member*) pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan PSAK, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi. Sebaliknya jika laporan keuangan koperasi disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, dapat menyedatkan penggunaannya.

B. Fokus penelitian

Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada badan usaha koperasi berpedoman pada PSAK 27, sedangkan yang bersifat umum diperlakukan dengan mengacu pada PSAK yang lain. Keadaan ini mungkin membuat manajemen koperasi menjadi kurang mengerti bagaimana membuat pembukuan secara benar sesuai dengan PSAK. Hal tersebut terutama

dialami oleh koperasi menengah dan kecil yang berlokasi di desa atau di kota kecil. Yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah praktek akuntansi dan pelaporan keuangan koperasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka berikut ini dibuat suatu perumusan masalah:

1. Bagaimana praktek akuntansi yang diterapkan pada koperasi?
2. Bagaimana standar akuntansi dalam pelaporan keuangan pada koperasi?

D. Tujuan Penelitian

Setelah melakukan kajian masalah, selanjutnya dilakukan rumusan atas permasalahan yang terjadi, berikut ini akan dibuat suatu tujuan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek akuntansi yang diterapkan pada koperasi.
2. Untuk menentukan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan yang dapat diterapkan pada koperasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk lebih mengetahui besarnya manfaat mempelajari praktek akuntansi dan pelaporan keuangan koperasi secara nyata dengan berpedoman pada PSAK 27.
2. Bagi Universitas
Memberikan hasil informasi aktual tentang koperasi, sehingga perguruan tinggi khususnya program studi akuntansi UPN “Veteran” Jawa timur bisa menjadi mitra dalam pengembangan teori tentang PSAK 27.
3. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menetapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

II. Studi Kepustakaan

A. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang disyaratkan dalam menyusun laporan keuangan, termasuk koperasi adalah basis akrual. Pendapatan dilaporkan pada periode dimana pendapatan diperoleh (*earned*). Beban dilaporkan pada periode dimana beban tersebut dialami (*incurred*) dalam mendapatkan pendapatan.

B. Pengakuan Pendapatan dan Penetapan Beban Koperasi

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Beban perkoperasian adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh badan usaha koperasi yang tidak dikeluarkan oleh badan usaha dengan bentuk lain.

Pendapatan dan beban bunga yang timbul diakui secara accrual (*accrual basis*) kecuali pendapatan dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang “*non performing*”. Pendapatan dari aktiva yang *non performing* hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima.

Beban bunga terdiri atas beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan secara langsung, dalam rangka penghimpunan dana tersebut seperti hadiah, premi, atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan (*funding*).

C. Perlakuan Aktiva

Terdapat dua metode akuntansi untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak tertagih, yaitu metode penyisihan dan metode penghapusan langsung. Metode penyisihan piutang tak tertagih, dilakukan dengan cara membuat perkiraan piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapus, sedangkan metode penghapusan langsung mengakui beban hanya pada saat piutang tersebut dianggap benar-benar tak tertagih.

Investasi jangka panjang harus dicatat pada neraca berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen. Apabila penurunan nilai tersebut terjadi, maka perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dengan syarat:

1. Besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan,
2. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

Harga perolehan aktiva terdiri dari harga belinya dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan dikurangi setiap potongan dagang dan rabat.

Masa manfaat aktiva ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh perusahaan. Estimasi masa manfaat dipertimbangkan berdasarkan pada pengalaman perusahaan dengan aktiva.

Metode pencatatan piutang yang diterapkan adalah metode penghapusan tidak langsung. Suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban dan pengurangan tidak langsung terhadap piutang usaha (melalui kenaikan akun penyisihan) dalam periode dimana penjualan itu dicatat.

D. Perlakuan Kewajiban

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

E. Perlakuan Ekuitas

Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.

F. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

III. Metode Penelitian & Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *diskriptif eksploratif* dimana peneliti menggali informasi-informasi tentang basis akuntansi, pengakuan pendapatan dan penetapan beban koperasi, perlakuan aktiva, perlakuan kewajiban, perlakuan equitas, dan laporan keuangan koperasi Primer UPN “Veteran” Jatim. Hasil penelitian selanjutnya dibandingkan dengan standar akuntansi yang berkaitan. Hasil penelitian didiskripsikan sehingga mampu menjelaskan praktek akuntansi yang diterapkan di Koperasi dan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan pada Koperasi Primer UPN “Veteran” Jatim.

IV. Hasil dan Pembahasan

Koperasi yang berkedudukan di Jl. Raya Rungkut Madya Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan nomor 6574A/BH/1189 pada tanggal 22 November 1995 oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia. Kegiatan usaha koperasi meliputi:

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Simpanan Sukarela
3. Unit Pinjaman Barang
4. Unit Cleaning Service
5. Unit Toko
6. Unit fotocopy
7. Unit Tambak
8. Unit Girimart

Analisis

A. Basis Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan Laporan Arus kas disusun dengan metode tidak langsung yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

Pemakaian basis akuntansi oleh koperasi primer UPN “Veteran” Jatim dengan menggunakan asumsi dasar yang dipakai oleh laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dasar akrual.

Koperasi sudah melakukan pengakuan atas terjadinya beban penyusutan atas aktiva tetap yang dimilikinya. Koperasi juga telah memperhitungkan beban piutang tak tertagih atau beban resiko kredit. Perlakuan tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum tentang pengakuan beban yang diakui secara akrual.

Koperasi telah mengadakan penyisihan atas kemungkinan piutang yang tak tertagih sebesar 0,1 % dari saldo piutang jasa anggota dan 1% dari saldo piutang non anggota per 31 Desember. Persediaan barang dicatat berdasarkan pada harga perolehan secara periodik sedangkan penilaian atas persediaan berdasarkan metode FIFO.

B. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-

anggota. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari asuransi dibayar dimuka dan sewa dibayar dimuka. Asuransi merupakan asuransi kematian anggota yang memiliki pinjaman agar pinjaman tercover jika ada anggota yang meninggal. Premi asuransi dipotong pada saat anggota mendapatkan pinjaman. Dalam hal ini koperasi bekerja sama dengan Asuransi Bumi Putera.

C. Perlakuan Aktiva

Aktiva tetap dinilai dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method). Aktiva tetap yang dimiliki oleh koperasi terdiri dari gedung Giri Mart, peralatan cleaning service, peralatan toko, peralatan percetakan, peralatan kontraktor, mesin fotocopy, peralatan fotocopy, peralatan Giri Mart, dan peralatan kantor. Aktiva tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dikelompokkan sebagai aktiva tetap yaitu:

- Berwujud, aktiva tetap yang dimiliki mempunyai wujud pasti. Tanah, gedung, dan inventaris yang dimiliki dapat dilihat bentuknya, dapat diraba dan dirasakan keberadaannya.
- Digunakan untuk kegiatan normal, aktiva tetap digunakan untuk operasi normal perusahaan. Tanah beserta gedung digunakan untuk kantor perusahaan. Inventaris kantor seperti lemari arsip, meja kantor, komputer dan inventaris lainnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan tujuan pemilikan ini sudah ada dalam pengertian aktiva tetap perusahaan;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual. Tanah, gedung, dan inventaris diperoleh untuk mendukung kegiatan operasi Koperasi Primer UPNV bukan untuk dijual kembali;
- Mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut kemungkinan besar dapat diterima;
- Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Biaya perolehan tanah, gedung, dan inventaris dapat diukur dengan andal.

Masa manfaat dan nilai sisa aktiva ditentukan berdasarkan masa kegunaan yang diharapkan oleh Koperasi. Estimasi masa manfaat tersebut ditentukan oleh pengurus berdasarkan pengalaman aktiva yang sejenis. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK No.16.

Koperasi menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua bangunan dan inventaris yang disusutkan. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus mengalokasikan beban penyusutan yang sama tiap tahun. Pola pemanfaatan aktiva yang disusutkan sama tiap tahun. Jadi, penggunaan metode tersebut sudah sesuai dengan teori pada landasan teori.

Aset Tidak Berwujud terdiri dari Franchise dan Software. Dan Aset Lain-lain terdiri dari :

- Aset non aktif berupa mesin percetakan yang ada di gudang koperasi namun tidak terpakai. Nilainya masing-masing sebesar Rp 42.000.000,- pada tahun 2010 dan 2009.
- Deposit Pembayaran On Line. Investasi jangka pendek merupakan deposit atas pembayaran listrik dan telpon secara online serta pulsa elektrik sebesar Rp. 20.000.000,-.

Piutang Koperasi Primer UPN ‘Veteran’ Jatim terdiri dari:

- Piutang Jasa Anggota merupakan pinjaman berupa uang tunai baik untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan konsumtif. Piutang jasa anggota ini sebagian berasal dari pinjaman bank dan sisanya dari perputaran simpanan sukarela anggota. Piutang jasa simpanan diberikan kepada anggota dengan suku bunga antar 10%-12% dengan tempo pinjaman antara 12-60 bulan. Piutang ini diberikan kepada anggota dengan jaminan SKEP anggota.
- Piutang Barang merupakan kredit barang yang dapat diangsur selama 10 bulan dengan bunga 1,5%/bulan sedangkan kredit laptop diberikan dengan tempo 12-24 bulan dengan bunga 12%/bulan. Piutang ini diberikan tanpa jaminan.

- Piutang Sementara merupakan pinjaman berupa uang tunai dengan tempo 1-2 bulan dan bunga 2%/bulan. Piutang ini diberikan tanpa jaminan.
- Piutang Lain-lain Anggota merupakan piutang mantan anggota yang telah keluar dari keanggotaan. Piutang ini diberikan dengan jaminan Skep.
- Piutang Pinjaman Jasa Anggota Luar Biasa merupakan piutang anggota luar biasa dengan suku bunga dan tempo yang sama dengan anggota. Piutang ini diberikan dengan jaminan sertifikat kendaraan maupun rumah.
- Piutang Cleaning Service merupakan piutang setiap satker atau fakultas atas jasa penggunaan cleaning service sesuai dengan SPK yang telah disepakati setiap satker.
- Deposito

Berdasarkan keterangan di atas piutang dicatat saat timbulnya hak sedangkan hutang dicatat saat timbulnya kewajiban. Koperasi telah mengadakan penyisihan atas kemungkinan piutang yang tak tertagih sebesar 0,1% dari saldo piutang jasa anggota dan 1% dari saldo piutang non anggota per 31 Desember.

D. Perlakuan Kewajiban

Koperasi telah membedakan kewajibannya menjadi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

Kewajiban Lancar terdiri dari :

- a. Simpanan Sukarela merupakan simpanan anggota yang mendapatkan bunga 10% per tahun.
- b. Simpanan Deposito merupakan simpanan beberapa anggota yang mendapatkan bunga 10% per tahun dengan tempo 12 bulan.
- c. Hutang jaminan kantin merupakan uang jaminan para penyewa kantin.
- d. Hutang pajak (PPN Keluaran). PPN keluaran timbul akibat penjualan Girimart.
- e. Hutang Pph Badan (Ps 29) merupakan hasil perhitungan pajak terutang tahunan.
- f. Hutang jangka pendek lain-lain merupakan hutang atas pembelian barang dagangan secara kredit kepada PT. Inti Cakrawala.
- g. Hutang bank dan non bank.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

- a. Hutang bank
- b. Hutang jangka panjang lain-lain.

E. Perlakuan Ekuitas

Simpanan pokok anggota merupakan simpanan yang harus dibayar anggota pada saat pertamakali menjadi anggota sebesar Rp 50.000,-.

Simpanan pokok anggota luar biasa merupakan simpanan yang harus dibayar anggota luar biasa pada saat pertama kali menjadi anggota sebesar Rp 200.000,-.

Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus dibayar anggota setiap bulan sebesar Rp 20.000,- bagi anggota golongan I dan II sebesar Rp 30.000,- bagi anggota golongan III dan IV. Simpanan wajib anggota luar biasa merupakan simpanan yang harus dibayar anggota luar biasa 6 bulan di depan sebesar Rp 120.000,-. Modal penyertaan partisipasi anggota merupakan modal donasi dari mantan rektor UPN "Veteran" Jatim Suparyo. Modal penyertaan partisipasi non anggota merupakan modal donasi dari PT. Coca Cola Indonesia.

F. Perlakuan Modal

Modal merupakan kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota. Modal penyertaan diakui dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas. Sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang.

Cadangan yang dibentuk dari SHU yang diperoleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal pengembangan usaha dan untuk menutup resiko kerugian

merupakan bagian dari ekuitas. Sebagai bagian dari ekuitas, cadangan berpengaruh terhadap total nilai kekayaan bersih koperasi yang mencerminkan nilai pemilikan anggota dalam koperasi. Oleh karena itu anggota yang keluar dalam tahun berjalan, selain menerima pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain sebesar nilai nominalnya, koperasi dapat menetapkan pembayaran tambahan dalam jumlah yang proporsional dengan nilai kekayaan bersih koperasi atau jumlah tertentu yang ditetapkan rapat anggota. Pembayaran tambahan tersebut dibebankan pada cadangan koperasi.

Pembagian SHU berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Koperasi Primer UPN "Veteran" Jatim. Kegiatan utama koperasi Primer UPNV adalah simpan pinjam. Pendapatan terbesar disumbangkan oleh bunga dari pinjaman anggota. Unit simpan pinjam mencatat pendapatan berdasarkan atas basis kas dimana pendapatan bunga dicatat sebagai pendapatan jika kas sudah terima. Pada akhir tahun tidak ada pengakuan akan bunga akrual dan piutang bunga. Oleh karena itu, jumlah saldo piutang jangka pendek menjadi lebih kecil dibandingkan dengan apabila pembukuan dilakukan berdasarkan basis akrual.

G. Laporan Keuangan Koperasi

Koperasi telah memenuhi sebagian ketentuan laporan keuangan koperasi yang tertera pada PSAK No.27. Menurut PSAK tersebut, laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan promosi ekonomi anggota, Catatan atas Laporan Keuangan. Koperasi Primer UPNV pada tanggal 31 Desember 2010 telah menyusun laporan keuangan koperasi yang meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan, tetapi koperasi belum membuat laporan promosi ekonomi anggota. Perusahaan belum menerapkan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, karena menurut standar akuntansi yang berlaku umum mengharuskan penyajian standar tersebut pada tahun buku yang bersangkutan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Koperasi Primer UPN "Veteran" Jawa Timur menggunakan basis akuntansi yang dasar asumsinya menggunakan laporan keuangan dan penyajiannya menggunakan dasar akrual. Koperasi Primer UPN "Veteran" Jatim telah memperhitungkan beban piutang tak tertagih atau beban resiko kredit. Pengakuan beban-beban lainnya belum memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku secara umum karena memakai basis kas.
2. Perlakuan pendapatan di Koperasi Primer UPN "Veteran" Jatim terdapat pemisahan pendapatan yaitu pendapatan anggota (sebagai partisipasi bruto) dan non anggota (sebagai pendapatan/penjualan). Perlakuan beban juga sama ada pemisahan beban yaitu beban anggota dan non anggota. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan anggota. Dari hal tersebut di atas perlakuan pendapatan dan beban sudah sesuai dengan PSAK 27.
3. Secara umum perlakuan aktiva di Koperasi Primer UPN "Veteran" Jatim sudah benar sesuai dengan PSAK 27 dan PSAK 16. Pada akhir tahun Koperasi Primer tidak mengakui adanya piutang bunga. Piutang bunga pada akhir tahun muncul karena adanya pengakuan pendapatan bunga akrual. Koperasi tidak mengakui adanya pendapatan bunga akrual. Bunga akan diakui jika kas diterima.
4. Secara umum, pencatatan kewajiban sudah benar. Kewajiban tersebut dicatat berdasarkan nilai nominalnya. Pengkategorian kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek juga sudah benar.
5. Ekuitas sudah dicatat dengan tepat. Simpanan pokok anggota dan non anggota, simpanan wajib serta cadangan telah dicatat dengan benar.
6. Laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Dalam

laporan keuangan Koperasi Primer UPN “Veteran” Jawa Timur tanggal 31 Desember 2010 belum membuat laporan promosi ekonomi anggota.

VI Daftar Pustaka

- Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*. Edisi 8. Yogyakarta. BPFE, 2004
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Halim, Abdul, Drs, MBA, Akt. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Buku 1. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1997.
- Kieso, Donald E. Dan Jerry J. Weygrant. *Intermediate Accounting*. Edisi 12. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2008.
- Rudianto. *Akuntansi Koperasi*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Mojokerto)**

Kurnia Widhi Hapsari
Erry Andhaniwati
Indrawati Yuhertiana

Abstract

Taxes are based on laws which means that tax collection has been agreed upon or mutually agreed between the government and society. Hope the government to all tax payers without any fraud on payment. So the public should be aware of their obligations to pay taxes. The community must pay taxes correctly in accordance with applicable laws and regulations. But in reality facing many obstacles in the implementation of tax collection, tax payers are not master right about the tax laws so that tax Directorate General of taxes as a non-compliance response thereto, and give an understanding and awareness to the public to obtain compliance with its obligations as a tax payer will.

This research had been done by using questioner. The variable measurements using likert scale with using interval scale. The measurements that use to measure this variable using survey strategy with impersonal model. Analysis technical that use in this research is double linier regression with hypothesis test that is F test and t test. For data processing use SPSS program.

Based on the research has been done can be concluded that the hypothesis wich states suspected of understanding and awareness of tax payers affected tax compliance committee of a case study in the footwear (Shoes and slipper) industrialist in Mojokerto, not proven true.

Keywords : *understanding tax payer, awareness tax payer, compliance tax payer*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia, dimana sedang mengalami krisis ekonomi sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri.

Sumber penerimaan negara, terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak. Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2006: 106).

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali

menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2008: 3).

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak.

Pada *official assessment system*, petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada *self assessment system*, wajib pajak berkewajiban, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Walaupun berbeda, kedua sistem penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetap memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sofyan, 2003: 30).

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Supadmi, 2006).

Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak disamping menyelenggarakan pembukuan, harus pula melengkapi dengan laporan keuangan yang berupa neraca, dan perhitungan laba – rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Pembukuan yang tertib dan benar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan memadai untuk mendukung perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga Wajib Pajak dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagaimana besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Waluyo & Ilyas, 2002: 11).

Penerimaan perpajakan Indonesia dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi pada 2008 hanya 22,89%, sedangkan penerimaan dari PPh badan terhadap realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai 77,11 %. Di negara maju, penerimaan PPh orang pribadi justru lebih besar ketimbang badan. Atas realisasi itu, pemerintah mengajukan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi UV (Daily Indonesia, 2009).

Dengan adanya perpanjangan *sunset policy* masyarakat diharapkan semakin banyak dan lebih terbuka mengungkapkan data perpajakannya. “Peranan penerimaan PPh orang pribadi di negara maju lebih besar, sejalan dengan kesadaran akan kewajiban warga negara bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban konstitusional dan sejalan dengan cita – cita demokrasi bangsa,” kata Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani Indrawati pada raker

dengan komisi XI di Jakarta. Dia menjelaskan, tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong kurang antara lain karena lemahnya mekanisme *check and balances* terkait *sistem self assessment* dalam pemungutan pajak (Daily Indonesia, 2009).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu juga dilakukan penyempurnaan aparatur perpajakan serta mempersiapkan para Wajib Pajak yang telah diberi kebebasan dan kepercayaan yang besar dalam menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Oleh sebab itu usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak ini harus dimulai mewujudkannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan Kota Mojokerto tahun 2008 sebesar Rp 2.799.306.407,00 -, dan pada tahun 2009 sebesar Rp 2.407.228.366,00 -, mengenai kepatuhan terhadap penyampaian SPT, dapat diketahui dalam penyampaian SPT tahun 2008 dan tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 1
Kepatuhan Pelaporan SPT PPh OP Usahawan KPP Pratama Mojokerto
Kota Mojokerto

Tahun	Jumlah NPWP	SPT yang Dilaporkan	Prosentase
2008	9883	3548	35,9 %
2009	16223	4658	28,7 %

Sumber : KPP Pratama Kota Mojokerto Seksi PDI

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto, Kota Mojokerto sebanyak 9883 Wajib Pajak, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang lapor sebanyak 3548 Wajib Pajak dengan prosentase sebesar 35,9 % dari jumlah keseluruhan, sedangkan pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar semakin meningkat yaitu menjadi 16223 Wajib Pajak, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang lapor sebanyak 4658 Wajib Pajak dengan prosentase sebesar 28,7 %. Dari kondisi ini berarti masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti “apakah pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tinjauan Pustaka

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak kadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Bila ada sedikit kemungkinan, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari pajak. Hal ini telah dan bukan hanya terjadi saat sekarang – sekarang ini saja, tetapi sudah sejak lama, dan tidak hanya terjadi di beberapa negara, melainkan pada setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok atau badan, memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak (Monganting, 1999: 48).

Pendapat Fallan (1999: 173– 184), mengkaji pada aspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap Wajib Pajak dengan membedakan antara laki – laki dan perempuan. Oleh karenanya sikap Wajib Pajak terhadap badan perpajakan akan dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak (Suryadi, 2006: 108).

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan juga dimaksudkan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak supaya lebih memahami Undang – Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Suhardito dan Sudiby (1999: 5), menyatakan bahwa kesadaran bernegara adalah suatu sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap ini berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi negara. Kesadaran bernegara berkonsekuensi logis untuk warga negara, atau mereka yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan para warga negara memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah, dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Apabila mangacu pengertian sistem perpajakan dengan *self assessment system* yang berarti pemenuhan kewajiban pajak seseorang dipercayakan kepada masyarakat Wajib Pajak, maka secara umum Wajib Pajak sepenuhnya membayar sendiri pajaknya apakah secara bulanan / tahunan, sehingga tidak akan pernah melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. Hal tersebut banyak ditentukan oleh beberapa faktor yang ada dan yang dapat mendukung keberhasilannya, yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yang dimulai dari pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mereka dalam masalah kewajiban perpajakannya (Pamungkas, 2003: 18). Menurut Simatupang (2002: 17), adanya keinginan yang kuat dari sebagaian masyarakat untuk tidak membayar pajak, mudah dipahami sebagai ketidakrelaannya untuk mengalihkan sebagian kekayaannya kepada negara, karena sesungguhnya pajak bagi mereka merupakan penyebab berkurangnya kekayaan atau konsumsi mereka.

Hal lain yang menyebabkan rakyat belum secara sukarela membayar pajak adalah image ditengah – tengah masyarakat, bahwa membayar pajak untuk orang – orang pajak (Silallahi, 2002: 39).

Pada umumnya kesadaran Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh kepercayaan. Wajib Pajak mengharapkan adanya timbal balik dari pembayaran pajak yang telah disetor kepada pemerintah. Apabila masyarakat tidak merasakan manfaat dari pajak tersebut, maka akan muncul kecenderungan penghindaran pajak.

Hipotesis

Bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada komite pengusaha alas kaki Kota Mojokerto.

METODE PENELITIAN

Pengukuran Variabel

Semua variabel ini diukur dengan menggunakan strategi survey dengan model impersonal. Model impersonal membutuhkan alat perantara antara pewawancara dengan terwawancara yang berupa daftar kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval dengan teknik pengukuran Skala Likert (Riduwan, 2004:86).

Teknik Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pengrajin atau pengusaha yang terdaftar di komite pengusaha alas kaki Kota Mojokerto, sebanyak 43 pengrajin.

b. Sampel

Teknik penentuan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dengan kriteria bahwa pengrajin atau pengusaha alas kaki tersebut memiliki NPWP, maka berdasarkan kriteria diatas sampel yang digunakan sebanyak 31 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yang diperlukan ini diperoleh dari jawaban responden dengan menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan kepada pengrajin sepatu sandal di Kota Mojokerto.
- b. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh KPP Pratama Mojokerto.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Uji Validitas

Hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel pemahaman wajib pajak, diketahui bahwa nilai *pearson correlation* yang diperoleh dari masing - masing item pertanyaan untuk variabel pemahaman wajib pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, sehingga seluruh item yang digunakan untuk variabel pemahaman wajib pajak dinyatakan valid.

Demikian pula Variabel Kesadaran Wajib Pajak diketahui bahwa nilai *pearson correlation* yang diperoleh dari masing - masing item pertanyaan untuk variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, sehingga seluruh item yang digunakan untuk variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid.

Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak hanya item pertanyaan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, yang digunakan dalam penelitian

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 (Nunnally, 1967) dalam (Ghozali, 2007: 42).

Hasil pengujian reliabilitas pada variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak bahwa besarnya nilai *Cronbach Alpha* variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari 0.60. Dengan demikian dapat dikatakan seluruh variabel penelitian adalah reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya metode *Kolmogorov Smirnov*. Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) $< 5\%$, maka distribusi adalah tidak normal. Jika nilai signifikansi (nilai probabilitas) $\geq 5\%$, maka distribusi adalah normal (Sumarsono, 2004: 43).

Berdasarkan hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa nilai *statistic Kolmogorov - Smirnov* yang diperoleh mempunyai taraf signifikan yang lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.868. Hal ini membuktikan bahwa semua variabel yang diteliti berdistribusi normal, sehingga pengujian dengan menggunakan statistik parametrik atau dalam hal ini regresi linier berganda layak untuk dilakukan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Pendeteksian ada tidaknya multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi (Ghozali, 2005: 91-92).

Hasil pengujian memperoleh nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas atau asumsi tidak terjadi multikolinieritas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel bebas menunjukkan bahwa nilai signifikansi korelasi *Rank Spearman* untuk variabel pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak, semuanya lebih besar dari 0.05, yang berarti tidak terdapat korelasi antara *residual* dengan variabel bebasnya. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas terpenuhi.

Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

Analisis Hipotesis

Berikut adalah nilai estimasi koefisien regresi :

Tabel 2
Hasil Estimasi Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients	
	β	Std. Error
Konstanta	2.462	0.625
Pemahaman Wajib Pajak (X_1)	-0.326	0.182
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0.254	0.228

Sumber : Hasil Analisis Data

Sehingga persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 2.462 - 0.326 X_1 + 0.254 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

$\beta_0 =$ Konstanta = 2.462

Artinya apabila variabel pemahaman wajib pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) adalah konstan atau sama dengan nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 2.462.

$\beta_1 =$ Koefisien regresi untuk $X_1 = -0.326$

Artinya besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel pemahaman wajib pajak (X_1) yaitu sebesar -0.326 dan mempunyai koefisien regresi negatif. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang berlawanan arah dengan variabel terikat. Jadi setiap ada kenaikan pada variabel pemahaman wajib pajak (X_1) sebesar 1 satuan, dapat menurunkan nilai kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.326 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada variabel pemahaman wajib pajak (X_1) sebesar 1 satuan, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.326 dengan asumsi bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_2) adalah konstan.

$\beta_2 =$ Koefisien regresi untuk $X_2 = 0.254$

Artinya besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_2) yaitu sebesar 0.254 dan mempunyai koefisien regresi positif. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dengan variabel terikat. Jadi setiap ada kenaikan pada variabel kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 1 satuan, dapat meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.254 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada variabel kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 1 satuan, dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.254 dengan asumsi bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X_1) adalah konstan.

Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 3
Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.323 ^a	.105	.041	.30035

a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP (X_2), Pemahaman WP (X_1)

Sumber : Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau *R Square* sebesar 0.105, artinya perubahan variabel terikat kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh perubahan variabel bebas pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sebesar 10.5%, sedangkan sisanya sebesar 89.5% dijelaskan oleh variabel lain selain kedua variabel bebas tersebut.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Kocokan Model)

Tabel 4
Hasil Uji F (Uji Kecocokan Model)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.295	2	.147	1.635	.213 ^a
	Residual	2.526	28	.090		
	Total	2.821	30			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP (X2), Pemahaman WP (X1)
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber : Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 1.635 dengan nilai signifikansi sebesar $0.213 > 0.05$, maka diputuskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak cocok dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada komite pengusaha alas kaki di Kota Mojokerto.

Uji t

Tabel 5
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Partial	Tolerance
1	(Constant)	2.462	.625		3.938	.000			
	Pemahaman WP (X1)	-.326	.182	-.461	-1.790	.084	-.320	.482	2.074
	Kesadaran WP (X2)	.254	.228	.286	1.111	.276	.205	.482	2.074

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber : Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hasil uji t sebagai berikut:

1. Pengujian pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar -1.790 dengan nilai signifikansi sebesar $0.084 > 0.05$, Hal ini berarti berpengaruh secara tidak signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman wajib pajak sebesar -0.326 menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya penurunan pemahaman wajib pajak akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar 1.111 dengan nilai signifikansi sebesar $0.276 > 0.05$, Hal ini berarti berpengaruh secara tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.254 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya peningkatan kesadaran wajib pajak akan menyebabkan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada komite pengusaha alas kaki di Kota Mojokerto diperoleh hasil bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0.323 atau sebesar 32.3% menunjukkan korelasi yang cukup kuat antara variabel pemahaman wajib pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.105 atau sebesar 10.5% yang berarti bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 10.5%.

Pemahaman wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini karena saat ini ketika pemerintah telah melakukan sosialisasi perpajakan baik melalui spanduk – spanduk, seminar, penyuluhan, media masa dan elektronik. Tujuannya adalah agar wajib pajak lebih mudah mengerti mengenai perpajakan, lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Masyarakat masih belum bisa mengerti atau paham, karena memang sosialisasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa atau komunikasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat, pemahaman berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru, yang dalam hal ini adalah pajak yang selama ini dianggap mengganggu mereka.

Wajib Pajak dikatakan paham terhadap pajak apabila setiap orang mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas – asasnya, macam – macam pajak yang berlaku, cara perhitungan dan tata cara pembayarannya, serta hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Ketidakhahaman terjadi apabila perkembangan intelektual dan moral masyarakat masih rendah atau sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. Saat ini pemahaman masyarakat Indonesia tentang Undang – Undang Pajak Penghasilan masih rendah. Hal ini dimungkinkan karena Undang – Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 pada kenyataannya tidak sesederhana seperti yang diidealkan, sementara itu tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Indonesia masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan itu tentunya mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sehingga dimungkinkan target penerimaan negara yang bersumber dari pajak juga rendah, hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Suryadi, 2006: 108), bahwa dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui pula bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak karena faktor penghindaran pajak, dan adanya rasa ketakutan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT serta Wajib Pajak kadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Bila ada sedikit kemungkinan, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari pajak. Hal ini tidak hanya terjadi saat sekarang – sekarang ini saja, tetapi sudah sejak lama, dan tidak hanya terjadi di beberapa negara, melainkan pada setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok atau badan, memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak, hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Pamungkas, 2003: 18), bahwa apabila mangacu pengertian sistem perpajakan dengan *self assessment system* yang berarti pemenuhan kewajiban pajak seseorang dipercayakan kepada masyarakat Wajib Pajak, maka secara umum Wajib Pajak sepenuhnya membayar sendiri pajaknya apakah secara bulanan / tahunan, sehingga tidak akan pernah melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. Hal tersebut banyak ditentukan oleh beberapa faktor yang ada dan yang dapat mendukung keberhasilannya, yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yang dimulai dari pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mereka dalam masalah kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan :

Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto tidak terbukti kebenarannya.

Referensi :

- Algifari, 2000, *Analisis Regresi*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Anonim, 2009, *Penghasilan Tidak Kena Pajak*, www.klinik-pajak.com.
- Anonim, 2009, *Tarif Pajak*, www.klinik-pajak.com.
- _____, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Akar Media, Surabaya.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Monganting, Yenni, 1999, *Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1 No. 1, hal 43 – 53.
- Mustikasari, Elia, 2007, *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, Simposium Nasional Akuntansi X, Juli
- Pamungkas, Hanggoro, 2003, *Penghitungan Pajak, Catatan Kecil*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 2, No. 8, Maret, hal 16 – 21.
- Resmi, Siti, 2008, *Perpajakan : Teori dan Kasus, Buku Satu*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Simatupang, Hendra, 2002, *Pajak, Yes! Penjara, Yes!*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 2, No. 3, Oktober, Hal 16 – 18.
- Suandy, Erly, 2005, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo, 1999, *Pengaruh Faktor – faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*, Simposium Nasional Akuntansi II, hal 1 - 14.
- Suharyadi dan Purwanto, 2004, *Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern*, Buku dua, Penerbit Salemba Empat.
- Sumarsono, 2004, *Metode Penelitian Akuntansi : Beserta Contoh Interpretasi Hasil Pengolahan Data*, Edisi Revisi.
- Supriyati, dan Fitri Indawati, 2007, *Analisis Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Sidoarjo Timur)*, Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 6, No. 1, Mei, Hal. 37 – 46.
- Suryadi, 2006, *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*, Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, No. 1, April, Hal. 105 – 121.
- Valentina & Aji Suryo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

FACTORS - FACTORS THAT INFLUENCE THE NEEDS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NO ACCOUNTABILITY OF PUBLIC ENTITIES (SAK ETAP) FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs)

Tituk D.W
Siti Sundari
Dyah Ratnawati

ABSTRACT

In an effort to grow or even survive, SMEs face many obstacles or problems partly due to low education, lack of understanding of information technology, and lack of reliability characteristics of the financial statements. The Indonesian government has set up a special obligation to prepare financial statements of SMEs. The regulations set forth in the Financial Accounting Standards (GAAP ETAP), which is published by the Association of Indonesian Accountants on May 19, 2009. But the level of need ETAP GAAP for SMEs is still very low. And SAK ETAP is also still considered to be burdensome for Small and Medium Enterprises. With the financial report, the owner can know the benefits, the additional capital to achieve, and the balance of rights and liabilities owned This research is aimed to know the factors - any factor that may influence the needs of Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) for Small and Medium Enterprises (SMEs).

This study used multiple linear regression equation model consisting of three independent variables and one variable, namely education terika owner (X1), understanding of technology Opera-(X2), the qualitative characteristics of financial statements (X3) and the needs of ETAP GAAP for SMEs (Y). The population in this study by 63 owners in particular Small and Medium Entrepreneurs Tour & Travel, spread in East Surabaya. To determine the sample used by the object of research used purposive sampling method is a method of determining this type of sample by non-probability sampling the selection of respondents based on characteristics or specific nature which is owned by the sample and the sample that is representative of the population.

Conclusions derived from multiple linear regression analysis on the researcher is variable understanding of information technology (X2) is the effect on GAAP requirements ETAP for SMEs, while the regression coefficient on owner education variable (X1) and the qualitative characteristics of financial statements (X3) is no effect on the demand ETAP GAAP for SMEs.

Keyword : *SAK Needs ETAP For SMEs, Education Owner, Understanding Information Technology, Characteristics of Financial Statements*

• **Latar Belakang**

Peranan UKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja (Setyawan, 2007 : 1). Dalam upaya berkembang atau bahkan tetap hidup, UKM menghadapi berbagai kendala atau masalah antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan kurangnya keandalan karakteristik laporan keuangan.

Artikel Suhairi dan Wahdini (2006 : 2) disebutkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dirasakan sangat memberatkan bagi Usaha Kecil dan Menengah dibandingkan dengan usaha besar. Salah satu faktor sebagai penyebab terjadinya overload adalah rendahnya tingkat penyusunan laporan keuangan pada UKM, dan adanya

kewajiban UKM yang sama dengan usaha besar. Dengan kata lain, UKM diwajibkan membuat laporan keuangan sesuai dengan menggunakan standar akuntansi keuangan internasional.

Namun saat ini pemerintah Indonesia sudah mengatur secara khusus kewajiban UKM untuk menyusun laporan keuangan. Peraturan tersebut dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) yang sudah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 19 Mei 2009. Standar ini dikemas cukup ringkas jika dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Walaupun cukup ringkas, tidak banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini. Kehadiran standar ini dapat menjadi acuan yang lebih mudah bagi kalangan yang lebih luas untuk penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum.

Kenyataannya tingkat kebutuhan SAK ETAP bagi UKM masih sangat rendah. Dan SAK ETAP juga masih dianggap memberatkan Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usahanya. Perusahaan atau pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan di dalam perusahaan terkesan apa adanya. Hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan pengelola usaha kecil menjadi berantakan dan akan menyulitkan manajer dalam mengontrol tentang informasi akuntansinya. Inilah yang menjadi permasalahan UKM pada saat ini, khususnya di bidang keuangan. Permasalahan tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan UKM di Indonesia.

Berdasarkan observasi sementara diperoleh informasi bahwa sebagian UKM Tour & Travel di Surabaya Timur telah mencatat aktivitas keuangan usaha mereka. Meskipun belum sempurna bentuk dan urutan laporan keuangan, namun dari pencatatan tersebut dapat dilihat dan diperoleh informasi keuangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dimana penelitian ini muncul dikarenakan beberapa permasalahan yang ada, antara lain : wacana yang telah dijelaskan diatas, hasil penelitian – penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini sulit untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam penyusunan laporan keuangan.

- **Tinjauan Pustaka**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan ini diperkenankan.

Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*Explicit And Unreserved Statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam

SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP.

Menurut Murniati (2002 : 138) dikutip oleh Agnesti (2009), kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer perusahaan kecil dan menengah saat ini sangat ditentukan dari pendidikan formal yang pernah ditempuh. Tingkat pendidikan formal rendah (tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah umum) pemilik atau manajer akan rendah penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkatan pendidikan formal yang tinggi (perguruan tinggi) pemilik atau manajer.

Menurut Murniati (2002 : 140) dikutip oleh Agnesti (2004) pendidikan manajer atau pemilik perusahaan akan diukur berdasarkan pendidikan formal yang pernah diikuti sehingga pengukurannya bersifat kontinyu. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah formal antara lain Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana dan Pascasarjana.

Menurut Sukmadinata (2004 : 215) dikutip oleh (M.Rifqi, 2009), pemahaman individu pada dasarnya merupakan pemahaman seluruh kepribadiannya dengan segala latar belakang dan interaksinya dengan lingkungannya.

Menurut Suhairi dan Wahdini (2006) beberapa penelitian menyebutkan bahwa perusahaan kecil di Indonesia cenderung untuk memilih normal perhitungan (tanpa menyusun laporan keuangan) sebagai dasar perhitungan pajak. Karena, biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar daripada kelebihan pajak yang harus dibayar.

• Metode Penelitian

1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pendidikan didefinisikan sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal (Agnesti, 2010 : 31).

Pemahaman dalam teknologi informasi yang dimaksudkan adalah dimana para pemilik atau pelaku usaha yang merangkap sebagai manajer ataupun karyawan diharapkan mampu dalam memahami informasi yang dihasilkan dari berbagai bidang, seperti di bidang teknologi ataupun bidang pengetahuan (Rifqi, 2009)

Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sesuatu yang perlu dalam penerapan aturan yang harus diterapkan dalam penyusunan, pengakuan, dan pencatatan suatu transaksi agar tidak menyimpang dari aturan yang diterapkan dan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah (Agnesti, 2010 : 31).

Teknik pengukuran yang digunakan adalah *semantic deferensial*, sedangkan Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval, dengan pengukuran intervalnya dimulai dari angka 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan angka 7 (sangat setuju) yang menunjukkan nilai tertinggi.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu 63 pemilik Usaha Kecil dan Menengah khususnya Pengusaha Tour & Travel yang tersebar di Surabaya Timur, yang terdiri dari 7 Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Gubeng terdapat 14 Pengusaha Tour & Travel
- b. Kecamatan Gununganyar terdapat 3 Pengusaha Tour & Travel
- c. Kecamatan Sukolilo terdapat 16 Pengusaha Tour & Travel
- d. Kecamatan Tambaksari terdapat 12 Pengusaha Tour & Travel
- e. Kecamatan Mulyorejo terdapat 5 Pengusaha Tour & Travel
- f. Kecamatan Rungkut terdapat 7 Pengusaha Tour & Travel
- g. Kecamatan Tenggiling Mejoyo terdapat 6 Pengusaha Tour & Travel.

(www.google.com dan hasil survey peneliti)

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan dasar pertimbangan pemilihan kriteria yaitu :

1. Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah khususnya di bidang Tour & Travel.
2. Usaha berdiri lebih dari 4 tahun.
3. UKM yang membuat dan menggunakan laporan keuangan.

Dari kriteria diatas maka obyek yang akan diteliti dalam perusahaan ini sebanyak 20 pemilik Usaha Kecil dan Menengah khususnya Pengusaha Tour & Travel yang tersebar di Surabaya Timur.

• Hasil Penelitian

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan sebagai berikut :

$$Y = -0,834 - 0,167 X_1 + 0,855 X_2 + 0,065 X_3$$

- a. Konstanta (a) sebesar -17657699313,111

Jika nilai $X_1 = X_2 = X_3 = 0$, akan diperoleh $Y = -0,834$. Pada umumnya nilai konstanta yang negatif bukan menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa persamaannya salah.

- b. Koefisien regresi variabel pendidikan pemilik (X_1) adalah sebesar -0,167 artinya jika variabel pendidikan pemilik (X_1) naik satu satuan, maka kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan turun sebesar 0,167 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan.
- c. Koefisien regresi variabel pemahaman teknologi informasi (X_2) adalah sebesar 0,855 artinya jika variabel pemahaman teknologi informasi (X_2) naik satu satuan, maka kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan naik sebesar 0,855 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan.
- d. Koefisien regresi variabel karakteristik kualitatif laporan keuangan (X_3) adalah sebesar 0,065 artinya jika variabel karakteristik kualitatif laporan keuangan (X_3) naik satu satuan, maka kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan naik sebesar 0,065 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,412 hal ini berarti secara bersama-sama 41,2% perubahan variabel kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan pemilik (X_1), pemahaman teknologi informasi (X_2) dan karakteristik kualitatif laporan keuangan (X_3), sedangkan sisanya yaitu 58,8% disebabkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam kerangka konsep ini.

Nilai F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 3,741 dengan tingkat signifikan sebesar 0,033 kurang dari 5% ($sig < 5\%$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti model regresi yang dihasilkan adalah cocok digunakan untuk mengetahui pengaruh pendidikan pemilik (X_1), pemahaman teknologi informasi (X_2) dan karakteristik kualitatif laporan keuangan (X_3) terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (Y).

Adapun hasil dari uji t adalah sebagai berikut :

- a. Nilai t_{hitung} pada variabel pendidikan pemilik (X_1) sebesar -0,606 dengan tingkat signifikan lebih dari 5% yaitu sebesar 0,533. Ini berarti pendidikan pemilik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- b. Nilai t_{hitung} pada variabel pemahaman teknologi informasi (X_2) sebesar 3,324 dengan tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu sebesar 0,004. Ini berarti pemahaman teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

- c. Nilai t_{hitung} pada variabel karakteristik kualitatif laporan keuangan (X_3) sebesar 0,197 dengan tingkat signifikan lebih dari 5% yaitu sebesar 0,847. Ini berarti karakteristik kualitatif laporan keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

• **Pembahasan Hasil Penelitian**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

- a. Variabel tingkat pendidikan pemilik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hal ini dapat disebabkan pendidikan baik formal maupun non formal yang baik kurang dijalankan di negara-negara yang sedang berkembang terutama UKM di Indonesia.
- b. Variabel pemahaman teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- c. Variabel karakteristik kualitatif laporan keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hal ini dapat disebabkan pengusaha kecil dan menengah memandang bahwa telah menyediakan laporan keuangan yang cukup lengkap. Dimana sebagian besar pengusaha kecil dan menengah telah menyediakan laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan neraca. Sebagian kecil juga cenderung untuk memilih melakukan perhitungan secara manual dengan asumsi perusahaan sendiri.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah perlu ada upaya promosi dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan UKM sekaligus menghilangkan mindset bahwa pengelolaan keuangan merupakan sesuatu yang rumit dan tidak mudah dipelajari bagi kalangan UKM. Jika memungkinkan, upaya ini selain melibatkan lembaga pemerintah terkait, IAI, kalangan akademisi juga sebaiknya melibatkan lembaga keuangan yang berperan sebagai kreditor bagi UKM.

• **Kesimpulan Dan Saran**

1. **Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini adalah hipotesis penelitian “adanya pengaruh positif antara tingkat pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)” sebagian teruji kebenarannya, karena hanya variabel pemahaman teknologi informasi yang berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sedangkan variabel tingkat pendidikan pemilik dan karakteristik kualitatif laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

2. **Saran**

Untuk mencapai manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, maka dikemukakan saran :

- a. Bagi lembaga pemerintah terkait, IAI, kalangan akademisi dan lembaga keuangan yang berperan sebagai kreditor bagi UKM, hendaknya melakukan upaya promosi dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan UKM sekaligus menghilangkan mindset bahwa pengelolaan keuangan merupakan sesuatu yang rumit dan tidak mudah dipelajari bagi kalangan UKM.

- b. Bagi penelitian mendatang, hendaknya memperluas jangkauan populasi yaitu tidak terbatas pada Pengusaha Tour & Travel yang tersebar di Surabaya Timur.

• **Daftar Pustaka**

- Anonim, 2009, *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi Jurusan Akuntansi*, FE UPN “Veteran “ Jawa Timur.
- Baridwan, Zaki, 1994, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi kedua, Cetakan Kedua, BPFE: Yogyakarta.
- Baswir, Revrison, 2000, *Koperasi Indonesia*. Edisi 1, BPFE Jogjakarta.
- Chandra, Dian, 2005, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Pada Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Pacitan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur.
- Cushing, Barry E, dan Rommey, Marshall B, 1989, *Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan*, Edisi Ketiga, SAPDODADI, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Tiga, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar, 1999, *Ekonomika Dasar*, Alih Bahasa : Zain, Sumarso, penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- KIESO, Weygant, 2002, *Intermediate Edisi 10 Jilid 1*, Penerbit Erlangga Jakarta..
- Nazir Moch, 2005, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Niswoger Warren Reve Fees, 1999, *Prinsip – Prinsip Akuntansi Edisi 19*, Erlangga Jakarta
- Rifqi Adi Jaya, L, Much, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Sentra Industri Kecil Patung batu di Desa Jati Pasar Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur.
- Rizki Abrory, Agnesti, 2010, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Studi Kasus pada Sentra Industri Marmer Onix yang tersebar di wilayah Desa Gamping Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung*, Skripsi, Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur.
- Sastrohadiwiryono, B Siswanto, 2003, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Cetakan kedua, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Setyawan, Purnomo, 2007, *Menumbuhkan Kebiasaan Menyusun Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah*,
- Soemanto, Wasty, 1992, *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta*, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sumarsono, 2004, *Metode Penelitian Akuntansi*, Penerbit Fakultas Ekonomi Akuntansi Pembangunan Nasional “ Veteran ” Surabaya.
- Supomo, Indriantoro, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis* , Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan*, BPFE Jogjakarta
- Undang – undang RI no 9, thn 1995, Tentang Usaha Kecil
- Wahdini dan Suhairi, 2006, *Persepsi Akuntan terhadap Overload SAK bagi UKM*, Simposium Nasional Akuntansi IX Padang
- Yadiati, Winwin, 2007, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, edisi Pertama, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta

**PERBANDINGAN ANTARA METODE *ACTIVITY BASED COSTING* DENGAN
METODE TRADISIONAL DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI
PADA CV.X SEMARANG**

FX. Anton, ST.
anton74d@yahoo.com
Febrian Raditya L.H

Abstract

The calculation of the cost of production can be done in various ways. In general, the pricing system of production set by the company is the conventional cost accounting systems (traditional cost systems). This system of allocating production costs to each product to calculate the cost of production. The calculation of the cost of production of material costs and direct labor costs can be clearly allocated to each product according to the product produced. But for the calculation of the volume of production, if there is a number of units produced more than usual will lead to greater overhead costs which can cause distortions in determining the cost of production. Activity Based Cost (ABC) has become an important aspect of the manufacturing organization / services. This activity-based costing can be defined as a methodology that measures the cost and performance of activities, resources and cost objects. This can be considered as an alternative paradigm to traditional cost-based accounting system.

The purpose of this paper is to illustrate the application of the ABC method and to compare the results of the ABC with traditional costing methods. The results highlight the weak points of the application of traditional cost methods and identify products overcosted and undercosted company.

Keyword : Activity Based Costing, overheads, traditional costing

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk dan jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Untuk tujuan penentuan *cost* produksi, akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, kemudian menyajikan analisis terhadap penyimpangannya. Agar tidak terjadi distorsi penentuan harga pokok per unit, banyak perusahaan yang mengadopsi penggunaan sistem penentuan harga pokok berbasis aktivitas (*Activity Based Costing*) yang menjadi bagian dari akuntansi biaya. Dengan harapan manajemen melakukan analisis profitabilitas, mendorong perbaikan proses, mengembangkan ukuran kinerja yang lebih inovatif, dan dapat berpartisipasi dalam perencanaan strategi.

Activity Based Costing adalah model ekonomis yang mengidentifikasi *cost pools* atau pusat-pusat aktivitas dalam suatu organisasi dan menempatkan biaya-biaya ke *cost drivers* yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas (Derya Eren Akyol, Gonca Tuncel, dan G Mirac Bayhan;2005). *Activity Based Costing* digunakan untuk menentukan biaya produk guna keperluan laporan manajemen khusus. Sistem ini biasanya digunakan sebagai suplemen untuk sistem yang biasa dilakukan perusahaan. Kebanyakan organisasi yang menggunakan sistem ABC memiliki dua sistem biaya yaitu biaya sistem resmi yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan eksternal dan biaya berbasis aktivitas sistem yang digunakan untuk pembuatan keputusan internal dan kegiatan pengelolaan.

Dengan adanya metode *Activity Based Costing* maka perusahaan akan memperoleh informasi biaya pada setiap proses produksi supaya biaya dari produk yang berbeda dapat

dibandingkan (Cooper, Tuney, 1990). Oleh sebab itu, perusahaan harus menggunakan *Activity Based Costing* untuk menentukan aktivitas nyata yang menyebabkan biaya-biaya (Michael Maher, 230).

2. LANDASAN TEORI

Akuntansi Biaya Tradisional

Sistem akuntansi biaya tradisional mengasumsikan bahwa semua biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya tetap dan biaya variabel yang berhubungan dengan perubahan pada unit atau volume produksi. Dalam akuntansi biaya tradisional, penentuan biaya produksi pada suatu produk hanya menggunakan *cost driver* yang berdasarkan unit. *Cost driver* berdasarkan unit membebankan *overhead* ke produk melalui tarif *plantwide* dan tarif departemen.

Pada tarif *plantwide* diasumsikan bahwa semua jenis biaya *overhead* pabrik dapat dijelaskan oleh satu jenis *cost driver*. *Direct attribution* digunakan untuk menentukan biaya pada kelompok *plantwide* dan kemudian tarif *plantwide* dihitung dengan menggunakan *cost driver*. Pembebanan biaya *overhead* pabrik ke produk dilakukan dengan cara mengkalikan tarif *plantwide* dengan kuantitas *cost driver* yang digunakan pada satu produk.

Pada tarif departemen, biaya *overhead* pabrik ditentukan di masing-masing departemen produksi dengan menggunakan *direct attribution*, *driver tracing* dan alokasi. Tarif departemen dihitung dengan menggunakan *cost driver* berdasarkan unit dan kemudian biaya *overhead* pabrik dibebankan ke produk dengan cara mengkalikan tarif departemen dengan kuantitas *cost driver* yang digunakan departemen.

ACTIVITY BASED COSTING

Salah satu model perhitungan yang inovatif untuk berhubungan dengan ketidakefisienan sistem perhitungan tradisional adalah *Activity Based Costing*. ABC, yang dipelopori oleh Robin Cooper, Robert Kaplan and H. Thomas Johnson (Cooper, 1988a, 1988b, 1990; Cooper and Kaplan, 1988), adalah metodologi perhitungan yang digunakan untuk mengusut biaya-biaya *overhead* ke biaya objek yang merupakan produk, proses, jasa atau konsumen dan membantu para manager untuk mengambil keputusan mengenai produk campuran dan strategi bersaing. ABC dapat mengubah secara radikal bagaimana para manager menentukan campuran dari garis produk mereka, harga produk mereka, mengidentifikasi lokasi untuk komponen-komponen sumber daya dan mentaksir teknologi baru. Juga kejelasan menggunakan ABC untuk mengatur lebih efektif (Granof et al., 2000).

Activity Based Costing adalah model ekonomi yang mengidentifikasi *cost pool* atau pusat-pusat aktivitas di dalam suatu organisasi dan menepatkan biaya-biaya ke *cost drivers* yang berhubungan ke aktivitas-aktivitas yang terdiri dari beberapa level:

- 1) *Unit level drivers* yang mengasumsikan kenaikan dari masukan-masukan untuk setiap *batch* yang sedang dibuat.
- 2) *Batch level drivers* yang mengasumsikan perbedaan dari masukan-masukan untuk setiap *batch* yang sedang dibuat.
- 3) *Product level drivers* yang mengasumsikan kebutuhan dari masukan-masukan untuk mendukung produksi dari setiap perbedaan jenis dari produk.
- 4) *Facility level drivers* adalah *drivers* yang berhubungan dengan fasilitas dalam proses manufaktur.

Pemakai dari ABC sistem akan membutuhkan untuk mengidentifikasi aktivitas yang menimbulkan biaya dan kemudian sesuaikan aktivitas ke level dasar untuk menentukan biaya ke produk.

Ketika menggunakan ABC sistem, aktivitas yang menimbulkan biaya harus ditentukan dan kemudian harus dicocokkan ke level *driver* yang digunakan untuk menentukan biaya ke produk.

Prosedur Alokasi Dua Tahap

Sistem *Activity-Based Costing* (ABC) berbeda dengan sistem tradisional dalam dua hal : *Pertama*, *cost pool* didefinisikan sebagai aktivitas atau pusat aktivitas dan bukan sebagai pabrik atau pusat biaya departemen. *Kedua*, *cost driver* yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya adalah *driver* aktivitas yang mendasarkan pada hubungan sebab akibat. Pendekatan tradisional menggunakan *driver* tunggal yang mendasarkan kepada volume yang seringkali tidak melihat hubungan antara biaya sumber daya dengan objek biaya.

Modifikasi ini menyebabkan prosedur dua tahap menyebabkan sistem *Activity-Based Costing* (ABC) melaporkan biaya aktivitas yang berbeda secara lebih akurat dibandingkan dengan sistem tradisional. Karena sistem tersebut mengidentifikasi secara jelas biaya dari aktivitas yang berbeda-beda yang ada di perusahaan. Sistem tersebut juga membebankan biaya aktivitas ke objek biaya *output* dengan menggunakan ukuran yang dapat menunjukkan permintaan produk atau jasa terhadap aktivitas tersebut.



3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana di dalam penelitian ini biaya-biaya di dalam perusahaan diolah untuk mengetahui harga pokok produksi. Teknik pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yaitu percakapan antara dua pihak yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tertentu mengenai penelitian ini, Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari perusahaan, dan studi pustaka.

4. PEMBAHASAN

Perhitungan harga pokok produksi di bawah ini dilakukan pada perusahaan Kontarktor di Semarang yang dalam pembangunan dibagi menjadi tiga bagian yaitu bangunan, interior dan mekanikal. Untuk setiap produk tersebut masing-masing memiliki tipe-tipe yang berbeda. Untuk produk Bangunan dengan tipe Cassanova, Bravo, Vega dan Clasic, untuk produk Interior dengan tipe Exclusive_1, Exclusive_2, Exclusive_3 dan Exclusive_4, untuk produk Mekanikal dengan tipe Electrician, Ericston, Vista dan Rasta. Perusahaan juga mengambil kebijakan untuk membagi biaya atas produk tersebut dengan perbandingan 6:3:1 (Bangunan: Interior: Mekanikal).

Berikut disajikan perhitungan Harga pokok untuk tiap-tiap jenis produk

DATA PRODUKSI RATA-RATA PER UNIT PRODUK

Keterangan	Jenis Produk/Type				
	CASANOVA	BRAVO	VEGA	CLASSIC	TOTAL
Bangunan	125	65	50	35	
Unit Produksi (unit)	60	58	62	45	225
Bahan baku (Rp)	152,758,420.20	79,434,368.10	61,103,360.08	42,772,352.06	336,068,500.44
Jam TKL (jam)	960	750	600	480	2,790
Jam kerja mesin (jam)	720	540	450	360	2,070
Kapasitas normal (Unit)	60	60	65	50	235.00
Biaya TKL	99,292,900.00	51,632,000.00	39,717,180.00	21,386,175.00	212,028,255.00
INTERIOR	EXCLUSIVE_1	EXCLUSIVE_2	EXCLUSIVE_3	EXCLUSIVE_4	
Unit Produksi	60	58	62	45	225
Bahan baku (Rp)	53,465,400.00	27,802,000.00	21,386,175.00	14,970,300.00	117,623,875.00
Jam TKL	232	168	120	56	576
Jam kerja mesin	174	126	90	42	432
Kapasitas normal	60	60	65	50	235
Biaya TKL	15,660,000.00	11,340,000.00	8,100,000.00	3,780,800.00	38,880,000.00
MEKANIKAL	ELEKTRICAL	ERICSTON	VISTA	RASTA	
Unit produksi	60	58	62	45	225
Bahan baku (Rp)	45,827,500.00	23,830,300.00	18,331,000.00	12,831,700.00	100,820,500.00
Jam TKL	168	136	88	40	432
Jam kerja mesin	126	102	66	30	324
Kapasitas normal	60	60	65	50	235
Biaya TKL	6,468,000.00	5,236,000.00	3,388,000.00	1,540,000.00	16,632,000.00

Biaya Overhead Pabrik Rata-Rata

BIAYA OVERHEAD PABRIK	Total BOP
BOP Variabel	
1. BAHAN PENOLONG	195,352,125.00
2. UPAH TAK LANGSUNG	202,665,874.00
3. BIAYA INTENSIF	302,549,097.00
4. BIAYA THR	53,699,757.00
5. BIAYA LISTRIK	737,829,765.00
6. BIAYA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	673,755,483.00
7. UPAH BORONGAN	59,184,222.00
8. BIAYA BONGKAR MUAT BARANG	84,582,396.00
9. BIAYA FINISHING	69,007,837.00
10. BIAYA DESIGN	47,415,791.00
11. BIAYA PEMASARAN	25,326,191.00
12. BIAYA ADMINISTRASI UMUM	22,378,564.00
Jumlah	2.473.747.102.00
BOP Tetap	
13. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	178,849,658.00
14. BIAYA PENYUSUTAN GEDUNG	77,648,374.00
15. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	24,899,783.00
16. BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	47,364,528.00
17. BIAYA ASURANSI	78,806,533.00
Jumlah	408.068.876.00
Total	2,881,815,978.00

Dari tabel di atas menunjukkan konsumsi keseluruhan biaya *overhead* pabrik yang belum dialokasikan ke tiap jenis produk.

Pembebanan Biaya Overhead Pabrik ke masing-masing produk

BIAYA OVERHEAD PABRIK		BANGUNAN	INTERIOR	MEKANIKAL	JUMLAH
BOP VARIABEL					
1	BAHAN PENOLONG	117,211,275.00	58,605,637.50	19,535,212.50	195,352,125.00
2	UPAH TAK LANGSUNG	121,599,524.40	60,799,762.60	20,266,587.40	202,665,874.00
3	BIAYA INTENSIF	181,529,458.20	90,764,729.10	30,254,904.70	302,549,097.00
4	BIAYA THR	32,219,854.20	16,109,927.10	5,369,975.70	53,699,757.00
5	BIAYA LISTRIK	442,697,859.00	221,348,929.50	73,782,976.50	737,829,765.00
6	BIAYA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	404,253,289.80	202,126,644.90	67,375,548.30	637,755,483.00
7	UPAH BORONGAN	35,510,533.20	17,755,266.60	5,918,422.20	59,184,222.00
8	BIAYA BONGKAR MUAT BARANG	50,749,437.60	25,374,718.80	8,458,239.60	84,582,396.00
9	BIAYA FINISHING	41,404,702.20	20,702,351.10	6,900,783.70	69,007,837.00
10	BIAYA DESIGN	28,449,474.60	14,224,737.30	4,741,579.10	47,415,791.00
11	BIAYA PEMASARAN	15,195,714.60	7,597,857.30	2,532,619.10	25,326,191.00
12	BIAYA ADMINISTRASI UMUM	13,427,138.40	6,713,569.20	2,237,856.40	22,378,564.00
	JUMLAH	1,484,248,261.20	742,124,130.60	247,374,710.20	2,473,747,102.00
BOP TETAP					
13	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	107,309,794.80	53,654,897.40	17,884,965.80	178,849,658.00
14	BIAYA PENYUSUTAN GEDUNG	46,589,024.40	23,294,512.20	7,764,837.40	77,648,374.00
15	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	14,939,869.80	7,469,934.90	2,489,987.30	24,899,783.00
16	BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	28,718,716.80	14,359,358.40	4,786,452.80	47,864,528.00
17	BIAYA ASURANSI	47,283,919.80	23,641,959.90	7,880,653.30	78,806,533.00
	JUMLAH	244,841,325.60	122,420,662.80	40,806,887.60	408,068,876.00
	TOTAL	1,729,089,586.80	864,544,793.40	288,181,597.80	2,881,815,978.00

Tabel di atas menunjukkan perbedaan konsumsi biaya *overhead* pabrik antara jenis produk yang satu dengan jenis produk yang lain. Hal ini dikarenakan perbedaan jumlah produksi tiap jenis produk dan pembebanan biaya secara proporsional. Data ini selanjutnya akan digunakan dalam perhitungan harga pokok produk untuk tiap jenis produk.

PERHITUNGAN HPP DENGAN METODE FULL COSTING

KETERANGAN	BANGUNAN			
	CASSANOVA	BRAVO	VEGA	CLASSIC
	125	65	50	35
Biaya bahan Baku (Rp)	152,758,400.20	79,434,368.10	61,103,360.08	42,772,352.06
Biaya Tenaga Kerja Langsung	99,292,900.00	51,632,000.00	39,717,180.00	21,386,175.00
BOP	7,638,536.92	7,674,463.75	7,688,950.37	7,754,301.14
HPP	259,689,827.12	138,740,831.85	108,509,490.45	71,912,828.20

KETERANGAN	INTERIOR			
	EXCLUSIVE_1	EXCLUSIVE_2	EXCLUSIVE_3	EXCLUSIVE_4
	125	65	50	35
Biaya Bahan baku (Rp)	53,465,400.00	27,802,000.00	21,386,175.00	14,970,300.00
Biaya Tenaga Kerja Langsung	15,660,000.00	11,340,000.00	8,100,000.00	3,780,000.00
BOP	3,819,268.00	3,837,231.87	3,844,475.19	3,877,150.57
HPP	72,944,668.00	42,979,231.87	33,330,650.19	22,627,450.57

KETERANGAN	MEKANIKAL			
	ELECTRICIAN	ERICSTON	VISTA	RASTA
	125	65	50	35
Biaya bahan baku (Rp)	45,827,500.00	23,830,300.00	18,331,000.00	12,831,700.00
Biaya Tenaga Kerja Langsung	6,468,000.00	5,236,000.00	3,388,000.00	1,540,000.00
BOP	1,273,089.49	1,279,077.29	1,281,491.73	1,292,383.52
HPP	53,568,589.49	30,345,377.29	23,000,491.73	15,664,083.52

Tabel di atas menunjukkan hasil dari perhitungan Harga pokok produksi yang telah dilakukan. Dari tabel di atas dapat dilihat harga pokok produksi untuk prodk bangunan dengan tipe Cassanova sebesar 259.689.827,12, Bravo sebesar 138.740.831,85, Vega sebesar 108.509.490,45, dan Classic sebesar 71.912.828,20. Untuk produk Interior dengan tipe Exclusive_1 sebesar 72.944.668,00, Exclusive_2 sebesar 42.979.231,87, Exclusive_3 sebesar 33.330.650,19, dan Exclusive_4 sebesar 22.627.450,57. Untuk produk Mekanikal dengan tipe Electrician sebesar 53.568.589,49, Ericston sebesar 30.345.377,29, Vista sebesar 23.000.491,73, dan Rasta sebesar 15.664.083,52.

PERHITUNGAN HPP DENGAN METODE VARIABEL COSTING

KETERANGAN	BANGUNAN			
	CASSANOVA	BRAVO	VEGA	CLASSIC
	125	65	50	35
Biaya bahan Baku (Rp)	152,758,400.20	79,434,368.10	61,103,360.08	42,772,352.06
Biaya Tenaga Kerja Langsung	99,292,900.00	51,632,000.00	39,717,180.00	21,386,175.00
BOP	11,244,305.81	6,048,660.27	4,352,633.94	4,197,873.62
HPP	263,295,606.01	137,115,028.37	105,173,174.02	68,356,400.68

KETERANGAN	INTERIOR			
	EXCLUSIVE_1	EXCLUSIVE_2	EXCLUSIVE_3	EXCLUSIVE_4
	125	65	50	35
Biaya Bahan baku (Rp)	53,465,400.00	27,802,000.00	21,386,175.00	14,970,300.00
Biaya Tenaga Kerja Langsung	15,660,000.00	11,340,000.00	8,100,000.00	3,780,000.00
BOP	5,622,152.67	3,024,329.57	2,176,318.72	2,098,935.34
HPP	74,747,552.67	42,166,329.57	31,662,493.72	20,849,235.34

KETERANGAN	MEKANIKAL			
	ELECTRICIAN	ERICSTON	VISTA	RASTA
	125	65	50	35
Biaya bahan baku (Rp)	45,827,500.00	23,830,300.00	18,331,000.00	12,831,700.00
Biaya Tenaga Kerja Langsung	6,468,000.00	5,236,000.00	3,388,000.00	1,540,000.00
BOP	1,874,050.83	1,008,110.10	725,439.03	699,645.64
HPP	54,169,550.83	30,074,410.10	22,444,439.03	15,071,345.64

Tabel di atas menunjukkan hasil dari perhitungan Harga pokok produksi yang telah dilakukan. Dari tabel di atas dapat dilihat harga pokok produksi untuk prodk bangunan dengan tipe Cassanova sebesar 263.295.606,01, Bravo sebesar 137.115.028,37, Vega sebesar 105.173.174,02, dan Classic sebesar 68.356.400,68. Untuk produk Interior dengan tipe Exclusive_1 sebesar 74.747.552,67, Exclusive_2 sebesar 42.166.329,57, Exclusive_3 sebesar 31.662.493,72, dan Exclusive_4 sebesar 20.849.235,34. Untuk produk Mekanikal dengan tipe Electrician sebesar 54.169.550,83, Ericston sebesar 30.074.410,10, Vista sebesar 22.444.439,03, dan Rasta sebesar 15.071.345,64.

PERHITUNGAN HPP DENGAN METODE ABC

Rekapitulasi Pengelompokan ke dalam Cost Pool

KETERANGAN	BANGUNAN	INTERIOR	MEKANIKAL	JUMLAH
BOP				
LEVEL UNIT				
BAHAN PENOLONG	117,211,275.00	58,605,637.50	19,535,212.50	195,325,125.00
UPAH TAK LANGSUNG	121,599,524.40	60,799,762.20	20,266,587.40	202,665,874.00
BIAYA INTENSIF	181,529,458.20	90,764,729.10	30,254,909.70	302,549,097.00
BIAYA THR	32,219,854.20	16,109,927.10	5,369,975.70	53,699,757.00
TOTAL	452,560,111.80	226,280,055.90	75,426,685.30	754,266,853.00
BIAYA LISTRIK	442,697,859.00	221,348,929.50	73,782,976.50	737,829,765.00
BIAYA BAHAN BAKAR & PELUMAS	404,253,289.80	202,126,644.90	67,375,548.30	673,755,483.00
TOTAL	846,951,148.80	423,475,574.40	141,158,524.80	1,411,585,248.00
LEVEL BATCH				
UPAH BORONGAN	35,510,533.20	17,755,266.60	5,918,422.20	59,184,222.00
BIAYA BONGKAR MUAT BARANG	50,749,437.60	25,374,718.80	8,458,239.60	84,582,369.00
BIAYA FINISHING	41,404,702.20	20,702,351.10	6,900,783.70	69,007,837.00
TOTAL	127,664,673.00	63,832,336.50	21,277,445.50	212,774,455.00
LEVEL PRODUK				
BIAYA DESIGN	28,449,474.60	14,224,737.30	4,741,579.10	47,415,791.00
BIAYA PEMASARAN	15,195,714.60	7,597,857.30	2,532,619.10	25,326,191.00
BIAYA ADMINISTRASI UMUM	13,427,138.40	6,713,569.20	2,237,856.40	22,378,564.00
TOTAL	57,072,327.60	28,536,163.80	9,512,054.60	95,120,546.00
LEVEL FASILITAS				
BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	107,309,794.80	53,654,897.40	17,884,965.80	178,849,658.00
BIAYA PENYUSUTAN GEDUNG	46,589,024.40	23,294,512.20	7,764,837.40	77,648,374.00
BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	14,939,869.80	7,469,934.90	2,489,987.30	24,899,783.00
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	28,718,716.80	14,359,358.40	4,786,452.80	47,864,528.00
BIAYA ASURANSI	47,283,919.80	23,641,959.90	7,880,653.30	78,806,533.00
	244,841,325.60	122,420,662.80	40,806,887.60	408,068,876.00
	1,729,089,586.80	865,544,793.40	288,181,597.80	2,881,813,987.00

Setelah pengklasifikasian berbagai aktivitas ke dalam salah satu dari empat level kategori, selanjutnya biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan *cost driver* yang mencerminkan hubungan sebab akibat antara konsumsi aktivitas dengan biaya. Setiap kelompok aktivitas dapat dibentuk beberapa kelompok biaya dan setiap kelompok biaya, digunakan satu *cost driver*.

KETERANGAN	BANGUNAN			
	CASSANOVA	BRAVO	VEGA	CLASSIC
	125	65	50	35
Biaya bahan Baku (Rp)	152,758,400.20	79,434,368.10	61,103,360.08	42,772,352.06
Biaya Tenaga Kerja Langsung	99,292,900.00	51,632,000.00	39,717,180.00	21,386,175.00
BOP	9,368,329.88	7,805,749.92	6,452,773.34	6,982,154.58
HPP	261,419,420.08	138,872,118.02	107,273,313.42	71,140,681.64

KETERANGAN	INTERIOR			
	EXCLUSIVE_1	EXCLUSIVE_2	EXCLUSIVE_3	EXCLUSIVE_4
	125	65	50	35
Biaya Bahan baku (Rp)	53,465,400.00	27,802,000.00	21,386,175.00	14,970,300.00
Biaya Tenaga Kerja Langsung	15,660,000.00	11,340,000.00	8,100,000.00	3,780,000.00
BOP	4,568,490.86	3,925,615.00	3,267,629.30	2,849,450.34
HPP	73,693,890.86	43,067,615.00	32,753,804.30	21,599,750.34

KETERANGAN	MEKANIKAL			
	ELECTRICIAN	ERICSTON	VISTA	RASTA
	125	65	50	35
Biaya bahan baku (Rp)	45,827,500.00	23,830,300.00	18,331,000.00	12,831,700.00
Biaya Tenaga Kerja Langsung	6,468,000.00	5,236,000.00	3,388,000.00	1,540,000.00
BOP	3,211,033.78	3,072,810.95	2,596,714.68	2,406,664.58
HPP	55,506,533.78	32,094,110.95	24,315,714.68	16,778,364.58

Tabel di atas menunjukkan hasil dari perhitungan Harga pokok produksi yang telah dilakukan. Dari tabel di atas dapat dilihat harga pokok produksi untuk prodk bangunan dengan tipe Cassanova sebesar 261.419.420,08, Bravo sebesar 138.872.118,02, Vega sebesar 107.273.313,42 dan Classic sebesar 71.140.681,64. Untuk produk Interior dengan tipe Exclusive_1 sebesar 73.693.890,86, Exclusive_2 sebesar 43.067.615,00, Exclusive_3 sebesar 32.753.804,30, dan Exclusive_4 sebesar 21.599.750,34. Untuk produk Mekanikal dengan tipe Electrician sebesar 55.506.533,78, Ericston sebesar 32.094.110,95, Vista sebesar 24.315.714,68, dan Rasta sebesar 16.778.364,58.

PERBANDINGAN HARGA POKOK PRODUKSI ANTARA METODE FULL COSTING, VARIABEL COSTING DAN METODE ABC

KETERANGAN	BANGUNAN			
	CASSANOVA	BRAVO	VEGA	CLASSIC
	125	65	50	35
Metode Full Costing	259,689,837.12	138,740,831.85	108,509,490.45	71,912,828.20
Metode Variabel Costing	263,295,606.01	137,115,028.37	105,173,174.02	68,356,400.68
Metode ABC	261,419,420.08	138,872,228.02	107,273,313.42	71,140,681.64

KETERANGAN	INTERIOR			
	EXCLUSIVE_1	EXCLUSIVE_2	EXCLUSIVE_3	EXCLUSIVE_4
	125	65	50	35
Metode Full Costing	72,944,668.00	42,979,231.87	33,330,650.19	22,627,450.57
Metode Variabel Costing	74,747,552.67	42,116,329.57	31,662,493.72	20,849,235.34
Metode ABC	73,693,890.86	43,067,615.00	32,753,804.30	21,599,750.34

KETERANGAN	MEKANIKAL			
	ELECTRICIAN	ERICSTON	VISTA	RASTA
	125	65	50	35
Metode Full Costing	54,075,057.95	30,869,310.18	23,531,466.73	16,226,826.26
Metode Variabel Costing	54,169,550.83	30,074,410.10	22,444,439.03	15,071,345.64
Metode ABC	55,506,533.78	32,094,110.95	24,315,714.68	16,778,364.58

Setelah melakukan perhitungan dengan pendekatan tradisional dengan metode *Activity Based Costing* maka dilakukan perbandingan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan *Activity Based Costing*. Ada beberapa produk yang menunjukkan hasil yang lebih efektif dengan pendekatan tradisional yaitu dengan metode *full costing* dapat dilihat pada produk bangunan type cassanova dan bravo yaitu selisih 1.729.582,96 dan 86.286,17 dengan metode ABC, pada produk interior type electrician_1 dan electrician_2 yaitu selisih 749.222,86 dan 88.383,13 dengan metode ABC, pada produk mekanikal lebih efektif menggunakan metode *full costing* dibandingkan dengan metode ABC. Dengan metode *variabel costing* dapat dilihat pada produk bangunan type bravo, vega dan classic yaitu selisih 1.757.089,65, 2.100.170,40, 2.784.280,96 dengan metode ABC, pada produk interior

type exclusive_1, exclusive_2, dan exclusive_3 yaitu selisih 901.285,43, 1.091.310,58, 750.515,00, pada produk mekanikal lebih efektif menggunakan metode *variabel costing* dibandingkan dengan metode ABC. Sedangkan ada beberapa produk yang lebih efektif dengan *Activity Based Costing* dibandingkan dengan metode tradisional. Dapat dilihat pada produk bangunan type vega dan classic yaitu selisih 1.236.177,03 dan 772.146,56 dengan metode *full costing*, pada produk interior type exclusive_3 dan exclusive_4 yaitu selisih 576,845.89 dan 1.027.700,23 dengan metode *full costing*. Pada produk bangunan type cassanova yaitu selisih 1.840.185,93 dengan metode *variabel costing*, pada produk interior type exclusive_1 yaitu selisih 1.053.661,81 dengan metode *variabel costing*.

5. KESIMPULAN

Dalam analisis perhitungan tersebut terlihat bahwa metode tradisional membebankan lebih besar overhead terhadap produk dengan volume yang lebih tinggi dan cenderung membebankan secara relatif lebih kecil terhadap produk dengan volume yang lebih rendah yang nantinya akan berpengaruh terhadap penentuan besarnya harga jual masing-masing produk. Hal ini dapat dilihat pada produk bervolume tinggi yang mendapat pembebanan biaya yang lebih tinggi dan sebaliknya. Akan tetapi metode tradisional tidak selamanya tidak efisien. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan apabila perusahaan menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional dan unit produksi sebagai satu-satunya dasar pengalokasian biaya overhead pabriknya. Sedangkan sistem biaya Activity Based Costing dapat melaporkan biaya produksi lebih tepat dibandingkan dengan sistem tradisional, karena Activity Based Costing tidak hanya menggunakan alokasi biaya berdasarkan unit, jam kerja mesin atau jam tenaga kerja saja tetapi juga berdasarkan kapasitas normal dan jumlah produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyol, Derya Eren, Gonca Tuncel, and G. Mirac Bayhan .2005. *A comparative analysis of activity-based costing and traditional costing*. Word Academy of Science, Engineering and Technology 3.
- Cooper R 1987. *The Two-Stage Procedure in Cost Accounting: Part Two. J. Cost Manage*. Manufacturing Industry.
- Cooper R, Kaplan R 1988. *Measure Cost Right: Make the Right Decisions*. Harv. Bus. Rev., 66.
- Granof M, Platt D, Vaysman I . 2000. *Using Activity-Based Costing to Manage More Effectively*, PriceWaterhouseCoopers.
- Hansen Mowen, *Akuntansi Manajemen, 2004*
- Ian Ruskin Brown, *Activity Based Costing, 2003*
- Mulyadi, 2003, *Activity Based Cost System*, Edisi Keenam, Jakarta: Salemba Empat.
- Maher, M. 1999. *Cost Accounting*, University of California.
- Mladenka Blagojevic, Dejan Markovic, Momcilo Kujacic and Momcilo Dobrodolac.2010. *Applying Activity Based Costing Model on Cost Accounting of Provider of Universal Postal Services in Developing Countries*. African Journal of Business Management Vol. 4(8), pp. 1605-1613.
- Sorin Briciu¹, Sorinel Capusneanu².2010. *Effective Cost Analysis Tools Of The Activity Based Costing (ABC) Method*. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica.

PENGARUH *EARNINGS MANAGEMENT* MEMEDIASI HUBUNGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PESERTA CGPI TAHUN 2004 -2008

Eni Wuryani

eniwuryani_bm@yahoo.com

Abstrak

The purpose of this research was to prove and analyze the influence of Good Corporate Governance on earnings management and on company performance. This research used data census, population of this research were 69 data taken from public company listed as participants of Corporate Governance Perception Index (CGPI) in the period of 2004-2008. This research used a path analysis test. The result showed that Good Corporate Governance simultaneously influenced earnings management and company performance. The result showed that Good Corporate Governance influenced significant on earnings management. Earnings management not influenced mediation relationship Good Corporate Governance on company performance. Earnings management influenced significant on company performance.

Keywords: *Good Corporate Governance, earnings management, company performance*

1. Pendahuluan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang melandasi hubungan antara manajer dan pemilik. Manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal. Kondisi agen dan prinsipal ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba. Adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dan fungsi pengendalian (*control*) dalam hubungan keagenan sering menimbulkan masalah-masalah keagenan (*agency problems*).

Terkait dengan mekanisme *good corporate governance*, Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan teori keagenan untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan antara *principals* dan *agents*, salah satunya dengan melalui pengelolaan yang baik (*good corporate governance*). *Good Corporate Governance* berpegang pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, mandiri dan kewajaran. *Corporate governance* dapat memberikan keyakinan pada investor tentang *return* yang diperoleh atas investasi ditanamkan (Shleifer and Vishny, 1997). Di Indonesia laporan hasil riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) secara kontinyu dilakukan tiap tahun sejak tahun 2001. Selanjutnya hasil riset dan pemeringkatan ini dipublikasikan oleh Majalah SWA dan IICG secara nasional dan internasional.

Laba menjadi pertimbangan investor dalam mengukur kinerja manajemen untuk mengambil keputusan investasinya tanpa mempertimbangkan prosedur yang digunakan. Pilihan kebijakan yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan *earnings management*. *Earnings management* dapat dilakukan karena Pernyataan Standar Akuntansi memberikan berbagai pilihan kebijakan dan prosedur akuntansi pada

manajemen perusahaan serta membutuhkan *judgment* dari manajer dalam mempersiapkan keuangan, sehingga tercipta fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan manajer untuk kepentingannya.

Earnings management yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien (meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat) dan dapat bersifat oportunistik yaitu manajemen melaporkan laba yang dapat dianggap sebagai pemanipulasian informasi dan lebih merefleksikan keinginan manajemen daripada performa keuangan perusahaan. Apabila pengelolaan oportunistik, maka informasi laba rekayasa dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah.

Earnings management merupakan salah satu bentuk rekayasa laba yang dilakukan manajemen dalam beberapa periode dengan tujuan menampilkan gambaran arus laba yang stabil (Dechow and Skinner, 2000). Perataan penghasilan merupakan upaya manajer untuk menekan variabilitas laba perusahaan pada sejumlah periode tertentu dengan tujuan memperoleh tingkat laba sesuai dengan yang diharapkan. *Earnings management* adalah cara untuk menekan volatilitas laba dengan menurunkan jumlah yang dilaporkan pada saat mengalami laba dan menaikkan angka laba laporan ketika kurang memenuhi ekspektasi.

Motivasi dari penelitian ini sebagai berikut: Pertama, isu mengenai penilaian pelaksanaan GCG yang dipakai acuan penilaian IICG belum pernah diteliti secara empiris sebelumnya. Penilaian pelaksanaan GCG sebagai alat ukur CGPI yang dilakukan IICG melalui 4 penilaian yaitu: *self assessment*, kelengkapan dokumen, makalah dan presentasi, observasi perusahaan. Kedua, konsep *corporate governance* tidak hanya melekat pada sistem dan penataan struktur melainkan menjadi bagian strategis dan memberikan arahan masa depan serta perilaku dan sikap perusahaan terhadap tantangan dan perubahan yang dihadapi dengan tetap memegang prinsip bisnis yang beretika, profesional, dan bertanggungjawab. Hal ini berkaitan dengan tindakan *earnings management* untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Ketiga, hasil penelitian ini mempunyai implikasi penting bagi perseroan terbuka dalam menciptakan keunggulan dan kinerja perusahaan yang unggul dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* dan pemegang saham.

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis

2.1 Good Corporate Governance dan Earnings Management

Pengaruh *good corporate governance* terhadap *earnings management* ditunjukkan pada penelitian Kanagaretnam *et al.* (2007) *good corporate governance* memperkecil *information asymmetry* saat mendekati triwulan pengumuman *earnings*. Tingkat kualitas *corporate governance* diperuntukkan semua investor terhadap informasi perusahaan. Menurut Liu and Zhou (2007) ada perbedaan sistematis dalam *earnings management* pada perusahaan Cina yang listing 1999-2005, perusahaan dengan tingkat *corporate governance* yang tinggi akan menyebabkan tingkat *earnings management* rendah. Penelitian di Cina mempunyai keadaan yang spesifik, perusahaan yang listing mempunyai insentif yang kuat dalam mengendalikan *earnings* dengan menerapkan *return on equity* (ROE) yang dapat dipercaya dan *earnings management* secara nyata.

Menurut Cornett *et al.* (2009) meneliti interaksi kinerja perusahaan, mekanisme *corporate governance* dan *earnings management*. Didalam penelitiannya menyatakan *corporate governance* memainkan peranan dalam *earnings* dan *earnings management*. Zaenal (2003) menemukan bahwa pengumuman *earnings* yang dilakukan oleh perusahaan yang bagus *corporate governance*-nya tidak secara signifikan meningkatkan *value* relevan dari pengumuman *earnings* namun secara signifikan menurunkan divergensi ekspektasi investor, terbukti dengan volume perdagangan yang signifikan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai *corporate governance* kurang bagus.

H₁: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*.

2.2 Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Berghe dan Rider dalam Kakabadse *et al.* (2001) menyatakan hubungan kinerja perusahaan dengan *corporate governance* tidak mudah dilakukan. Hasil penelitian Deni *et al.* (2004) dengan sampel perusahaan publik di Indonesia yang masuk pemeringkatan penerapan *corporate governance*, menemukan hasil bahwa *corporate governance* baru bisa memiliki keterkaitan dengan kinerja operasi perusahaan diukur dengan rasio *return on equity*, sedangkan keterkaitan terhadap kinerja pasar tidak ditemukan. Hal ini disebabkan respon pasar terhadap implementasi *corporate governance* tidak bisa secara langsung direspon tetapi membutuhkan waktu atau ada kemungkinan masih rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap efektivitas pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia. Penelitian dengan hasil yang sama dikemukakan oleh Lastanti (2005) dan Majidah (2005).

Menurut Cornett *et al.* (2009) kinerja perusahaan dan mekanisme *corporate governance* merupakan upaya yang berkaitan (mendukung). Brown and Caylor (2006) menyatakan penilaian *Governance* signifikan dan positif dengan Kinerja perusahaan (*Tobin's Q*). Hal senada dilakukan oleh Black *et al.* (2005); Klaper dan Love (2002) yang memberikan bukti bahwa *corporate governance* merupakan faktor penting dalam menjalankan kinerja perusahaan.

Pada penelitian ini akan menguji variabel pengaruh *earnings management* sebagai mediasi antara GCG dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian *earnings management* bisa sebagai mediasi hubungan antara GCG dan kinerja perusahaan atau sebaliknya *earnings management* tidak mempunyai pengaruh mediasi hubungan antara GCG dan kinerja perusahaan.

H₂: *Earnings management* berpengaruh signifikan memediasi hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kinerja perusahaan

2.3 Earnings Management dan Kinerja Perusahaan

Manajemen melakukan *earnings management* karena bertujuan mempengaruhi persepsi investor akan kinerja perusahaan. Beattie *et al.* (1994) menyatakan bahwa laba menjadi parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dan dasar bagi investor untuk mengambil keputusan tanpa memperhitungkan prosedur yang dilakukan. Laba mempunyai kekuatan untuk menjelaskan (*explanatory power*) perilaku keputusan investor untuk menjual, membeli atau menahan sekuritas ketika diperoleh informasi tentang laba dengan tetap memperhatikan tingkat kepercayaan investor terhadap relevansi, reabilitas dan kredibilitas sumber informasi. Berkenaan dengan laba rugi, SFAC No. 2 (FASB, 1980) menyatakan bahwa laporan laba-rugi sangat penting bagi para pemakainya (*users*) karena mempunyai nilai prediktif. Mereka menggunakan informasi laba untuk membantu dalam mengevaluasi kinerja manajemen; mengestimasi *earnings power* atau lainnya yang mereka nilai sebagai representasi kemampuan laba perusahaan dalam jangka panjang; memprediksi laba masa datang atau menilai resiko berinvestasi.

Earnings management dilakukan untuk menghasilkan laba yang dinikmati oleh investor sehingga apabila kinerja perusahaan tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan kepentingannya, maka *management* akan termotivasi untuk melakukan *earnings management*, sehingga *earnings management* akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Suranta dan Madiastuty (2004) yang menyimpulkan bahwa *earnings management* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (kinerja perusahaan menggunakan *index tobin's Q*). Penelitian Assih (2005) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan *earnings management* saat melakukan penawaran publik perdana saham, memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sejalan dengan penelitian Hunt *et al.* (1995) yang menghasilkan bukti bahwa kebijakan manajemen menyebabkan laba lebih mempunyai kandungan informasi kepada investor. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Herawati (2007) mendapat hasil yaitu *Earnings management* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian

Ujiyantho & Pramuka (2007) menyatakan *earnings management* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (*cash flow return on assets*)

H₃ : *Earnings management* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan pengambilan data empiris periode lima tahun (2004-2008). Penelitian ini juga mempertimbangkan bahwa pada periode tahun pengamatan IICG melakukan hasil perangkaan yang terakhir tahun 2008, sehingga penelitian ini mengambil data 5 tahun terakhir (2004-2008).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi variabel di atas, maka berikut ini dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel yang akan diteliti, sebagai berikut:

3.2.1 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance sebagai variabel eksogen (X1) merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, *shareholders* dan non pemegang saham. Dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* diukur dengan *index GCG system* yang dikeluarkan oleh IICG tahun 2004-2008 hanya pada perusahaan terbuka. Penilaian *index GCG system* mencakup (1) *self assessment* dengan nilai 15% (persen), (2) kelengkapan dokumen dengan nilai 25 % (persen), (3) makalah dan presentasi dengan nilai 12% (persen) dan (4) observasi perusahaan dengan nilai 48% (persen).

3.2.2 Earnings management

Earnings management sebagai variabel endogen dan variabel *intervening* (Y1) merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan *General Accepted Accounting Principles* (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan. Pada penelitian ini untuk menghitung *earnings management* menggunakan data *cross-section* dan *time series* pada perusahaan *go public* tahun 2004-2008 yang ikut perangkaan CGPI. *Earnings management* dalam penelitian dengan menghitung *Discretionary Accruals* (DA) *Earning management* dihitung dengan menggunakan formulasi model Healy (1985). Model Healy (1985) menghitung *earnings management* dengan langkah awal menghitung total akrual.

Total accruals (TA) didefinisikan sebagai berikut:

$$ACR = \frac{(\Delta CA - \Delta CL - \Delta Cash + \Delta STD - Dept)}{A} \dots\dots\dots(1)$$

$$NDA = \frac{TA}{T} \dots\dots\dots(2)$$

$$DA = TA - NDA \dots\dots\dots(3)$$

Nilai *Discretionary Accruals* (DA) menunjukkan besaran *earnings manajement* yang dilakukan oleh manajemen, semakin besar nilai *Discretionary Accruals* menunjukkan semakin besar *earnings management* yang dilakukan manajemen.

3.2.3 Kinerja perusahaan

Kinerja perusahaan sebagai variabel indogen (Y2) merupakan hasil kerja yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Pada penelitian ini untuk menghitung kinerja perusahaan menggunakan data *cross-section* dan *time series* pada perusahaan *go public* tahun 2004-2008. Pengukuran kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan *Tobin's Q*

sebagai pengukuran kinerja dari sisi eksternal. *Tobin's Q* sering digunakan sebagai *proxy* dalam menilai kualitas perusahaan atau *corporate opportunity*. Pada penelitian ini untuk menghitung kinerja perusahaan menggunakan data *cross-section* dan *time series* pada perusahaan *go public* tahun 2004-2008 yang ikut perangkaan CGPI.

Tobin's Q dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$Q = (EMV + D) / (EBV + D)$$

Equity Market Value (EMV) diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan (*Closing Prices*) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. Nilai *Tobin's Q* antara 0-1 menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut *undervalued*; nilai 1 menunjukkan bahwa *market value* merefleksikan nilai *asset* perusahaan, sedangkan jika *Tobin's Q* > 1 menunjukkan bahwa *market value* lebih besar dari nilai perusahaan.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik regresi SPSS melalui dua tahap. Pada penelitian untuk menguji pengaruh mediasi digunakan alat Uji Sobel.

4. Hasil Penelitian

Berdasarkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), Informasi penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* diperoleh dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Informasi data keuangan untuk mengetahui *earnings management* dan kinerja perusahaan dapat diperoleh dari BEI dan ICMD.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam pemilihan populasi pada penelitian ini yaitu: Perseroan Terbuka sebagai peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2004 – 2008 dan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 69 perusahaan yang memenuhi kriteria. Mengingat jumlah populasinya hanya 69, maka setiap unit analisis dalam populasi ini akan turut dianalisis, sehingga merupakan studi sensus.

Analisis statistik deskriptif hasil penelitian ditampilkan dalam **Tabel 4.1** berikut ini:

TABEL 4.1
STATISTIK DESKRIPTIF

	GCG	ERM	KJP
Maximum	90,65	0,09	1,88
Minimum	56,38	-0,12	0,4
Mean	78,5714	0,0086	1,1331
Std. Deviasi	7,55566	0,04174	0,32910
Kolmogorov-Smirnov Z	1,359	1,091	1,356
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,50	0,185	0,51

Sumber: Hasil olah data sekunder

Keterangan:

GCG = *Good Corporate Governance*

EM = *Earnings Management*

KP = Kinerja Perusahaan

4.1 Uji Asumsi Rekursif

Hasil pengujian asumsi rekursif seperti ditunjukkan pada **Tabel 4.2** dan **Tabel 4.3** menunjukkan bahwa VIF tidak lebih besar dari 10, oleh karena itu hasil uji model ini memenuhi asumsi model rekursif. Dapat disimpulkan bahwa model ini tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.2
UJI ASUMSI REKURSIF PADA VARIABEL ENDOGEN
EARNINGS MANAGEMENT (EM)

Varabel Eksogen	VIF	Kesimpulan
<i>Good Corporate Governance</i>	1,085	Tidak ada hubungan (saling bebas)

Sumber: Hasil olah data sekunder

Tabel 5.3
UJI ASUMSI REKURSIF PADA VARIABEL ENDOGEN
KINERJA PERUSAHAAN

Variabel Eksogen	VIF	Kesimpulan
<i>Good Corporate Governance</i>	1,305	Tidak ada hubungan (saling bebas)
<i>Earning Management</i>	1,605	Tidak ada hubungan (saling bebas)

Sumber: Hasil olah data sekunder

4.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji model regresi linear melihat ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi pada variabel endogen *earnings management* menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,184. Nilai Tabel *Durbin Watson* (DW) dengan jumlah $n=69$ dan variabel independen 2 ($k=2$) di sebesar 1,554 dan sebesar 1,672. Syarat tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif adalah $dl < DW < 4 - du$. Hasil uji autokorelasi menunjukkan $1,554 < 2,184 < 2,328$. Jadi dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

Uji autokorelasi pada variabel endogen kinerja perusahaan menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,312. Nilai Tabel *Durbin Watson* (DW) dengan jumlah $n=69$ dan variabel independen 2 ($k=2$) maka di sebesar 1,554 dan sebesar 1,672. Syarat tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif adalah $dl < DW < 4 - du$. Hasil uji autokorelasi menunjukkan $1,554 < 2,312 < 2,328$. Jadi dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas residual dalam penelitian ini menggunakan Uji statistik non - parametrik Kolmogorov – Smirnov (K- S). Pada variabel GCG besarnya nilai Kolmogorov – Smirnov adalah 1,359 dan signifikan pada 0,050 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Pada variabel ukuran perusahaan besarnya nilai Kolmogorov –Smirnov adalah 0,626 dan signifikan pada 0,829 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Pada variabel *earnings management* besarnya nilai Kolmogorov –Smirnov adalah 1,091 dan signifikan pada 0,185 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Pada variabel kinerja perusahaan besarnya nilai Kolmogorov –Smirnov adalah 0,356 dan signifikan pada 0,051 hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

4.4 Uji Linearitas

Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan *Ramsey Test*. *Remsey Test* menyarankan suatu uji yang disebut *general test of specification* atau RESET. Syarat fungsi linear diterima dengan syarat F hitung $< F$ tabel. Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa F hitung (0,00846) $< F$ tabel (4,73), maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah model linear.

5. Analisis Jalur (Path Analysis)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik regresi SPSS. Analisis jalur pada penelitian ini dilakukan dengan menspesifikasi hubungan antar variabel dalam model. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan antara p -value dengan α ($alpha$) yang ditentukan oleh peneliti. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menghasilkan bahwa variabel endogen kinerja perusahaan (Y_2) dapat dijelaskan secara

signifikan oleh variabel eksogen *Good Corporate Governance* (X_1), variabel endogen-intervening *earnings management* (Y_1), dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel eksogen *Good Corporate Governance* (X_1), ukuran perusahaan (X_2), yang diinterpretasikan dari masing-masing koefisien jalur. Koefisien-koefisien jalur tersebut merupakan hipotesis dalam studi ini dan dapat disajikan ke dalam dua model persamaan.

5.1. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

5.1.1. Hasil Pengujian

Hasil penelitian dengan menganalisis koefisien regresi secara parsial (uji-t) dan secara simultan (uji-F) disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Variabel Eksogen	Variabel Endogen	Koefisien Estimasi	t-statistik	p-value	Keterangan
<i>Good Corporate Governance</i> (X_1)	<i>Earnings Management</i> (Y_1)	-3,70	-3,659	0,001	Signifikan
<i>Good Corporate Governance</i> (X_1)	Kinerja Perusahaan (Y_2)	0,362	4,029	0,000	Signifikan
<i>Earnings Management</i> (Y_1)	Kinerja Perusahaan (Y_2)	-0,255	-2,556	0,013	Signifikan

Sumber: Hasil olah data sekunder

5.1.2 Hasil Pengujian dengan Uji Sobel

Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung *Good Corporate Governance* ke kinerja perusahaan melalui *earnings management* dan ukuran perusahaan ke kinerja perusahaan melalui *earnings management*.

Besarnya *standard error* pengaruh tidak langsung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{b^2 sa^2 + a^2 sb^2 + sa^2 sb^2}$$

Menguji signifikansi pengaruh tidak langsung diperlukan menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

Nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung > nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. Nilai t hitung -1,505626 lebih kecil dari t tabel (1,96) dengan tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan mediasi -0,004014 berarti tidak ada pengaruh mediasi. Nilai t hitung -2,10791 lebih besar dari t tabel (1,96) dengan tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan mediasi -0,016056 berarti ada pengaruh mediasi.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pembahasan Hipotesis 1

Hasil temuan penelitian ini *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *earnings management*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat penerapan *good corporate governance* akan mengurangi tindakan *earnings management*. Sebaliknya jika penerapan *good corporate governance* turun akan meningkatkan tindakan *earnings management*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *earnings management* diterima.

5.2.2 Pembahasan Hipotesis 2

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *earnings management* sebagai mediasi hubungan *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan tidak bisa ditunjukkan. Dengan demikian penelitian ini menemukan adanya hubungan langsung antara *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan. *Corporate governance* sebagai suatu

proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai-nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan kepentingan *stakeholder*. Dengan penerapan GCG diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan *earnings management* memberikan pengaruh mediasi anatar hubungan *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan.

5.2.3 Pembahasan Hipotesis 3

Hasil temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa *earnings management* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tindakan *earnings management* yang dilakukan akan menurunkan kinerja perusahaan, demikian sebaliknya semakin kecil tindakan *earnings management* yang dilakukan maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa. Hasil penelitian ini konsisten dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *earnings management* memberikan pengaruh pada kinerja perusahaan.

5. Kesimpulan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dan pengujian hipotesis sebagaimana yang disajikan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Good Corporate Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap *earnings management*, artinya semakin meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan maka menurunkan motivasi manajemen untuk tindakan *earnings management*. Penerapan GCG dapat berdampak pada peningkatan integritas laporan keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Publik umumnya menilai perusahaan yang menerapkan GCG akan menghindari tindakan *earnings management*. Temuan penelitian ini mendukung *agency theory* (Henderson *et al.*, 2004). Temuan penelitian ini mendukung hasil riset hasil Liu and Zhou (2007), Kanagaretnam *et al.* (2007), Zaenal (2003).

Earnings Management tidak memberikan pengaruh mediasi antara hubungan *Good Corporate Governance* kinerja perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan adanya pengaruh langsung antara *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan, artinya semakin meningkat penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan maka semakin tinggi kinerja perusahaan. Publik umumnya menilai perusahaan yang menerapkan GCG akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Temuan penelitian ini mendukung *agency theory* (Henderson *et al.*, 2004). Temuan penelitian ini mendukung hasil riset Cornett *et al.* (2009), Brown and Caylor (2006), Black *et al.* (2005); Klaper and Love (2002).

Earnings management berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, artinya semakin besar tindakan *earnings management* yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan kinerja perusahaan semakin turun. Hal ini disebabkan Publik umumnya menilai semakin besar tindakan *earnings management* yang dilakukan perusahaan, dapat membuat investor salah dalam menilai kinerja perusahaan tersebut dan salah dalam keputusan beinvestasi. Temuan penelitian ini mendukung teori agensi *agency theory* (Henderson *et al.*, 2004). Temuan penelitian ini mendukung hasil riset Suranta dan Midiastuty (2004), Assih dkk. (2005), Hunt *et al.* (1995).

Daftar Pustaka

- ASX. 2003. *Principles of Corporate Governance and Best Practice Recommendations*, ASX Corporate Governance Council. Sydney Australia.
- Atik, A. and N. Sensoy, 2004, Detecting income smoothing behaviours of Turkish listed firms through discretionary accounting changes. *Working Paper*. www.SSRN.com, diakses tanggal 10 Juli 2009.
- Atkinson, Anthony A. 1995. *Management Accounting*. Second Edition. Pillipines. Prentice Hill. Richard D Irwin, Inc.
- Axtell, R. 2006. Firm Sizes: Facts, Formulae, Fables, and Fantasies. *Working Paper*. No. 44. CSED. Washington. The Brookings Institution.
- Bapepam. 1996. Keputusan Ketua Bapepam No. 63 tahun 1996 tentang kewajiban pembentukan *Corporate Secretary*.
- Bapepam. 2003. Nomor KEP – 41/PM/2003 *Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. tanggal 22 Desember 2003.
- Bateman, Thomas S. and Carl P. Zeithmal. 1990. *Management Function and Strategy*. USA. Richard D. Irwin, Inc.**
- Beattie, R.P. and E. Zajac. 1994. Managerial Incentives Monitoring and Risk Bearing: A Study Executive Compensation, Ownership and Board Structure in Initial Public Offering. *Administratives Science Quarterly*. Vol. 39. pp. 313-335.
- Beaver, William H. 1968. The Information Content of Annual Earnings Announcements. *Journal of Accounting Research*. Suplement. pp. 67-92.
- Black, Bernard S., 2001, The corporate governance behavior and market value of Russian Firms, *Emerging Market Review*. Vol.2, pp. 89-108.
- _____, **H. Jang dan W. Kim, 2003, *Predicting Firms' Corporate Governance Choices: Evidence from Korea*, Working Paper. <http://papers.ssrn.com>. diakses tanggal 10 Desember 2009.**
- _____, 2005, Does Corporate Governance Predict Firms Market Values? Evidence from Korea, *Working Paper* No. 86/2005.
- Brown, Lawrence D. and Marcus L. Caylor, 2006, Corporate governance and firm valuation, *Journal of Accounting and Public Policy*, 25. pp. 409–434.
- Cornett, Marcia Millon, Jamie John McNutt and Hassan Tehranian. 2009. *Corporate governance and earnings management at large U.S. bank holding companies*. *Journal of Corporate Finance*. Vol 15, pp. 412–430.**
- Deni, Darwati, Khosiyah dan Rika G.R. 2004. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. *Symposium Nasional Akuntansi*. Denpasar, 2-3 Desember. pp. 391- 407.**
- Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P., 1995, *Detecting earnings management*, *Accounting Review*, Vol. 70, pp. 193–225.**
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and review. *Academy of Management*. Vol. 14. No. 1, pp. 57-74.
- Fama, Eugene F. 1980. Agency problem and the Theory of the firm. *Journal of Political Economy*. Vol. 88, No.2 (April). pp. 288-307.
- _____. dan Jensen, M. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*. Vol. 36. pp.301-325.
- _____. 1983. Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Political Economic*, Vol. 26, pp. 327-350.
- FCGI (Forum For Corporate Governance In Indonesia). 2002. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Jakarta. Yayasan Pendidikan pasar Modal Indonesia & Synergy Communication.
- Ghozali, Imam, 2005, *Analisis Multivariate dengan Proses SPSS*, BP. UNDIP, Semarang.**

- Healy, P.M. 1995. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, *Journal of Accounting and Economic*. pp. 85-107.
- _____, and J.M. Wahlen. 1998. A Review of the earnings management Literature and its Implication for Standard Setting. *Working Paper*.
- Herawati, Erna. 2007. Pengaruh Elemen dalam Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Earnings Management dan Kinerja Perusahaan. Surabaya. *Disertasi Universitas Airlangga*.
- IAI-KAP, 2001, Standard Profesional Akuntan Publik. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*). 2000. *Corporate Governance atau Corporate Failure?*
- _____. 2005. Laporan Hasil Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2004. Internalisasi *Good Corporate Governance* dalam Proses Bisnis.
- _____. 2006. Laporan Hasil Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2005. Mewujudkan *Good Corporate Governance* sebagai Sebuah Sistem.
- _____. 2007. Laporan Hasil Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2006. Menyempurnakan *Good Corporate Governance* sebagai Sebuah Sistem.
- _____. 2008. Laporan Hasil Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2007. Aktualisasi *Good Corporate Governance* sebagai Sebuah Sistem.
- _____. 2009. Laporan Hasil Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2008. *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Manajemen Strategik.
- Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Cetakan Pertama. Jakarta, Salemba Empat.
- Jeffrey A. Alexander and Bryan Weiner. 1998. *Good Corporate Governance*. Boston. Prentice-Hall International.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, pp. 305-360.
- _____. 1993. The Industrial Revolution, Exit, and The Failure of Internal Control System. *Journal of Finance*. Vol. 48. July. pp. 831 – 880.
- _____. and R. Ruback. 1983. The market for Corporate Control: The scientific evidence. *Journal of Financial Economic*. Vol. 11, pp. 5 -50.
- Jin, Liauw S. dan M. Machfoedz. 1998. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Penghasilan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 1 (2). pp. 174-191.
- Kanagaretnam Kiridaran, Gerald J. Lobo and Dennis J. Whalen. 2007. Does good corporate governance reduce information asymmetry around quarterly earnings announcements?. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 26. pp. 497–522.
- Klapper, Leora F. and I. Love. 2002. Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Market. *World Bank Working Paper*. <http://ssrn.com>. diakses tanggal 30 Agustus 2008.
- KNKCG (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance). 2001. Pedoman *Good Corporate Governance* ref. 4.0
- La Porta R., F. Lopez-de-Shleifer., R. Vishny. 1999. Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*. Vol. 54. pp. 471-518.
- _____. 2000. Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*. Vol. 58. pp 3-27.

- Lako, Andreas. 2003. Anomali Reaksi investor terhadap Pengumuman Laba Goods News: Bukti empiris dari Bursa Efek Jakarta. *Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 002/Th. XXXII. Februari. pp. 3-12.
- Lastanti, H. S. 2005. Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan reaksi Pasar. *Konferensi Nasional Akuntansi*.
- Liu, Qiao and Zhou (Joe) Lu. 2007. Corporate governance and earnings management in the Chinese listed companies: A tunneling perspective. *Journal of Corporate Finance*. Vol. 13. pp. 881-906.
- Majidah. 2005. Hubungan Kausalitas Mekanisme dan Proses Tata Kelola Perusahaan serta Kinerja Keuangan (Suatu Studi Emiten di Bursa Efek Jakarta). *Konferensi Nasional Akuntansi*.
- Marrakchi S., Chtourou. Corporate Governance and Earning Management. 2001. Social Science Research Network (SSRN), <http://paper.ssrn.com/abstract=275053>. diakses tanggal 5 April 2009.
- Milton, T., 2002, A Cross-Firm Analysis of the Impact of corporate governance on the East Asian Financial Crisis, *Journal of Financial Economic*, pp. 1-45.
- Moses, Douglas O. 1997. Income Smoothing and Incentives: Empirical Using Accounting Changes. *The Accounting Review*. Vol. LXII, No.2. April. pp. 259-377.
- _____. 1987. Income Smoothing and Incentives: Empirical Test Using Accounting Changes, *The Accounting Review*. Vol. 62 (2). pp. 358-377.
- Nicolo, Gianni De, Luc Laeven, and Kenichi Ueda. 2008. Corporate governance quality: Trends and real effects. *Journal of Financial Intermediation*. Vol. 17. pp. 198-228.
- OECD. 2004. *Principles of Corporate Governance*. Paris, France. OECD Publication Services.
- Presiden Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.**
- Pugeg, I Wayan, 2001, Penerapan Good Corporate Governance dan permasalahannya, Artikel Seminar Penerapan Good Corporate Governance dan value Based Management, *Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance*, Jakarta, 8 Nopember 2001.
- Richardson, V. J., 1998, Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence. <http://www.ssrn.com>, diakses tanggal 20 Nopember 2009.
- Scott, William R., 2000, *Financial Accounting Theory*, Second edition. Canada: Prentice Hall.
- _____, 2006, *Financial Accounting Theory*, Fourth edition. Canada: Prentice Hall.
- Shivdasani, A., 1993, Board Composition, Ownership Structure, and hostile takeovers, *Journal of Accounting and Economics*, Vol 16. pp. 167-198.
- Shleifer, A. and R.W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, *Journal of Finance*, Vol.52, pp.737-783.
- Sprenger, Carsten, 2002, Ownership and Corporate Governance in Rusian Industry: A Survey, *Working Paper*, No. 70.
- Steer, R.M., 1975, Factor Affecting Job Attitudes in Goal-Setting Enviroment, Academy of Management Journal. pp. 6-16.**
- _____, 1977, *Organizational effectiveness: A behavior view*. Santa Monica, CA: Goodyear.
- Stolowy, H., and G. Breton, 2000, A Framework for the Classification of Accounts Manipulations, *Paper*. Munich: EAA Annual Meeting.
- Suranta, E. dan Pratana P. Mediastuti, 2004, Income Smothing, Tobin's Q, Agency Problems dan Kinerja Perusahaan, *Kumpulan Makalah*, Simposium Nasional Akuntansi VII, pp. 340-358.
- _____, 2005, Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Praktek Manajemen Laba, *Konferensi Nasional Akuntansi*, pp. 1-18.

- Sylvia Veronica Siregar and Sidharta Utama. 2008. Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*. Vol. 43. pp. 1–27.
- Tjager, I Nyoman, Antonius Alijoyo, Humprey R Djemat dan Bambang Soembodo. 2003. *Corporate Good Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta. PT. Prehallindo.
- Trueman, B. and S. Titman, 1988. An Explanation for Accounting Income Smoothing, *Journal of Accounting Research*, Vol. 26 (Supplement), pp. 127-139.
- Tugiman, Hiro. 2000. Pengaruh Peran Auditor Intern Serta Faktor-Faktor Pendukungnya Terhadap Peningkatan Pengendalian Intern dan Kinerja Perusahaan. Bandung. *Disertasi. Universitas Padjadjaran*.
- _____. 2004. Pengendalian Intern Organisasi yang Buruk Penyebab Utama Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Terkorup di Dunia. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*. Bandung. *Universitas Widyatama*.
- Turley, Stuart and Mahbub, Zaman. 2004. The Corporate Governance Effects of Audit Committees. *Journal of Management and Governance*. Vol. 8. pp. 305-332.
- Turnbull, S. 1997. Corporate Governance: It's Scope, Concerns and Theories Corporate Governance. *Scholarly Research and Theory Papers*. Vol. 5. No. 4. Oktober. pp. 181-205.
- Tuschke, Anja and Sanders, Wm., Gerard. 2003. Antecedent and Consequences of Corporate Governance Reform: The Case of Germany. *Strategic Management Journal*. Vol. 24. pp. 631 – 649.
- Ujiyanto, M. Arief dan Bambang, Agus Pramuka, 2007, Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan, *Kumpulan Makalah*. Simposium Nasional Akuntansi X, 26-27 Juli, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Watts and Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. *The Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- _____. 1990. Positive Accounting Theory: a Ten Years Perspective. *The Accounting Review*. Vol.65. No.1, January.
- Zaenal, Arifin. 2003. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Reaksi Harga dan Volume Perdagangan Pada Saat Pengumuman *Earnings*, *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya, 16-17 Oktober 2003, Hal. 614-621.

**PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PROFESIONALISME
DOSEN AKUNTANSI
(Studi Pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim dan Universitas
Negeri Surabaya)**

Dewi
Muslimin
Dwi Suhartini

Abstract

A college in its action to get people with high quality, this is depend on the conception of curriculum, so that need the professionalism in management of education institute, a lecturer who have the high professionalism will try to improve quality which passed to student. This research aim to know the professionalism of lecturer of state-owned university significantly is higher than private university, there is an influence of student's IPK, education of student parent and the owning of student parent to their perception about professionalism and know whether happened the difference of perception among student in UNESA with the student in UPN “Veteran” about professionalism.

The population which is used that is student of economics faculty majoring in accountancy from both college that is UNESA and UPN “Veteran” Jatim by using technique purposive . The research hypothesis, we use analysis of correlation Kendall Tau-B.

The result of analysis conclude that IPK of student (X1), the education grade of student parent (X2), the owning of student parent (X3) have not get the relation which significant with the perception of accountancy student to professionalism of accountancy lecturer of UPN “Veteran” JATIM (Y1), the first, second and third hypothesis is not put to a test its truth. IPK Student (X1) have not got the relation significantly with the perception of accountancy student to professionalism of accountancy lecturer of UNESA (Y2), The fourth hypothesis is not put to a test its truth. The education grade of student parent (X2) and the earnings of student parent (Y3) have relation significantly to the perception of accountancy student to professionalism of accountancy lecturer of UNESA (Y4), The fifth and sixth hypothesis is put to a test its truth. The result of analysis test the independent sample t there are not mean difference of student perception of accountancy of UPN “Veteran” JATIM and student of UNESA to professionalism of accountancy lecturer, the seventh hypothesis is not put to a test its truth.

Keywords :IPK of Student, the education grade of student parent, the owning of student parent and perception of accountancy student to professionalism of accountancy lecturer.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara kita adalah negara yang sedang berkembang maka persiapan Indonesia dalam mengantisipasi realita di masa mendatang harus dimulai sedini mungkin. Persiapan tersebut tidak hanya mencakup masalah fragmatis saja tetapi mencakup hal-hal yang bersifat normatif tanpa melupakan etika dan mentalitas seorang profesional. Dunia pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena dunia pendidikan merupakan lingkungan tempat berlangsungnya proses pembentukan profesi melalui serangkaian proses belajar mengajar. Hal ini merupakan titik

awal yang perlu diperhatikan dalam upaya menghasilkan calon-calon profesional dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

Peran pendidikan menurut Safford dan Kershaw dalam Machfoedz (1999) mengemukakan bahwa pendidikan tinggi harus melakukan transformasi secara struktural maupun sistemik dengan melakukan pelatihan dan cara-cara lain untuk meningkatkan profesionalisme, baik terhadap staf akademik maupun non-akademik. Di Indonesia proses profesionalisme yang dilakukan terhadap akuntan dan pendidikan akuntansi ketinggalan bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, kenyataan ini mengundang keprihatinan terhadap profesionalisme bagi dosen akuntansi di perguruan tinggi.

Berbicara masalah profesionalisme dosen, seiring dengan lahirnya UU Guru-Dosen, kita memang belum mendapatkan format ideal. Karena berbagai keterbatasan di sana-sini, sehingga jajaran pendidikan tinggi, dosen yang nota bene tidak saja sebagai pendidik, pengajar tetapi juga sebagai ilmuwan, belum dapat menampilkan kinerja profesionalisme yang memadai. Dalam bunyi pada UU Guru-dosen tersebut, definisi, batasan dan indikator terminologi "profesional", belum jelas benar, kecuali batasan-batasan leksikal yang dipahami sebagai tugas, jabatan, fungsi dan kewenangan seseorang dilakukan dengan nilai-nilai profesi (Drost, Suara Merdeka, 2004).

Untuk dapat disebut dosen yang professional maka harus memenuhi tiga hal yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan karakteristik (*ethies*). (Novin dan Tucker, 1999: 281). Mulyana (2001) menyatakan bahwa kemajuan suatu fakultas bergantung pula pada kemajuan jurusan-jurusannya. Kerjasama yang harmonis antara berbagai pihak akademika: rektor, dekan, ketua jurusan, staf pengajar, karyawan, dan mahasiswa, merupakan kunci utama keberhasilan suatu perguruan tinggi. Adapun dalam tulisan lain menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas dosen juga menjadi tolok ukur kemajuan profesionalisme para dosen, ada dosen berkualitas mengajar dengan penuh motivasi dan memberi materi dengan begitu inspiring, ada juga dosen yang hanya membaca buku, bercakap-cakap dengan papan tulis, dan kurang memiliki dedikasi. Perguruan tinggi memiliki kontribusi terhadap baik-buruknya dosen lewat kebijakan pengangkatan dan faktor lingkungan (BC Block UGM, 2006)

Menurut Wuwuh (2002) dalam Sofina (2008) menyatakan bahwa IPK dan kan Tingkat penghasilan orang tua mempunyai pengaruh yang sangat signifikan pada persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen sedangkan Tingkat pendidikan orang tua tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen dan dari penelitian Machfoedz (1999) ketiga variabel mempunyai pengaruh. Hal tersebut kemungkinan menimbulkan problem mengenai lulusan perguruan tinggi negeri biasanya mutunya lebih baik dari lulusan perguruan tinggi swasta. Karena perguruan tinggi negeri mempunyai kualitas dosen yang lebih baik daripada perguruan tinggi swasta. Rata-rata umur perguruan tinggi negeri lebih lama daripada perguruan tinggi negeri swasta. Sejak tahun 1980-an dosen-dosen perguruan tinggi negeri jurusan akuntansi telah memperoleh fasilitas pengembangan akuntansi untuk belajar diluar maupun di dalam negeri, sedangkan dosen swasta harus berjuang dengan dananya sendiri yang terbatas. (Machfoedz, 1999). Untuk itu peneliti ingin menguji kembali apakah terdapat hubungan antara IPK mahasiswa, tingkat pendidikan orang tua mahasiswa, dan penghasilan orang tua mahasiswa dengan persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi pada UPN "Veteran" Jatim dan Universitas negeri Surabaya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah untuk di cari pemecahannya yaitu :

- a. Apakah terdapat hubungan antara IPK mahasiswa, tingkat pendidikan orang tua mahasiswa, dan penghasilan orang tua mahasiswa dengan persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim?
- b. Apakah terdapat hubungan antara IPK mahasiswa, tingkat pendidikan orang tua mahasiswa, dan penghasilan orang tua mahasiswa dengan persepsi mahasiswa terhadap

- profesionalisme dosen akuntansi Universitas Negeri Surabaya?
- c. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN “Veteran” Jatim dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi Universitas Negeri Surabaya?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Keperilakuan

Siegel dan Marcony (1989) dalam *Ikhsan* (2005) menulis bahwa pada tahun 1971, *American Accounting Association's Committes* berdasarkan pada *Behavioral Sciene Content of the Accounting Curriculum* mengembangkan lingkup dan definisi dari “Ilmu keperilakuan” sebagai berikut : Istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relative baru. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset mana pun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi, perilaku dari manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial.

IPK mahasiswa

IPK merupakan standar nilai yang dikeluarkan oleh kampus untuk mengukur hasil proses belajar mahasiswa selama satu semester. IPK menjadi suatu standar keberhasilan mahasiswa dalam proses belajar-mengajar dan juga mengukur tingkat kemampuan mahasiswa tersebut. Semakin tinggi IPK mahasiswa maka dapat diasumsikan bahwa mahasiswa tersebut berhasil dalam mengikuti proses belajar-mengajar.

Pendidikan Orang Tua Mahasiswa

Pendidikan adalah tingkat pengetahuan seseorang yang diukur dengan dasar studi akhir yang telah ditempuh, di bangku sekolah atau di bangku kuliah. (*Astiningsari*, 1997 dalam *Kustono*, 2004).

Tingkat pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh dan berhasil diselesaikan oleh orang tua mahasiswa. Jika pendidikan orang tua semakin tinggi maka akan memberikan pengalaman mengikuti pendidikannya pada putra-putrinya.

Penghasilan Orang Tua Mahasiswa

Penghasilan adalah sesuatu yang diterima seseorang dalam bentuk upah atau gaji atas dasar prestasi kerjanya ataupun disesuaikan dengan jabatannya. (*Astiningsari*, 1997 dalam *Kustono*, 2004). Jadi tentunya penghasilan tiap-tiap orang tua akan berbeda dilihat profesinya, dan jabatan yang dimiliki di tempat kerjanya.

Jika seseorang memiliki penghasilan setara atau lebih dari UMR maka dapat di asumsikan bahwa orang tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, setidaknya kebutuhan primer. Jika seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan primer hidupnya maka dia akan dapat memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Dalam hal ini jika orang tersebut adalah orang tua maka dia akan dapat memberikan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi untuk anak-anaknya seperti biaya pendidikan.

Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Dosen Akuntansi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995) mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi adalah tanggapan mahasiswa akuntansi perguruan tinggi secara langsung mengenai dosen akuntansi yang memiliki keahlian, ketrampilan dan pengetahuan karena pendidikan dan latihan yang dijalani selama di perguruan tinggi. (*Astiningsari*, 1997 dalam *Kustono*, 2004).

Pengaruh IPK Pada Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Dosen

Secara intuitif bisa dikemukakan bahwa para mahasiswa yang mempunyai nilai yang bagus atau pandai lebih *demanding* terhadap perilaku dosennya. Para mahasiswa kelompok

ini mempunyai suatu harapan bahwa dosen yang profesional akan memberikan lebih banyak kontribusi pada mahasiswa (Machfoedz, 1999).

Teori yang mendukung adanya pengaruh IPK terhadap persepsi mahasiswa tentang profesionalisme dosen adalah teori harapan. Menurut Victor Vroom (dalam Gibson, 1996) teori ini menganggap seseorang menentukan tingkah lakunya berdasarkan berbagai alternatif dengan harapan memperoleh keuntungan dari setiap tindakan yang dipilihnya.

Mahasiswa dengan IPK yang tinggi tentunya akan memiliki harapan dan keinginan kuat pada dosennya agar dalam memberikan materi perkuliahan lebih profesional, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa dengan IPK lebih tinggi akan memberikan persepsi yang lebih baik terhadap profesionalisme dosennya dalam memberikan materi perkuliahan.

Pengaruh Pendidikan Orang Tua Pada Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Dosen

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi cara pandang seseorang akan suatu permasalahan. Hal ini disebabkan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, berarti semakin luas pula wawasan dan wacana yang mereka miliki yang membuat mereka akan lebih objektif dan logis dalam mengambil keputusan dalam memandang suatu permasalahan.

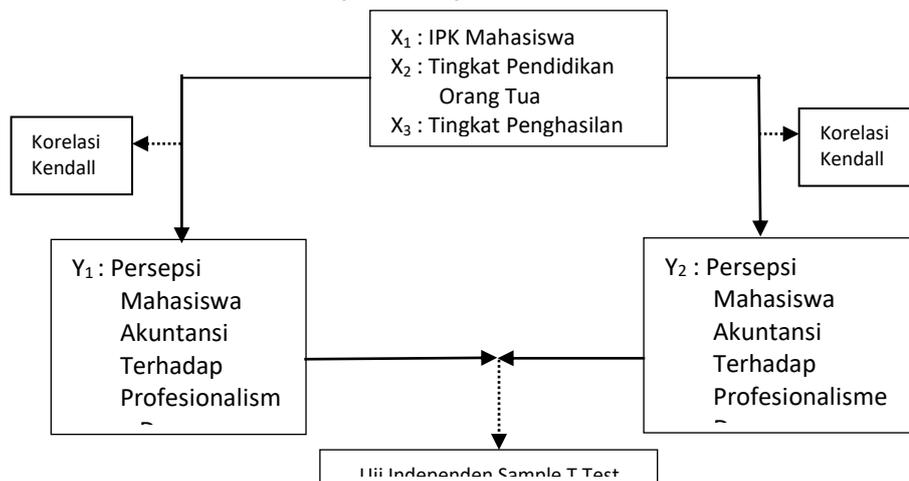
Dengan tingginya pendidikan orang tua, maka orang tua sebagai pendidik dalam keluarga akan dapat mendidik anak-anaknya dengan lebih baik sehingga tentunya akan mempengaruhi cara pandang anaknya dalam lingkungan sosial. Termasuk juga persepsi mereka sebagai mahasiswa terhadap profesionalisme dosennya.

Pengaruh Penghasilan Orang Tua Pada Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Dosen

Seseorang yang memiliki penghasilan setara atau lebih dari UMR maka dapat di asumsikan bahwa orang tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, setidaknya kebutuhan primer. Jika seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan primer hidupnya maka dia akan dapat memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Dalam hal ini jika orang tersebut adalah orang tua maka dia akan dapat memberikan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi untuk anak-anaknya seperti pendidikan.

Mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu, pada umumnya, mempunyai banyak fasilitas dan pengalaman. Misalnya dengan membaca banyak media massa atau melihat program-program televisi. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dengan orang tua yang memiliki tingkat penghasilan yang tinggi akan memiliki persepsi lebih baik terhadap profesionalisme dosennya.

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dapat dibuat suatu kerangka pikir yang dijelaskan dalam bentuk skema (bagan) sebagai berikut :



Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁. Ada hubungan antara IPK mahasiswa, tingkat pendidikan orang tua mahasiswa dan penghasilan orang tua mahasiswa dengan persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN “Veteran” Jatim.
- H₂. Ada hubungan antara IPK mahasiswa, tingkat pendidikan orang tua mahasiswa dan penghasilan orang tua mahasiswa dengan persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi Universitas Negeri Surabaya.
- H₃. Ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN “Veteran” Jatim dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi Universitas Negeri Surabaya.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan pengukuran Variabel

Variabel penelitian ini adalah persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi sebagai variabel terikat (Y), IPK mahasiswa (X_1), tingkat pendidikan orang tua mahasiswa (X_2), dan tingkat penghasilan orang tua mahasiswa (X_3) sebagai variabel bebas (X).

Definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi (Y)

Persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi adalah tanggapan secara langsung dari seorang mahasiswa mengenai beberapa hal melalui panca inderanya terhadap seorang pengajar (kelompok tertentu) yang dianggap mempunyai keterampilan, keahlian, punya komitmen moral, bertanggung jawab, disiplin dan tekun dalam menjalankan pekerjaannya (profesinya).

Sesuai dengan perumusan, tujuan dan hipotesis, variabel persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi (Y) dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim terhadap profesionalisme dosen akuntansi (μ_1)
- b. Persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya terhadap profesionalisme dosen akuntansi (μ_2)

IPK mahasiswa (X_1)

Adalah Indeks Prestasi Kumulatif seseorang yang merupakan nilai hasil studi dari seluruh mata kuliah yang telah (pernah) ditempuh atas prestasi belajarnya.

Tingkat pendidikan orang tua mahasiswa (X_2)

Adalah tingkat pengetahuan seseorang yang diukur dengan studi akhir yang telah ditempuh di bangku sekolah atau bangku kuliah.

Tingkat penghasilan orang tua mahasiswa (X_3)

Adalah sesuatu yang diterima seseorang dalam bentuk upah atau gaji atas dasar prestasi kerjanya ataupun disesuaikan dengan jabatannya.

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada 2 perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Surabaya dan UPN “Veteran” Jawa Timur.

Teknik sampling yang digunakan adalah secara *purposive sample*. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang telah menempuh minimal 120 SKS, sehingga dianggap telah mendapat manfaat maksimal dari pengajaran akuntansi.
2. Sudah menempuh mata kuliah auditing, akuntansi manajemen dan teori akuntansi.

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang mahasiswa jurusan akuntansi dari 2 perguruan tinggi yaitu 50 orang mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya dan 50 orang mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Pertama melakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas, reliabilitas dan normalitas selanjutnya untuk menguji hipotesis satu dan dua digunakan uji koefisien korelasi Kendall Tau-b sedangkan untuk menguji hipotesis ketiga digunakan *Independent Sample t Test* (uji t untuk dua sampel independen). Adapun langkah-langkah dalam pengujian *Independent Sample t Test* dengan *Levene's Test For Equality Of Variance* dan *T-Test For Equality Of Means*. (Santoso, 2005)

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Korelasi Kendall Tau-b

Koefisien Korelasi Kendall Tau-b cocok untuk mengukur asosiasi data dengan skala ukuran paling tidak skala ordinal, sehingga setiap subyek bisa diukur rankingnya untuk variabel X dan Y. Keunggulan korelasi Kendall Tau-b adalah Kendall Tau-b dapat digeneralisasi untuk koefisien korelasi parsial (Ghozali, 2002).

Hasil uji Korelasi Kendall Tau-b untuk Y1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara IPK mahasiswa (X_1) dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim (Y_1) sebesar 0,074; koefisien korelasi antara tingkat pendidikan orang tua mahasiswa (X_2) dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim (Y_1) sebesar 0,154 dan koefisien korelasi antara tingkat penghasilan orang tua mahasiswa (X_3) dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim (Y_1) sebesar 0,117. Ketiga variabel bebas tersebut memiliki korelasi yang sangat rendah dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim, berarti IPK Mahasiswa (X_1), tingkat pendidikan orang tua (X_2) dan tingkat penghasilan orang tua (X_3) memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat signifikan dari ketiga variabel bebas tersebut lebih dari 5%, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya: IPK mahasiswa (X_1) tidak memiliki hubungan (korelasi) yang signifikan dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim (Y_1), sehingga hipotesis ke-1 tidak teruji kebenarannya.

Hasil uji Korelasi Kendall Tau-b untuk Y2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara IPK mahasiswa (X_1) dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA (Y_2) sebesar 0,072; koefisien korelasi antara tingkat pendidikan orang tua mahasiswa (X_2) dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA (Y_2) sebesar 0,311 dan koefisien korelasi antara tingkat penghasilan orang tua mahasiswa (X_3) dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA (Y_2) sebesar 0,367. Dari koefisien korelasi yang dihasilkan tersebut IPK mahasiswa memiliki korelasi yang sangat rendah dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA, berarti IPK Mahasiswa (X_1) memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA dibandingkan dengan dua variabel yang lain. Tingkat signifikan pada variabel IPK mahasiswa lebih dari 5%, maka ada hubungan antara IPK mahasiswa dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi Universitas Negeri Surabaya tidak teruji kebenarannya sedangkan tingkat signifikan pada variabel tingkat pendidikan dan penghasilan orang tua mahasiswa kurang dari 5% sehingga teruji kebenarannya. Artinya bahwa tingkat pendidikan orang tua mahasiswa dan penghasilan orang tua memiliki hubungan (korelasi) yang signifikan dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi Universitas Negeri Surabaya.

Independent Sample t Test bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup (persepsi mahasiswa akuntansi UPN "Veteran" Jatim dan UNESA) yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah

tidak secara signifikan. Dengan *Levene's Test For Equality Of Variance* menghasilkan Nilai F_{hitung} sebesar 3,355 dengan tingkat signifikan (sig) diatas 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti varians persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim sama dengan varians persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA.

Berdasarkan hasil *Levene's Test For Equality Of Variance* diperoleh kesimpulan bahwa varians persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim sama dengan varians persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA, maka *t-Test For Equality Of Means* akan menggunakan rumus untuk *equal variance assumed* / varians sama. Dalam tes ini menghasilkan Nilai t_{hitung} sebesar 1,544 dengan tingkat signifikan (sig) lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti rata-rata persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim sama dengan rata-rata persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA, sehingga hipotesis yang berbunyi "Ada perbedaan persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim sama dengan persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA" tidak teruji kebenarannya.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa mahasiswa dengan IPK tinggi, tingkat pendidikan dan penghasilan orang tua yang tinggi akan memiliki persepsi yang lebih baik terhadap profesionalisme dosennya khususnya responden yang ada di UPNV Jatim. Kemungkinan hal ini terjadi karena metode pembelajaran tidak dibarengi dengan *improvement* metode pembelajaran, sehingga memberikan dampak penyerapan materi kuliah oleh mahasiswa kurang efektif. Sesuai dengan jawaban responden yaitu 66,7% mahasiswa akuntansi UPN menyatakan bahwa dosen kurang memberikan perhatian terhadap mahasiswa yang memiliki masalah dalam belajar maupun masalah lainnya, sehingga peran seorang dosen terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan pelajaran kurang optimal. Kurangnya pemahaman yang berkaitan dengan peran dan posisi ilmu dasar yang menunjang bangunan keilmuan bidang studinya secara menyeluruh. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa untuk belajar dengan baik pada tahap-tahap selanjutnya. Berkaitan dengan hal ini, maka wawasan mengenai ilmu dan bidang keahliannya perlu sedini mungkin untuk ditanamkan kepada mahasiswa. Sesuai dengan jawaban responden yaitu 36,6% mahasiswa akuntansi UPN menyatakan bahwa teori akuntansi yang diberikan oleh dosen kurang optimal, 20% mahasiswa akuntansi UPN menyatakan bahwa dosen kurang menerapkan pengetahuan akuntansi didalam perkuliahan dan membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik.

Hasil penelitian pada responden UNESA. IPK mahasiswa tidak memiliki hubungan (korelasi) yang signifikan dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa mahasiswa dengan IPK yang tinggi tentunya akan memiliki keinginan kuat pada dosennya agar dapat memberikan kuliah lebih profesional. Tingkat pendidikan orang tua mahasiswa memiliki hubungan dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA, Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa makin baik pendidikan orang tua maka diharapkan makin baik persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosennya (Machfoedz, 1999: 24). Namun, tingkat pendidikan orang tua mahasiswa memiliki korelasi yang rendah dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA yaitu sebesar 31,1%. Untuk meningkatkan hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA, diharapkan tidak hanya diukur dengan lama menempuh studi melainkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Tidak kalah pentingnya adalah sosok penampilan dosen yang ditandai dengan keunggulan dalam nasionalisme dan jiwa juang, keimanan dan ketakwaan, penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin, profesionalisme, kerjasama dan belajar dengan berbagai disiplin, wawasan masa

depan, kepastian karir, dan kesejahteraan lahir batin. Tingkat penghasilan orang tua mahasiswa memiliki hubungan dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA, namun memiliki korelasi yang rendah dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA yaitu sebesar 36,7%. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa mahasiswa dengan orang tua yang memiliki tingkat penghasilan yang tinggi akan memiliki persepsi lebih baik terhadap profesionalisme dosennya (Machfoedz, 1999: 24).

Hasil analisis uji *independent sample t test* menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata persepsi mahasiswa akuntansi UPN "Veteran" Jatim dan UNESA terhadap profesionalisme dosen akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa UPN "Veteran" Jatim dan UNESA memiliki persepsi yang cukup baik terhadap profesionalisme dosennya. Bisa disimpulkan bahwa, walaupun UPNV Jatim merupakan perguruan tinggi swasta, namun mahasiswanya memiliki persepsi yang sama dengan UNESA terkait dengan tuntutan pada tingkat profesionalisme dosennya. Kemungkinan hal ini karena saat ini mahasiswa semakin sadar akan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang harus mampu bersaing pada era globalisasi tanpa memandang dari mana mahasiswa tersebut menuntut ilmu, di perguruan tinggi negeri atau swasta, karena keberhasilan mahasiswa ada pada dirinya sendiri.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini mempunyai beberapa kelemahan yang membatasi kesempurnaannya. Oleh karena itu, keterbatasan ini perlu lebih diperhatikan untuk penelitian-penelitian berikutnya, yaitu :

1. Kendala yang bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dirasakan responden pada saat pengisian kuisioner tersebut akan dapat mempengaruhi cara menjawab.
2. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yang akan berbeda dengan penelitian yang menggunakan teknik pengambilan sampel *simple random sampling*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. IPK mahasiswa, Tingkat pendidikan orang tua mahasiswa dan Tingkat penghasilan orang tua mahasiswa tidak memiliki hubungan (korelasi) yang signifikan dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim.
2. IPK mahasiswa tidak memiliki hubungan (korelasi) yang signifikan dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA namun Tingkat pendidikan orang tua mahasiswa dan Tingkat penghasilan orang tua mahasiswa memiliki hubungan (korelasi) yang signifikan dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi UNESA.
3. Tidak terdapat perbedaan rata-rata persepsi mahasiswa akuntansi UPN "Veteran" Jatim dan UNESA terhadap profesionalisme dosen akuntansi. Hal ini berarti bahwa mahasiswa semakin sadar akan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang harus mampu bersaing pada era globalisasi tanpa memandang dari mana mahasiswa tersebut menuntut ilmu, di perguruan tinggi negeri atau swasta, karena keberhasilan mahasiswa ada pada dirinya sendiri.

Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan :

1. Bagi dosen akuntansi baik dosen akuntansi UPN "Veteran" Jatim maupun dosen UNESA, hendaknya meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan materi kuliah dengan baik, memberikan yang esensial dengan cara yang menarik, percaya diri dan mampu membangkitkan motivasi mahasiswanya untuk mengembangkan kreatifitas dalam mengeksplorasi materi yang lebih dalam secara mandiri. Komunikasi dan interaksi baik

- di dalam kelas maupun di luar kelas sangat menentukan efektifitas dan mutu pendidikan.
2. Bagi jurusan, hendaknya membangun atmosfir akademis yang kondusif dan meningkatkan komitmen dan kemampuan untuk senantiasa melakukan Evaluasi Diri.
 3. Bagi orang tua mahasiswa, hendaknya meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan agar lembaga pendidikan mampu mewujudkan peranannya secara efektif.
 4. Bagi penelitian yang akan datang, hendaknya memperluas jangkauan populasi dan menambah variabel bebas lainnya, selain: IPK, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan orang tua mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, Ivancevich, Donnely, 1996, *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi kelima, Terjemahan Djarkasih, penerbit Erlangga Jakarta
- Ghozali, Imam, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi kesebelas, penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ikhsan, Arfan, 2005, *Akuntansi keperilakuan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Irtiani, Siti, 1998, *Pengaruh kesempatan pembelajaran organisasi, kualitas pengajaran dan orientasi profesional pada hubungan antara partisipan dosen dalam pengambilan keputusan dengan hasil belajar*, Makalah dalam SNA ke tiga
- Ilyastuti, Sabeni, Darsono, 2003, *Pengujian empiris profil kebutuhan profesional (Professional Needs) dosen akuntansi di Jawa*, Makalah dalam SNA VI
- Kamus Besar, 1995,
- Kustono, Ronny, 2004, *studi persepsi mahasiswa jurusan akuntansi terhadap profesionalisme dosen akuntansi perguruan tinggi universitas pembangunan nasional veteran dan universitas airlangga*
- Machfoedz, mas'ud, 1999, *Studi persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme dosen akuntansi perguruan tinggi*, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.3, No.1 ISSN: 1410-2420, penerbit fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Mulyana, Dedi, 2001, *Ilmu Komunikasi suatu pengantar*, Cetakan kedua, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Santoso, Singgih, 2005, *Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Edisi Pertama, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Thoha, Miftah, 2003, *Perilaku Organisasi dan Konsep Dasar*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

**PENGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PADA KOPERASI KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN NGANJUK**

Munari
Anike Dwi Noviantaka
Erna Sulistyowati

Abstract

Phenomena that occur at this time in the Cooperative Farmers Group in Nganjuk is that the existing accounting information system in the District Cooperative Farmers Group Nganjuk already computerized but not optimally use. In certain activities still menggunakan manual process. Thus, accounting information system user satisfaction does not happen but it also overlooked other factors such as user communication, user participation, the complexity of the system and organizational structure. This study aims to examine the variables user communication, participation, complexity, system and organizational structure influence penggunaan Accounting Information Systems.

Data used in this study are primary data that is data collected through questionnaires distributed to the respondents at 39 cooperative farmers' groups in Nganjuk. Measurement scale used is an interval scale with the measurement technique of semantic differential scale with levels 1-7. Sampling technique using a simple random sampling is the sampling technique in which all members of the population have equal opportunity to be sampled. The analysis technique used is multiple linear regression to determine the influence of user Communications (X1), User participation (X2), The complexity of the system (X3) and Organization Structure (X4) on the Use of Accounting Information Systems (Y) cooperative farmer groups in Nganjuk, which will be tested by using SPSS 13.0, with an analysis of multiple linear regression equation and significance level of 5%.

Based on the results of testing using the F test showed that multiple linear regression model used is suitable to study the effect of communication users (X1), the participation of users (X2), the complexity of the system (X3), organizational structure (X4) on the use of accounting information system (Y) in cooperative groups of farmers in the district nganjuk. While based on test results using t test showed that the communication users (X1), the participation of users (X2), the complexity of the system (X3), organizational structure (X4) partially significant effect on the use of accounting information system (Y) in the cooperative farmer groups in the district nganjuk.

Keywords: Communication Users, User Participation, System Complexity, Organizational Structure, and Use of Accounting Information Systems

Pendahuluan

Perkembangan koperasi saat ini belum seperti yang diharapkan. Hal ini karena ada berbagai macam kendala yang dihadapi koperasi. Diantaranya ada yang bersumber dari luar koperasi antara lain yaitu lingkungan yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan usaha, seperti persaingan dari badan usaha bukan koperasi merupakan persoalan yang khusus yang harus dipecahkan oleh pengurus koperasi. Badan usaha yang bukan koperasi dengan skala luas karena mempunyai modal-modal yang besar kualitas daya manusia yang baik. Sedangkan yang bersumber dari koperasi itu sendiri antara lain kurangnya tenaga ahli dalam

mengelola koperasi, tingkat partisipasi anggota, modal usaha koperasi yang relatif rendah serta pemasaran hasil usaha.

Pengembangan sistem informasi akuntansi menjadi suatu hal yang sangat penting. Perkembangan dunia usaha saat ini sudah berkembang pesat di bidang industri dagang, maupun jasa, telah menimbulkan berbagai macam masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini manajemen dituntut mampu mengelola serta menjalankan perusahaan seefektif mungkin agar dapat bertahan dalam persaingan dunia usaha, lebih-lebih dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini.

Obyek dalam penelitian ini adalah beberapa Koperasi di desa di Kabupaten Nganjuk. Koperasi di Desa Bagor Kulon di Kabupaten Nganjuk adalah koperasi yang bergerak di bidang pertanian mempunyai usaha simpan pinjam dan usaha dagang yang beranggotakan sekelompok orang tani. Sejak pertama kali didirikan koperasi ini telah memfokuskan dalam bidang usaha simpan pinjam, dimana hasil dari simpanan para anggota koperasi selain dipinjamkan kembali juga digunakan untuk usaha dagang atau disebut "usaha toko". Selain itu kegiatan koperasi ini juga menimbun hasil panen dan apabila dibutuhkan bisa dipinjamkan. Dari hasil observasi diketahui bahwa sistem informasi akuntansi yang ada sudah terkomputerisasi namun belum secara maksimal penggunaannya. Dalam aktivitas tertentu masih menggunakan proses manual. Sehingga kepuasan pemakai sistem informasi akuntansi tidak terwujud selain itu juga kurang diperhatikan faktor lain seperti komunikasi pemakai, partisipasi pemakai, kompleksitas sistem dan struktur organisasi.

Kurangnya partisipasi pemakai dalam hal ini adalah karyawan koperasi nampak dari minimnya penguasaan para karyawan akan sistem informasi akuntansi yang ada dalam koperasi, sehingga hal tersebut menyebabkan para karyawan enggan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi yang tersedia. Selain itu kurangnya komunikasi antara pemakai yaitu karyawan dengan pengembang yaitu pengelola sistem informasi akuntansi dari pihak manajemen koperasi tersebut. Selain itu kurangnya komunikasi antara pemakai yaitu para karyawan dengan pengembang sebagai pengelola sistem informasi akuntansi dari pihak manajemen koperasi menyebabkan pemakai tidak mampu menguasai dengan baik sistem informasi akuntansi yang telah tersedia sehingga berakibat menurunnya kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Faktor yang lain adalah kompleksitas sistem yang disusun oleh pihak pengembang terlalu rumit untuk dipahami para karyawan sebagai pengguna sehingga berakibat pada menurunnya kepuasan para pengguna sehingga berakibat pada menurunnya kepuasan para pengguna sistem informasi akuntansi di Koperasi tersebut.

Adanya komunikasi pemakai dan partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi diharapkan dapat mendesain suatu sistem yang mampu bekerja sama dengan pemakai sistem informasi akuntansi (user), selain itu suatu sistem informasi akuntansi yang dipakai harus sesuai struktur organisasi suatu perusahaan, kesesuaian tersebut dapat mengurangi kompleksitas sistem sehingga tidak terjadi hambatan dalam pemakaian sistem informasi akuntansi, maka diusahakan agar sistem tersebut mudah digunakan dan lebih fleksibel. Karena secanggih apapun sistem yang dibuat, namun dalam perencanaan sistemnya tidak memperhatikan faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pemakai, maka dapat dipastikan akan terjadi hambatan-hambatan yang disebabkan karena ketidaksesuaian antara teknologi yang digunakan dengan pemakainya.

Perumusan Masalah :

“Apakah komunikasi pemakai, partisipasi, kompleksitas, sistem dan struktur organisasi berpengaruh terhadap penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Koperasi Kelompok Tani di Kabupaten Nganjuk ?”

Tujuan Penelitian :

Untuk menguji variabel komunikasi pemakai, partisipasi, kompleksitas, sistem dan struktur organisasi berpengaruh terhadap penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Landasan Teori

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Richard F. Neuschel yang dikutip oleh Cecil Gillespie (1971: 2) dalam bukunya, *Accounting System, Procedure and Methods*, sistem akuntansi didefinisikan dalam dua pengertian pokok yaitu ; sistem dan prosedur.

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dikembangkan sesuai dengan suatu kerangka yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan utama dalam perusahaan.

“Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sementara menurut Mulyadi (2001: 3), bahwa sistem akuntansi adalah salah satu sistem informasi di antara diantara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Setiap sistem informasi terdiri dari blok-blok bangunan yang membentuk suatu sistem tersebut. Seperti halnya bangunan rumah sistem informasi memiliki komponen utama yang membentuk struktur bangunan sistem informasi. Komponen bangunan sistem informasi terdiri dari enam blok (disebut dengan *information system building block*) : masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, dan pengendalian.

Dari dua pengertian sistem akuntansi yang telah dikemukakan di atas terlihat dua titik pandang yang berbeda. Pada pendapat pertama sistem akuntansi dibagi dalam dua elemen pokok yaitu menyangkut sistem dan prosedur yang merupakan kerangka terpadu untuk mengurutkan kegiatan tulis-menulis (klerikal) melalui prosedur yang sama. Sedangkan pada pendapat yang kedua penekanan diberikan pada kata-kata koordinasi, yang mencakup catatan, formulir dan laporan dengan sasaran untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen. Kedua pendapat tersebut diatas, secara prinsip dan konsep tidaklah berbeda, namun keduanya saling melengkapi.

Menurut Jogiyanto (2000:54), sistem informasi akuntansi adalah sistem akuntansi dengan pengembangan informasi lebih luas dengan menekankan informasi lebih luas dengan menekankan informasi kepada manajemen tanpa mengurangi informasi kepada pihak luar.

Menurut Moscovice (1994:4) sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan mengambil keputusan yang relevan kepada pihak luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor, dan kreditor) dan pihak intern (terutama manajemen)

Menurut Widjajanto (2001:4), bahwa sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh manajemen

Komunikasi Pemakai

Menurut Gitosudarmo (1996: 195) komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, konsep, gagasan atau informasi dari si pengirim kepada si penerima informasi.

Menurut Davis dan Newstorm (1996 : 150) komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan, fakta, pikiran, perasaan dan nilai kepada orang lain.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemakai adalah proses penyampaian ide, gagasan, atau informasi yang dilakukan oleh pemakai selama proses pengembangan sistem informasi.

Organisasi tidak mungkin ada tanpa komunikasi. Apabila tidak ada komunikasi, para pegawai tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan rekan sekerjanya, pemimpin tidak dapat menerima masukan informasi, dan para penyelia tidak dapat memberikan instruksi. Koordinasi kerja tidak mungkin dilakukan dan organisasi akan runtuh karena tidak ada

komunikasi.kerja sama juga menjadi sulit karena orang-orang tidak dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan perasaan mereka kepada orang lain.

Menurut Gitosudarmo (1996: 203) komunikasi yang efektif dan komunikatif merupakan hal yang penting karena :

1. Komunikasi merupakan alat bagi manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepemimpinan dan fungsi pengendalian.
2. Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer di setiap hari dan memakan waktu yang paling banyak dari waktu kerja yang tersedia.kita maklumi bersama bahwa jarang sekali seorang yang duduk manis di samping meja kerjanya untuk berfikir perencanaan semata atau merenungkan alternatif-alternatif. Sebagian besar waktunya akan dihabiskan untuk mengadakan komunikasi dengan bawahanya, rekan kerja setingkat, pemasok atau pelanggan atau membaca laporan-laporan, memo, surat dan sebagainya

Partisipasi Pemakai

Menurut Nitisemito (1996:156) mengemukakan bahwa partisipasi adalah salah satu cara memotivasi yang mempunyai ciri khas lain daripada yang lain. Hal ini disebabkan peningkatan partisipasi lebih ditekankan pada segi psikologi daripada segi materi, dimana dengan melibatkan seseorang maka orang tersebut akan merasa ikut bertanggung jawab.

Menurut Davis (1996:171) menyatakan bahwa “ *participation is mental and emotional of persons in group situations that them to contribute to group goals and share responsibility for them*” (partisipasi adalah keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut).

Menurut Restuningdiah dan Indriantoro (2000: 121-122) partisipasi pemakai merupakan perilaku, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemakai selama proses pengembangan sistem informasi. Dan membedakan definisi *user involment* dengan *user participation* perbedaan tersebut adalah sebagai berikut

1. Istilah “user participation” sebaiknya lebih digunakan dibanding “user involvement” apabila berkaitan dengan perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh pemakai selama proses pengembangan sistem. Lebih jauh dinyatakan bahwa pengukuran perilaku pemakai dan aktivitas harus dipertimbangkan sebagai pengukuran *user participation* bukan *user involment*.
2. Konsisten dengan disiplin ilmu yang lain, maka “*user involvement*” digunakan berkaitan dengan pernyataan *psychological* dari individu dan didefinisikan sebagai pentingnya, serta relevansi personal sistem kepada pemakai.
3. Mencatat adanya hubungan implisit antara *participation* dengan *involvement*, dan berpendapat bahwa *user participation* merupakan penyebab penting bagi *user involvement*.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemakai dalam penelitian ini adalah perilaku atau aktivitas pemakai untuk ikut serta dalam keseluruhan proses pengembangan sistem informasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi

Kompleksitas Sistem

Kompleksitas menurut Robbins (1996:91-100) merujuk pada tingkat differensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Dimana diferensiasi terbagi menjadi :

1. Diferensiasi Horisontal
Merujuk pada tingkatan differensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat, dari tugas yang mereka laksanakan dan tingkat pendidikan serta pelatihannya.
2. Diferensiasi Vertikal

Merujuk pada kedalaman struktur organisasi, dimana semakin meningkat differensiasi yang ada pada sebuah perusahaan maka akan semakin meningkat pula kompleksitasnya karena jumlah tingkatan hierarki di dalam organisasi bertambah.

3. Diferensiasi Spasial

Merujuk pada sejauh mana lokasi fasilitas dan pegawai organisasi tersebar secara geografis.

Struktur Organisasi

Pengertian struktur organisasi menurut Arifin (2003:177) adalah suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dan kelompok, sedangkan menurut Robbins (2002:132) struktur organisasi adalah penetapan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah suatu sistem atau kerangka kerja yang menjelaskan penetapan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal

Pengaruh Komunikasi Pemakai Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Teori yang melandasi adalah *Balance Theory* oleh Newcom pada tahun 1961. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang tertarik satu sama lain pada dasar sikap-sikap yang serupa terhadap obyek dan tujuan-tujuan yang relevan secara umum. Suatu kelompok akan produktif bila anggotanya memiliki keterampilan, pribadi yang baik serta mendapat dukungan dari manajemen dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Komunikasi pemakai adalah suatu proses penyampaian ide, konsep, gagasan atau informasi dari si pengirim si penerima informasi. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan dalam mencapai tujuan perusahaan, begitu juga dengan komunikasi pemakai dalam mengembangkan sistem informasi sehingga hasil dari penggunaan sistem informasi dapat dipakai oleh pemakai sistem informasi yang pada akhirnya tujuan dapat terwujud

Pengaruh Partisipasi Pemakai terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Teori yang melandasi adalah teori harapan *expectancy theory* dikemukakan oleh Victor H. Vroom dalam Hasibuan (1999:116) yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil pekerjaan tersebut.

Partisipasi pemakai merupakan perilaku pemakai, pekerjaan dari pemakai dan aktivitas yang dilakukan oleh pemakai selama proses penggunaan sistem informasi akuntansi sehingga sistem informasi yang dihasilkan dapat diterima dan digunakan sehingga kepuasan pemakai dapat tercapai karena apabila sistem yang digunakan oleh sebuah perusahaan tidak melibatkan pemakai sistem informasi akan terjadi penolakan sehingga sistem yang dibuat akan sia-sia karena pemakai tidak mengerti atau tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemakai melalui partisipasi pemakai sistem informasi dengan harapan bahwa sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemakai hasil dari partisipasi tersebut

Pengaruh Kompleksitas Sistem Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Teori yang melandasi adalah teori sikap dan perilaku (*theory of attitude and behaviour*) yang dikembangkan oleh Triandis (1980) dalam Jurnal dan Supomo (2002:219) yang menyatakan bahwa pemanfaatan komputer personal (*personal computer*) oleh pemakai yang memiliki pengetahuan di lingkungan yang dapat memilih (*optional*) dipengaruhi oleh afeksinya (*affect*) terhadap pemanfaatan PC.

Menurut Robbins yang memandang organisasi terediri dari sub sistem yang membutuhkan koordinasi, komunikasi dan kontrol agar dapat efektif. Seorang dengan jabatan manajemen membutuhkan informasi yang sangat kompleks sehingga memerlukan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhannya karena apabila tidak didukung oleh sistem informasi yang baik maka manajer tersebut tidak dapat mengambil keputusan yang akurat.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah pemanfaatan sistem informasi tergantung kebutuhan akan informasi tersebut, semakin tinggi jabatan seseorang maka membutuhkan informasi yang semakin kompleks itu diperlukan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, karena apabila didukung oleh sistem informasi yang baik maka manajer tersebut dapat mengambil keputusan yang akurat

Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Teori yang melandasi adalah teori kelompok yang dikembangkan oleh Filey, House dan Kerr pada tahun 1976 dalam Thoha (1992:182) yang menyatakan bahwa suatu kelompok bisa mencapai tujuan-tujuan maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif diantara pemimpin dan pengikutnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap sikap, kepuasan kerja dan pelaksanaan kerja.

Setiap perusahaan memiliki struktur yang mengatur tugas dan wewenang, seorang pemimpin atau manajer bertanggung jawab atas semua aktivitas perusahaan sedangkan bawahan atau karyawan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dimana dia berada, kesemua bagian tersebut memerlukan sistem informasi yang berbeda-beda, agar dapat mencapai tujuan yang sama yaitu tujuan perusahaan maka dari itu hendaknya dapat membuat sistem informasi yang dapat mendukung terciptanya komunikasi antara pimpinan dan bawahan yang ada dalam struktur organisasi.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah agar suatu kelompok bisa mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai, maka harus terdapat suatu pertukaran positif diantara pimpinan dan pengikut nya, komunikasi antar bagian yang ada dalam struktur organisasi dapat tercipta apabila sistem informasi yang digunakan mendukung komunikasi tersebut

Pengukuran Variabel

Tipe skala yang digunakan adalah skala interval dan teknik pengukuran yang digunakan adalah *semantic differential scale* artinya penskalaan yang meminta responden untuk memberikan penilaian terhadap sejumlah pertanyaan tentang variabel yang diteliti yang terukur melalui tujuh skala sikap yang pada keduanya sisinya ditutup dengan kata sifat. Lebih khususnya penelitian ini menggunakan pilihan satu sampai tujuh menunjukkan kata sifat sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

Jawaban dengan nilai 1 berarti cenderung sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, nilai 4 merupakan nilai tengah antara sangat tidak setuju dengan sangat setuju dan nilai 7 berarti cenderung sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan

Teknik Penentuan Sampel

Teknik penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi mendapat peluang yang sama untuk menjadi sampel (Sugiyono,2003: 61). Penentuan sampel didasarkan pada pedoman ukuran sampel rumus Slovin dengan jumlah populasi sebanyak 66 koperasi dan tingkat sampling error 10% maka dihasilkan responden sebanyak 39 Koperasi Kelompok Tani di Kabupaten Nganjuk.

Teknik Analisis

Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan melalui beberapa uji yang dilakukan sebelumnya antara lain : 1) Uji Kualitas Data yang terdiri dari: Uji Validitas, Uji Reabilitas, dan Uji Normalitas. 2) Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari: Autokolerasi, Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas. 3) Uji F dan Uji t

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilakukan dengan cara melihat nilai R (koefisien korelasi) yang diperoleh. Sedang untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilakukan dengan cara melihat nilai R^2 atau R square (koefisien determinasi) yang diperoleh (Santoso, 2001:167).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis dan Hasil Uji Hipotesis

Langkah 1 : Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi linier berganda yang digunakan adalah cocok atau tidak untuk mengetahui pengaruh komunikasi pemakai (X_1), partisipasi pemakai (X_2), kompleksitas sistem (X_3), dan struktur organisasi (X_4) terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y).

Tabel 1 : Hasil Uji F

Model	Koefisien Regresi	F_{hitung}	Sig (p-value)	R^2
Konstanta	1,819	12,364	0,000	0,593
komunikasi pemakai (X_1)	0,469			
Partisipasi pemakai (X_2)	0,345			
Kompleksitas sistem (X_3)	0,203			
Struktur organisasi (X_4)	0,337			

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa model regresi linier berganda yang digunakan adalah cocok untuk mengetahui pengaruh komunikasi pemakai (X_1), partisipasi pemakai (X_2), kompleksitas sistem (X_3), dan struktur organisasi (X_4) terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y)

Langkah 2 : Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu komunikasi pemakai (X_1), partisipasi pemakai (X_2), kompleksitas sistem (X_3), dan struktur organisasi (X_4) terhadap variabel terikat yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi (Y). Berikut ini hasil uji t :

Tabel 2 : Hasil Uji t

Model	t_{hitung}	Sig (p-value)
Komunikasi pemakai (X_1)	2,431	0,021
Partisipasi pemakai (X_2)	2,325	0,026
Kompleksitas sistem (X_3)	2,234	0,032
Struktur organisasi (X_4)	2,872	0,007

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui hasil analisis regresi dalam pengujian parsial untuk variabel komunikasi pemakai (X_1) menunjukkan nilai t hit sebesar 2,431 dan nilai-p sebesar 0,021, variabel partisipasi pemakai (X_2) menunjukkan nilai t hit sebesar 2,325 dan $p-value = 0,026$ yang lebih besar dari 0,05, variabel kompleksitas sistem (X_3) menunjukkan nilai t hit sebesar 2,234 dan $p-value = 0,032$ yang lebih besar dari 0,05, variabel struktur organisasi (X_4) menunjukkan nilai t hit sebesar 2,872 dan $p-value = 0,007$ yang **lebih kecil dari 0,05**, yang berarti bahwa variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y) pada koperasi kelompok tani di kabupaten nganjuk. **Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti kebenarannya.**

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pemakai (X_1), partisipasi pemakai (X_2), kompleksitas sistem (X_3), struktur organisasi (X_4) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y) pada koperasi kelompok tani di kabupaten nganjuk.

Komunikasi pemakai adalah proses penyampaian ide, gagasan, atau informasi yang dilakukan oleh pemakai selama proses pengembangan sistem informasi (Davis dan Newstorm, 1996: 150). Komunikasi pemakai (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y) pada koperasi kelompok tani di kabupaten

nganjuk. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2004) yang menyimpulkan bahwa komunikasi pemakai tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengembangan sistem informasi.

Partisipasi pemakai merupakan perilaku, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemakai selama proses pengembangan sistem informasi (Restuningdiah dan Indriantoro, 2000: 121). Partisipasi pemakai (X_2) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y) pada koperasi kelompok tani di kabupaten nganjuk. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2004) yang menyimpulkan bahwa partisipasi pemakai tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengembangan sistem informasi.

Kompleksitas sistem merupakan koordinasi, komunikasi dan kontrol dalam organisasi agar dapat efektif. Kompleksitas sistem (X_3) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y) pada koperasi kelompok tani di kabupaten nganjuk. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2004) yang menyimpulkan bahwa komunikasi pemakai tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengembangan sistem informasi.

Struktur organisasi merupakan suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dan kelompok (Arifin, 2003:177). Struktur organisasi (X_4) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y) pada koperasi kelompok tani di kabupaten nganjuk. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2004) yang menyimpulkan bahwa struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengembangan sistem informasi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai tujuan hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Model regresi linier berganda yang digunakan adalah cocok untuk mengetahui pengaruh komunikasi pemakai (X_1), partisipasi pemakai (X_2), kompleksitas sistem (X_3), struktur organisasi (X_4) secara bersama-sama terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y) pada koperasi kelompok tani di kabupaten nganjuk
2. Hipotesis yang menyatakan bahwa komunikasi pemakai (X_1), partisipasi pemakai (X_2), kompleksitas sistem (X_3), struktur organisasi (X_4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi (Y) pada koperasi kelompok tani di kabupaten nganjuk **terbukti kebenarannya**.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pihak koperasi kelompok tani di Kabupaten Nganjuk hendaknya mampu menggunakan dan menerapkan sistem informasi akuntansi dalam menjalankan aktifitasnya, karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem informasi akuntansi mampu mengerjakan lebih cepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 1994, *Dampak Komputer Pada Sistem Akuntansi*, cetakan pertama, penerbit BPFE , Yogyakarta.
- ANICPA, 1989, *Codification of statement on Auditing standart*, AICPA, inc, New York.
- Arifin, 2003, *Perilaku Organisasi*, Cetakan Pertama, Penerbit Bayu Media, Malang.
- Baridwan, 1994, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Bornar, George H.and William S.Hopwood, 1990, *Accounting Information system*, Fouth Ed.Boston Allyn and Bacon.

- Cecil Gillespie, 1971, *Accounting System, Prosedure and Methods*, Third Edition Prentice-Hall Englewood cliff, New Jersey.
- Cushing, 1991, *Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan*, Edisi Ketiga Cetakan Kelima, Terjemahan Kosasih, Ruchyat, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Charles T. Horngren, et al, 1989, *Accounting*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliff New Jersey.
- Davis dan Newstrom, 1996, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Bagian II, Penerbit Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Gitosudarmo, 1996, *Prinsip Dasar Manajemen*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, 2000, *Sistem Informasi Berbasis Komputer*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Leitch, A. Robert and K. Roscoe Davis, 1983, *Accounting Information Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nash, F. Jhon, 1988, *Accounting Information System*, Second Ed, PWS-Kent Publishing Company, Boston.
- Nasir, 1998, *Metode Penelitian*, Edisi Ketiga, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nitisemito, 1996, *Manajemen Personalia*, Edisi Ketiga, Cetakan Kesembilan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter L. Mc. Micklie, 1989, *Accounting system: Past, Present, and Future*, in the Accounting system Journal (ASJ), Fall.
- Porter, W. Thomas and William E. Perry, 1981, EDP : *Control and Auditing*, Third Edition. Kent Publishing Co., Massachusetts.
- Robbins, 1996, *Perilaku Dalam Organisasi*, Jilid Pertama, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan Pujatmaja, Hadyana, Penerbit PT. Prehallindo, Jakarta.
- Simamora, 2000, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, Jilid Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Slamet Sugiri, MBA, 1991, *Computer Fraud dan Bagaimana Mencegahnya*, Majalah Akuntansi.
- Widjajanto, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wilkinson, W. Joseph, 1982, *Accounting and Informations Sytems*, John Wiley and Sons, Inc., New York.
- Teddy Jurnal dan Bambang Supomo, 2002, *Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik*.
- Dian Indri Purnamasari, 2004, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Pengembangan Sistem Informasi*.
- Lindrianasari, 2001, *Hubungan Keahlian dengan Partisipasi dan Hubungan Partisipasi dengan Variabel Lain dalam Pengembangan Sistem Informasi*.
- Prasid Junaedi, 2009, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Koperasi "Setia Bhakti Wanita" Jawa timur*,
- Widda Ratna Anggraewati, 2009, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi pada Koperasi "Bina Tani Bambu Runcing" di Probolinggo*,
- Vonny Ria Hartawati, 2009, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*,

**PENGARUH PERILAKU BELAJAR DAN KECERDASAN EMOSIONAL
TERHADAP STRES KULIAH MAHASISWA AKUNTANSI**

Eko Riadi
Rida Perwita Sari

Abstract

Learning behavior is defined as the habit of learning. Poor study habits are caused by a lack of awareness of students about the meaning of learning in college, so that these students feel frustrated in carrying out the process of learning. Teaching and learning process associated with emotional intelligence of students. Emotional intelligence is able to train the student ability. The ability to manage feelings, to motivate him, brave in the face of frustration, impulse control and delay immediate gratification, regulate moodreactive, and able to empathize and cooperate with others. Emotional intelligence develops with age and experience.

Research was conducted at 115 accounting students of the National Development University "Veteran" East Java class in 2007 with the primary data in the form of questionnaires. Tool that uses regression analysis. Result of analysis later in the analysis with the classical assumption test and F test and t test statistics.

The results of this study indicated that learning behaviors have significant and positive impact on college respondents stress. Whereas emotional intelligence provides a significant and negative effect of stress college respondents.

Keywords : *behavior learning, emotional intelligences, college stress.*

ABSTRAKSI

Perilaku belajar didefinisikan sebagai kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar yang jelek disebabkan oleh kurangnya kesadaran mahasiswa mengenai makna belajar di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa tersebut merasa frustasi dalam menjalankan proses belajar. Proses belajar mengajar berkaitan dengan kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu melatih kemampuan mahasiswa tersebut, yaitu kemampuan untuk mengelola perasaannya, memotivasi dirinya, tegar dalam menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan emosi berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman.

Penelitian ini dilakukan pada 115 mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur angkatan tahun 2007 dengan data primer berupa kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah regresi. Hasil analisis kemudian di analisis dengan uji asumsi klasik serta uji F dan uji t statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku belajar memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap stres kuliah responden, sedangkan kecerdasan emosional memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap stres kuliah responden.

Kata Kunci : perilaku belajar, kecerdasan emosional, stress kuliah

PENDAHULUAN

Akuntansi keperilaku dapat merancang sistem informasi untuk mempengaruhi motivasi, moral, dan produktivitas mahasiswa akuntansi. Perilaku belajar mahasiswa akuntansi dapat dilihat dari kebiasaan mahasiswa akuntansi dalam mengikuti dan memantapkan pelajaran, kebiasaan membaca buku teks, kunjungan ke perpustakaan, serta kebiasaan menghadapi ujian (Afifah, 2004).

Contoh di sekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak saja, atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan. Bahkan seringkali yang berpendidikan formal lebih rendah ternyata banyak yang lebih berhasil. Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal (IQ) saja, padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun karirnya terhambat atau lebih buruk lagi, tersingkir, akibat rendahnya kecerdasan emosional mereka (Melandy dan Aziza ; 2006).

Proses yang dijalani selama menuntut ilmu di perguruan tinggi secara langsung ataupun tidak langsung akan melatih kecerdasan emosional. Proses belajar mengajar dalam berbagai aspeknya bisa jadi meningkatkan kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu melatih kemampuan mahasiswa tersebut, yaitu kemampuan untuk mengelola perasaannya, kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustrasi, kesanggupan mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan-kemampuan ini mendukung seorang mahasiswa dalam mencapai tujuan dan cita-citanya (Melandy dan Aziza ; 2006).

Sebagai mahasiswa, individu diharapkan mempunyai semangat hidup tinggi, rasa optimis yang besar, dan motif berprestasi yang tinggi. Dengan adanya motif berprestasi yang tinggi yang mempunyai sifat-sifat, seperti selalu berusaha mencapai prestasi optimal, selalu memandang masa depannya dengan rasa optimis, diharapkan mahasiswa dapat sukses dalam menjalani kehidupan di perguruan tinggi, dan mempunyai prestasi yang optimal. Namun demikian, kenyataan yang dihadapi mahasiswa tidak seperti yang diharapkan. Berbagai masalah dialami mahasiswa dan tidak sedikit mahasiswa yang mengalami gangguan mental. Cobaan yang bertubi-tubi seperti ada satu mata kuliah yang telah diulang beberapa kali tetapi masih juga belum lulus dapat menyebabkan mahasiswa pesimis terhadap masa depannya, keinginan untuk semakin surut, yang akhirnya dapat mempengaruhi motif berprestasinya, sehingga dapat menyebabkan stres kuliah (Prabandari, 1989).

Selama menuntut ilmu di perguruan tinggi, mahasiswa terkadang merasa bosan dan tertekan dengan kuliahnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran mahasiswa mengenai makna belajar di perguruan tinggi yang akan sangat menentukan sikap dan pandangan belajar di perguruan tinggi. Keadaan mahasiswa yang merasa bosan dan tertekan ini dapat menyebabkan mahasiswa mengalami stres (Marita, dkk., 2008).

Belum lama ini terdengar berita mengenai kasus bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Indonesia pada waktu dan lokasi yang berlainan. Bahkan salah satunya adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Penyebab dari kasus-kasus bunuh diri tersebut adalah bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengalami stres kuliah.

Fenomena yang terjadi adalah dimana pada tanggal 15 Desember 2008, Hendrawan Winata, mahasiswa UPI YAI Salemba nekat mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari lantai 13 Fakultas Ekonomi, Universitas Atmajaya, Jakarta. Diduga Hendrawan bunuh diri karena stres kuliah. Hendrawan depresi karena kuliahnya tidak kunjung selesai, padahal Hendrawan sudah menempuh kuliah selama delapan tahun. Pada bulan yang sama, Nova Mirawati, mahasiswi Psikologi Universitas Indonesia diduga bunuh diri dengan cara melompat dari lantai tujuh Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta Timur. Menurut hasil pemeriksaan, belakangan ini Nova memang tampak stres karena nilai-nilai mata kuliahnya merosot. Kasus serupa juga dialami oleh David Hartanto Widjaja, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, Nanyang Technological University (NTU) Singapura. David bunuh diri setelah menusuk dosen pembimbing tugas akhirnya, Setelah itu David mengiris urat nadinya lalu meloncat hingga menemui ajal. David mengalami stres ketika mengerjakan skripsi karena beasiswanya dicabut (www.detiknews.com).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tingkat akhir cenderung mengalami stres kuliah, bahkan sampai bunuh diri.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perilaku belajar mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap stres kuliah?
2. Apakah kecerdasan emosional mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap stres kuliah?

MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan akuntansi. Bagi akademisi akan menjadi rujukan yang bermanfaat dalam mengenali mahasiswanya sesuai kematangan mereka untuk menciptakan suasana kelas yang tidak menimbulkan stres kuliah, sementara bagi mahasiswa dapat merujuk hasil penelitian ini dengan mempelajari manfaat kecerdasan emosional dan perilaku belajar mahasiswa sehingga secara tidak langsung mahasiswa akan belajar untuk mengelola kecerdasan emosional dengan baik dan menggunakan perilaku belajar yang baik dalam menghadapi stres kuliah.

KAJIAN PUSTAKA

Suwarjono (2004) menyatakan bahwa belajar di perguruan tinggi merupakan suatu pilihan strategis dalam mencapai tujuan individual seseorang. Semangat, cara belajar, dan sikap mahasiswa terhadap belajar sangat dipengaruhi oleh kesadaran akan adanya tujuan individual dan tujuan lembaga pendidikan yang jelas. Keselarasan tujuan akan menjadikan belajar di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang menyenangkan tanpa meninggalkan *scientific vigor* perguruan tinggi.

Perilaku manusia adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika, sedangkan belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat (<http://id.wikipedia.org>). Sehingga perilaku belajar adalah kebiasaan belajar yang dilakukan individu secara berulang-ulang sehingga menjadi otomatis dan spontan (Rampengan (1997) dalam Afifah (2004).

Kebiasaan belajar dapat berlangsung melalui tiga cara, yaitu memperoleh *reinforcement*, *classical conditioning*, belajar moderen. Apabila model ini mendapat *reinforcement* terhadap tindakannya, maka akan menjadi kebiasaan. Hal-hal yang berhubungan dengan perilaku belajar yang baik, yaitu kebiasaan mengikuti dan memantapkan pelajaran, kebiasaan membaca buku, kebiasaan kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan menghadapi ujian. Dampak kebiasaan belajar yang jelek bertambah berat ketika kebiasaan itu membiarkan mahasiswa dapat lolos tanpa gagal Hasil belajar dapat dihubungkan dengan terjadinya suatu perubahan, kecakapan atau kepandaian seseorang dalam proses pertumbuhan tahap demi tahap (Marita, dkk., 2008).

Apapun tujuan yang ingin dicapai melalui belajar di perguruan tinggi, akhirnya tujuan tersebut harus dicapai dalam bentuk unit kegiatan belajar mengajar yang disebut kuliah. Kuliah merupakan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan pengetahuan/keterampilan. Pemahaman dan persepsi mengenai hubungan ketiga faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan proses belajar (Suwarjono, 2004).

Beberapa aspek yang berkaitan dengan kegiatan konkret belajar menurut Suwarjono (2004), antara lain makna kuliah, fungsi temu kelas, pengalaman belajar atau nilai, konsepsi tentang dosen, kemandirian dalam belajar, konsep memiliki buku, dan kemampuan berbahasa.

Akar kata emosi adalah *movere*, kata kerja Bahasa Latin yang berarti menggerakkan, bergerak ditambah awalan “e-“ untuk memberi arti bergerak menjauh, menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi

(Goleman, 2007). Istilah kecerdasan emosi pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire pada tahun 1990. Mayer dan Salovey mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, serta mengendalikan perasaan secara mendalam, sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual (Arbadiati dan Kurniati, 2007).

Kecerdasan emosi menurut Cooper dan Sawaf merupakan faktor penentu perusahaan dalam karier dan organisasi, termasuk dalam pembuatan keputusan, kepemimpinan, melakukan terobosan teknis dan strategis, komunikasi yang terbuka dan jujur, kerja sama dan hubungan saling mempercayai, serta mengembangkan kreativitas dan daya inovasi (Suryaningsum, dkk., 2004).

Ciri-ciri kecerdasan emosional meliputi kemampuan, seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa (Goleman, 2007).

Dengan adanya kecerdasan emosional yang ditandai oleh kemampuan pengenalan diri/kesadaran diri, penguasaan diri, motivasi diri, empati dan kecakapan sosial (Goleman, 2007) akan mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa yang nantinya juga mempengaruhi seberapa besar tingkat stres yang dialami mahasiswa. Seorang mahasiswa yang kecerdasan emosionalnya tinggi akan berdampak positif pada perilaku belajar mahasiswa sehingga memiliki peranan penting untuk menghadapi stres yang bakal datang (Marita, dkk., 2008).

Terjadinya proses stres didahului oleh adanya sumber stres (*stressor*) yaitu setiap keadaan yang dirasakan orang mengancam dan membahayakan dirinya. Istilah stres atau ketegangan memiliki konotasi yang beragam. Bagi sementara orang, stres dapat menggambarkan keadaan psikhis yang telah mengalami berbagai tekanan yang melampaui batas ketahanannya. Sementara orang lain mengatakan stres bersifat subyektif hanya berhubungan dengan kondisi-kondisi psikologis dan emosi seseorang. Ada pula yang menganggap stres dan ketegangan merupakan faktor sebab akibat. Namun banyak orang cenderung menganggap stres sebagai tanggapan patologis (proses penyimpangan kondisi biologis yang sehat) terhadap tekanan-tekanan psikologis dan sosial yang berhubungan pekerjaan dan lingkungannya (Marita, dkk., 2008).

Menurut Rahim (1996) dalam Mulyati (2009), faktor-faktor penyebab stres antara lain adalah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, waktu kerja yang terlalu lama, dan kondisi tempat kerja. Sedangkan dampak stres menurut Suhartin (1999), meliputi dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap kinerja, dan dampak terhadap kejenuhan/kelelahan

Problem focused coping adalah usaha untuk mengurangi kebutuhan dalam situasi yang penuh stres atau menambah usaha untuk meredakannya. Menurut Smet (1994) seseorang cenderung menggunakan pendekatan *problem focused coping*, ketika mereka percaya bahwa sumber stres atau situasi dapat diubah. Menurut Kutash dan Schlesinger (1980) *problem focused coping* adalah usaha untuk berdamai dengan stres, baik itu merubah perilaku seseorang dalam mengatasi masalah maupun merubah kondisi lingkungan yang penuh stres itu sendiri (Arbadiati dan Kurniati, 2007: 24).

Strategi *problem focused coping* menurut Sarafino (1994) dalam (Arbadiati dan Kurniati, 2007: 24), meliputi:

1. Merencanakan Pemecahan Masalah
Menganalisis situasi untuk mendapatkan solusi dan kemudian mengambil tindakan langsung untuk memperbaiki keadaan.
2. Menghadapi Masalah
Dengan mengambil tindakan asertif.
3. Mencari Dukungan Sosial
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bantuan dan berusaha untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan *stressor*.

HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Perilaku belajar mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap stres kuliah.

H₂ : Kecerdasan emosional mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap stres kuliah

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan tahun 2007 atau mahasiswa semester delapan sebanyak 161 orang dengan alasan untuk memperoleh data lebih mudah dan karena peneliti berasumsi bahwa mahasiswa angkatan tahun 2007 diasumsikan telah mengalami proses pembelajaran yang lama dan sedang mengerjakan tugas akhir, sehingga beban yang dirasakan semakin berat dibandingkan dengan mahasiswa yang baru mengikuti perkuliahan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, yaitu suatu cara pengambilan sampel di mana kita tidak memilih-milih individu yang akan dijadikan anggota sampel (Djarwanto dan Subagyo, 2000: 111).

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu perilaku belajar (X₁) dan kecerdasan emosional (X₂) dengan variabel dependen yaitu stres kuliah (Y).

Sebelum melakukan analisis data maka perlu dilakukan pengujian kualitas data. Adapun pengujian yang dilakukan diantaranya uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Pengujian validitas menggunakan *corrected item-total correlation* di mana suatu butir atau pertanyaan dikatakan valid, jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha*. *Item to total correlation* digunakan untuk memperbaiki pengukuran dan mengeliminasi butir-butir yang kehadirannya akan memperkecil koefisien *cronbach's alpha*. Secara umum skor *cronbach's alpha* yang direkomendasikan di atas 0,6 (Ghozali, 2006). Uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov*, di mana jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) > dari 0,05, maka distribusi adalah normal (Sumarsono, 2004).

Setelah melakukan uji terhadap kualitas data, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik menjelaskan bahwa suatu persamaan regresi linier yang baik hendaknya tidak boleh terjadi multikolinieritas, heterokedastisitas, maupun autokolerasi. Sedangkan uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ dengan kriteria pengujian apabila tingkat signifikansi (p-value) > 0,05 H₀ diterima dan H₁ ditolak, dan sebaliknya. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, dengan kriteria pengujian apabila tingkat signifikansi (sig) $\geq 0,05$ H₀ diterima dan H₁ ditolak, dan sebaliknya (Ghozali, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uji normalitas dengan *kolmogorov smirnov* menunjukkan nilai signifikansi > 0,05, sehingga data variabel penelitian memiliki distribusi data yang normal, yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Uji Normalitas

No.	Variabel	Kolmogorov Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	Perilaku Belajar (X ₁)	0,381	0,999	Normal
2	Kecerdasan Emosional (X ₂)	0,457	0,985	Normal
3	Stres Kuliah (Y)	0,556	0,917	Normal

(Sumber: Data diolah)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas penelitian dapat dipenuhi. Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas pada nilai residual variabel bebas penelitian menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Dengan demikian asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas dapat dipenuhi, yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas dan heterokedastisitas

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Spearman	Sig.	Keterangan
1	Perilaku Belajar	0,440	2,272	-0,100	0,873	Bebas multikolinieritas dan heterokedastisitas
2	Kecerdasan Emosional	0,440	2,272	-0,200	0,747	Bebas multikolinieritas dan heterokedastisitas

(Sumber: Data diolah)

Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Persamaan Regresi

	Variabel		
	Konstanta	Perilaku Belajar (X_1)	Kecerdasan Emosional (X_2)
Koefisien Regresi	118,834	0,250	-0,103
Beta		1,125	-1,460
t_{hitung}		5,260	-6,318
Signifikansi		0,034	0,024

(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 118,834 + 0,250 X_1 - 0,103 X_2$$

$$a = \text{Konstanta} = 118,834$$

Nilai konstanta (a) sebesar 118,834 menunjukkan bahwa, apabila variabel perilaku belajar dan kecerdasan emosional konstan maka besarnya nilai stres kuliah yaitu sebesar 118,834.

$$b_1 = \text{Koefisien regresi untuk } X_1 = 0,250$$

Koefisien regresi untuk variabel perilaku belajar (X_1) adalah sebesar 0,250. Tanda positif menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dari variabel perilaku belajar (X_1) terhadap variabel stres kuliah (Y), yang artinya bahwa setiap penambahan variabel perilaku belajar (X_1) sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel stres kuliah (Y) sebesar 0,250.

$$b_2 = \text{Koefisien regresi untuk } X_2 = -0,103$$

Variabel kecerdasan emosional (X_2) mempunyai pengaruh negatif terhadap stres kuliah, hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar -0,103. Pengaruh negatif ini berarti bahwa kecerdasan emosional dan stres kuliah menunjukkan pengaruh terbalik, di mana setiap penambahan X_2 sebesar satu satuan akan menurunkan Y sebesar 0,103. Jika kecerdasan emosional semakin meningkat mengakibatkan stres kuliah semakin menurun, begitu pula sebaliknya jika pada kecerdasan emosional semakin menurun maka stres kuliah akan semakin meningkat.

Koefisien determinasi atau R-square menunjukkan persentase seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat.

Berikut adalah nilai R-square yang diperoleh dari hasil analisis:

Tabel 4. Pengaruh Variabel

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. Error of the timate
1	0,976	0,953	0,906	12,06324

(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai R Square sebesar 0,953, hal ini berarti bahwa stres kuliah mahasiswa S1 Akuntansi dipengaruhi oleh perilaku belajar dan kecerdasan emosional sebesar 95,3%, sedang sisanya 4,7% masih dipengaruhi oleh variabel lain, seperti variabel kecerdasan spritual (*spritual quotient*). Karena seseorang yang memiliki kecerdasan spritual, yaitu sejauh mana seseorang memperlakukan orang lain atau lingkungan yang menjadi sumber kesulitan dan kegagalannya. Dan yang lebih penting lagi adalah sejauh mana kesediaan untuk bertanggungjawab atas kesalahan atau kegagalan tersebut. Kecerdasan ini sangat penting dimiliki seseorang dalam menghadapi stres (Marita, dkk., 2008: 20). Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain serta menambah data penelitian atau pengamatannya.

Pada uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 20,282 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,047. Karena tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel perilaku belajar (X_1) dan variabel kecerdasan emosional (X_2) berpengaruh terhadap stres kuliah (Y), sehingga model regresi yang dihasilkan adalah sesuai atau cocok. Hasil uji F ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Uji F Variabel Bebas dengan Variabel Terikat

Sumber keragaman	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Signifikansi
Regresi	5902,957	2	2951,478	20,282	0.047
Residual	291,043	2	145,522		
Total	6194,000	4			

(Sumber: Data diolah)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$; maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$; maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Hasil pengujian hipotesis pengaruh secara parsial variabel perilaku belajar (X_1), dan Kecerdasan emosional (X_2) terhadap stress kuliah (Y) dengan menggunakan uji t.

Tabel 6. Hasil Uji t Variabel Bebas dengan Variabel Terikat

Parameter	Standardized Coefficients	t_{hitung}	Signifikansi
Perilaku Belajar (X_1)	1,215	5,260	0,034
Kecerdasan Emosional (X_2)	-1,460	-6,318	0,024

(Sumber: Data diolah)

Hasil uji t antara variabel perilaku belajar dengan variabel stres kuliah menunjukkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,034 yang berarti $< 0,05$; maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Perilaku Belajar berpengaruh signifikan terhadap Stres Kuliah.

Hasil uji t antara variabel Kecerdasan Emosional dengan variabel stres kuliah menunjukkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,024 yang berarti $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kecerdasan Emosional berpengaruh signifikan terhadap Stres Kuliah.

Berdasarkan pada analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa kesesuaian model analisis variabel perilaku belajar (X_1) dan kecerdasan emosional (X_2) cocok untuk mengetahui pengaruh terhadap stres kuliah (Y) mahasiswa S1 program studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,047 yang berarti kurang dari 0,05; jadi adanya perilaku belajar dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap stres kuliah.

Berdasarkan pengujian uji t terhadap variabel perilaku belajar, dapat diketahui bahwa perilaku belajar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap stres kuliah mahasiswa S1 program studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,034 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marita, dkk. (2008) yang menyimpulkan bahwa perilaku belajar berpengaruh terhadap stres kuliah, apabila mahasiswa mempunyai perilaku belajar yang baik maka tidak ada mahasiswa yang merasa stres kuliah.

Hal-hal yang berhubungan dengan perilaku belajar yang baik menurut Surachmad (2001), dapat dilihat dari kebiasaan mengikuti dan memantapkan pelajaran, kebiasaan membaca buku, kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan menghadapi ujian. Calhoun dan Acocella (1995) menyatakan bahwa dampak kebiasaan belajar yang jelek bertambah berat ketika kebiasaan itu membiarkan mahasiswa dapat lolos tanpa gagal (Marita, dkk., 2008: 8).

Berdasarkan pengujian uji t terhadap variabel kecerdasan emosional dapat diketahui bahwa kecerdasan emosional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap stres kuliah mahasiswa S1 program studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arbadiati dan Kurniati (2007) bahwa individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik cenderung mampu mengontrol dirinya sehingga mampu memberikan dorongan pada dirinya untuk bertindak langsung mencari pemecahan masalah. Sehingga dengan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, maka tingkat stres kuliah menjadi berkurang.

Dengan adanya kecerdasan emosional yang ditandai oleh kemampuan pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan kemampuan sosial (Goleman 2007: 45) akan mempengaruhi seberapa besar tingkat stres yang dialami mahasiswa. Seorang mahasiswa yang kecerdasan emosionalnya tinggi akan berdampak positif pada perilaku belajar mahasiswa sehingga memiliki peranan penting untuk menghadapi stres yang bakal datang (Marita, dkk., 2008: 8).

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini dirasakan oleh peneliti telah dilakukan secara optimal, namun demikian peneliti masih merasa dalam penelitian ini masih adanya keterbatasan antara lain:

1. Sampel dalam penelitian ini terbatas hanya pada mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2007.
2. Data penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara.
3. Selain kecerdasan emosional, seseorang juga memiliki kecerdasan spiritual atau *Spiritual Quotient* (SQ). Kecerdasan ini sangat penting dimiliki seseorang dalam menghadapi stres. Oleh karena itu penelitian mendatang dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan kecerdasan spiritual sebagai variabel bebas.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perilaku belajar berpengaruh signifikan terhadap stres kuliah mahasiswa S1 Program studi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap stres kuliah mahasiswa S1 program studi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas jangkauan populasi karena penelitian ini hanya menggunakan satu angkatan saja, yaitu hanya pada mahasiswa akuntansi angkatan 2007 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sehingga pada penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah obyek penelitian.
2. Hendaknya pada penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah jumlah variabel yang diteliti yang dapat berpengaruh terhadap stres kuliah, seperti kecerdasan spiritual atau *Spiritual Quotient* (SQ).
3. Untuk mengurangi stres kuliah pada mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dapat dilakukan hal-hal berikut, seperti dibuatkanlah suatu wadah bimbingan konseling bagi mahasiswa, membuat suasana belajar menjadi nyaman, sehingga mahasiswa tidak merasa bosan, memberikan pengarahan kepada orang tua agar tidak memaksa anaknya untuk kuliah di jurusan yang mereka inginkan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Nurul, 2004, *Pengaruh Perilaku Belajar terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Akuntansi*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- Anonim, 2009, *Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Berdasar Her Registrasi dan KRS Gasal Tahun 2009/2010*, Admik FE ‘09/’10
- Arbadiati, RA. Catur Wahyu dan Ni Made Taganing Kurniati, 2007, “Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Kecenderungan Problem Focused Coping Pada Sales”, *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek, dan Sipil)*, Volume 2 Agustus 2007, Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Dewi, Rosita dan Amilin, 2008, “Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik Dengan Role Stress Sebagai Variabel Moderatif”, *JAAI*, Volume 12 No. 1 Tahun 2008.
- Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 2000, *Statistik Induktif*, Edisi Keempat Cetakan Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- El-Qudsy, Achsin, 2010, *Perilaku Belajar Mahasiswa di Indonesia*, <http://citizennews.suaramerdeka.com> yang diakses pada tanggal 29 Desember 2010.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Goleman, Daniel, 2007, *Emotional Intelligence (Kecerdasan Emosional). Mengapa EI lebih penting daripada IQ*, Terjemahan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunawan, Deden, 2009, *Mahasiswa RI Tewas di Singapura Pertaruhan Harga Diri RI*, <http://www.detiknews.com/read/2008/12/17/122318/1055055/10/mahasiswa-RI-Tewas-di-singapura> diakses pada tanggal 29 Desember 2010.
- Gusnita, Chazizah, 2008, *Mahasiswa Universitas Indonesia Jatuh dari Pusat Grosir Cilitan: Nova Diduga Bunuh Diri Karena Nilainya Anjlok*,

<http://www.detiknews.com/read/2008/12/17/122318/1055055/10/nova-diduga-bunuh-diri-karena-nilainya-anjlok> diakses pada tanggal 29 Desember 2010.

- Ilyas, Mefida, 2007, "Peran Pernyataan Orientasi Tujuan (State Goal Orientation) dalam Pengajaran Di Kelas terhadap Proses Pencapaian Kinerja Mahasiswa Akuntansi di Perguruan Tinggi", *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X*, Surabaya.
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak, 2005, *Akuntansi Keprilakuan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Japarianto, Edwin, 2006, "Budaya dan Behaviour Intention Mahasiswa dalam Menilai Service Quality Universitas Kristen Petra", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Volume 1 No. 1, April 2006, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Jogiyanto, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, BPFE, Yogyakarta.
- Marita, Sri Suryaningsum, dan Hening Naafi Shaalih, 2008, "Kajian Empiris atas Perilaku Belajar dan Kecerdasan Emosional dalam Mempengaruhi Stres Kuliah Mahasiswa Akuntansi", *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI*, Makassar.
- Melandy, Rissyo dan Nur Aziza, 2006, "Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Diri sebagai Variabel Pemoderasi", *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX*, Padang.
- Mudjijanti, Fransisca, 2006. "Analisis terhadap Masalah-masalah Mahasiswa Unika Widya Mandala Madiun", *Jurnal Widya Warta*, No. 02 Tahun XXX, Juli 2006, Universitas Katolik Widya Mandala, Madiun..
- Mulyati, Syari, 2009. "*Pengaruh Konflik Peran Dan Stres Terhadap Komitmen Organisasi*", Skripsi, Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Prabandari, Raden Ajeng Yayi Suryo, 1989, "Hubungan antara Stres dan Motif Berprestasi dengan Depresi Pada Mahasiswa Tingkat Lanjut", *Jurnal Psikologi*, Volume No. 1 tahun 1989, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Saputra, Andi, 2008, *Kasus Mahasiswa Bunuh Diri: Peran Keluarga Sangat Penting*, <http://www.detiknews.com/read/2008/12/17/113817/1055006/10/peran-keluarga-sangat-penting> diakses pada tanggal 29 Desember 2010.
- Sudjianto, Yani, 2010, *Pengaruh Perilaku Belajar dan Kecerdasan Emosional terhadap Stres Kuliah Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi STIESIA)*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.
- Suhartin, RI., 1999, "Stres Dan Cara Mengendalikannya", *Jurnal Bina Widya Psikologi*, Volume 10 No. 3 Tahun 1999, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.
- Sumarsono, 2004, *Metode Penelitian Akuntansi*, Surabaya.
- Suryaningsum, Sri, Suchayo Heriningsih, dan Afifah Afuwah, 2004, "Pengaruh Pendidikan Tinggi Akuntansi Terhadap Kecerdasan Emosional", *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VII*, Denpasar.
- Suwardjono, 2004, "Perilaku Belajar di Perguruan Tinggi", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Widarjono, Agus, 2007, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

**KONTRIBUSI REGULASI PEMERINTAH, TEKANAN MASYARAKAT DAN
TEKANAN ORGANISASI LINGKUNGAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN AKUNTANSI SOSIAL
(Kasus Pada PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya)**

Saiful Anwar
Sari Andayani
Syarif Hidayat

Abstrac

Company as one economic actor must have a very important role on survival of the economy and society at large. In conducting its business the company should consider all aspects, namely financial aspects, social aspects, and environmental aspects based on the concept of Triple Bottom Line. Not only concerned with profits to be achieved. The company as a principal business is required to further consider the social and environmental conditions that exist in the vicinity. For that company PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya must always maintain mutual reciprocity relationship between the Company as an organization with nature / environment and society as a guarantor of the availability of Raw Materials. Social Responsibility of companies can be seen from the commitment and support for companies who voluntarily give attention to environmental and social as well as stakeholdersnya. The purpose of this study is to empirically To test the influence of Government Regulation, Community Pressure, and Pressure Environment Organization of Corporate Social Responsibility, as well as to test empirically the influence of Corporate Social Responsibility to Corporate Social Accounting.

Object of the research is PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya with research sample is the employees who totaled 52 people. Hypothesis test used was multiple linear regression analysis and simple linear regression analysis.

Based on test results of the analysis we concluded that for the first hypothesis states that government regulation, public pressure, and pressure environmental organizations significantly influence corporate social responsibility partially verified. As for the second hypothesis states that corporate social responsibility significantly influence social accounting firm verified.

Keyword : Government regulation, Public pressure, The pressure of environmental organizations, corporate social responsibility, Corporate Social Accounting

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional suatu negara bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Salah satu yang mendorong perkembangan dan pertumbuhan tersebut adalah dunia usaha, yaitu hasil pelaksanaan berbagai instansi dan pihak-pihak. Instansi dan pihak-pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan-perusahaan. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup perekonomian dan masyarakat luas. Keberadaan perusahaan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat dan perekonomian suatu Negara dalam bentuk membuka lapangan kerja, menghasilkan pendapatan untuk Negara melalui pajak dan memberikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam melaksanakan usahanya perusahaan harus memperhatikan seluruh aspek, yaitu aspek

keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang berdasarkan konsep *Triple Bottom Line*. Tidak hanya mementingkan keuntungan yang akan dicapai. Perusahaan sebagai pelaku bisnis dituntut untuk semakin memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan *Raw Material* sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan lingkungan, dan oleh karenanya PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya selalu menjaga hubungan *resiprositas mutualisme* antara Perusahaan sebagai suatu organisasi dengan alam / masyarakat selaku penjamin ketersediaan *Raw Material*. Hubungan *resiprositas mutualisme* tersebut direalisasikan oleh perusahaan dalam bentuk program-program sosial berdasarkan regulasi pemerintah diantaranya pavingisasi, reboisasi, pemeriksaan polutan berkala, bakti sosial, pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemagangan trainee dan perekrutan karyawan dari warga sekitar, serta swadaya masyarakat (wirausaha) [matrik keberhasilan program CSR tahun 2010 PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya].

Mengingat rendahnya kepedulian sosial perusahaan di Indonesia, apakah regulasi pemerintah, tekanan masyarakat, dan tekanan organisasi lingkungan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Kontribusi Regulasi pemerintah, tekanan masyarakat, tekanan organisasi lingkungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan akuntansi sosial perusahaan (Kasus Pada PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya)”

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah regulasi pemerintah, tekanan masyarakat, dan tekanan organisasi lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ?, 2) Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntansi sosial perusahaan ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menguji secara empirik pengaruh regulasi pemerintah, tekanan masyarakat, dan tekanan organisasi lingkungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, 2) Untuk menguji secara empirik pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap akuntansi sosial perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Pengertian Tanggung Jawab sosial Perusahaan

Menurut **Elkington (Wibisono, 2007: 32)** bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P” yang terkenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*”, selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*), dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansial saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

2. Klasifikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut **Broadshaw (Harahap, 2007: 400)** mengemukakan bahwa tanggung jawab perusahaan ada tiga bentuk, yaitu :

a. corporate philanthropy, di sini tanggung jawab perusahaan itu berada sebatas kedermawanan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

- b. *corporate responsibility*, di sini kegiatan pertanggungjawaban itu sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena ketentuan UU atau bagian dari kemauan atau kesediaan perusahaan.
- c. *corporate policy*, di sini tanggung jawab sosial perusahaan itu sudah merupakan bagian dari kebijakannya.

2.2. Teori Stakeholder

Menurut Blair et.al (Kholis dan Maksun, 2003: 938) mendefinisikan stakeholder sebagai berikut : “ *As group or individuals who have an interest in the actions of an organization and ability to influence it* “. Pengertian yang dikemukakan oleh Blair et.al dapat diartikan bahwa stakeholder sebagai sebuah kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dan dapat pula mempengaruhi jalannya operasional perusahaan. Jika dicermati secara substansial kedua pendapat diatas, memiliki orientasi konsep yang sama yaitu menyangkut masalah kelangsungan hidup (*goingconcern*) perusahaan.

- a. Regulasi pemerintah (*governmental regulation*), menurut Hendriques dan Sadorsky (1999) dalam Kholis dan Maksun (2003: 944) regulasi pemerintah yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- b. Tekanan masyarakat, menurut Hendriques dan Sadorsky (1999) dalam Kholis dan Maksun (2003: 944) tekanan masyarakat adalah perhatian perusahaan terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Tekanan masyarakat agar perusahaan lebih teliti kepada lingkungan merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan perusahaan dengan konsumen, bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif.
- c. Tekanan organisasi Lingkungan, menurut Hendriques dan Sadorsky (1999) dalam Kholis dan Maksun (2003: 944) tekanan organisasi lingkungan adalah perhatian perusahaan terhadap aktifitas organisasi lingkungan (*LSM lingkungan*).orientasi organisasi lingkungan secara umum adalah menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan hidup demi kepentingan perusahaan (*profit*).

2.3. Pengertian Akuntansi Sosial

Menurut Kholis (2002: 30) istilah akuntansi sosial (*Social Accounting*) sebenarnya bukanlah istilah baku dalam akuntansi. Para pakar akuntansi membuat istilah masing-masing untuk menggambarkan transaksi antara perusahaan dengan lingkungannya. Menurut Suadi (1998) dalam Kholis (2002: 30) mempergunakan istilah *Social Accounting* dan mendefinisikannya sebagai proses pengukuran variabel-variabel yang menentukan tingkat prestasi sosial perusahaan baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan definisi akuntansi sosial menurut Harahap (2007:184) adalah : “Ilmu Socio Economic Accounting (SEA) ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek *social Benefit* dan *Social cost* yang ditimbulkan oleh lembaga”.

2.4. Pelaporan dan Pengungkapan Akuntansi Sosial

Untuk melaporkan aspek sosial ekonomi yang diakibatkan oleh perusahaan ada beberapa teknik pelaporan dalam *Social Economic Accounting* (SEA). Menurut Diller (1970) dalam Harahap (2007: 409) mengungkapkan teknik pelaporannya sebagai berikut:

1. Pengungkapan dalam surat pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau dalam bentuk laporan lainnya.
2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Dilihat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan dan sebagainya.

2.5. Pengaruh Regulasi pemerintah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Coghill (1999) dalam Kholis dan Maksun (2003: 941) regulasi pemerintah dapat dipahami sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan perusahaan, sebab sebagai badan pembuat peraturan (*regulator body*) pemerintah memiliki peran signifikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan terhadap lingkungan

eksternalnya. Sejalan dengan **Coghill, Hendriques dan Sadorsky (1999) dalam kholis dan Maksun (2003: 941)** juga merekomendasikan bahwa regulasi pemerintah memiliki pengaruh terhadap pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Peran pemerintah menjadi sangat penting karena pemerintahan juga merupakan bagian salah satu komponen *stakeholders* perusahaan **Freeman (1984) dalam Kholis dan maksun (2003: 941)**.

H1. Dikaitkan dengan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *terdapat pengaruh yang signifikan antara regulasi pemerintah terhadap tanggung jawab sosial perusahaan*.

2.6. Pengaruh Tekanan Masyarakat Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut **Blair (1991) dalam Kholis dan Maksun (2003: 941)** masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat mempengaruhi arah dan kebijakan sebuah organisasi perusahaan. **Hendriques dan Sadorsky (1999) dalam Kholis dan Maksun (2003: 941)** juga merekomendasikan bahwa tekanan masyarakat memiliki pengaruh terhadap tentang pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan. Peran masyarakat menjadi penting karena juga merupakan bagian salah satu komponen stakeholder perusahaan **Freeman (1984) dalam Kholis dan Maksun (2003: 941)**. Di Indonesia peran masyarakat yang diwakili oleh organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang sertifikasi halal untuk menguji produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dijadikan contoh dari peran masyarakat sebagai stakeholder yang harus diperhatikan oleh perusahaan.

H2. Dikaitkan dengan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *terdapat pengaruh yang signifikan antara tekanan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan*.

2.7. Pengaruh Tekanan Organisasi Lingkungan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hunt dan auster (1990) dalam Kholis dan Maksun (2003: 941) menyatakan organisasi lingkungan memiliki peran sebagai wadah kontrol sosial yang fokus terhadap pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Selanjutnya **Romee (1992) dalam Kholis dan Maksun (2003: 941)** menyoroti pentingnya dunia bisnis memperhatikan isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai media untuk menjalankan fungsi-fungsi lingkungan yang ada pada perusahaan. Tekanan organisasi lingkungan menjadi sangat penting karena juga merupakan salah satu komponen dari *stakeholders* perusahaan **Freeman (1984) dalam Kholis dan Maksun (2003: 942)**. Keberadaan organisasi lingkungan hidup di Indonesia dikenal dengan organisasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lingkungan hidup. Sebuah contoh aktivitas LSM lingkungan di Indonesia adalah investigasi yang dilakukan oleh WALHI atas pencemaran sungai propinsi Riau yang berasal dari pembuangan limbah perusahaan yang mengakibatkan ribuan ekor ikan mati dan rusaknya habitat di muara sungai. Temuan-temuan LSM lingkungan tersebut tentunya akan ditindaklanjuti oleh perusahaan sehingga perusahaan akan melihat sedemikian pentingnya organisasi lingkungan saat ini, dengan demikian dapat dipahami bahwa tekanan organisasi lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan (**Kholis dan Maksun,2003: 942**).

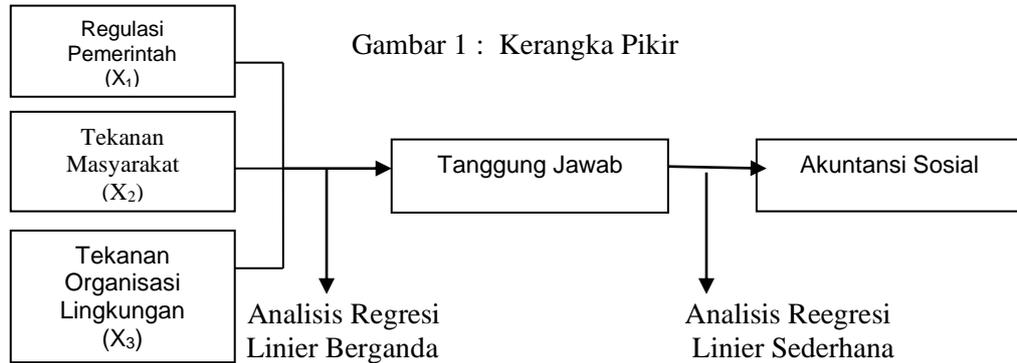
H3. Dikaitkan dengan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *terdapat pengaruh yang signifikan antara tekanan organisasi lingkungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan*.

2.8. Pengaruh Tanggung jawab Sosial Terhadap Akuntansi Sosial

Permasalahan akuntansi sosial ini jika dikaitkan dengan prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi isu penting pengelolaan perusahaan saat ini, khususnya pada prinsip *Responsibility* yang berbicara tentang bagaimana entitas bisnis bertanggung jawab kepada *stakeholders* dan juga lingkungannya. Prinsip dasar GCG ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan hanya kepada para pemegang saham, calon investor, kreditur, dan pemerintah tetapi juga kepada

stakeholders lainnya, seperti masyarakat umum, konsumen, serikat pekerja dan karyawan perusahaan secara individu.

H4. Berdasarkan uraian dan argumen diatas dapat disimpulkan bahwa *terdapat pengaruh yang signifikan antara tanggung jawab sosial perusahaan terhadap akuntansi sosial perusahaan.*



3. Metode Penelitian

3.1. Pengumpulan sampel dan Data

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling” dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2003:120) dengan presisi yang ditetapkan sebesar 10% dari jumlah karyawan PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya sebanyak 109 orang, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 52 responden.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Regulasi pemerintah. Adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tekanan masyarakat. Adalah perhatian perusahaan terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat

Tekanan Organisasi Lingkungan. Adalah perhatian perusahaan terhadap aktifitas organisasi lingkungan (LSM lingkungan).

Tanggung Jawab sosial. adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.

Akuntansi Sosial. Adalah proses pengukuran variabel-variabel yang menentukan tingkat prestasi sosial perusahaan baik secara internal maupun eksternal.

Teknik Pengukuran Variabel dan Sumber Instrumen Penelitian

Variabel akuntansi sosial diukur dengan menggunakan skala *Semantic Differential* yang dikembangkan oleh **Hendriques dan Sadorsky (1999)**

3.3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan analisis regresi linier sederhana. Model persamaan regresi linier yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Persamaan Regresi Linier Berganda

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

2. Persamaan Regresi Linier Sederhana

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 Y_1 + e \dots\dots\dots (2)$$

4. Hasil Penelitian

4.1. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Regulasi Pemerintah. Hasil pengujian validitas terhadap 4 (empat) item pertanyaan menunjukkan koefisien korelasi yaitu pertanyaan $X_{1,1}$ valid *Corrected Item Total Correlation* 0,543 ; $X_{1,2}$: 0,422 ; $X_{1,3}$:0,598, $X_{1,4}$: 0,203 kurang dari 0,30.

Tekanan Masyarakat. Hasil pengujian validitas t terhadap 4 (empat) item pertanyaan menunjukkan koefisien korelasi yaitu pertanyaan $X_{1,1}$ valid *Corrected Item Total Correlation* 0,589, $X_{1,2}$: 0,664, $X_{1,3}$ tidak valid 0,160 kurang dari 0,30, pertanyaan $X_{1,4}$; 0,633.

Tekanan Organisasi Lingkungan. Hasil pengujian validitas terhadap 4 (empat) item pertanyaan menunjukkan koefisien korelasi yaitu pertanyaan $X_{1,1}$: 0,675, pertanyaan $X_{1,2}$: 0,585, pertanyaan $X_{1,3}$: 0,628, pertanyaan $X_{1,4}$: 0,695.

Tanggung jawab Sosial perusahaan. Hasil pengujian validitas terhadap 4 (empat) item pertanyaan menunjukkan koefisien korelasi yaitu pertanyaan $X_{1,1}$: 0,621, pertanyaan $X_{1,2}$: 0,607, pertanyaan $X_{1,3}$: 0,523, pertanyaan $X_{1,4}$: 0,286 kurang dari 0,30.

Akuntansi Sosial. Hasil pengujian validitas terhadap 4 (empat) item pertanyaan menunjukkan koefisien korelasi yaitu pertanyaan $X_{1,1}$: 0,433, pertanyaan $X_{1,2}$: 0,492, pertanyaan $X_{1,3}$: 0,625, pertanyaan $X_{1,4}$: 0,585.

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas di atas menyebutkan bahwa nilai alpha cronbach's yang dihasilkan kelima variabel tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga variabel regulasi pemerintah (X_1), tekanan masyarakat (X_2), tekanan organisasi lingkungan (X_3), tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1) dan akuntansi sosial perusahaan (Y_2) dinyatakan reliabel.

3. Uji Normalitas

Bahwa distribusi data pada variabel regulasi pemerintah (X_1), tekanan masyarakat (X_2), tekanan organisasi lingkungan (X_3) dan tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1) adalah distribusi normal, karena tingkat signifikan dari *Kolmogorov-Smirnov* yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 5\%$). Sedangkan distribusi data pada variabel akuntansi sosial (Y_2) adalah tidak distribusi normal, karena tingkat signifikan dari *Kolmogorov-Smirnov* yang dihasilkan kurang dari 0,05 ($\text{sig} < 5\%$). Dengan mempertimbangkan *central limit theorem* untuk sampel yang lebih besar dari 30 ($n = 52$), sehingga distribusi data variabel akuntansi sosial (Y_2) dianggap berdistribusi normal (Iskandar Itan, 2003 : 167).

4.2. Uji Asumsi klasik

1. Multikolinieritas

Variabel regulasi pemerintah (X_1), tekanan masyarakat (X_2) dan tekanan organisasi lingkungan (X_3) kurang dari angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

2. Heteroskedastisitas

Menunjukkan bahwa tingkat signifikan pada variabel regulasi pemerintah (X_1), tekanan masyarakat (X_2) dan tekanan organisasi lingkungan (X_3) lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 5\%$), sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dengan residual tidak terjadi heteroskedastisitas atau model regresi linier berganda yang dihasilkan bebas dari heteroskedastisitas.

4.3. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Dari hasil analisis perhitungan komputer menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y_1 = 2,790 + 0,239 X_1 + 0,260 X_2 + 0,025 X_3$$

Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan adalah sebagai berikut

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,162 hal ini berarti secara bersama-sama 16,2% perubahan variabel tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1) dapat dijelaskan oleh regulasi pemerintah (X_1), tekanan masyarakat (X_2) dan tekanan organisasi lingkungan (X_3) sedangkan sisanya yaitu 83,8% disebabkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam kerangka konsep ini.

Nilai korelasi ganda yang dihasilkan sebesar 0,403 yang berarti terdapat hubungan yang sedang antara variabel regulasi pemerintah (X_1), tekanan masyarakat (X_2) dan

tekanan organisasi lingkungan (X_3) dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1) yaitu sebesar 40,3%.

Hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 3,100 dengan tingkat signifikan sebesar 0,035 kurang dari 5% ($sig < 5\%$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti model regresi yang dihasilkan adalah cocok digunakan untuk mengetahui pengaruh regulasi pemerintah (X_1), tekanan masyarakat (X_2) dan tekanan organisasi lingkungan (X_3) terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1).

Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil dari uji t adalah sebagai berikut:

1. Nilai t_{hitung} pada variabel regulasi pemerintah (X_1) sebesar 1,542 dengan tingkat signifikan sebesar 0,130 lebih dari 5% ($sig > 5\%$), yang berarti regulasi pemerintah (X_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1). Berdasarkan hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel ini adalah positif yang artinya semakin banyak regulasi pemerintah semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, hasil uji t menyebutkan bahwa regulasi pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang artinya tingginya regulasi pemerintah tidak memberikan dampak positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Nilai t_{hitung} pada variabel tekanan masyarakat (X_2) sebesar 2,016 dengan tingkat signifikan sebesar 0,049 kurang dari 5% ($sig < 5\%$), yang berarti tekanan masyarakat (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1). Berdasarkan hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel ini adalah positif yang artinya semakin banyak tekanan masyarakat yang diperhatikan maka tanggung jawab sosial perusahaan semakin tinggi. Terbukti dari jawaban responden yaitu PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya Hasil uji t menyebutkan bahwa tekanan masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang artinya perhatian perusahaan terhadap masyarakat yang tinggi memberikan dampak positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Nilai t_{hitung} pada variabel tekanan organisasi lingkungan (X_3) sebesar 0,222 dengan tingkat signifikan sebesar 0,826 lebih dari 5% ($sig > 5\%$), yang berarti tekanan organisasi lingkungan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1). Berdasarkan hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel ini adalah positif yang artinya semakin tinggi tekanan organisasi lingkungan maka semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan. Terbukti dari jawaban responden yaitu PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya memiliki perhatian terhadap aktifitas organisasi lingkungan.

Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana

Adapun persamaan regresi linier sederhana untuk menguji tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Akuntansi sosial dengan hasil analisis sebagai berikut :

$$Y_2 = 2,767 + 0,445 Y_1$$

Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,209 hal ini berarti perubahan variabel akuntansi sosial perusahaan (Y_2) dapat dijelaskan oleh tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1) sebesar 20,9% sedangkan sisanya yaitu 79,1% disebabkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam kerangka konsep ini.

Nilai korelasi ganda yang dihasilkan sebesar 0,457 yang berarti terdapat hubungan yang sedang antara variabel tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1) dengan akuntansi sosial perusahaan (Y_2) yaitu sebesar 45,7%.

Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil dari uji t adalah sebagai berikut:

Nilai t_{hitung} pada variabel tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1) sebesar 3,631 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 kurang dari 5% ($sig < 5\%$), yang berarti tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1) berpengaruh terhadap akuntansi sosial perusahaan (Y_2).

Berdasarkan hasil uji t tersebut di atas menyimpulkan bahwa hipotesis ke-4 "Bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntansi sosial perusahaan" teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (Y_1) berpengaruh positif terhadap akuntansi sosial perusahaan (Y_2) yang berarti semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan, maka akuntansi sosial perusahaan semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis ke-2 "Bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntansi sosial perusahaan" teruji kebenarannya.

Keterbatasan Penelitian

Data penelitian ini berasal dari persepsi responden secara tertulis melalui instrumen kuesioner. Ketidakobyektifan responden dalam mengisi kuesioner dapat mempengaruhi hasil penelitian, sehingga perlu ditambahkan metode wawancara dalam upaya pengumpulan data untuk menghindari kemungkinan tersebut.

Saran

Bagi perusahaan, hendaknya lebih mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan sosial seperti, pengerusakan hutan, lingkungan, iklan palsu, jaminan palsu, kualitas produk yang tidak benar, kebisingan, keracunan dan produk yang merusak kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Anonim.2009. *Pedoman penyusunan Usulan penelitian Dan Skripsi jurusan akuntansi*. Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Harahap, Sofyan, Safri, 2007, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja grafindo Perkasa, Jakarta.
- Suharjo, Bambang, 2008, *Analisis Regresi Terapan Dengan SPSS*, Edisi pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Umar, Husein, 2003, *Metode Riset Perilaku Organisasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.
- Anggraini, Fr. Reni Retno, 2006, "*Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Jakarta)*", Simposium Nasional Akuntansi IX, K-AKPM 24, Padang, Hal 1-21.
- Azizul Kholis dan Azhar Maksu, 2003, "*Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan akuntansi Sosial perusahaan (Corporate Responsibilities and Social Accounting)*", Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003, Hal 936-954

**PENERAPAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
EARNING MANAGEMENT DI DALAM PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI
(Studi Kasus pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia)**

Erdian Ajie Laksono
Sri Hastuti
Anik Juliati
e-mail : tutik_hastuti@yahoo.com

Abstract

The company was founded with the aim of increasing corporate value through increased prosperity owners or shareholders. Parties manager as the manager of corporate managers have different goals, especially in terms of improving individual performance and compensation to be received. Ketidajajaran interest to encourage the emergence of deviant behavior of managers is one form of earnings management activity (earnings management). In line with his hard drive investors will increase the quality of financial information and the Indonesian government began to implement Good Corporate Governance (GCG) as a sound corporate governance. Good corporate governance include managerial ownership, independent commissioners, audit committees, and institutional ownership. This study aims to find empirical evidence that good corporate governance mechanisms to reduce the practice of earnings management in listed Telecommunication Company in Indonesia Stock Exchange.

The sample used in this study is 5 telecommunications companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2007 to 2010. While the types of data used are secondary data, and sources of data come from PT. Indonesia Stock Exchange and the Faculty of Economics (FE), UPN Veteran East Java. Data were analyzed using multiple linear regression analysis techniques.

From the results of Model Suitability Test or Test F shows that the resulting regression model fit in order to see the impact of managerial ownership, independent commissioners, audit committees, and institutional ownership on earnings management practices, but on the basis of the Partial Test or t test showed that only for variables audit committee which is partially significant effect on earnings management practices, while managerial ownership variables, independent commissioners, and institutional ownership is partial no significant effect on earnings management practices by telecommunications companies listed in Indonesia Stock Exchange, that hypotheses are proposed, no verified.

Keyword: *Managerial Ownership, the Independent Commissioner, Audit Committee, Institutional Ownership, and Profit Management*

PENDAHULUAN

Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Pihak manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima. Ketidak sejajaran kepentingan dapat mendorong timbulnya perilaku menyimpang dari manajer yang salah satu bentuknya adalah aktivitas manajemen laba (*earning management*). Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi dengan menggunakan kebijakan metode akuntansi. Berbagai bentuk manajemen laba seperti :

taking a bath, perataan laba (*income smoothing*), maksimalisasi dan minimalisasi laba memang sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional yang lebih mengerti dan memahami cara menjalankan suatu usaha. Sejalan dengan kerasnya dorongan investor akan peningkatan kualitas informasi keuangan, dan pemerintah Indonesia mulai menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata kelola perusahaan yang sehat, Sistem *Corporate Governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). *Good Corporate Governance* meliputi kepemilikan manajerial, komisisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Penerapan *corporate governance* di Indonesia sendiri masih dinilai lemah, hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil survei berikut : Indonesia merupakan negara yang terburuk dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Asia. (McKinsey *Investor Opinion Survey*, 1999-2000). Indonesia merupakan negara yang paling tinggi tingkat KKN-nya di ASIA (Hasil *Survey Political and Economic Risk Colsultancy*)

Indonesia menduduki peringkat 88 *Corruption Persception Index* (CPI) 2001 dari 99 negara yang di-survey. (Survey CPI 2001-*Transparancy International*)

. Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* pada perusahaan adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan . Tetapi dengan lemah dan buruknya *corporate governance* yang ada di Indonesia, dalam kutipan (<http://swamediainc.com/events/2010/12/good-corporate-governanceaward2010>) salah satu operator telekomunikasi kelas dunia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) meraih penghargaan CGA (Corporate Governance Award) untuk kategori “The Best Right of Shareholder” di penghujung tahun 2010. berkaitan dengan fenomena diatas, maka penulis mencoba menelaah dalam suatu penelitian untuk mendapatkan bukti empiris bahwa mekanisme *good corporate governance* dapat mengurangi praktek manajemen laba pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah kepemilikan manajerial, komisisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris bahwa mekanisme *good corporate governance* dapat mengurangi praktek manajemen laba pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

Untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari konsep *good corporate governance*, dan membuktikan secara empiris mengenai fenomena dan gejala yang terjadi di perusahaan mengenai *good corporate governance*, dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen karena penerapan *corporate governance* merupakan salah satu praktek yang sangat penting terutama dalam menjalankan operasi perusahaan. Sedangkan bagi investor sebaiknya mengambil keputusan bisnis, tidak hanya terfokus pada informasi laba, tetapi juga

mempertimbangkan informasi non keuangan, seperti keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan.

Kajian Pustaka, Kerangka Konseptual & Hipotesis

Penelitian tentang manajemen laba ini dilandasi oleh *agency theory*. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Masalah agensi antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai agen yang diberi tugas, karena apa yang dilakukan manajer sulit diketahui oleh pemegang saham.

Manajemen Laba

Manajemen laba sebagai suatu tindakan oportunistik manajer sehingga dapat *manage earning* pada tingkat yang diinginkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu dengan cara tertentu pula. Sikap curang (*fraud*) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja dan didesain untuk menipu orang lain yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kekayaannya atau mengeluarkan biaya atas kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukannya.

Corporate Governance

Corporate governance sebagai suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholders*) dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* antara lain : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit (Bernhart dan Rosenstein (1998, dalam Siallagan & Mas'ud, 2006

Hubungan Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba

Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono, 2005). Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah pula. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Madiastuty dan Mahfoedz (2003) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dengan manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual*. Salah satu mekanisme yang diuji adalah kepemilikan manajerial. mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accrual*. Hasil ini menunjukkan bahwa di Indonesia kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah ketidaksiharasan kepentingan ,antara manajer dengan pemegang saham. Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas dinyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin mengurangi kecenderungan manajer melakukan manajemen laba

Hubungan Komisaris Independen dan Manajemen Laba

Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola

perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, dan memastikan apakah manajemen benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan, serta menjaga kepentingan para pemegang saham. Oleh karena itu Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. (Egon Zehnder International, 2000 hal.12-13 dalam FCGI,2001). Fungsi *service* dan *control* dewan komisaris sebagai mekanisme *corporate governance* ini dapat dilihat sebagai suatu sinyal kepada para investor bahwa perusahaan telah dikelola sebagaimana mestinya. Investor diharapkan akan menerima sinyal ini dan bersedia membayar premium yang lebih tinggi untuk perusahaan yang *well-governed* di Indonesia (Amalia, 2007). Komisaris independen sebagai mekanisme *corporate governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. (Wilopo :2004)

Hubungan Komite Audit dan Manajemen Laba

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan, dan keberadaannya sangat penting bagi perusahaan, karena merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan, dan dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham, dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam mengenai masalah pengendalian. Berdasarkan surat edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk Ketua Komite Audit, yang berasal dari komisaris sebanyak satu orang, dari komisaris independen perusahaan dan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Sedangkan anggota lain harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Nasution & Dody, 2007). Selain itu juga mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan untuk menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. (*Improving Audit Committee Performance: What Works Best – A Research Report prepared by Pricewaterhouse Coopers, the Institute of Internal Auditors Research Foundation*, dalam FCGI, 2001). Komite audit dengan proporsi anggota eksternal yang cukup besar, yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang berkaitan dengan keuangan, diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan. Oleh karena itu sebaiknya komite audit memiliki intensitas pertemuan yang cukup untuk dapat lebih baik dalam memonitor masalah seperti manajemen laba.

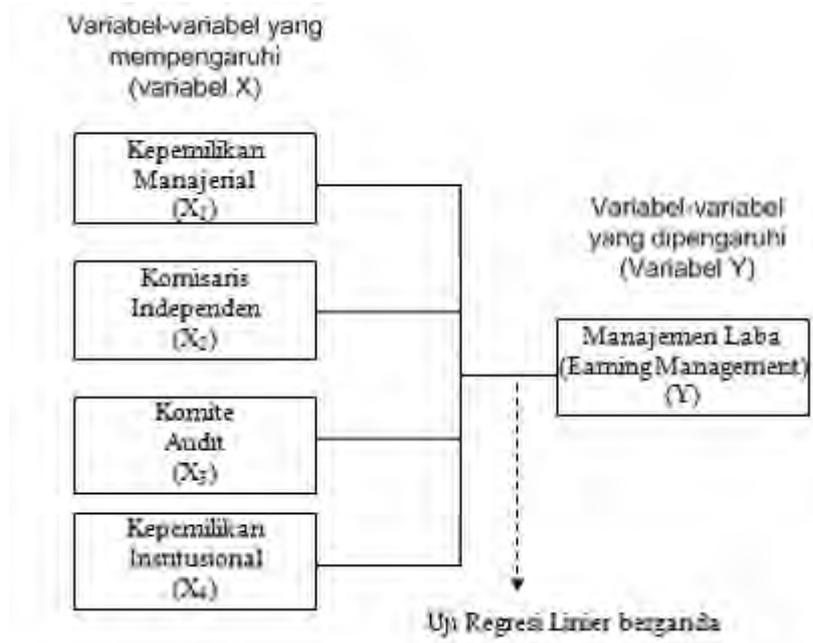
Hubungan Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan, yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan lebih efektif mempengaruhi manajer dalam pengambilan keputusan agar tidak bertindak untuk kepentingannya sendiri, melakukan praktik manajemen laba. (Cai *et al* 2001, dalam Faisal 2004).

Rajgopal, Venkatachalam & Jiambalvo (1999) dalam Fidyati (2004), membuktikan adanya hubungan negatif antara kepemilikan investor institusional dengan perilaku manajemen laba yang diukur dengan nilai absolut *discretionary accrual*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa investor institusional tidak mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajer, sehingga manajer akan menghindari manajemen laba, Sedangkan penelitian Wedari (2004) menemukan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba namun dengan arah yang positif.

Berdasarkan kajian pustaka sebagaimana diuikan maka penelitian ini memiliki keangka konseptual yang juga menjadi kerangka acuan untuk merumuskan hipotesis penelitian:

Gambar .1; Kerangka Konseptual



Hipotesis ;

H1 : Kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional & Pengukuran Variabel

Definisi operasional Variabel, beserta pengukurannya dalam penelitian ini sebagai berikut ;

Manajemen Laba (Earnings Management) Y, sebagai Variabel Terikat ; adalah suatu tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standart tertentu dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan dan atau nilai pasar perusahaan .

Variabel ini diukur berdasarkan proxy *Discretionary Accrual (DA)*, yang merupakan kumpulan sejumlah dampak bersih atas kebijakan akuntansi yang mencakup portofolio penentu pendapatan (income).

Manajemen laba (Earning Management) dapat diformulasikan:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

(Dechow, 1996, dalam Widyaningdyah, 2001 : 95)

Keterangan :

DA_{it} : *Discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

TA_{it} : *Total accruals* perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} : *Non discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

Model ini dapat menggunakan ukuran tendensi sentral dalam aplikasinya, baik mean maupun *median industry adjusted* model dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \text{Mean atau Median } (TA_t \text{ IND})$$

Variabel ini diukur berdasarkan proxy *Discretionary Accrual* (DA), yang merupakan kumpulan sejumlah dampak bersih atas kebijakan akuntansi yang mencakup portofolio penentu pendapatan (*income*).

Keterangan :

NDA_t : *Non Discretionary Accruals* pada periode t

$TA_t \text{ IND}$: *Total Accruals* Industri (perusahaan CEO atau non CEO)

Untuk mencari *Total Accrual* (TA) digunakan model, yaitu sebagai berikut:

$$TA_{it} = \frac{(\Delta CA_t - \Delta CL_t - \Delta \text{Cash}_t + \Delta \text{STD}_t - \text{Depr}_t)}{A_{t-1}}$$

Keterangan :

ΔCA_t : *Delta Current Assets* (aktiva lancar) pada tahun t

ΔCL_t : *Delta Current Liabilities* (utang lancar) pada tahun t .

ΔCash_t : *Delta cash and equivalent* (kas dan setara kas) pada tahun t .

ΔSTD_t : *Delta debt included in current liabilities* (hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun) pada tahun t .

Depr_t : *Depreciation and amortization expense* (biaya depresiasi dan amortisasi) pada tahun t .

A_{t-1} : *Total assets* (total aktiva) I tahun sebelum t .

Skala pengukuran rasio dengan satuan persen (%)

Good Corporate Governance (X), sebagai Variabel bebas yang terdiri dari:

a. Kepemilikan Manajerial (X_1) adalah persentase kumulatif saham yang dimiliki secara langsung oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial}}{\text{Total saham}}$$

(Isnanta, 2008):

Skala pengukuran rasio dengan satuan persen (%)

b. **Komisaris Independen** (X_2) adalah perbandingan jumlah komisaris independen yang dimiliki suatu perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen perusahaan}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

(Surya dan Yustiavananda, 2006:133)

Skala pengukuran rasio dengan satuan persen (%)

c. **Komite Audit** (X_3)

Variabel ini merupakan variabel *dummy* yaitu dengan menggunakan skala 1 untuk perusahaan yang memiliki komite audit dan skala 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite audit. (Effendi, 2008:25).

Skala pengukuran nominal

d. **Kepemilikan Institusional** (X_4) jumlah kumulatif dari persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional yang dimiliki paling sedikit 5% saham perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional}}{\text{Total saham}}$$

(Isnanta, 2008)

Skala pengukuran rasio dengan satuan persen (%)

Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Telekomunikasi yang go publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 berjumlah 7 perusahaan, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :PT. Bakrie Telecom, Tbk;PT. Excelcomindo Pratama, Tbk;PT. Indosat, Tbk;PT. Info Asia Teknologi Global, Tbk;PT. Inovisi Infracom, Tbk;PT. Mobile-8 Telecom, Tbk;PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probabilitas sampling* dengan teknik *purposive sampling* atau dengan kriteria bahwa selama periode penelitian tahun 2007-2010 Perusahaan Telekomunikasi tersebut :

1. Terdaftar di BEI
2. Data laporan keuangan perusahaan tersedia berturut – turut dipublikasikan
3. laporan keuangan auditor dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
4. Data yang tersedia lengkap (termasuk data mengenai *good corporate governance* perusahaan.)
5. Tidak mengalami transaksi merger, akuisisi, restrukturisasi dan perubahan

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas maka **sampel** yang digunakan dalam penelitian ini 5 perusahaan yaitu (1)PT. Bakrie Telecom, Tbk; (2)PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. (3)PT. Indosat, Tbk. (4)PT. Inovisi Infracom, Tbk. (5)PT. Mobile-8 Telecom, Tbk

Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari perpustakaan PT. Bursa Efek Indonesia yaitu buku *Indonesian Capital Market Directory*. dan Fakultas Ekonomi (FE) UPN Veteran Jawa Timur. Sedangkan **Jenis** data sekunder berupa laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi dari perusahaan Telekomunikasi yang go publik di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2007 – 2010.

Tehnik Analisis dan Uji Hipotesis

Teknik Analisa

Sebelum melakukan analisis data perlu dilakukan uji normalitas dan asumsi klasik(Autokorelasi ,Multikolonieritas, dan Heterokedastisitas) karena uji-uji tersebut merupakan persyaratan dari analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam teknik analisis. Sedangkan programnya SPSS.15.0 *For Windows*, dengan model persamaan regresi linier, sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + D_1 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

(Anonim,2010:L-21)

Dimana:

Y	= Manajemen laba
X ₁	= Kepemilikan Manajerial
X ₂	= Komisaris Independen
X ₃	= Komite Audit (0 jika tidak ada komite audit, 1 jika ada komite audit)
X ₄	= Kepemilikan Institusional
e	= <i>error term</i>
β ₀	= Konstanta
β ₁ , β ₂ , β ₄	= Koefisien regresi
D ₁	= Dummy

HASIL UJI DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Hasil analisis atas data dengan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil yang signifikansinya lebih dari 0,05 dengan nilai 0,799. Hal ini menjelaskan bahwa sebaran data menunjukkan berdistribusi normal (Sumarsono, 2004 : 43)

Uji Asumsi Klasik

Autokorelasi

Berdasarkan dari hasil “Uji Autokorelasi” dengan alat bantu komputer yang menggunakan Program SPSS. 15.0. *For Windows* dapat diketahui bahwa besarnya nilai Durbin Watson atau DW tes yaitu sebesar 1,914 berada diantara -2 sampai +2, dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, hal ini berarti bahwa dalam persamaan regresi tersebut tidak ada Autokorelasi (Ghozali, 2006: 99-100).

Multikolonieritas

Berdasarkan uji multikolonieritas diperoleh besaran VIF dari masing-masing variabel bebas yaitu Kepemilikan manajerial (X_1) 5,012; Dewan Komisaris independen (X_2) 9,634; Komite audit (X_3) 1,071; Kepemilikan institusional (X_4) 8,352; sehingga menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas baik X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 , mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10, dan sesuai dengan dasar analisis yang digunakan, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas Multikolinieritas. (Ghozali, 2005: 91-92)

Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji *Glejser* dan hasil uji menunjukkan bahwa tingkat signifikan pada variabel Kepemilikan manajerial (X_1) 0,255; Dewan Komisaris independen (X_2) 0,506, Komite audit (X_3) 0,660 dan Kepemilikan institusional (X_4) 0,940 semuanya lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier berganda yang digunakan bebas heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 108).

Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dengan program SPSS 15.0 for window dapat diperoleh hasilnya dalam table dibawah ini :

Tabel 1. : Model Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien regresi	t. hitung	Sig.
Konstanta	-5.223,523	-1/126	0.287
Kepemilikan manajerial (X_1)	15,297	0,463	0,653
Dewan Komisaris independen (X_2)	14,242	0,437	0,671
Komite audit (X_3)	4.652,311	5,058	0,000
Kepemilikan institusional (X_4)	1,189	0,031	0,976
<i>adjusted R-square</i>	0.676		
F hitung	8,314	Sig	0,003

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = - 5.223,523 + 15,297 X_1 + 14,242 X_2 + 4.652,311 X_3 + 1,189 X_4$$

Uji F (Kesesuaian Model)

Berdasarkan pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai F hitung sebesar 8,314 dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima, yang berarti bahwa model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh kepemilikan manajerial, Dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (Anonim, 2009: L-22). Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dapat diketahui nilai *Adjusted R square* sebesar 0,676, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel praktek manajemen

laba sebesar 67,6% dipengaruhi oleh variabel kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, sedangkan sisanya 32,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. (Santoso; 2001- 167).

Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan dari tabel 1 di atas dapat diinterpretasikan, sebagai berikut:

Nilai t hitung Kepemilikan Manajerial (X_1) sebesar 0,463, tingkat signifikansi 0,653 lebih besar dari 0,05 maka H_1 ditolak ,berarti secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba (Y)

Nilai t hitung Komisaris Independen (x_2) sebesar 0,437, tingkat signifikansi 0,671 lebih besar dari 0,05, maka H_1 ditolak ,berarti secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba (Y)

Nilai t hitung Komite Audit (x_3) sebesar 5,058, tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima ,berarti secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba (Y)

Nilai t hitung Kepemilikan Institusional (x_4) sebesar 0,031, tingkat signifikansi 0,976 lebih besar dari 0,05, maka H_1 ditolak berarti , secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba (Y) (Santoso; 2001- 168).

Pembahasan ;

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa ada pengaruh positif dari variabel bebas Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen , Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap tergantung Manajemen laba, artinya setiap kenaikan yang terjadi pada variabel-variabel bebas tersebut akan mengakibatkan adanya kenaikan pada variabel Manajemen laba, sehingga semakin baik variabel-variabel bebas ,maka praktek manajemen laba akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena kelemahan *corporate governance* yang ada di Indonesia misalnya seperti : lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas tersebut kurang tepat digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat praktek manajemen laba.

Sedangkan hasil analisis dalam pengujian secara parsial menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara Kepemilikan Manajerial terhadap praktek manajemen laba, ini disebabkan karena pihak manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda. Jika manajer perusahaan melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Hasil ini sesuai dengan teori keagenan, yang menyebutkan bahwa hubungan antara manajemen dengan pemegang saham rawan untuk terjadinya masalah keagenan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial kurang tepat digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat praktek manajemen laba.

Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba, ini disebabkan karena sedikitnya jumlah anggota komisaris independen dalam perusahaan, sehingga proses pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen kurang maksimal, dan peluang praktek manajemen laba sangat besar. sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen kurang tepat digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat praktek manajemen laba.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan , berarti bahwa semakin baik komite audit maka praktek manajemen laba akan semakin tinggi. Ini disebabkan tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip dalam GCG yang tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melaksanakan analisis risiko, dan dapat menghambat tugas komite dalam melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, yang mana seharusnya komite audit bertanggung jawab mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal, yang diharapkan dapat mengurangi

sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba, tidak terlaksana dengan baik. sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit kurang tepat digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat praktek manajemen laba.

Kepemilikan Institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba hal ini disebabkan karena ketidaksejajaran kepentingan antara *principal* dan *agent*, yang akan memicu terjadinya manajemen laba. sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional kurang tepat digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat praktek manajemen laba.

Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang diambil relatif kecil, sehingga kurang dapat mengukur penerapan mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengurangi praktek manajemen laba pada perusahaan.
2. Kendala yang bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dapat dirasakan peneliti pada saat melakukan penelitian, yang mana pada saat ini situasi negara dalam keadaan krisis ekonomi sehingga dapat mempengaruhi penerapan mekanisme *good corporate governance* pada perusahaan.
3. Dari hasil penelitian juga dapat dilihat adanya pengaruh dari variabel lain, sehingga dalam penelitian yang akan datang hendaknya diperhitungkan variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap praktek manajemen

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil Uji Kesesuaian Model atau Uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan dari hasil Uji Parsial menunjukkan bahwa hanya untuk variabel komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan untuk variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis yang diajukan tidak teruji kebenarannya.

Saran

Untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, hendaknya manajemen perusahaan menerapkan 5 (lima) prinsip yang telah ditetapkan oleh *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata kelola perusahaan yang sehat yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Dengan begitu akan memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Dwi Yana. 2007. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar, 26-28 Juli.
- Anonim, 2010, *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian Dan Skripsi Progam Studi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. *Pembentukan dan pedoman Kerja Komite Audit*. Keputusan Bapepam No: Kep-29/PM/2004.

- Boediono, SB., Gideon. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Makalah Simposium Nasional Akuntansi V111. Solo, 15-16 September.
- Dechow, Patricia M., Sloan, Richard G., Amy P, Sweeney 1995, Detecting Earning Management. *The Accounting Review*. 70: 193-225.
- Effendi, Arief, 2009, *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Faisal. Analisis Agency Cost, *Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance. Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar-Bali, 2-3 Desember, Hal: 197-208.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*.
- Ghozali, 2006, *Aplikasi Analisis Multivarrate dengan Program SPSS. Edisi Kesebelas*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Isnanta, Rudi, 2008, *pengaruh corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Jensen, M, dan Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behaviour Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Finance Economics*, Vol. 3, p: 305-360.
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 2 Agustus 2002 tentang *Penerapan Praktik GCG pada BUMN*
- Midiastuty, Pratana P., dan Mas'ud Machfoedz. 2003. *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba. Makalah Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya, 16-17 Oktober.
- Nasution, Marihot, dan Dody Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Rajgofal S., M. Venkatachalam, dan J. Jiambalvo, 1999. *Is Institutional Ownership Associated With Earning Management and the Extent to Which Stock Price Reflect Future Earnings?. Working Paper University of Washington Seattle*.
- Santoso, Singgih, 2002, *Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik*. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Siallagan, Hamonangan, dan Mas'ud Machfoedz. 2006. *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba, dan Nilai Perusahaan. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang, 23-26 Agustus.
- Sumarsono, 2004, *Metode Penelitian Akuntansi. Edisi Revisi*, Penerbit UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.
- Surya, Indra, dan Yustiavandana, Ivan, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance*, Penerbit Prenada Media Grup, Jakarta.
- Wedari, Linda Kusumaning. 2004. *Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit. Simposium Nasional Akuntansi VII*, Denpasar-Bali, hal. 963-974.
- Wilopo. 2004. *The Analysis of Relationship of Independent Board of Directors, Audit Committee, Corporate Governance: The Role of Companies with Small Board of Directors. Journal of Financial Economics* 40, 185-211.

Website :

<http://swamediainc.com/events/2010/12/good-corporate-governance-award-2010>

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_keuangan

<http://www.fcgi.or.id>

<http://www.idx.co.id>

<http://iicg.org>

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
KETERLAMBATAN DALAM PENYUSUNAN APBD
(Studi Kasus di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007-2010)**

Sri Trisnaningsih
trisahendrawan@yahoo.co.id
Norsain
Fajar Saiful Akbar

ABSTRACT

Lateness of APBD preparation becomes a phenomenon in local government budgeting in Indonesia. The phenomenon is experienced by many local governments in Indonesia. Schedule of APBD preparation which is stated by regulations has not been applied yet by local governments. This phenomenon leads to retardation in regional economic growth.

Based on the fact, it is need to solve this problem. The first step is to identify factors causing lateness of APBD preparation . The purpose of this research is to identify factors causing the phenomenon by using Local Government of Rejang Lebong as a sample. Process to identify these factors is Exploratory Factor Analysis (EFA).

The result of this research showed that there are five factors causing lateness of APBD preparation. Those factors are (1) understanding of laws and regulations factor, (2) performance indicator factor, (3) executive and legislative relationship factor, and (4) commitment factor.

Keywords: Lateness of APBD preparation, factor analysis, understanding of laws and regulations, performance indicator, executive and legislative relationship, and commitment.

A. PENDAHULUAN

Keterlambatan penyusunan APBD telah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia dan hal itu telah berlangsung pada kurun waktu yang lama bahkan hingga saat ini. Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah yang tergolong mengalami keterlambatan dalam menyusun APBD khususnya APBD tahun 2007-2010. APBD pada keempat tahun anggaran tersebut disahkan pada kurun waktu antara 1 Januari s/d 31 April.

Selain banyak daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD, adanya keterlambatan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat.

Ada banyak alasan yang disebut sebagai biang keladi keterlambatan tersebut. Mulai dari kepentingan politik yang mencuat di lembaga legislatif, ketidakmampuan aparatur daerah menyusun rancangan APBD yang memadai, dan lambatnya penetapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, serta alasan lain yang buat orang awam susah dipahami.

Semua alasan yang mengemuka itu, bisa dikategorikan menjadi dua penyebab keterlambatan penyelesaian APBD , yakni persoalan teknis yang meliputi

penyiapan rancangan dan pemenuhan standarnya, serta persoalan moral yang mencakup kedisiplinan lembaga legislatif yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok, atau golongan ketimbang mengutamakan kepentingan masyarakat di daerahnya. Persoalan pertama yang menyangkut teknis, seperti kemampuan eksekutif dalam menyiapkan rancangan, memang cukup serius. Gejala kedua yang menghambat penyelesaian APBD adalah persoalan moral, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif.

Para legislator dan eksekutif sepertinya tidak punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan APBD tepat sesuai dengan jadwal. Dua pilar penting yakni eksekutif dan legislatif itu tampak tak punya greget untuk segera menyelesaikan tanggung jawab mengegolkan anggaran daerah. Keduanya lebih banyak melontarkan wacana ke publik yang tidak ada relevansinya dengan penyelesaian anggaran menjadi sebuah peraturan daerah (perda). Patut dipertanyakan, kalau penetapan anggaran daerah yang merupakan kegiatan rutin saja tidak bisa diselesaikan tepat waktu, bagaimana nasib penyelesaian kebijakan lainnya?

APBD yang terlambat dalam proses penyusunannya dapat pula berpengaruh terhadap perekonomian daerah, hal tersebut terjadi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka di masa APBD belum disahkan maka aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan itu memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah turut merasakan dampak dengan adanya kelesuan ekonomi.

APBD yang terlambat disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat pula memberi peluang munculnya korupsi, sebagaimana dinyatakan (KPK,2008). Peluang korupsi tersebut dapat muncul dikarenakan adanya usaha untuk mengalihkan dana yang tersisa dari pelaksanaan program APBD ke dalam rekening pribadi. Dana yang tersisa berasal dari dana sisa anggaran program yang tidak selesai dilakukan karena terlambat dalam pelaksanaan proses awal. Pengalihan dana ke rekening pribadi tersebut membuka peluang terjadi penyelewengan dana APBD untuk kepentingan pribadi sehingga terjadilah korupsi. Pada akhirnya dampak yang muncul dari keterlambatan penyusunan APBD tersebut merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hal-hal yang menjadi motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, masih sedikit adanya penelitian yang terkait dengan keterlambatan dalam penyusunan APBD termasuk dalam hal ini di wilayah Sumenep belum dilakukan penelitian tersebut. Kedua, keterlambatan dalam penyusunan APBD telah menjadi salah satu fenomena yang terjadi di sebagian besar wilayah pemerintah daerah Indonesia dan hingga saat ini fenomena tersebut terus terjadi setiap tahunnya. Ketiga, dampak yang timbulkan dari adanya keterlambatan APBD dapat pada akhirnya merugikan masyarakat selaku penerima layanan publik dan hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan anggota Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki 18 Dinas, 6 Badan dan 4 Kantor dan 1 Satpol PP. Tiap Dinas yang terlibat dalam penyusunan anggaran 4 sampai 5 orang, terdiri 4 Kabid dan 1 Kasubag Program. Badan dan Kantor biasanya yang terlibat dalam penyusunan anggaran lebih sedikit dibandingkan Dinas yang berkisar antara 2 sampai dengan 3 orang. Jumlah pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep sebanyak 24 orang jadi secara keseluruhan berjumlah 129 orang.

2. Metode Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen dalam penelitian ini terbagi menjadi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk. Instrumen dikatakan valid bila nilai *correlated item-total correlation* lebih dari nilai r tabel, sebagaimana dinyatakan (Ghozali, 2009). Pengujian instrumen yang kedua, yakni uji reliabilitas dilakukan dengan berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*. Bila instrumen mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,50 ($> 0,50$) maka instrumen reliabel, menurut (Nunnally, 1967) dalam (Jogiyanto, 2008).

3. Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan adalah analisis faktor jenis eksploratori atau dikenal dengan *exploratory factor analysis* (EFA). EFA berusaha untuk mengidentifikasi struktur dari faktor (sekumpulan variabel) yang terbentuk (Hair *et al.*, 1998). Pada penelitian ini tidak ada hipotesis karena belum ada penelitian dan teori sebelumnya. Tahapan dalam analisis faktor terdiri dari pertama menilai kelayakan untuk melakukan analisis faktor dengan berdasarkan nilai KMO yang harus memenuhi syarat nilai KMO di atas 0,50. Kedua melihat nilai kolerasi yang ditunjukkan variabel pada *anti- image correlation*. Variabel dengan nilai korelasi terkecil dan kurang dari 0,50 harus dikeluarkan dari analisis. (Hair *et al.*, 1998) menyatakan bahwa nilai $MSA < 0,50$ merupakan nilai yang tidak dapat diterima.

Penilaian kelayakan variabel ditentukan dari nilai KMO yang diperoleh hasil pengolahan dengan SPSS *Statistic* 17.0. Nilai KMO yang diperoleh menunjukkan 0,707. Proses untuk mendapatkan nilai KMO tersebut dilakukan secara berulang untuk analisis faktor karena persyaratan untuk proses tidak dipenuhi sehingga ada beberapa variabel yang harus dikeluarkan. Pada tahapan akhir dari 29 variabel yang diujikan dengan analisis faktor hanya 15 variabel yang tersisa. Nilai KMO 0,707 lebih dari 0,50 ($> 0,50$) maka layak untuk dilakukan tahapan selanjutnya pada proses tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan anggota Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki 18 Dinas, 6 Badan dan 4 Kantor dan 1 Satpol PP. Tiap Dinas yang terlibat dalam penyusunan anggaran 4 sampai 5 orang, terdiri 4 Kabid dan 1 Kasubag Program. Badan dan Kantor biasanya yang terlibat dalam penyusunan anggaran lebih sedikit dibandingkan Dinas yang berkisar antara 2 sampai dengan 3 orang. Jumlah pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep sebanyak 24 orang jadi secara keseluruhan berjumlah 129 orang.

Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *sensus* yaitu seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan anggaran di Kabupaten Sumenep, jadi jumlah sampel yang diambil sebanyak 129 orang.

Kuesioner disebar sebanyak 129 buah, dan terdapat 100 buah kuesioner yang kembali, sedangkan 29 buah lagi tidak kembali, sehingga tingkat pengembalian yang digunakan sebesar $= 100/129 \times 100\% = 77,52\%$.

1. KMO dan Bartlett's Test

KMO Measure of Sampling Adequacy adalah angka indeks untuk menggantikan besarnya koefisien korelasi observasi dengan besarnya koefisien parsial. *KMO Measure of Sampling Adequacy* kurang dari 0,50 maka menunjukkan bahwa korelasi antar variabel dan analisis faktor tidak sesuai untuk diterapkan. *Barlett's Test* adalah tes yang digunakan untuk menguji interdependensi antara butir-butir yang menjadi indikator suatu variabel atau faktor. Berikut ini hasil KMO dan *Bartlett's Test* :

Berdasarkan hasil analisis, nilai KMO *Measure of Sampling Adequacy* yang dihasilkan sebesar 0,608 yang artinya bahwa antar variabel mempunyai korelasi yang cukup tinggi, sehingga variabel tersebut mempunyai kecenderungan mengelompok dan membentuk sebuah faktor. Nilai pada uji *Barlett's Test* yang dihasilkan sebesar 282,733 dengan tingkat signifikansi dibawah 5% sebesar 0,000 maka variabel dan sampel yang ada sudah bisa dianalisis lebih lanjut.

2. *Anti Image Matrices*

Besar korelasi parsial, korelasi antara dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain. Deteksi terhadap besarnya korelasi parsial dapat dilihat *Anti Image Correlation*. Adapun kriteria dari MSA adalah :

- MSA = 1, variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain
- MSA > 0,5 variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut.
- MSA < 0,5 variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa X₁, X₂, X₃, X₄, X₆, X₇, X₁₀, X₁₁, X₁₂, X₁₃, X₁₄, X₁₅ dan X₁₆ bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut karena nilai MSA yang dihasilkan variabel tersebut diatas 0,50.

3. *Communalities*

Communalities pada dasarnya adalah jumlah varians dari suatu variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Sub variabel yang diekstrak menjadi beberapa faktor selanjutnya akan diukur seberapa besar keragaman setiap sub variabel asal yang dapat diterangkan oleh hasil ekstraksi faktor. Besar keragaman setiap sub variabel asal ini dikenal dengan istilah komunalitas. Nilai komunalitas diperoleh dengan menghitung jumlah kuadrat *loading factor* setiap sub variabel asal. Semakin kecil komunalitas sebuah sub variabel, maka semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tiga variabel yang memiliki nilai komunalitas tertinggi adalah : X₁₆ dengan nilai *extraction* sebesar 0,738 ; X₁ dengan nilai *extraction* sebesar 0,703 ; X₁₁ dengan nilai *extraction* sebesar 0,693

Tiga variabel yang memiliki nilai komunalitas terendah adalah : X₇ dengan nilai *extraction* sebesar 0,509 ; X₆ dengan nilai *extraction* sebesar 0,394 ; X₁₅ dengan nilai *extraction* sebesar 0,271

4. *Total Variance Explained*

Faktor yang memiliki nilai eigen lebih besar dari 1,0 dipertahankan dalam model. Nilai eigen menerangkan besarnya variasi yang disumbangkan oleh faktor tersebut terhadap keseluruhan nilai variasi yang diamati.

Eigen value selain dapat digunakan untuk memperkirakan derajat pentingnya tiap-tiap variabel, juga dapat digunakan untuk membantu menyelidiki jumlah faktor yang akan dapat dipertahankan untuk analisis selanjutnya. Total *Eigen value* untuk kasus ini haruslah tiga belas.

Berdasarkan *Eigen value* ini, jumlah faktor yang dipertahankan adalah empat, yaitu keempat faktor telah mewakili 56,892% dari variansi sepuluh variabel (Wibisono, 2002 : 254). Interpretasi dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

- Jika tiga belas variabel tersebut diringkas menjadi satu faktor, maka varians yang bisa dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah $2,596/13 \times 100\% = 19,969\%$
- Jika tiga belas variabel tersebut diringkas menjadi dua faktor, maka varians yang bisa dijelaskan oleh dua faktor tersebut adalah $2,244/13 \times 100\% = 17,260\%$, sehingga total kedua faktor akan bisa menjelaskan $19,696\% + 17,260\% = 37,230\%$ dari variabilitas tigabelas variabel asli tersebut.
- Jika tiga belas variabel tersebut diringkas menjadi tiga faktor, maka varians yang bisa dijelaskan oleh tiga faktor tersebut adalah $1,384/13 \times 100\% = 10,644\%$, sehingga total ketiga faktor akan bisa menjelaskan $19,696\% + 17,260\% + 10,644\% = 47,874\%$ dari variabilitas tigabelas variabel asli tersebut.

- d. Jika tiga belas variabel tersebut diringkas menjadi empat faktor, maka varians yang bisa dijelaskan oleh empat faktor tersebut adalah $1,172/13 \times 100\% = 9,018\%$, sehingga total keempat faktor akan bisa menjelaskan $19,696\% + 17,260\% + 10,644\% + 9,018\% = 56,892\%$ dari variabilitas tigabelas variabel asli tersebut.

5. Rotasi Matrik Faktor (*Rotated Component Matrix*)

Berdasarkan tabel *component matrik* di bawah ini dapat diketahui beberapa variabel yang dimasukkan kedalam faktor yang terbentuk maka perlu dilakukan proses rotasi semakin jelas perbedaan sebuah variabel akan dimasukkan pada faktor yang ada. Proses rotasi adalah menentukan variabel-variabel merupakan korelasi antara variabel dengan faktor.

Faktor loading memberikan informasi tentang variabel mana yang masuk dalam satu faktor tertentu dan seberapa jauh dukungan variabel tersebut terhadap faktor tersebut. Adapun hasil rotasi *component matrik* dan faktor yang masuk dalam faktor-faktor tersebut merupakan koefisiensi korelasi antara variabel-variabel yang dipertimbangkan dengan faktor-faktornya. Faktor loading yang bernilai besar menunjukkan besarnya pengaruh variabel observasi terhadap faktor yang muncul.

A. Faktor pertama didukung oleh 5 (lima) variabel

Faktor pertama memiliki nilai tertinggi dalam nilai eigen yaitu 2,596 dan variasi kumulatifnya sebesar 19,969%. Variabel-variabel yang dipertimbangkan didalam faktor pertama adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_{11} memiliki loading faktor sebesar 0,793 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor pertama sebesar 79,3%.
2. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_{12} memiliki loading faktor sebesar 0,765 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor pertama sebesar 76,5%.
3. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_{13} memiliki loading faktor sebesar 0,732 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor pertama sebesar 73,2%.
4. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_6 memiliki loading faktor sebesar 0,456 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor pertama sebesar 45,6%.
5. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_{15} memiliki loading faktor sebesar 0,396 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor pertama sebesar 39,6%.

B. Faktor kedua didukung oleh 4 (empat) variabel

Faktor kedua memiliki nilai tertinggi dalam nilai eigen yaitu 2,244 dan variasi kumulatifnya sebesar 37,230%. Variabel-variabel yang dipertimbangkan didalam faktor kedua adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_4 memiliki loading faktor sebesar 0,805 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor kedua sebesar 80,5%.
2. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_2 memiliki loading faktor sebesar 0,713 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor kedua sebesar 71,3%.
3. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_{14} memiliki loading faktor sebesar 0,607 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor kedua sebesar 60,7%.
4. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_7 memiliki loading faktor sebesar 0,494 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor kedua sebesar 49,4%.

C. Faktor ketiga didukung oleh 2 (dua) variabel

Faktor ketiga memiliki nilai tertinggi dalam nilai eigen yaitu 1,384 dan variasi kumulatifnya sebesar 47,874%. Variabel-variabel yang dipertimbangkan didalam faktor ketiga adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_1 memiliki loading faktor sebesar 0,805 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor ketiga sebesar 80,5%.
2. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_3 memiliki loading faktor sebesar 0,736 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor ketiga sebesar 73,6%.

D. Faktor keempat didukung oleh 2 (dua) variabel

Faktor keempat memiliki nilai tertinggi dalam nilai eigen yaitu 1,172 dan variasi kumulatifnya sebesar 56,892%. Variabel-variabel yang dipertimbangkan didalam faktor keempat adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_{16} memiliki loading faktor sebesar 0,841 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor keempat sebesar 84,1%.
2. Variabel yang dipertimbangkan yaitu X_{10} memiliki loading faktor sebesar 0,690 artinya kemampuan variabel itu untuk dipertimbangkan terhadap pembentukan faktor keempat sebesar 69%.

6. Menentukan *Component Transformation Matrix*

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3	4
1	.867	.330	.319	.195
2	-.363	.762	.411	-.344
3	-.121	-.511	.851	.010
4	-.319	.221	.077	.918

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Tabel di atas menunjukkan angka yang ada pada diagonal, antara component 1 dengan component 1 sebesar 0,867; component 2 dengan component 2 sebesar 0,762; component 3 dengan component 3 sebesar 0,851 dan component 4 dengan component 4 sebesar 0,918. Karena keempat angka tersebut jauh diatas 0,5 maka terbukti bahwa keempat faktor (*component*) yang terbentuk sudah tepat, karena mempunyai korelasi yang tinggi.

7. Uji Validasi

Uji validasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut bisa digeneralisasi ke populasi. Proses validitas ada berbagai macam cara, namun yang paling praktis digunakan adalah dengan menguji kestabilan faktor yang telah terbentuk. Untuk mengetahui kestabilan tersebut maka dilakukan sebagai berikut :

1. Sampel yang akan dipecah (split) menjadi dua bagian :
 - a. Untuk split yang pertama yang dimasukkan adalah responden 1 sampai 50.
 - b. Untuk split yang kedua yang dimasukkan adalah responden 51 sampai 100.
2. Setiap bagian akan diuji dengan analisis faktor, seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

8. Interpretasi Hasil Analisis Faktor

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 (tigabelas), namun ada 3 (tiga) variabel yang dikeluarkan karena memiliki nilai $MSA < 0,50$, maka kesepuluh variabel yang digunakan adalah variabel X_1 (Komunikasi di antara eksekutif dan legislatif kurang harmonis), variabel X_2 (Adanya kesenjangan informasi antar pihak eksekutif dengan legislatif), variabel X_3 (Pihak eksekutif dan legislatif belum mampu

berkoordinasi secara baik), variabel X₄ (Pihak eksekutif dan legislatif kurang mampu bekerja sama dengan baik), variabel X₆ (Adanya kesulitan untuk menterjemahkan indikator kinerja), variabel X₇ (Pemerintah Daerah sulit mengukur dan menentukan capaian kinerja), variabel X₁₀ (Pihak eksekutif lebih mengutamakan kepentingan eksekutif), variabel X₁₁ (Peraturan perundang-undangan yang terkait sederhana), variabel X₁₂ (Peraturan perundang-undangan yang terkait sulit dipahami), variabel X₁₃ (Peraturan perundang-undangan yang terkait mudah dilaksanakan), variabel X₁₄ (Peraturan perundang-undangan yang terkait memungkinkan penyusunan dan penetapan lebih tepat waktu), variabel X₁₅ (Saya tidak mendapat kesulitan memahami penggunaan peraturan perundangan) dan variabel X₁₆ (Saya merasa penerapan peraturan perundangan sulit saya lakukan)

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Banyak aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah. Namun, yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelolaan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD). Perhatian utama adalah adanya paradigma baru dalam manajemen anggaran daerah (Halim, 2001:16). Paradigma yang menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran, dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget* (Yuwono dkk:63). Dukungan SDM yang terlatih merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan penerapan *performance budgeting*. *Traditional budget* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *lineitem* dan *incremental*, proses penyusunan anggaran hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. *Performance budgeting* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja.

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Reformasi anggaran daerah dimulai dengan penyusunan anggaran daerah yang tidak lagi mengacu kepada PP No.6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Perubahan kebijakan tentang anggaran terjadi mengikuti perubahan kebijakan pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk perubahan kebijakan tersebut dengan mulai diberlakukannya PP No.105 Tahun 2000, selanjutnya diganti dengan PP. No. 58 Tahun 2005, yang diikuti dengan diterbitkannya Permendagri No.13 Tahun 2006.

Keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat bergantung pada perubahan cara berfikir, berkeyakinan dan bertindak dari pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Cara berfikir, berkeyakinan dan bertindak dari pihak yang terlibat dari penyusunan APBD sangat bergantung pada intensitas pendidikan dan pelatihan Penganggaran Keuangan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dari tabel dibawah. Jenjang pendidikan tidak mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam implementasi peraturan perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja yang tepat adalah standar pelayanan minimum, ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, kelanjutan program, tingkat inflasi, tingkat efisiensi, kendala di masa akan datang, dan dasar untuk menetapkan prioritas anggaran. Selain faktor-faktor di atas dalam menentukan indikator kinerja terdapat kriteria yang harus dipenuhi. BPKP (2005) menyatakan bahwa indikator kinerja harus memenuhi kriteria yang terdiri dari spesifik, dapat diukur, relevan, dan tidak bias. Penentuan indikator kinerja dalam penyusunan APBD bukanlah hal yang mudah. Tahapan penentuan indikator kinerja merupakan proses kompleks dan harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Tanpa adanya fasilitas

dan sarana yang memadai maka penentuan indikator kinerja dapat menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang lama yang berpengaruh pada ketepatan waktu APBD untuk ditetapkan.

Faktor indikator kinerja terdiri dari item pertanyaan yaitu adanya kesenjangan informasi antar pihak eksekutif dengan legislatif, pihak eksekutif dan legislatif kurang mampu bekerja sama dengan baik, Pemerintah Daerah sulit mengukur dan menentukan capaian kinerja dan Peraturan perundang-undangan yang terkait memungkinkan penyusunan dan penetapan lebih tepat waktu.

Tahapan penyusunan APBD diwarnai dengan hubungan yang tercipta antara eksekutif dan legislatif karena dalam penyusunan APBD kedua pihak tersebut berperan dan menunjukkan kesepakatan maupun kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Namun, bila sebaliknya hubungan APBD tidak berjalan dengan baik dapat berpengaruh buruk pada penyusunan APBD. Salah satu bentuk hubungan yang berpengaruh pada penyusunan APBD adalah hubungan keagenan. Hubungan keagenan memperlihatkan adanya prinsipal dan agen serta terjadinya pendelegasian wewenang.

Pendelegasian wewenang memiliki empat ciri sebagaimana dinyatakan oleh Lupia dan McCubbins (2000) dalam Halim dan Abdullah (2006), yakni terjadi informasi asimetrik, adanya prinsipal maupun agen, timbul konflik kepentingan, dan adanya usaha prinsipal untuk mengurangi masalah keagenan. Ciri-ciri pada pendelegasian tersebut secara tidak langsung dapat menjadi ciri dari hubungan keagenan yang terjadi antar eksekutif dan legislatif serta dapat ditemukan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak selaras dan lebih mengarah pada keagenan merupakan salah satu faktor penyebab keterlambatan dalam penyusunan APBD. Hubungan tersebut menghambat proses penyusunan APBD yang efektif dan efisien.

Komitmen adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak di dalam organisasi untuk secara bersama melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari organisasi. Pada penyusunan APBD pihak-pihak yang terlibat hendaknya memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan penyusunan APBD secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Adanya komitmen memberikan gambaran bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD untuk mengetahui secara jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan APBD. Selain itu, melalui komitmen dapat menciptakan motivasi dan kemauan bagi pihak penyusun APBD untuk menyelenggarakan tahapan penyusunan APBD yang lebih baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Pemahaman terhadap aturan sebagai pedoman penyusunan anggaran yang lebih rumit, proses yang lebih lama dan sering terjadinya perubahan kebijakan sangatlah menentukan keberhasilan penyusunan dan penetapan anggaran lebih tepat waktu. Keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat bergantung pada perubahan cara berfikir, berkeyakinan dan bertindak dari pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Cara berfikir, berkeyakinan dan bertindak dari pihak yang terlibat dari penyusunan APBD sangat bergantung pada intensitas pendidikan dan pelatihan Penganggaran Keuangan Daerah. Jenjang pendidikan tidak mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam implementasi peraturan perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persoalan pemahaman peraturan perundang-undangan adalah persoalan yang menyangkut teknis, seperti kemampuan eksekutif di daerah dalam menyiapkan rancangan, memang cukup serius. Daerah penting seperti Provinsi DKI Jakarta saja sempat mengeluh kekurangan tenaga ahli keuangan, apalagi provinsi atau kabupaten/

kota yang lain. Berlakunya PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membuat banyak daerah kedodoran dalam upaya memenuhi aturan itu. Maklumlah, kebanyakan latar belakang pendidikan jajaran birokrasi kita adalah ilmu politik atau hukum; minim sekali jumlah aparatur pemerintahan yang menguasai secara matang seluk-beluk keakuntansian. Belum lagi sekarang pemerintah daerah (pemda) harus menyusun APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 13/2006 yang menuntut pembuatan rencana anggaran secara detail. Sudah tertutup kemungkinan untuk mengajukan anggaran secara gelondongan tanpa perincian jelas, termasuk alokasi dana taktis yang dulu masih diperbolehkan.

Implikasi lain yang harus ditanggung rakyat adalah berkurangnya jatah pembangunan yang seharusnya diterima, mengingat Menteri Keuangan via Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu sudah menyatakan akan memberi sanksi pemotongan DAU atau minimal penundaan pencairannya terhadap daerah yang terlambat menyerahkan APBD-nya. Katakanlah DAU dipotong 20%, maka akan terjadi pemangkasan anggaran pembangunan dan bantuan sosial, karena tidak mungkin pemda memotong gaji pegawainya sebagai konsekuensi dari pemotongan DAU. Untuk DAK, juga berlaku hal yang sama, yakni syarat pencairannya harus dengan penetapan APBD.

Beberapa terobosan dalam reformasi kelembagaan perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut:

Pertama, perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pembahasan rancangan APBD dapat lebih fokus pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan dan tidak lagi terlalu terbebani dengan transaksi-transaksi politik. Itupun dengan asumsi bahwa Tim Anggaran baik di pihak eksekutif maupun legislatif mempunyai komitmen untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan proses anggaran.

Kedua, perlu dikembangkan strategi yang jitu baik berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Tujuan utama dilakukannya langkah ini adalah untuk mengubah paradigma tradisional yang berfokus pada penganggaran uang menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang menitikberatkan pada perencanaan kegiatan yang menjawab akar permasalahan di masyarakat.

Ketiga, memberikan insentif dan disinsentif yang efektif secara institusional. Secara makro, kebijakan Menteri Keuangan yang akan memotong Dana Alokasi Umum (DAU) untuk keterlambatan APBD sudah merupakan langkah yang tepat namun secara mikro tetap diperlukan beberapa terobosan lain, misalnya dengan melarang dicairkannya belanja pimpinan/anggota DPRD dan Kepala Daerah yang di banyak daerah dianggap sebagai kelompok belanja wajib, sehingga meskipun APBD belum disahkan belanja-belanja tersebut tetap bisa dicairkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Peneliti telah mengidentifikasi terdapat 4 faktor yang merupakan faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Keempat faktor tersebut terdiri dari faktor pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, faktor indikator kinerja, faktor hubungan eksekutif dan legislatif dan faktor komitmen. Keempat faktor tersebut memiliki total persentase varian sebesar 56,892%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut secara keseluruhan memberikan pengaruhnya terhadap keterlambatan penyusunan APBD sebesar 56,892% dan sisanya 43,108% dipengaruhi oleh faktor lain selain keempat faktor tersebut.

5.2. SARAN

1. Perlu memperbaiki pemahaman peraturan perundang-undangan karena merupakan faktor faktor yang paling mempengaruhi keterlambatan APBD.

2. Kompetensi dan keahlian SDM harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD dan dalam kegiatan lainnya. Pendidikan informal perlu ditingkatkan lagi sehubungan dengan pelaksanaan penganggaran daerah.
3. *Perlu perbaikan hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam penyusunan APBD. Kedua belah pihak harus memahami tujuan dari penyusunan APBD bagi pelaksanaan pemerintahan dan setiap unsur yang terlibat haruslah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam penyusunan APBD.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Jhon Andra Asmara, 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang*.
- Anonim. Budget-Info. 25 Juni 2010. 13 Maret 2010 <www.budget-info.com>.
- Ardi, Hamah. 2007. Analisa Good Governance dan Value For Money Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Sebuah Studi Interpretif (Studi pada Organisasi Masyarakat Sipil di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*.
- Arniati, Imelda & Ely Kartikaningdyah. 2010. " Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Pendukung, terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Pinang ". *Simposium Nasional Akuntansi (2010)*.
- BPKP. "Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)." 28 Juni 2010. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. 9 April 2010 <<http://www.bpkp.go.id>>.
- Dobell, Peter & Martin Ulrich. 2002. Parliament's performance in the budget process: A case study. *Policy Matters* 3(2): 1-24. <http://www.irpp.org>.
- Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper 147*.
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting—Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- http://www.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/garamfalvi/garamfalvi.html.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001*.
- Hamzah, Ardi. "Analisa Good Governance dan Value For Money Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Studi Pada Organisasi Masyarakat Sipil di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo." *Simposium Nasional Akuntansi (2007)*.
- Halim, Abdul & Syukri Abdulah. "Hubungan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran & Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Pemerintah (2006): 53-64*.
- Haryani & Muchammad Syafruddin. "Kepercayaan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Batang." *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (2010)*.
- Jogiyanto. Pedoman Survei Kuesioner: *Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2008.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Konteks Pencegahan Korupsi. Jakarta: KPK, Maret 2008.
- Lane, Jan-Erik. 2003. Management and public organization: The principal-agent framework. University of Geneva and National University of Singapore. *Working paper*.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martinez-Vazquez, Jorge, F. Javier Arze, & Jameson Boex. 2004. *Corruption, Fiscal Policy, and Fiscal Management*. Working Paper, Georgia State University. <http://www.fiscalreform.net>
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006.
- Sopannah & Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya.
- Wangi, Chitra Ariesta Pandan &, Irwan Taufiq Ritonga . 2010. Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD :Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 13. Purwokerto*
- Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah – Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Rizky Eriandani

rizky_eriandani@yahoo.com

Irene Syafridda

jade_lin4jc@yahoo.com

Abstrak

Islamic Banking has two important role within the society, which are in religious and financial aspect. In religious aspect the Islamic Banking has responsibility to operate according to Sharia, the Islamic law of human conduct. There are still very few of research conduct regarding the disclosures of CSR (Corporate Social Responsibility) for Sharia Banking Industry in Indonesia. Therefore, this research aim to provide Index Social Disclosures derived from the combination of earlier research and regulation or law from Bank Indonesia that related to the disclosures of CSR. The CSR disclosures of Bank Sharia in Indonesia will be examine based on content analysis of the sharia banking industry annual report. By classifying the type of disclosures based on the index that have been made, this research conclude that after being applied on 8 (eight) Islamic Bank in Indonesia, only half of them, provide appropriate CSR disclosures (more than 50%). Another interesting finding, that Islamic Bank in Indonesia has the tendency not to disclose items or issues that stimulate negative image on user of the financial statement perspective such us: Unlawful Transaction from Islamic Perspective that represent in Qardh Hassan Report.

Keyword: *Islamic Banking, Sharia, Corporate Social Responsibility*

Latar belakang

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan perusahaan, yang semula hanya berfokus pada *shareholder*, sekarang lebih berfokus pada *stakeholder*. *Stakeholder theory* mendorong munculnya konsep *corporate social responsibility* (CSR), yang menekankan aktivitas perusahaan pada tiga aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. CSR telah berkembang menjadi *framework* untuk peran bisnis di lingkungan sosial dan sebagai standar perilaku bagi perusahaan, dimana perusahaan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dengan cara yang produktif.

Penelitian ini menggunakan teori CSR untuk mengkaji pengungkapan sosial dari perspektif islam. Pada masyarakat barat dimana teori CSR dikembangkan, kode etik dipandang sebagai sesuatu yang relatif. Maksudnya, suatu praktik etika tertentu dapat diterima oleh satu grup atau individu, tetapi tidak dapat diterima oleh grup atau individu lainnya, dan tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan etika mana yang paling *valid*. Dalam perspektif islam, hak dan kewajiban individu atau organisasi terhadap pihak lain didefinisikan secara jelas oleh agama, tidak dipengaruhi oleh hukum yang sering berubah serta tidak dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi. Sehingga dapat dikatakan *responsibility* dalam islam didefinisikan dengan sangat baik, tidak berubah-ubah sepanjang waktu, dan tidak dipengaruhi oleh berbagai macam *framework* teori. Hal ini membuat definisi *responsibility* lebih stabil, tanpa membuatnya menjadi statis dan tidak relevan (Maali et al, 2003). Tujuan utama bisnis islam, sama halnya dengan individu, adalah untuk melayani Tuhan dengan mengikuti *Quran* dan *Sunah*, yang merupakan sumber utama syariah. Bukan berarti tidak mencari profit untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Bekerja dalam islam merupakan bagian dari bekerja untuk Tuhan, sehingga tujuan bisnis untuk mencari profit diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan syariah. Sehingga konsep CSR akan dapat berkembang dalam bisnis islam, tanpa harus bergantung pada berbagai peraturan yang bersifat memaksa.

Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia memasuki delapan tahun terakhir, pasca-perubahan UU Perbankan dengan UU No. 10/1998, mengalami pertumbuhan dan

perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2009 (Desember 2009). Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Indikasi	1998 KP/UUS	2003 KP/UUS	2004 KP/UUS	2005 KP/UUS	2006 KP/UUS	2007 KP/UUS	2008 KP/UUS	2009 KP/UUS	2010 KP/UUS
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6	11
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25	23
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139	146

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009

Keterangan :

BUS = Bank Umum Syariah

UUS = Unit Usaha Syariah

BPRS = Bank Perkreditan Rakyat Syariah

KP/UUS = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

Peran sosial merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah, karena bank syariah diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya lebih baik dibanding bisnis lain. Al Maghrabi (1996) mengatakan bahwa bank islam memiliki dua peran penting dalam masyarakat, yaitu dalam hal *religious* dan *financial*. Pada sisi *religious*, bank islam memiliki tanggung jawab untuk beroperasi sesuai dengan cara islam. Dalam aktivitasnya tersebut akan dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku individu maupun organisasi bisnis dalam masyarakat. Sedangkan pada sisi *financial*, bank islam mengendalikan dana yang cukup besar dan menggunakan pendapatan untuk menjalankan peran sosialnya. Sehingga, penelitian ini memiliki dua tujuan, **pertama**, mengkombinasikan *index social disclosure* dari instrument pengungkapan yang telah dibuat penelitian sebelumnya, dan akan digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini, sehingga dapat menggambarkan item pengungkapan sosial yang seharusnya diungkapkan oleh bank syariah. **Kedua**, melihat dan menganalisis praktik pengungkapan sosial yang telah dilakukan bank syariah, dengan cara membandingkan antara *index social disclosure* dengan *actual disclosure* pada annual report Bank Syariah di Indonesia.

Teori

Manfaat pengungkapan CSR

Perusahaan melakukan aktivitas CSR dengan alasan tertentu. Beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan ketika melakukan CSR adalah (*corporate watch report*, 2006) reputasi manajemen, *employee satisfaction*, *investor relations and access to capital*, dan efisiensi operasional. CSR merupakan strategi yang penting untuk membangun reputasi perusahaan, berdasarkan survei pada konsumen yang mengatakan bahwa konsumen akan memiliki image yang positif pada perusahaan yang peduli pada lingkungan dan sosial. Hal ini juga didasari karena adanya pergeseran minat konsumen. Konsumen pada tahun 1980-an lebih cenderung berusaha mendapatkan barang yang berkualitas tinggi dan dengan harga murah, sekarang konsumen lebih mementingkan jasa atau layanan penjualan (Budimanta, Prasetyo, dan Rudito, 2004). Karyawan merupakan komponen penting perusahaan,

kemampuan karyawan akan mendorong profitabilitas, sehingga perusahaan akan memperhatikan dan meningkatkan kualitas karyawannya. Dalam hubungannya dengan investor, kebanyakan investor akan merasa lebih aman dalam melakukan investasi pada perusahaan yang dinilai bertanggung jawab secara sosial. Delapan puluh enam persen (86%) investor institusional meyakini bahwa CSR akan memiliki dampak yang positif pada bisnis. Kemudian, CSR juga dapat mendorong tercapainya efisiensi operasi. Khususnya pada aspek lingkungan, perusahaan akan dapat meminimalkan barang sisa (*waste*) atau menghemat energi sehingga biaya operasional menurun.

Perspektif islam terhadap CSR

Berdasarkan pendekatan *tawhid*, islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan; Manusia dengan manusia; dan Manusia dengan lingkungan. Jika dilakukan dalam aktivitas bisnis, maka aktivitas tersebut dilakukan tidak hanya untuk memuaskan kebutuhan *material*, tetapi lebih untuk memenuhi kewajiban agama dan mencapai tujuan *non-material*, seperti kebutuhan keamanan sosial. *Social responsibility* dalam islam berawal dari konsep *brotherhood* dan *social justice*. *Social justice* akan melindungi muslim dari perbuatan haram. *Brotherhood* merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesama muslim adalah saudara, sehingga sesama muslim saling bertanggung jawab, khususnya terhadap orang yang tidak mampu (Mukhazir, 2006).

Parvez dan Ahmed (2004) mengatakan bahwa berdasarkan perspektif islam, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh organisasi bisnis merupakan suatu manfaat (lebih memberikan manfaat dibandingkan biaya yang dikeluarkan). Hal ini dapat dipahami ketika dipandang secara luas dan dalam periode waktu yang panjang. Dalam perspektif islam, tanggung jawab sosial tidak hanya masalah kewajiban hukum dan hak stakeholder. Didalamnya terdapat kewajiban moral untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan maupun masyarakat, dimana keduanya saling memiliki ketergantungan. Ketika perusahaan melakukan tindakan yang dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (misal: pembuangan limbah, eksploitasi karyawan, dll.), maka dalam periode waktu tertentu tindakan itu akan berbalik merugikan perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan selalu bertanggung jawab secara sosial, maka tindakan tersebut juga akan berbalik pada perusahaan. Dengan kata lain, biaya (tindakan *irresponsible*) yang dikenakan pada masyarakat akan berbalik ke perusahaan dalam jumlah yang lebih besar (kerugian). Begitupun manfaat yang diberikan pada masyarakat, akan berbalik lagi ke perusahaan dengan keuntungan lagi yang lebih besar.

Menurut Maali (2003), pada dasarnya pandangan islam terhadap pengungkapan sosial sesuai dengan konsep *accountability*, *social justice*, dan *ownership*. *Accountability* dalam islam, berarti semua orang (termasuk suatu bisnis) bertanggungjawab terhadap Tuhan atas apa yang mereka perbuat. Bertanggung jawab terhadap Tuhan berarti bertanggung jawab terhadap masyarakat, dan menghormati hak-hak masyarakat. *Social justice* dalam islam dikatakan bahwa semua muslim merupakan saudara, sehingga harus saling menjaga dan tidak diperbolehkan untuk melakukan eksploitasi atau merugikan sesama dengan alasan apapun. Pemilik segalanya adalah Tuhan, dalam konsep *ownership*, islam mengakui adanya kepemilikan yang bersifat privat (bukan milik umum), tetapi kepemilikan tersebut tidak absolut. Artinya, pemilik dari suatu sumber daya harus bertanggung jawab pada Tuhan atas penggunaan sumber daya bersangkutan, dan penggunaannya sebaiknya memberikan manfaat pada masyarakat.

Pengungkapan CSR dalam islam

Dalam islam, pengungkapan CSR dalam laporan keuangan harus menunjukkan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan syariah islam. Tujuannya untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap Tuhan, dan membantu pengambilan keputusan dalam hal ekonomi maupun religius. Mukhazir (2006) menggunakan pendekatan tauhid untuk menyusun item-item CSR yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pendekatan tauhid menggunakan konsep *Unity of God*, artinya Allah satu-satunya pencipta dan pemilik segalanya. Konsep ini dibangun dengan 2 element dasar, yaitu : *tawhid*

uluhiyyah dan *tawhid rububiyyah*. *Tawhid uluhiyyah* yaitu keyakinan bahwa semua yang ada di dunia adalah milikNya. *Tawhid rububiyyah* yaitu keyakinan bahwa Tuhan yang menentukan hidup dan mati semua ciptaan-Nya. Konsep ini juga menyatakan bahwa islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan.

Maali (2003) membuat index pengungkapan sosial berdasarkan konsep *accountability* dan memenuhi tujuan yang ditetapkan AAOIFI. Haniffa (2004) mengembangkan index pengungkapan sosial berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang pelaporan tanggung jawab sosial (Guthrie and Parker, 1989, 1990; Gray et al., 1995a; Haniffa, 1999), serta *framework* pengungkapan berdasarkan perspektif islam (Baydoun and Willett, 2000; Haniffa and Hudaib, 2002).

Metode penelitian

Penulisan ini merupakan *basic research* yang bertujuan mengembangkan instrumen untuk menilai pengungkapan aktifitas sosial perusahaan. Peneliti melakukan pengembangan *index social disclosure* berdasarkan penelitian sebelumnya dan peraturan Bank Indonesia. Dari *index social disclosure* tersebut, Peneliti kemudian melakukan *content analysis* untuk mengetahui *actual social disclosure* dari Bank Syariah yang terdaftar di Indonesia. Perbandingan tersebut dilakukan dalam upaya mengukur seberapa luas pengungkapan yang telah dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia selama ini.

Dari 11 Bank Umum Syariah di Indonesia, penelitian ini menggunakan 8 bank sebagai sample, karena tidak berhasil mendapatkan *annual report* 3 bank lainnya. Peneliti fokus pada *annual report* perbankan karena mudah mendapatkannya.

Pembahasan

Item pengungkapan yang dibuat dalam paper ini berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengkombinasikan item-item pengungkapan CSR yang direkomendasikan oleh Haniffa (2004), Maali (2003), Mukhazir (2006), dan Surat Edaran dari Bank Indonesia (SE No.12/13/DPbS). Haniffa membuat pengelompokan item pengungkapan CSR untuk bank syariah dengan cara mengkombinasikan kategori pengungkapan dari CSR – dari penelitian sebelumnya (Guthrie and Parker, 1989; Gray et al., 1995a; Haniffa, 1999), dan *framework* pengungkapan dari perspektif islam – dari penelitian sebelumnya (Baydoun and Willett, 2000; Haniffa and Hudaib, 2002). Maali (2003) membuat item-item pengungkapan CSR pada *annual report* bank islam berdasarkan konsep *accountability* dalam islam dan pengungkapan yang diminta oleh AAOIFI. Mukhazir et al. (2006) merumuskan kategori dan item pengungkapan berdasarkan pendekatan ‘*tauhid*’ dalam islam, yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan; dan hubungan manusia dengan sosial (manusia dan lingkungan). Kemudian, penelitian ini juga menggunakan aturan BI (SE No.12/13/DPbS) tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang didalamnya terdapat item pengungkapan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pertimbangan memasukkan item-item GCG untuk menyusun index pengungkapan CSR dalam bank islam karena salah satu prinsip dasar dari pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah adalah *accountability*, selain akuntabilitas merupakan konsep islam, GCG juga merupakan salah satu pilar pelaksanaan CSR (Febrianti, 2010). Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (*stockholder*), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Akibat yang muncul dari pergeseran paradigma ini, tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan masalah *corporate social responsibility* (CSR), sehingga dapat dikatakan salah satu implementasi GCG adalah penerapan CSR.

Berdasarkan aturan Bank Indonesia, konsep islam, dan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tidak membedakan mana yang bersifat sukarela dan mana yang wajib, maka penelitian ini menyarankan item-item pengungkapan CSR dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) **Visi dan Misi Perusahaan**

Item pengungkapan ini sejalan dengan dengan penelitian Haniffa (2004), Mukhazir (2006), dan SE dari Bank Indonesia (SE No.12/13/DPbS). Hanya standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang tidak meminta untuk mengungkapkan visi dan misi perusahaan.

Visi dan Misi perusahaan menggambarkan tujuan yang hendak dicapai manajemen. Tujuan yang ditetapkan perbankan syariah hendaknya sejalan dengan konsep islam. Mengingat islam sangat menjaga hubungan antara Tuhan dengan manusia, dan manusia dengan ciptaanNya (sosial dan lingkungan), maka dalam pernyataan visi-misi sebaiknya diungkapkan bahwa operasional perusahaan telah sesuai dengan syariah islam. Selain itu juga dapat diungkapkan tujuan yang hendak dicapai atau nilai yang akan diberikan bagi *stakeholdernya*.

Item pengungkapan visi dan misi mendapat score yang tertinggi. Semua bank syariah telah menyatakan dalam visi dan misinya, bahwa mereka telah beroperasi sesuai syariah islam, dan menyatakan tujuannya yang terkait kepentingan *stakeholder* bank.
- 2) **Top Management**

Haniffa (2004), Mukhazir (2006), dan SE dari Bank Indonesia (SE No.12/13/DPbS) menyarankan adanya pengungkapan informasi mengenai Top management. Top manajemen merupakan penanggung jawab tertinggi di perusahaan. Dalam islam, tanggung jawab merupakan kepercayaan yang terima atau amanah dari Tuhan yang harus dilaksanakan (dalam hal berhasil atau tidaknya operasional perusahaan). Top manajemen bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, serta penggunaan sumber daya yang ada didalamnya. sehingga pertanggungjawaban selain terhadap Tuhan, juga terhadap masyarakat. Artinya, nama, profil, dan kualifikasi anggota top manajemen harus diketahui oleh para *stakeholder*. Jumlah rapat yang dilakukan sebaiknya juga diungkapkan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab, hal ini didukung oleh SE No.12/13/DPbS dari Bank Indonesia.

Semua Bank Syariah telah mengungkapkan nama dan profil top management sebagai bagian dari annual report mereka, akan tetapi hanya sebagian bank syariah yang telah mengungkapkan item-item seperti kualifikasi, remunerasi fasilitas dan jumlah rapat yang diadakan oleh pada top management. Untuk item kualifikasi sebagian hanya menyebutkan bahwa telah sesuai dengan uji kepatutan dan kelayakan BI No 12/ 2/ DpG/DPbs, tanpa menyebutkan keterangan rinci kualifikasi tersebut. Hanya Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Victoria yang pengungkapannya minim yaitu kurang dari 50%.
- 3) **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dalam perbankan syariah, keberadaan DPS sangat penting karena berperan untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah pada pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Sehingga *stakeholder* perlu mengetahui anggota DPS (nama, profil, kualifikasi), remunerasi dan fasilitas yang diterima DPS, serta opini dan rekomendasi DPS atas operasional (termasuk distribusi keuntungan dan kerugian) dan produknya.

Semua Bank Syariah telah mengungkapkan item-item DPS yaitu nama profil, opini SSB tentang distribusi profit (loss), sebagai bagian dari annual report mereka, akan tetapi sama dengan pengungkapan item dalam top management, hanya sebagian bank syariah yang telah mengungkapkan item-item seperti kualifikasi, remunerasi fasilitas DPS. Untuk item kualifikasi sebagian hanya menyebutkan bahwa telah sesuai dengan uji kepatutan dan kelayakan BI No 12/ 2/ DpG/DPbs, tanpa menyebutkan keterangan rinci kualifikasi tersebut. Hanya Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Victoria yang pengungkapannya minim yaitu kurang dari 50%.
- 4) **Zakat**

Penelitian Haniffa (2004), Maali (2003), Mukhazir (2006), dan Surat Edaran dari Bank Indonesia (SE No.12/13/DPbS) menyarankan pengungkapan mengenai zakat. Hanya

saja Haniffa (2004) tidak membuat kategori zakat tersendiri, informasi mengenai zakat dimasukkan dalam kategori audit. Penelitian ini menyarankan pengungkapan zakat karena merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Jika dilihat dari teori tauhid, maka zakat mencakup pemenuhan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, dan manusia terhadap manusia. Tanggung jawab kepada Tuhan karena zakat merupakan keharusan bagi orang-orang yang mampu, dan tanggung jawab terhadap manusia karena dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling membantu – khususnya terhadap orang yang tidak mampu. Perusahaan sebaiknya memberikan informasi pada *stakeholder* sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai sumber dan penggunaan zakat, jumlah yang telah didistribusikan, saldo zakat yang belum didistribusikan beserta alasannya, dan opini DPS terhadap perhitungan & distribusi zakat.

Semua Bank Syariah telah mengungkapkan item-item Zakat seperti: sumber dan laporan penggunaan zakat hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101, sebagai bagian dari annual report mereka. Hanya Bank Bukopin dan Bank Jabar Banten Syariah, yang belum melakukan pengungkapan atas sumber dan laporan penggunaan zakat. Namun hampir semua Bank Syariah, kecuali Bank mega Syariah, belum melakukan pengungkapan atas item alasan saldo zakat belum dibagikan dan opini DPS terkait perhitungan dan distribusi zakat.

5) *Qard Hassan*

Qard Hassan sama dengan pinjaman tanpa bunga yang disediakan bank islam untuk individu dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini penting untuk diketahui pengguna *annual report* untuk menilai apakah bank telah menjalankan aktivitas religious dan mengikuti prinsip islam. Qard hassan dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial, karena merupakan pinjaman yang diberikan untuk memberikan manfaat bagi individu. Bank hanya membebankan biaya fee dan administrasi, dan mengijinkan nasabah untuk membayar secara angsuran. Informasi yang dapat diungkapkan meliputi sumber dan penggunaan dana qard hassan, jumlah yang disalurkan, tujuan sosial disalurnya qard hassan, dan kebijakan berkaitan dengan dana tersebut – misalnya, jika ada nasabah yang terlambat membayar.

Hanya Bank Muamalat yang telah mengungkapkan semua item-item Qardh Hassan/ Dana Kebajikan seperti: sumber, laporan perhitungan dan penggunaan, tujuan sosial, dan kebijakan terkait. Namun, Bank Bukopin dan Bank Jabar Banten Syariah, yang belum melakukan pengungkapan atas Qardh Hassan/ Dana Kebajikan.

6) *Unlawful Operation*

Organisasi islam seharusnya tidak melakukan transaksi yang melanggar prinsip syariah. Syariah melarang adanya *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *masyir* (gambling), walaupun ditimbulkan dari transaksi halal. Pendapatan non halal dan penggunaannya. Pengungkapan mengenai pendapatan non halal dan penggunaannya paling kurang meliputi sumber pendapatan non halal, nilai, dan penggunaannya. Dalam hal penggunaan pendapatan non halal dimaksud digabungkan menjadi satu dengan penggunaan "dana qardh lainnya" dan tidak dapat dikaitkan lagi sumber dengan penggunaannya maka cukup diberi keterangan "dijadikan satu dengan penggunaan dana qardh" (SE No. 12/13/DPbS).

Dalam transaksi tertentu, organisasi islam seperti perbankan syariah tidak dapat menghindari transaksi haram, misalnya – bank syariah melakukan transaksi *letter of credit* dengan bank konvensional, dari transaksi tersebut bank diminta membayar bunga. Sehingga organisasi islam sebaiknya mengungkapkan informasi mengenai transaksi haram, seperti : deskripsi jenis transaksi yang termasuk haram (unlawful operation), menjelaskan alasan dilakukannya transaksi tersebut, pengungkapan pendapatan dan beban pada transaksi bersangkutan, opini dewan syariah mengenai transaksi tersebut.

Hampir semua Bank Syariah belum melakukan pengungkapan item-item untuk Unlawful Operation sebagai bagian dari annual report mereka. Kecuali Bank Mega yang menyatakan pendapatan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

- 7) Produk
Organisasi islam diharuskan memproduksi barang atau jasa yang halal, sehingga transparansi informasi mengenai barang atau jasa tersebut relevan dan berguna bagi user untuk menilai etika perusahaan dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Organisasi islam direkomendasikan mengungkapkan informasi sebagai berikut: pernyataan yang menjelaskan bahwa semua barang atau jasa telah disetujui oleh dewan syariah, deskripsi konsep syariah yang mendasari barang atau jasa, informasi detail mengenai barang atau jasa, pernyataan yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemasaran sesuai dengan etika islam.
Hampir semua Bank Syariah telah melakukan pengungkapan item-item untuk Produk yang cukup memadai yaitu lebih dari 50%, sebagai bagian dari annual report mereka. Bank Bukopin, BCA, BJB yang pengungkapannya hanya terkait deskripsi produk, dirasa masih minim karena kurang dari 50%
- 8) Karyawan
Karyawan harus diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai mesin atau peralatan. Informasi yang harus diungkapkan antara lain : remunerasi karyawan, kebijakan mengenai kesempatan training dan edukasi, pernyataan mengenai kebijakan perlindungan kesejahteraan seperti asuransi kesehatan atau kebebasan beribadah, pernyataan mengenai lingkungan perusahaan yang kondusif untuk menerapkan nilai etika islam, dan pernyataan bahwa tidak adanya diskriminasi gender atau minoritas.
Hampir semua Bank Syariah telah melakukan pengungkapan item-item Karyawan secara memadai yaitu lebih dari 50%, sebagai bagian dari annual report mereka. BJB, dan Bank Victoria yang pengungkapannya masih minim yaitu 40%
- 9) Masyarakat
Perspektif islam terhadap accounting menekankan pada keadilan sosial (*social justice*), sehingga pengungkapan CSR merupakan element utama dari laporan. Organisasi islam diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi. Selain zakat dan sumbangan, bank islam diharapkan melakukan aktivitas lain yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mendorong bank untuk memberikan prioritas pada investasi yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah sosial, walaupun akan mengurangi keuntungan bank.
Pengungkapan yang dilakukan antara lain: deskripsi kontribusi perusahaan terhadap perbaikan kualitas masyarakat, pernyataan mengenai kontribusi yang dilakukan untuk mendukung aktivitas organisasi lain dalam perbaikan masyarakat, jumlah dana yang disalurkan, dan sumber dana tersebut.
Bank Muamalat, Bank Mandiri dan Bank BNI telah melakukan pengungkapan secara memadai yaitu 100%, sedangkan Bank Mega, BJB, Bank Victoria belum melakukan pengungkapan. Sementara Bank lain melakukan pengungkapan secara minim yaitu 33,33%
- 10) Lingkungan
Pengungkapan informasi mengenai lingkungan dianggap perlu karena lingkungan merupakan penciptaan Tuhan, dan harus dipelihara. Pengungkapan yang berhubungan dengan lingkungan adalah : deskripsi aktivitas perusahaan untuk melindungi lingkungan, penjelasan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melindungi alam, pernyataan yang mengindikasikan bahwa perusahaan telah patuh pada regulasi lingkungan, pernyataan bahwa operasi perusahaan tidak menimbulkan polusi, dan penjelasan mengenai adanya training karyawan yang berhubungan dengan lingkungan. Bisa juga pengungkapan mengenai pembiayaan yang dikeluarkan untuk masalah lingkungan.

Hanya dua Bank Syariah yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI yang telah melakukan pengungkapan item-item lingkungan secara sementara bank syariah lainnya melakukan pengungkapan yang masih minim yaitu kurang dari 50%.

SIMPULAN

Dalam Penelitian ini, setelah kami mengembangkan *index social disclosure* berdasarkan perspektif islam, maka akan dilakukan *content analysis* pada annual report bank syariah. Setelah diaplikasikan pada 8 Bank Syariah yang diteliti, hanya setengah dari jumlah tersebut yang melakukan pengungkapan item-item CSR berdasarkan *Index Social Disclosure* secara memadai yaitu lebih dari 50%. Temuan menarik lainnya bahwa seluruh Bank Syariah memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan pengungkapan terkait dengan issue atau item yang dapat memicu image negatif para pengguna laporan keuangan seperti item *Unlawful Transaction* dari perspektif islam. *Unlawful Transaction* hanya tercermin pada laporan qardh pada item pendapatan non-halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, Desy. 2005. "Tingkat Keluasan Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan dan Hubungannya dengan Earning Response Coefficient (ERC)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.2, No.1, July, p.24 – 57.
- Chapra, Habib Ahmed. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Haniffa, Roszaini, and Muhammad Hudaib. 2004. "Disclosure Practices of Islamic Financial Institutions: An exploratory study". *Working Paper Series*.
- Mukhzar, Muhammad, and Noordin. 2006. "Corporate Social Responsibility Disclosure : A Tawhidic Approach". *Jurnal Syariah*, 14-1, p.125-142.
- Maali, Casson, and Napier. 2003. "Social Reporting by Islamic Banks". University of Southampton.
- Muhammad, Dwi Suwiknyo. "Akuntansi Perbankan Syariah". Trust Media. Yogyakarta. 2009.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS. 30 April 2010
- Yaya, Rizal Martawireja, Aji Erlangga Abdurahim, Ahim. "Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer". Salemba Empat. Jakarta 2009

**PRAKTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI:
STUDI KASUS PADA KOPERASI PRIMER
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR**

Tantina Haryati
Sishadiyati
Ira Wikartika

Abstract

Cooperative effort is directly related to business interests of members to improve the business and welfare of members. Like other business entities, cooperatives can make efforts as other business entities, such as trade, manufacturing, financial services, and financing, insurance services, transportation services, professional services, and other services. Accounting treatment arising from transactions between the cooperative relationship with its members and other transaction- specific cooperative business entity shall be guided by PSAK No. 27, while a general nature are treated with reference to the other PSAK. This situation may create a less cooperative management understand how to make proper accounting in accordance with PSAK. It is mainly experienced by medium and small cooperatives located in rural or small town.

Keyword: *Accounting Basis, Revenue and Expense Recognition, Asset, Liability, Equity, and Financial Reporting Cooperative.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda (*the dual identity of member*) pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan PSAK, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi. Sebaliknya jika laporan keuangan koperasi disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, dapat menyesatkan penggunaannya.

B. Fokus penelitian

Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada badan usaha koperasi berpedoman pada PSAK 27, sedangkan yang bersifat umum diperlakukan dengan mengacu pada PSAK yang lain. Keadaan ini mungkin membuat manajemen koperasi menjadi kurang mengerti bagaimana membuat pembukuan secara benar sesuai dengan PSAK. Hal tersebut terutama dialami oleh koperasi menengah dan kecil yang berlokasi di desa atau di kota kecil. Yang

menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah praktek akuntansi dan pelaporan keuangan koperasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka berikut ini dibuat suatu perumusan masalah:

1. Bagaimana praktek akuntansi yang diterapkan pada koperasi?
2. Bagaimana standar akuntansi dalam pelaporan keuangan pada koperasi?

D. Tujuan Penelitian

Setelah melakukan kajian masalah, selanjutnya dilakukan rumusan atas permasalahan yang terjadi, berikut ini akan dibuat suatu tujuan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek akuntansi yang diterapkan pada koperasi.
2. Untuk menentukan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan yang dapat diterapkan pada koperasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk lebih mengetahui besarnya manfaat mempelajari praktek akuntansi dan pelaporan keuangan koperasi secara nyata dengan berpedoman pada PSAK 27.
2. Bagi Universitas
Memberikan hasil informasi aktual tentang koperasi, sehingga perguruan tinggi khususnya program studi akuntansi UPN "Veteran" Jawa timur bisa menjadi mitra dalam pengembangan teori tentang PSAK 27.
3. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menetapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

II. Studi Kepustakaan

G. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang disyaratkan dalam menyusun laporan keuangan, termasuk koperasi adalah basis akrual. Pendapatan dilaporkan pada periode dimana pendapatan diperoleh (*earned*). Beban dilaporkan pada periode dimana beban tersebut dialami (*incurred*) dalam mendapatkan pendapatan.

H. Pengakuan Pendapatan dan Penetapan Beban Koperasi

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Beban perkoperasian adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh badan usaha koperasi yang tidak dikeluarkan oleh badan usaha dengan bentuk lain.

Pendapatan dan beban bunga yang timbul diakui secara accrual (*accrual basis*) kecuali pendapatan dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang "*non performing*". Pendapatan dari aktiva yang *non performing* hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima.

Beban bunga terdiri atas beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan secara langsung, dalam rangka penghimpunan dana tersebut seperti hadiah, premi, atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan (*funding*).

I. Perlakuan Aktiva

Terdapat dua metode akuntansi untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak tertagih, yaitu metode penyisihan dan metode penghapusan langsung. Metode penyisihan piutang tak tertagih, dilakukan dengan cara membuat perkiraan piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapus, sedangkan metode penghapusan langsung mengakui beban hanya pada saat piutang tersebut dianggap benar-benar tak tertagih.

Investasi jangka panjang harus dicatat pada neraca berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen. Apabila penurunan nilai tersebut terjadi, maka perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dengan syarat:

3. Besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan,
4. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

Harga perolehan aktiva terdiri dari harga belinya dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan dikurangi setiap potongan dagang dan rabat.

Masa manfaat aktiva ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh perusahaan. Estimasi masa manfaat dipertimbangkan berdasarkan pada pengalaman perusahaan dengan aktiva.

Metode pencatatan piutang yang diterapkan adalah metode penghapusan tidak langsung. Suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban dan pengurangan tidak langsung terhadap piutang usaha (melalui kenaikan akun penyisihan) dalam periode dimana penjualan itu dicatat.

J. Perlakuan Kewajiban

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

K. Perlakuan Ekuitas

Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.

L. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

III. Metode Penelitian & Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *diskriptif eksploratif* dimana peneliti menggali informasi-informasi tentang basis akuntansi, pengakuan pendapatan dan penetapan beban koperasi, perlakuan aktiva, perlakuan kewajiban, perlakuan equitas, dan laporan keuangan koperasi Primer UPN “Veteran” Jatim. Hasil penelitian selanjutnya dibandingkan dengan standar akuntansi yang berkaitan. Hasil penelitian didiskripsikan sehingga mampu menjelaskan praktek akuntansi yang diterapkan di Koperasi dan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan pada Koperasi Primer UPN “Veteran” Jatim.

IV. Hasil dan Pembahasan

Koperasi yang berkedudukan di Jl. Raya Rungkut Madya Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan nomor 6574A/BH/1189 pada tanggal 22 November 1995 oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia. Kegiatan usaha koperasi meliputi:

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Simpanan Sukarela
3. Unit Pinjaman Barang
4. Unit Cleaning Service
5. Unit Toko
6. Unit fotocopy
7. Unit Tambak
8. Unit Girimart

Analisis

H. Basis Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan Laporan Arus kas disusun dengan metode tidak langsung yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

Pemakaian basis akuntansi oleh koperasi primer UPN “Veteran” Jatim dengan menggunakan asumsi dasar yang dipakai oleh laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dasar akrual.

Koperasi sudah melakukan pengakuan atas terjadinya beban penyusutan atas aktiva tetap yang dimilikinya. Koperasi juga telah memperhitungkan beban piutang tak tertagih atau beban resiko kredit. Perlakuan tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum tentang pengakuan beban yang diakui secara akrual.

Koperasi telah mengadakan penyisihan atas kemungkinan piutang yang tak tertagih sebesar 0,1 % dari saldo piutang jasa anggota dan 1% dari saldo piutang non anggota per 31 Desember. Persediaan barang dicatat berdasarkan pada harga perolehan secara periodik sedangkan penilaian atas persediaan berdasarkan metode FIFO.

I. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari asuransi dibayar dimuka dan sewa dibayar dimuka. Asuransi merupakan asuransi kematian anggota yang memiliki pinjaman agar pinjaman tercover jika ada anggota yang meninggal. Premi asuransi dipotong pada saat anggota mendapatkan pinjaman. Dalam hal ini koperasi bekerja sama dengan Asuransi Bumi Putera.

J. Perlakuan Aktiva

Aktiva tetap dinilai dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method). Aktiva tetap yang dimiliki oleh koperasi terdiri dari gedung Giri Mart, peralatan cleaning service, peralatan toko, peralatan percetakan, peralatan kontraktor, mesin fotocopy, peralatan fotocopy, peralatan Giri Mart, dan peralatan kantor. Aktiva tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dikelompokkan sebagai aktiva tetap yaitu:

- f. Berwujud, aktiva tetap yang dimiliki mempunyai wujud pasti. Tanah, gedung, dan inventaris yang dimiliki dapat dilihat bentuknya, dapat diraba dan dirasakan keberadaannya.
- g. Digunakan untuk kegiatan normal, aktiva tetap digunakan untuk operasi normal perusahaan. Tanah beserta gedung digunakan untuk kantor perusahaan. Inventaris kantor seperti lemari arsip, meja kantor, komputer dan inventaris lainnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan tujuan pemilikan ini sudah ada dalam pengertian aktiva tetap perusahaan;
- h. Tidak dimaksudkan untuk dijual. Tanah, gedung, dan inventaris diperoleh untuk mendukung kegiatan operasi Koperasi Primer UPNV bukan untuk dijual kembali;
- i. Mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut kemungkinan besar dapat diterima;
- j. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Biaya perolehan tanah, gedung, dan inventaris dapat diukur dengan andal.

Masa manfaat dan nilai sisa aktiva ditentukan berdasarkan masa kegunaan yang diharapkan oleh Koperasi. Estimasi masa manfaat tersebut ditentukan oleh pengurus berdasarkan pengalaman aktiva yang sejenis. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK No.16.

Koperasi menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua bangunan dan inventaris yang disusutkan. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus mengalokasikan beban penyusutan yang sama tiap tahun. Pola pemanfaatan aktiva yang disusutkan sama tiap tahun. Jadi, penggunaan metode tersebut sudah sesuai dengan teori pada landasan teori.

Aset Tidak Berwujud terdiri dari Franchise dan Software. Dan Aset Lain-lain terdiri dari :

- Aset non aktif berupa mesin percetakan yang ada di gudang koperasi namun tidak terpakai. Nilainya masing-masing sebesar Rp 42.000.000,- pada tahun 2010 dan 2009.
- Deposit Pembayaran On Line. Investasi jangka pendek merupakan deposit atas pembayaran listrik dan telpon secara online serta pulsa elektrik sebesar Rp. 20.000.000,-.

Piutang Koperasi Primer UPN ‘Veteran’ Jatim terdiri dari:

- Piutang Jasa Anggota merupakan pinjaman berupa uang tunai baik untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan konsumtif. Piutang jasa anggota ini sebagian berasal dari pinjaman bank dan sisanya dari perputaran simpanan sukarela anggota. Piutang jasa

simpanan diberikan kepada anggota dengan suku bunga antar 10%-12% dengan tempo pinjaman antara 12-60 bulan. Piutang ini diberikan kepada anggota dengan jaminan SKEP anggota.

- Piutang Barang merupakan kredit barang yang dapat diangsur selama 10 bulan dengan bunga 1,5%/bulan sedangkan kredit laptop diberikan dengan tempo 12-24 bulan dengan bunga 12%/bulan. Piutang ini diberikan tanpa jaminan.
- Piutang Sementara merupakan pinjaman berupa uang tunai dengan tempo 1-2 bulan dan bunga 2%/bulan. Piutang ini diberikan tanpa jaminan.
- Piutang Lain-lain Anggota merupakan piutang manta anggota yang telah keluar dari keanggotaan. Piutang ini diberikan dengan jaminan Skep.
- Piutang Pinjaman Jasa Anggota Luar Biasa merupakan piutang anggota luar biasa dengan suku bunga dan tempo yang sama dengan anggota. Piutang ini diberikan dengan jaminan sertifikat kendaraan maupun rumah.
- Piutang Cleaning Service merupakan piutang setiap satker atau fakultas atas jasa penggunaan cleaning service sesuai dengan SPK yang telah disepakati setiap satker.
- Deposito

Berdasarkan keterangan diatas piutang dicatat saat timbulnya hak sedangkan hutang dicatat saat timbulnya kewajiban. Koperasi telah mengadakan penyisihan atas kemungkinan piutang yang tak tertagih sebesar 0,1% dari saldo piutang jasa anggota dan 1% dari saldo piutang non anggota per 31 Desember.

K. Perlakuan Kewajiban

Koperasi telah membedakan kewajibannya menjadi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

Kewajiban Lancar terdiri dari :

- a. Simpanan Sukarela merupakan simpanan anggota yang mendapatkan bunga 10% per tahun.
- b. Simpanan Deposito merupakan simpanan beberapa anggota yang mendapatkan bunga 10% per tahun dengan tempo 12 bulan.
- c. Hutang jaminan kantin merupakan uang jaminan para penyewa kantin.
- d. Hutang pajak (PPN Keluaran). PPN keluaran timbul akibat penjualan Girimart.
- e. Hutang Pph Badan (Ps 29) merupakan hasil perhitungan pajak terutang tahunan.
- f. Hutang jangka pendek lain-lain merupakan hutang atas pembelian barang dagangan secara kredit kepada PT. Inti Cakrawala.
- g. Hutang bank dan non bank.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

- a. Hutang bank
- b. Hutang jangka panjang lain-lain.

L. Perlakuan Ekuitas

Simpanan pokok anggota merupakan simpanan yang harus dibayar anggota pada saat pertamakali menjadi anggota sebesar Rp 50.000,-.

Simpanan pokok anggota luar biasa merupakan simpanan yang harus dibayar anggota luar biasa pada saat pertama kali menjadi anggota sebesar Rp 200.000,-.

Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus dibayar anggota setiap bulan sebesar Rp 20.000,- bagi anggota golongan I dan II sebesar Rp 30.000,- bagi anggota golongan III dan IV. Simpanan wajib anggota luar biasa merupakan simpanan yang harus dibayar anggota luar biasa 6 bulan di depan sebesar Rp 120.000,-. Modal penyertaan partisipasi anggota merupakan modal donasi dari mantan rektor UPN "Veteran" Jatim Suparyo. Modal penyertaan partisipasi non anggota merupakan modal donasi dari PT. Coca Cola Indonesia.

M. Perlakuan Modal

Modal merupakan kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota. Modal penyertaan diakui dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas. Sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang.

Cadangan yang dibentuk dari SHU yang diperoleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal pengembangan usaha dan untuk menutup resiko kerugian merupakan bagian dari ekuitas. Sebagai bagian dari ekuitas, cadangan berpengaruh terhadap total nilai kekayaan bersih koperasi yang mencerminkan nilai pemilikan anggota dalam koperasi. Oleh karena itu anggota yang keluar dalam tahun berjalan, selain menerima pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain sebesar nilai nominalnya, koperasi dapat menetapkan pembayaran tambahan dalam jumlah yang proporsional dengan nilai kekayaan bersih koperasi atau jumlah tertentu yang ditetapkan rapat anggota. Pembayaran tambahan tersebut dibebankan pada cadangan koperasi.

Pembagian SHU berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Koperasi Primer UPN "Veteran" Jatim. Kegiatan utama koperasi Primer UPNV adalah simpan pinjam. Pendapatan terbesar disumbangkan oleh bunga dari pinjaman anggota. Unit simpan pinjam mencatat pendapatan berdasarkan atas basis kas dimana pendapatan bunga dicatat sebagai pendapatan jika kas sudah terima. Pada akhir tahun tidak ada pengakuan akan bunga akrual dan piutang bunga. Oleh karena itu, jumlah saldo piutang jangka pendek menjadi lebih kecil dibandingkan dengan apabila pembukuan dilakukan berdasarkan basis akrual.

N. Laporan Keuangan Koperasi

Koperasi telah memenuhi sebagian ketentuan laporan keuangan koperasi yang tertera pada PSAK No.27. Menurut PSAK tersebut, laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan promosi ekonomi anggota, Catatan atas Laporan Keuangan. Koperasi Primer UPNV pada tanggal 31 Desember 2010 telah menyusun laporan keuangan koperasi yang meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan, tetapi koperasi belum membuat laporan promosi ekonomi anggota. Perusahaan belum menerapkan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, karena menurut standar akuntansi yang berlaku umum mengharuskan penyajian standar tersebut pada tahun buku yang bersangkutan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Koperasi Primer UPN "Veteran" Jawa Timur menggunakan basis akuntansi yang dasar asumsinya menggunakan laporan keuangan dan penyajiannya menggunakan dasar akrual. Koperasi Primer UPN "Veteran" Jatim telah memperhitungkan beban piutang tak tertagih atau beban resiko kredit. Pengakuan beban-beban lainnya belum memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku secara umum karena memakai basis kas.
2. Perlakuan pendapatan di Koperasi Primer UPN "Veteran" Jatim terdapat pemisahan pendapatan yaitu pendapatan anggota (sebagai partisipasi bruto) dan non anggota (sebagai pendapatan/penjualan). Perlakuan beban juga sama ada pemisahan beban yaitu beban anggota dan non anggota. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan anggota. Dari hal tersebut di atas perlakuan pendapatan dan beban sudah sesuai dengan PSAK 27.

3. Secara umum perlakuan aktiva di Koperasi Primer UPN “Veteran” Jatim sudah benar sesuai dengan PSAK 27 dan PSAK 16. Pada akhir tahun Koperasi Primer tidak mengakui adanya piutang bunga. Piutang bunga pada akhir tahun muncul karena adanya pengakuan pendapatan bunga akrual. Koperasi tidak mengakui adanya pendapatan bunga akrual. Bunga akan diakui jika kas diterima.
4. Secara umum, pencatatan kewajiban sudah benar. Kewajiban tersebut dicatat berdasarkan nilai nominalnya. Pengkategorian kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek juga sudah benar.
5. Ekuitas sudah dicatat dengan tepat. Simpanan pokok anggota dan non anggota, simpanan wajib serta cadangan telah dicatat dengan benar.
6. Laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan Koperasi Primer UPN “Veteran” Jawa Timur tanggal 31 Desember 2010 belum membuat laporan promosi ekonomi anggota.

VI Daftar Pustaka

- Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*. Edisi 8. Yogyakarta. BPFE, 2004
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Halim, Abdul, Drs, MBA, Akt. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Buku 1. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1997.
- Kieso, Donald E. Dan Jerry J. Weygrant. *Intermediate Accounting*. Edisi 12. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2008.
- Rudianto. *Akuntansi Koperasi*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit

**ANALYSIS SEVERAL FACTORS THAT INFLUENCE INVESTMENT (PMDN)
AT EAST JAVA**

Sri Muljaningsih
Luky Susilowati
Muchtolifah
sri_muljaningsih@yahoo.com

Abstract

In development PMDN at East Java has experienced depreciation, where does investment agreement (PMDN) at East Java sharply decreased in the year 1998 only amount of Rp. 3,62 triliun if compared Rp. 12,01 triliun in the year 1997 and this depreciation returns to continue in the year 1999 that is amount of Rp. 1,07 triliun. Beside that also happen investment realization value from at first recorded 65 projects in the year 1997 be 27 projects in the year 1998 and 23 projects in the year 1999. The decreasing agreement of Pmdn at East Java is caused by decrease it investor interest to embedded the capital's at East Java. Inconnecton with the mentioned, this research aimed to know regional domestic product bruto (PDRB), rate USD towards Rupiah, Inflation and influential Total of Labour towards Capital Investment in Country at East Java and also detects variable dominantest the influence. This research used secondary data with range of time during fifteen year (1994-2009), where is data got from East Java Statistics Council. The analysis model used doubled linear regression. The result shows partially rate variable Valas Rate and Inflation has influence significant towards Capital Investment in Country at East Java. But regional domestic product bruto and Total of Labour not influential towards Capital Investment in Country at East Java. Besides, also got result that Inflation variable is variable with influence level dominantest towards Capital Investment in Country at East Java.

Keyword: Capital Investment in Country, Regional Domestic Product Bruto, Valas Rate, Inflation, Total of Labour.

*Dosen Progdil Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan UPN "Veteran" Jatim

PENDAHULUAN

Dalam rangka mempercepat pemulihan perekonomian nasional dari dampak krisis perekonomian seharusnya pemerintah lebih memanfaatkan potensi sumber daya, baik yang dimiliki oleh pemerintah Badan Usaha Milik Negara atau swasta asing salah satunya dalam bentuk investasi. Saat ini investasi memegang peranan penting, karena keberhasilan investasi tentunya juga tergantung dari sejauh mana dan seberapa lama berbagai kendala yang menimpa perekonomian nasional dapat diatasi dan bagaimana para pelaku ekonomi termasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menyikapi situasi yang terjadi (Damanhuri, 2000).

Propinsi Jawa Timur sebagai daerah dengan kontribusi perekonomian yang tinggi ternyata juga ditandai oleh inflasi yang sangat rendah. Hal ini terjadi pada tahun 1997 jika dibandingkan dengan tahun 1998, dimana pada tahun 1997 inflasi di Jawa Timur sebesar 10,40% sedangkan pada tahun 1998 sebesar 82,31%. Akan tetapi pada tahun 1999 inflasi di Jawa Timur kembali rendah yaitu sebesar 10,47% rendahnya inflasi di Jawa Timur pada tahun 1999 ini dipicu adanya deflasi yang disebabkan juga oleh mengalirnya kembali pasokan barang dan jasa. Selain itu, perkembangan PMDN di Jawa Timur juga mengalami

penurunan. Nilai investasi (PMDN) di Jawa Timur terjadi penurunan tajam pada tahun 1998 yang hanya sebesar Rp. 3,62 Triliun jika dibandingkan Rp. 12,01 Triliun pada tahun 1997 dan penurunan ini kembali berlanjut pada tahun 1999 yaitu sebesar Rp. 1,07 Triliun. Selain penurunan dari yang semula 65 proyek pada tahun 1997 menjadi 27 proyek pada tahun 1998 dan turun menjadi 23 proyek pada tahun 1999. Penurunan persetujuan PMDN di Jawa Timur ini disebabkan oleh berkurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Padahal dilain sisi diketahui bersama bahwa tujuan negara Indonesia adalah memberi kemakmuran sebesar-besarnya pada masyarakat dengan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto ditinjau atas dasar harga konstan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, sehingga mendorong adanya investasi (Jhingan, 2002:482).

Perekonomian di Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997 menyebabkan kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 %. Padahal masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 %, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta per tahun. Sehingga setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Berdasarkan fenomena yang ada maka terdapat pertanyaan penelitian yang dikembangkan dari permasalahan yang terjadi dengan mempertimbangkan relevansi kaidah teori yang ada diantaranya sejauh mana PDRB, kurs USD terhadap Rupiah, inflasi, dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap investasi (PMDN) di Jawa Timur dan dari ketiga variabel tersebut variabel apa yang berpengaruh secara dominan terhadap investasi (PMDN) di Jawa Timur.

KAJIAN TEORI

1. Investasi

Menurut Sunariyah (2003:4) : “Investasi adalah penanaman modal satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”. Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

Sedangkan menurut Tandelilin (2010:1) investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang (*sacrifice current consumption*) dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. Investasi dapat berkaitan dengan penanaman sejumlah dana pada aset seperti : tanah, emas, rumah dan aset real lainnya atau pada aset finansial seperti : deposit, saham, obligasi dan surat berharga lainnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang di produksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu yaitu satu tahun. Sering disebutkan bahwa besaran PDRB dapat dihitung melalui pendekatan produksi, yang kedua dengan pendekatan pengeluaran dan terakhir dikenal dengan pendekatan pendapatan.

3. Kurs Valuta Asing

Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya

rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai kurs valuta asing dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan (Sukirno, 2004:397).

Kurs valuta asing adalah nilai tukar mata uang dari negara tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan faktor-faktor ekonomi seperti cadangan devisa, posisi neraca perdagangan suatu negara dengan negara lainnya. Nilai tukar mata uang internasional atau kurs valutas asing merupakan nilai atau harga tukar suatu mata uang dengan mata uang negara lainnya yang ditetapkan atau terjadi dalam hubungan lalu lintas perdagangan dan moneter antar negara. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar valuta asing dan juga dapat ditentukan oleh pemerintah (Murni, 2006:224).

4. Inflasi

Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita tidak pernah menghendaki. Milton Friedman mengatakan inflasi ada dimana saja dan selalu merupakan fenomena moneter yang berlebihan dan tidak stabil (Dronbusch dan Fischer, 2001).

Jika didefinisikan, inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus dengan rentang waktu minimal 1 bulan (Murni, 2006:203).

Sedangkan Boediono (2008:161), mendefinisikan inflasi adalah kecenderungan dari harga untuk naik secara terus menerus. Boediono (2008:155) juga berpendapat Dengan menurunnya tingkat inflasi di suatu negara maka kegiatan daya beli masyarakat akan mengalami peningkatan karena selalu diiringi dengan turunnya harga-harga barang dan jasa di dalam negeri sehingga membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya

5. Jumlah Tenaga Kerja

Menurut Simanjutak (2001) yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang sedang atau sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan-kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Semakin banyaknya permintaan investasi maka semakin banyak juga lapangan kerja yang dihasilkan ini sangat berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang akan bekerja. Karena banyaknya perusahaan-perusahaan baru dan perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya lebih berkembang.

a) Hubungan antara PDRB dengan PMDN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan investasi merupakan hal yang sangat berkaitan. Peningkatan PDRB merupakan indikasi terjadinya peningkatan produktivitas suatu daerah yang berarti juga turut meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Terjadinya peningkatan pendapatan dapat mempengaruhi iklim investasi, karena dengan semakin tingginya pendapatan suatu daerah dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi (Sukirno, 2004:109).

b) Hubungan antara Kurs USD dengan PMDN

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam kegiatan investasi (berproduksi) masih terdapat ketergantungan akan produk-produk luar negeri, baik itu berupa mesin-mesin produksi maupun bahan baku, oleh karenanya perubahan kekuatan nilai tukar rupiah turut berperan dalam mempengaruhi investasi. Menguatnya USD mengakibatkan nilai tukar rupiah yang semakin merosot, demikian pula berlaku sebaliknya. Melemahnya USD mengakibatkan nilai tukar rupiah menguat, menguatnya nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi tingkat pembayaran terhadap barang-barang modal yang di impor sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Penurunan biaya produksi dapat meningkatkan perolehan laba para pengusaha, sehingga pengusaha cenderung lebih berani untuk berinvestasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi (Sukirno, 2004:397).

c) **Hubungan antara Investasi dengan PMDN**

Adanya inflasi membuat harga barang-barang menjadi semakin mahal sehingga dapat menurunkan kemampuan membeli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat dapat menyebabkan menurunnya tingkat permintaan suatu barang, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan minat para investor untuk memproduksi barang tersebut. Hal sebaliknya berlaku pula, dengan menurunnya tingkat inflasi membuat harga barang menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan akan barang. Adanya kenaikan permintaan akan menimbulkan minat investor untuk berinvestasi menghasilkan barang sebagaimana permintaan yang ada di masyarakat (Murni, 2006:203).

d) **Hubungan antara Jumlah Tenaga Kerja dengan PMDN**

Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja maka juga akan meningkatkan produktivitas barang dan jasa, dengan adanya peningkatan produktivitas barang dan jasa maka permintaan akan barang juga akan meningkat. Adanya kenaikan permintaan akan menimbulkan minat investor untuk berinvestasi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat (Dumairy, 2007:74).



METODE PENELITIAN

Penentuan sampling dalam penelitian ini menggunakan metode *quotasampling* yaitu penelitian dibatasi pada data selama 15 tahun jumlah investasi (PMDN), PDRB, Kurs USD terhadap Rupiah, Inflasi dan Tenaga Kerja periode tahun 1994-2008 yang didapat dari BPS Provinsi Jawa Timur.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen (PDRB, Kurs USD terhadap Rupiah, Inflasi dan Tenaga Kerja) terhadap variabel dependen (investasi /PMDN) di Jawa Timur digunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS (*Statistic Program For Social Science*) dengan model sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (\text{Sudrajat, 2000:112})$$

Dimana :

- Y = Investasi (PMDN)
- X₁ = PDRB
- X₂ = Kurs USD terhadap Rupiah
- X₃ = Inflasi
- X₄ = Tenaga Kerja
- β₀ = Konstanta
- β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi
- e = Variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = -5236,684 - 5,190 X_1 + 0,479 X_2 + 20,744 X_3 + 0,000 X_4$$

Dari persamaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta -5236,684 menunjukkan bahwa apabila faktor Produk Domestik Regional Bruto, Kurs Valas, Inflasi, dan Tenaga Kerja konstan maka Penanaman Modal Dalam Negeri turun sebesar Rp.5236,684 Juta. Faktor Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif, apabila Produk Domestik Regional Bruto mengalami Peningkatan satu juta rupiah maka Penanaman Modal Dalam Negeri akan mengalami penurunan sebesar Rp.5,190 Juta. Faktor Kurs Valas 0,479 berpengaruh positif, apabila ada kenaikan Kurs Valas satu rupiah maka Penanaman Modal Dalam Negeri akan mengalami peningkatan sebesar Rp.0,479 juta, jika faktor lain konstan. Faktor Inflasi 20,744, menunjukkan adanya kenaikan Inflasi satu persen maka Penanaman Modal Dalam Negeri akan mengalami peningkatan sebesar Rp.20,744 juta bila faktor lain konstan. Sedangkan jika faktor Tenaga Kerja mengalami kenaikan maka Penanaman Modal Dalam Negeri akan mengalami peningkatan yang sangat kecil.

Pembahasan

Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara nyata (tidak signifikan) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena meningkat atau turunnya Penanaman Modal Dalam Negeri tidak melihat dari segi faktor ekonomi khususnya Produk Domestik Regional Bruto melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri yakni perizinan untuk berinvestasi yang lebih di permudah, sosial, politik, keamanan, dan kepastian hukum.

Kurs Valas berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai mata uang Rupiah terhadap kurs valas maka pertumbuhan ekonomi positif sehingga investasi Penanaman Modal Dalam Negeri akan mengalami kenaikan, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan kurs rupiah mengalami kenaikan yakni faktor non ekonomis yaitu : stabilitas politik, keamanan.

Inflasi berpengaruh nyata (signifikan) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini disebabkan biaya produksi yang harganya relatif lebih stabil maka kegiatan daya beli masyarakat akan mengalami kestabilan karena selalu diiringi dan diikuti harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kestabilan sehingga membuat investor berniat untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Tenaga Kerja tidak berpengaruh nyata (tidak signifikan) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena naiknya Penanaman Modal Dalam Negeri, bukan berarti total output atau meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tidak hanya menggunakan tenaga kerja manusia saja tetapi saat ini sudah banyak yang menggunakan mesin mungkin agar proses produksi lebih cepat dan lebih menghemat biaya produksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan uji statistik untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau keseluruhan antara Produk Domestik Regional Bruto, Kurs Valas, Inflasi, dan Tenaga Kerja

terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri.

Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara nyata dan negatif terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena meningkat atau turunnya Penanaman Modal Dalam Negeri tidak melihat dari segi faktor ekonomi khususnya Produk Domestik Regional Bruto melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri yakni perizinan untuk berinvestasi yang lebih di permudah, sosial, politik, keamanan, dan kepastian hukum. Sejalan dengan penelitian Maharani (2007) yang menyatakan terdapat hubungan antara PDRB dengan Investasi Swasta (PMA dan PMDN) di Indonesia. PDRB yang semakin meningkat mempengaruhi peningkatan pendapatan suatu daerah, semakin tinggi pendapatan suatu daerah berkontribusi terhadap banyaknya investasi.

Kurs Valas berpengaruh secara nyata positif terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai mata uang Rupiah terhadap kurs valas maka pertumbuhan ekonomi positif sehingga investasi Penanaman Modal Dalam Negeri akan mengalami kenaikan, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan kurs rupiah mengalami kenaikan pada faktor non ekonomis yaitu : stabilitas politik, keamanan. Sukirno (2004:397) menjelaskan pada tingkat kurs valuta asing mengalami penurunan maka nilai mata uang rupiah akan mengalami kenaikan, dengan adanya kenaikan nilai mata uang maka pertumbuhan ekonomi positif sehingga investasi swasta PMA dan PMDN akan mengalami kenaikan.

Inflasi berpengaruh secara nyata positif terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini disebabkan biaya produksi yang harganya relatif lebih stabil maka kegiatan daya beli masyarakat akan mengalami kestabilan karena selalu diiringi dan diikuti harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kestabilan sehingga membuat investor berniat untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Dengan menurunnya tingkat inflasi di suatu negara maka kegiatan daya beli masyarakat akan mengalami peningkatan karena selalu diiringi dengan turunnya harga-harga barang dan jasa di dalam negeri sehingga membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya (Boediono, 2008:155).

Tenaga Kerja diketahui tidak berpengaruh secara nyata terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Hasil ini menolak penelitian Tarotama (2007) yang menyatakan tenaga kerja berpengaruh terhadap investasi di Jawa Timur, artinya tenaga kerja memberikan peranan penting dalam mendorong kemajuan investasi. Hal ini disebabkan karena naiknya Penanaman Modal Dalam Negeri, bukan berarti total output atau meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tidak hanya menggunakan tenaga kerja manusia saja tetapi saat ini sudah banyak yang menggunakan mesin agar proses produksi lebih cepat dan lebih menghemat biaya produksi.

Saran

Pemerintah membuat kebijakan moneter agar menjaga perkembangan ekonomi makro tetap stabil agar banyak investor yang masuk untuk menanamkan modalnya.

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan peraturan atau kebijakan agar tidak mempersulit perizinan dan menetapkan Tingkat Suku Bunga agar lebih banyak lagi Investor maupun pengusaha untuk menanamkan modalnya dan memperoleh modal dengan mudah. Selain itu, Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan proses perizinan yang tidak rumit agar lebih banyak lagi Investor maupun pengusaha untuk menanamkan modalnya sehingga banyak tenaga kerja yang terserap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Yoopi, 2004, *“Memahami Kurs Valuta Asing”*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Anonim, 2009, Erdhika, ElitSekuritas, Challenging Year The 2009 Strategic View. Artikel. http://www.erdhika.com/data/file/marketoutlook_2009.pdf.
- Anonim, 2009, *Internasional Monetary Fund, World Economic Outlook Database*, October 2009. Artikel. <http://www.imf.org/external/index.htm>.
- Boediono, 2008, *“Ekonomi Moneter”* BPFE, Yogyakarta
- Budiarti, 2006, *“Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Jawa Timur”*, Skripsi FE-UPN UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- Damanhuri, Didin S, 2000, *“Pilar-Pilar Revormasi Ekonomi-Politik”*, CIDES, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Febriyanti, 2006, *“Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur”*, Skripsi FE-UPN UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- Gujarati, 2002, *“Ekonomika Dasar”*, Cetakan Pertama PT. Gelora Aksara Pratama, Bandung.
- Jamli, Ahmad, 2001. *“Dasar-dasar Keuangan Internasional”*, BPFE, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L, 2002, *“Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”*, cetakan ke dua belas, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latief, Dochak, 2000, *”Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global”*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Maharani, 2007, *“Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta (PMA dan PMDN) di Indonesia”*, Skripsi FE-UPN UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- Murni, Asfia, 2006, *“Ekonomika Makro”*, PT. Refika Aditama Bandung
- Nopirin, 2000, *“Ekonomi Moneter”* Edisi Kedua, BPFE-UGM, Yogyakarta
- Rosjidi, Suherman, 2000, *“Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saksono, Heru D., 2006, *“Analisis Beberapa Faktor yang mempengaruhi Peertumbuhan Investasi di Indonesia”*, Skripsi FE-UPN UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- Simanjutak, J. Payaman, 2001, *“Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”*, Penewrbit LPFE-UI, Jakarta.
- Situmorang, Paulus, 2008, *“Pengantar Pasar Modal”*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Sudrajat, MSW, 2000, *“Mengenal Ekonometrika Pemula”*, CV Armico, Bandung.
- Sukirno, Sadono, 2004, *“Pengantar Teori Makro Ekonomi”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suroto, 2002, *“Strategi Pembangunan da Perencanaan Kesempatan Kerja”*, edisi kedua, Penerbit BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Suwarno dan Alvin Y. SO, 2000, *”Perubahan Sosial dan Pembangunan”*, Edisi Revisi, LP3ES, PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Tadelilin, Eduardus, 2010, *“Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi”*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Tarotama, 2007, *“Analisis Beberepa Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta (PMDN) di Jawa Timur”*, Skripsi FE-UPN UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- www.bkpm.go.id
- www.riau.bps.go.id
- www.sinarharapan.co.id
